



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

LPPD

PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023



KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

LPPD

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023



KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA

MAKNA LAMBANG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Lambang Daerah berbentuk Tameng/Perisai melambangkan pertahanan dengan warna utama Biru, Kuning, Merah dan Hijau. Sedangkan warna pendukung adalah hitam dan putih; di dalamnya terdapat gambar unsur-unsur lambang dan Tulisan Provinsi Kepulauan Riau, serta didisain dengan Pita berwarna Kuning dengan tulisan Berpancang Amanah Bersauh Marwah.

Lambang Daerah terdiri dari 6 (enam) bagian dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bintang berwarna kuning melambangkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mata Rantai berwarna hitam berjumlah 32 (tiga puluh dua) yang berlatar belakang warna hijau muda melambangkan kebersamaan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang bersatu padu dan menunjukkan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi yang ke- 32 di Negara Republik Indonesia.
- c. Perahu berwarna kuning sebagai simbol alat transportasi masyarakat Kepulauan Riau dengan layar berwarna putih yang terkembang melambangkan semangat kebersamaan dalam satu tekad mengisi laju pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.
- d. Padi berwarna kuning berjumlah 24 (dua puluh empat) butir dan Kapas berwarna hijau dan putih berjumlah 9 (sembilan) kuntum melambangkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sebagai tujuan utama dan mengingatkan tanggal disyahrkannya Undang-Undang terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau 24 September 2002, Sebilah Keris berluk 7 (tujuh) berwarna kuning emas berhulu kepala Burung Serindit berwarna hitam, di atas tepak sirih berwarna merah lekuk 5 (lima), di dalam perahu berwarna kuning yang dengan gelombang 7 (tujuh) lapis, yang masing-masing melambangkan sebagai berikut:

MAKNA LAMBANG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU



- ▶ Sebilah Keris berluk 7 (tujuh) berwarna kuning emas berhulu kepala Burung Serindit berwarna hitam, melambangkan keberanian dalam menjaga dan memperjuangkan negeri bahari ini untuk menuju kesejahteraan dan kemakmuran.
 - ▶ Tepak Sirih berwarna merah melambangkan persahabatan.
 - ▶ Perahu berwarna kuning sebagai simbol alat transportasi masyarakat Kepulauan Riau dengan layar berwarna putih yang terkembang, melambangkan semangat kebersamaan dalam satu tekad mengisi laju pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.
 - ▶ Gelombang berlapis 7 sebagai simbol bulan Juli, sehingga mengingatkan kita diresmikannya Provinsi Kepulauan Riau yakni tanggal 1 Juli 2004.
- e. Tulisan "PROVINSI KEPULAUAN RIAU" berwarna putih di atas dasar lambang daerah berwarna biru tua sebagai identitas nama daerah.
- f. Pita berwarna kuning bertuliskan "BERPANCANG AMANAH BERSAUH MARWAH" berwarna hitam adalah semangat dan tekad serta azam masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dalam menuju cita-cita luhurnya yakni masyarakat sejahtera, cerdas dan berakhlak mulia.



LPPD

PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
H. ANSAR AHMAD, S.E.,MM





KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah kami panjatkan puji dan Syukur ke hadirat Allah S.W.T, atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 telah selesai disusun dengan tepat waktu.

Penyusunan LPPD merupakan amanat konstitusional dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Melalui LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sekaligus menjadi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, rangkaian penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud haruslah dapat tergambarkan melalui dokumen LPPD yang bersifat holistik, serta menggambarkan pelaksanaan dan hasil dari penyelenggaraan semua urusan pemerintah daerah.

Substansi LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 menginformasikan mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang memuat indikator makro, indikator kinerja kunci keluaran, indikator kinerja kunci hasil, dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan. Selain itu, LPPD juga mengakomodir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan, serta Laporan Pelayanan Minimal (SPM).

Terimakasih dan sekalung penghargaan kami sampaikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 ini. Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan perlindungan, ridho dan barokah dalam kita melakukan amanah mewujudkan Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Tanjungpinang, 27 Maret 2024

**GUBERNUR
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	3
1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	412
1.2.1 Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	412
1.2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	423
1.2.3 Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan.....	424
1.2.4 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	452
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	457
2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO	457
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia.....	458
2.1.2 Angka Kemiskinan.....	460
2.1.3 Angka Pengangguran	461
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi.....	462
2.1.5 Pendapatan per Kapita.....	462
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan.....	463
2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	464
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)	466
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)	553
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .	566
2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	570
2.3.1 Target Kinerja dalam Perjanjian Kerja.....	571
2.3.2 Pengukuran Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dan Perbandingan Tahun Sebelumnya	572
2.3.3 PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Triwulan IV-2022, Triwulan III-2023 dan Triwulan IV- 2023 (miliar rupiah)	587
2.3.4 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau q-to-q, y-on-y dan c-to-c Triwulan IV-2023 Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (persen).....	589
2.3.5 Kebijakan Pendidikan Baru pada Sistem Pendidikan Merdeka Belajar: ...	695
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	796
3.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH PROVINSI....	798
3.1.1 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	799



3.1.2 Urusan Pertanian.....	801
3.1.3 Urusan Pariwisata.....	809
3.1.4 Permasalahan dan Kendala.....	812

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

.....	813
4.1 URUSAN PENDIDIKAN	815
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	815
4.1.2 Target Pencapaian.....	815
4.1.3 Realisasi	815
4.1.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran	816
4.1.5 Dukungan Personil	817
4.1.6 Permasalahan dan Solusi	818
4.2 URUSAN KESEHATAN	818
4.2.1 Target pencapaian.....	818
4.2.2 Realisasi	819
4.2.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran	820
4.2.4 Dukungan Personil	820
4.2.5 Permasalahan dan Solusi	821
4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM	822
4.3.1 Target pencapaian.....	822
4.3.2 Realisasi	823
4.3.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran	823
4.3.4 Dukungan Personil	824
4.3.5 Permasalahan dan Solusi	824
4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	825
4.4.1 Target pencapaian.....	825
4.4.2 Realisasi	826
4.4.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran	826
4.4.4 Dukungan Personil	827
4.4.5 Permasalahan dan Solusi	828
4.5 URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	828
4.5.1 Target pencapaian.....	828
4.5.2 Realisasi	829
4.5.3 Alokasi Anggaran	830
4.5.4 Dukungan Personil	830
4.5.5 Permasalahan dan Solusi	830
4.6 URUSAN SOSIAL	831
4.6.1 Target pencapaian.....	832
4.6.2 Realisasi	833
4.6.3 Alokasi Anggaran	834
4.6.4 Dukungan Personil	834
4.6.5 Permasalahan dan Solusi	835
4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN	835
4.7.1 Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan	835



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

4.7.2 Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan.....	840
4.7.3 Program dan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum	840
4.7.4 Program dan Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat	841
4.7.5 Program dan Kegiatan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	842
4.7.6 Program dan Kegiatan Bidang Sosial	845
BAB V PENUTUP	847



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 69 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan adanya stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengoptimalkan pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta merupakan salah satu bahan evaluasi bagi Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan terhadap Pemerintah Daerah guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Ruang lingkup laporan meliputi penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dengan memperhatikan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, capaian pelayanan dasar, dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 mengacu pada sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan susunan sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, yang memuat Penjelasan Umum, Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
2. **Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, yang memuat Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
3. **Bab III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan**, yang memuat dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan, gambaran umum pelaksanaan tugas



pembantuan di provinsi, dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

4. **Bab IV Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum**, yang memuat urusan Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Sosial; dan Program & Kegiatan.
5. **Bab V Penutup.**

Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
3. Keputusan Presiden Nomor 40/P Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2021-2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan



Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).

7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 895);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 754);
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.2.7/8697/OTDA Tanggal 11 Desember Tahun 2023 Perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2023.

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi ke-32 di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau mencakup wilayah Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau secara resmi dimulai pada tanggal 1 Juli 2004 yang dipusatkan di Kota Batam dan setahun kemudian berangsur pindah ke Ibukota Provinsi di Kota Tanjungpinang. Saat ini Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau berada di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang.

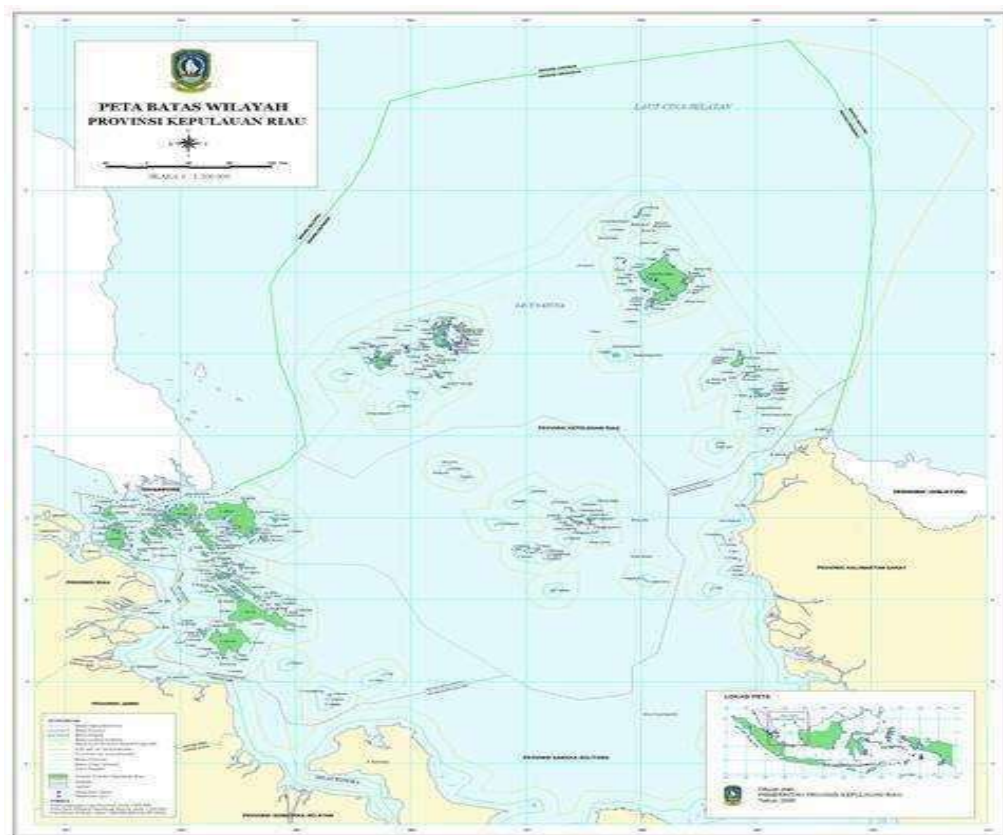
b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 00°29' Lintang Selatan dan 04°40' Lintang Utara, serta antara 103°22' Bujur Timur sampai dengan 109°40' Bujur Timur. Provinsi Kepulauan Riau memiliki batas-batas wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja
- Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau

Peta batas wilayah provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 1.1 Peta Batas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau



Secara administratif Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2 (dua) kota yaitu Kota



Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi dan Kota Batam, serta memiliki 5 (lima) kabupaten yaitu: Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Jarak antara ibukota provinsi ke daerah kabupaten/kota terjauh ditempuh sejauh 440 km dari Natuna-Tanjungpinang.

Berdasarkan Permendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2022, maka, luas wilayah daratan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 8.273,87 km². Rincian luas wilayah daratan berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)
1.	Kabupaten Bintan	1.317,15
2.	Kabupaten Karimun	930,45
3.	Kabupaten Natuna	1.999,16
4.	Kabupaten Lingga	2.210,82
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	627,03
6.	Kota Batam	1.034,73
7.	Kota Tanjungpinang	150,37
	Total	8.269,71

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2022; BPS Kepulauan Riau: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2024.

Berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 417.012,97 km². Hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007 digunakan sebagai referensi luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau karena hingga saat ini belum ada penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berikut ini disajikan rincian luas laut menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007:



Tabel 1.2
Luas Wilayah Laut Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Laut (km ²)
1	Kabupaten Karimun	4.698,09
2	Kabupaten Bintan	102.964,08
3	Kabupaten Natuna	216.113,42
4	Kabupaten Lingga	43.339,00
5	Kabupaten Kep. Anambas	46.074,00
6	Kota Batam	3.675,25
7	Kota Tanjungpinang	149,13
	Total	417.012,97

Sumber: Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2022, total jumlah pulau di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebanyak 2.028 pulau. Berikut ini disajikan rincian jumlah pulau berdasarkan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 1.3
Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau
1	Kabupaten Bintan	263
2	Kabupaten Karimun	248
3	Kabupaten Natuna	172
4	Kabupaten Lingga	630
5	Kabupaten Kep. Anambas	239
6	Kota Batam	454
7	Kota Tanjungpinang	8
8	Provinsi Kepulauan Riau	14
	Rekapitulasi Jumlah Pulau	2.028



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2022.

Di samping itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Provinsi Kepulauan Riau memiliki 22 pulau-pulau kecil terluar sebagai berikut:

Tabel 1.4

Jumlah dan Nama Pulau-Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau	Nama Pulau
1	Kabupaten Bintan	4	Pulau Berakit, Pulau Sentut, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun
2	Kabupaten Karimun	2	Pulau Tokong Hiu Kecil, Pulau Karimun Anak
3	Kabupaten Natuna	7	Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Belayar
4	Kabupaten Kepulauan Anambas	5	Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Belayar
5	Kota Batam	4	Pulau Tokong Hiu Kecil, Pulau Karimun Anak
	Jumlah	22	

Sumber: Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, 2017

Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera

Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Batam, ketinggiannya wilayah bervariasi antara 0 – 50 meter dpl, 50 – 200 m (paling dominan) dan di atas 200 meter, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Lingga (1.163 meter dpl). Kemiringan lereng yang dominan adalah 15 – 25% pada wilayah perbukitan, serta 25 – 40% dan di atas 40% pada wilayah pegunungan.



2. Wilayah Pulau-pulau di sebelah Timur Jauh

Pulau-pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan dan lain-lain. Kondisi morfologi, ketinggian dan kemiringan lereng wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 meter dpl).

3. Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-Singkep

Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi tua dengan topografi berupa bukit dan gunung.

4. Kelompok Pulau Batam, Rempang dan Galang

Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai morfologi tua paparan tepian Benua Sunda.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023, adalah sebanyak 2.150.329 jiwa yang terdiri atas 1.093.102 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 1.057.227 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan. Rasio jenis kelamin di Provinsi Kepulauan Riau adalah 103,39. Hal ini berarti bahwa dalam setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 104 penduduk laki-laki.

Dengan luas daratan provinsi Kepulauan Riau sebesar 8.269,71 km², maka, tingkat kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 260 jiwa per km². Penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau masih terkonsentrasi di Kota Batam, yakni sebanyak 1.240.792 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 49.274 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk pada masing-masing kabupaten/kota berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau, (Semester 1 Tahun 2023) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023
(Semester 1)

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk
1.	Bintan	88.745	84.426	173.171	104,56	287
2.	Karimun	136.863	130.899	267.762	105,12	131
3.	Natuna	42.669	40.781	83.450	104,63	42
4.	Lingga	52.835	49.639	102.474	106,44	46
5.	Kepulauan Anambas	25.240	24.034	49.274	105,02	78
6.	Batam	629.319	611.473	1.240.792	102,92	1.199
7.	Tanjungpinang	117.431	115.975	233.406	101,26	1.552
	Kepulauan Riau	1.093.102	1.057.227	2.150.329	103,39	260

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semester I Tahun 2023

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2022, merincikan jumlah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel 1.7
Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1.	Kabupaten Bintan	10	15	36
2.	Kabupaten Karimun	12	29	42
3.	Kabupaten Natuna	15	7	70
4.	Kabupaten Lingga	13	7	75
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	10	2	52
6.	Kota Batam	12	64	0
7.	Kota Tanjungpinang	4	18	0
	Total	76	142	275

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2022



e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah

Jumlah perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, jumlah perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas terdiri atas 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan 43 Unit Kerja Perangkat Daerah di bawah OPD, baik berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Dinas dan Badan, maupun Cabang Dinas. Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Jumlah UPT
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2 UPT
2	Dinas Perhubungan	4 UPT
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6 UPT
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	3 UPT
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2 UPT
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	-
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2 UPT
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	2 UPT
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 UPT
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
12	Dinas Pendidikan	1 UPT 5 Cabdis
13	Dinas Kebudayaan	5 Cabdis
14	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-
15	Dinas Kesehatan	-
16	Dinas Pariwisata	-
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
18	Dinas Sosial	1 UPT
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
23	Badan Pendapatan Daerah	9 UPT
24	BKD dan Korpri	-
25	Badan Pengembangan SDM	-
26	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan	-
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-



No	Perangkat Daerah	Jumlah UPT
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
29	Badan Pengelolaan Perbatasan	
30	Badan Penghubung	
31	Inspektorat Daerah	-
32	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	-
33	Sekretariat Daerah	
34	Sekretariat DPRD	-
35	Rumah Sakit Umum Raja Ahmad Thabib	-
36	Rumah Sakit Umum Engku Haji Daud	-

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kepri, 2024

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik PNS Pemerintah Provinsi maupun PNS Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, berjumlah 29.338 orang. Secara rinci, jumlah PNS menurut wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.9
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Wilayah Kabupaten/Kota, Jabatan, dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Kabupaten Bintan	1419	1827	3246
2.	Kabupaten Karimun	1906	2798	4704
3.	Kabupaten Natuna	1499	1359	2858
4.	Kabupaten Lingga	1318	1674	2992
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	937	1070	2007
6.	Kota Batam	2292	3336	5628
7.	Kota Tanjungpinang	1176	1822	2998
8.	Provinsi Kepulauan Riau	2279	2626	4905
	Total	12.826	16.512	29.338

Sumber : Badan Kepegawaian dan Korpri, 2024

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Gambaran realisasi APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 secara rinci diuraikan di bawah ini, dan mencakup Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, dan Pengelolaan Pembiayaan Daerah.



1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah meliputi: 1) Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari: Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah.

Total realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4.170.044.095.409,31 atau 101,86% dari target pendapatan daerah dalam APBD-P sebesar Rp. 4.094.098.079.448,00, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.10
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	Uraian	Target APBD-P	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
	PENDAPATAN DAERAH	4.094.098.079.448,00	4.170.044.095.409,31	101,86	75.946.015.961,31
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.710.018.213.010,00	1.806.972.833.505,31	105,67	96.954.620.495,31
	Pajak Daerah	1.545.528.271.857,00	1.631.489.164.580,00	105,56	85.960.892.723,00
	Retribusi Daerah	17.158.831.254,00	12.203.621.186,00	71,12	(4.955.210.068,00)
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.300.000.000,00	2.449.330.649,00	13,38	(15.850.669.351,00)
	Lain-Lain PAD yang Sah	129.031.109.899,00	160.830.717.090,31	124,64	31.799.607.191,31
2	PENDAPATAN TRANSFER	2.382.801.146.438,00	2.361.792.541.904,00	99,12	-21.008.604.534,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.382.801.146.438,00	2.361.792.541.904,00	99,12	-21.008.604.534,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.278.720.000,00	1.278.720.000,00	100	0
	Pendapatan Hibah	1.278.720.000,00	1.278.720.000,00	100	0

Penjelasan lebih rinci terhadap realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada masing-masing unsur pendapatan daerah sebagai berikut:

a) Realisasi Pendapatan Asli Daerah



Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi, Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2023 sebesar Rp1.806.972.833.505,31 atau 105,67% dari target Pendapatan Asli Daerah dalam APBD-P sebesar Rp1.710.018.213,00. Lebih rinci tentang realisasi Pendapatan Asli Daerah dijelaskan sebagai berikut:

- Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi pendapatan dari sektor Pajak Daerah melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2023 sebesar Rp1.631.489.164.580,00 atau 105,56% dari target dalam APBD-P 2023 sebesar Rp1.545.528.271.857,00. Hal ini disebabkan karena adanya Program Penghapusan sanksi administrasi dan keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penghapusan sanksi administrasi dan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, yang berdampak pada kenaikan penerimaan PKB. Realisasi yang terbesar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp535.895.634.154,00, selanjutnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp492.259.273.564,00, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp443.090.099.000,00. Sementara itu jenis pajak daerah lainnya yaitu pajak rokok sebesar Rp159.252.940.722,00, dan pajak air permukaan hanya sebesar Rp991.217.140,00.

- Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan dari Retribusi Daerah lebih rendah dari target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2022. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2023 sebesar Rp12.203.621.186,00 atau 71,12% dari target dalam APBD-P sebesar Rp17.158.831.254,00. Kontribusi Retribusi Daerah berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Rp3.076.350.090,00; Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Rp2.165.293.596,00; Retribusi Izin Usaha Perikanan Rp1.456.630.000,00; Retribusi Penjualan Produksi



Usaha Daerah Rp58.323.500,00; Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Rp565.218.000,00; dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Rp4.881.806.000,00.

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2.165.293.596,00 atau sebesar 73,36% dari target yang ditetapkan dalam perubahan APBD sebesar Rp2.951.792.000,00 dimana sub rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan–Pelabuhan yang dimiliki dan dikelola (Dinas Perhubungan) terealisasi sebesar Rp1.434.493.868,00 atau sebesar 65,15% dari target yang ditetapkan dalam perubahan APBD sebesar Rp2.201.792.000,00 dikarenakan berkurangnya aktivitas pengguna transportasi laut dikarenakan salah satunya faktor cuaca.

Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan sub rincian objek pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp58.323.500,00 atau sebesar 29,16% dari target yang ditetapkan dalam perubahan APBD sebesar Rp200.000.000,00 dikarenakan sarana produksi benih ikan masih dalam proses rehabilitasi, kemudian adanya kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang merupakan kegiatan pelepasan benih ikan di Kabupaten Karimun sehingga bibit ikan yang sebelumnya akan dijual dialihkan untuk mendukung kegiatan tersebut.

Pendapatan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum terealisasi sebesar Rp565.218.000,00 atau sebesar 70,83% dari target yang ditetapkan dalam perubahan APBD sebesar Rp798.000.000,00 dikarenakan Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum yang dilakukan oleh pengguna jasa hanya bersifat perpanjangan izin, tidak ada yang bersifat pengajuan izin baru oleh Badan Usaha/Penggunaan Jasa.

Pendapatan Retribusi Retribusi Izin Usaha Perikanan dengan sub rincian objek Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan terealisasi sebesar Rp1.456.630.000,00 atau sebesar 72,83% dari target yang ditetapkan dalam



perubahan APBD sebesar Rp2.000.000.000,00 dikarenakan adanya perubahan kebijakan untuk kapal yang beroperasi di atas 12 mil wajib melakukan migrasi ke perizinan pusat, sehingga berdampak pada pendapatan retribusi.

Pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) terealisasi sebesar Rp4.881.806.000,00 atau sebesar 61,02% dari target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD sebesar Rp8.000.000.000,00 dikarenakan adanya penambahan wilayah kerja pada PT. Bintang Alumina Indonesia atas Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) selain Tanjungpinang dan Bintang yaitu Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat yang menyebabkan pembayaran retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) disetorkan ke Pemerintah Pusat.

- Realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan daerah dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan kurang dari target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023. Realisasi Pendapatan sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2023 sebesar Rp2.449.330.649,00 atau 13,38% dari target dalam APBD-P sebesar Rp18.300.000.000,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari perolehan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebesar Rp2.449.330.649,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Dividen) sebesar Rp2.449.288.621,00 dan juga sisa pembagian dividen saham tahun buku 2016 sebesar Rp42.028,00 yang baru disalurkan pada tanggal 26 Mei 2023.

- Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023, dimana realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2023 sebesar Rp160.830.717.090,03 atau 124,64% dari target dalam



APBD-P Tahun 2023 sebesar Rp129.031.109.899,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berasal dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp1.842.358.888,00; Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp43.460.000,00; Jasa Giro Rp7.819.679.440,45; Pendapatan Bunga Rp1.056.231.052,00; Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp1.500.000,00; Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp821.214.202,67; Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp18.476.805.010,00; Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp3.721.717,00; Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 500.000.000,00 Pendapatan dari Pengembalian Rp2.560.433.079,91 Pendapatan BLUD Rp127.664.894.152,28.

b) Realisasi Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp2.382.801.146.438,00 dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.361.792.541.904,00 atau 99,12%. Penjelasan rincian atas realisasi pendapatan masing-masing komponen Dana transfer Pemerintah Pusat sebagai berikut:

- Dana Perimbangan

Dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp2.376.107.401.438,00, terealisasi sebesar Rp2.355.098.796.904,00 atau 99,12%, dengan komponen meliputi:

- 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), terdiri atas: DBH Pajak Bumi dan Bangunan; DBH PPh Pasal 21; DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN; DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT); DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi; DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi; DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent; Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty; DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH); dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR).
- 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU).



- 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, terdiri atas: DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMA; DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SLB; DAK Fisik Bidang Pendidikan Penugasan SMK; DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kefarmasian; DAK Fisik Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian; DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan; DAK Fisik Bidang Jalan-Penugasan-Jalan; DAK Fisik Bidang Transportasi Laut-Penugasan; DAK Fisik Bidang Transportasi Laut-Reguler; DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan.
- 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, terdiri atas: DAK Non Fisik-BOS Reguler; DAK Non Fisik-BOS Kinerja; DAK Non Fisik-TPG PNSD; DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD; DAK Non Fisik-TKG PNSD; DAK Non Fisik-PK2UKM; DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal; DAK Non Fisik-BOKB-KB; dan DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah direncanakan dalam APBD-P Tahun 2023 sebesar Rp6.693.745.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp6.693.745.000,00 atau sebesar 100%.

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebesar Rp1.278.720.000,00 atau 100,00% dari target APBD-P sebesar Rp1.278.720.000,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari pendapatan hibah.

Sementara itu, penjelasan lebih rinci terhadap Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, serta Capaian Anggaran Tahun 2023 pada masing-masing bidang urusan pemerintahan, adalah sebagai berikut:



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**



1. Pendidikan

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Alokasi anggaran untuk Urusan Pendidikan pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 892.990.791.274,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp. 855.313.758.869,83 atau sebesar 95,78%. Jumlah indikator program pada Urusan Pendidikan adalah sebanyak 14 indikator, dengan pencapaian sebanyak 13 indikator kategori sangat tinggi, dan sebanyak 1 indikator kategori tinggi. Selengkapnya, pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Urusan Pendidikan tahun 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.12
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pendidikan yang Dilaksanakan Dinas Pendidikan Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN PENDIDIKAN							892.990.791.274,00	855.313.758.869,83	95,78
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							540.918.797.860,00	521.323.145.138,50	96,38
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100,00	ST			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7	7	100,00	ST	2.058.713.647,00	1.885.448.308,00	91,58
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100,00	ST	914.579.340,00	837.801.016,00	91,61
Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-	Dokumen	1	1	100,00	ST	684.607.363,00	679.779.378,00	99,29



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Dokumen RKA- SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	56.292.404,00	49.581.200,00	88,08
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	403.234.540,00	318.286.714,00	78,93
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai serta Administrasi melaksanakan Tugas	%	100	100	100,00	ST	441.755.895.862,00	424.611.603.489,00	96,12
	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Laporan	1	1	100,00	ST			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	3360	3360	100,00	ST	439.914.401.862,00	422.870.235.739,00	96,13
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	1.350.462.000,00	1.346.462.000,00	99,7
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	481.032.000,00	387.095.850,00	80,47
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	Laporan	1	1	100,00	ST	10.000.000,00	7.809.900,00	78,1



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Pendidikan	Laporan	1	1	100,00	ST	120.000.000,00	119.953.464,00	99,96
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	120.000.000,00	119.953.464,00	99,96
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pegawai Dinas Pendidikan	Orang	185	185	100,00	ST	1.580.182.500,00	1.378.289.900,00	87,22
	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Dinas Pendidikan	Laporan	1	1	100,00	ST			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			315	315	100,00	ST	304.149.500,00	300.284.100,00	98,73
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			2	2	100,00	ST	783.447.000,00	623.859.076,00	79,63
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			5	5	100,00	ST	44.636.000,00	42.088.000,00	94,29
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			180	180	100,00	ST	447.950.000,00	412.058.724,00	91,99
Administrasi Umum	Jumlah Barang	Unit/Barang	85	85	100,00	ST	2.002.952.801,00	1.831.755.661,00	91,45



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Perangkat Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik Dinas Pendidikan								
	Jumlah Barang cetakan, Penggandaan dan Bahan Bacaan Dinas Pendidikan	exemplar	10	10	100,00	ST			
	Jumlah Rapat dan Konsultasi Dinas Pendidikan	Rapat	500	500	100,00	ST			
	Jumlah Kunjungan Tamu yang terlayani	Kunjungan	30	30	100,00	ST			
	Jumlah Laporan Arsip Dinamis Dinas Pendidikan	laporan	1	1	100,00	ST			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	20	100,00	ST	15.000.000,00	9.983.800,00	66,56
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	24	24	100,00	ST	432.386.500,00	423.508.000,00	97,95
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	24	24	100,00	ST	47.169.000,00	44.082.050,00	93,46
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	17	17	100,00	ST	242.750.000,00	237.860.300,00	97,99
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	5	100,00	ST	350.488.000,00	340.797.000,00	97,23
Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan	Dokumen	5	5	100,00	ST	35.000.000,00	28.940.000,00	82,69



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Peraturan Perundang-Undangan	Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan								
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	95.000.000,00	71.791.200,00	75,57
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	735.159.301,00	627.122.783,00	85,3
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	50.000.000,00	47.670.528,00	95,34
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan Mesin Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Unit	25	25	100,00	ST	1.303.847.660,00	1.200.058.200,00	92,04
	Jumlah Aset Tetap Lainnya Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Unit	6	6	100,00	ST			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25	25	100,00	ST	777.132.500,00	766.480.000,00	98,63
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	6	100,00	ST	526.715.160,00	433.578.200,00	82,32
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya Air, Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor Dinas Pendidikan	Bulan	12	12	100,00	ST	90.124.458.990,00	88.391.645.221,50	98,08
Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan	Laporan	1	1	100,00	ST	1.066.701.645,00	968.365.070,00	90,78



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	233.900.000,00	144.660.000,00	61,85
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	88.823.857.345,00	87.278.620.151,50	98,26
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan Dan Mesin Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang dipelihara	Unit	21	21	100,00	ST	1.972.746.400,00	1.904.390.895,00	96,54
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	15	15	100,00	ST	348.897.400,00	346.910.500,00	99,43
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	100,00	ST	1.558.849.000,00	1.492.656.995,00	95,75
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	3	3	100,00	ST	65.000.000,00	64.823.400,00	99,73
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							351.230.997.031,00	333.291.569.465,33	94,89
	Angka Partisipasi Sekolah	%	100	84,97	84,97	T			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	(APS) SMA/SMK								
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	98,50	115,00	116,75	ST			
	Angka partisipasi kasar (APK) SLB	%	85,00	97,74	114,99	ST			
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	%	79,00	92,29	116,82	ST			
	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	0,37	0,06	200,00	ST			
	Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	%	96,11	95,43	99,29	ST			
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	%	99,08	100,88	101,82	ST			
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio	33,80	35,91	106,24	ST			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase siswa SMA yang diterima di Perguruan Tinggi	%	63,00	61,53	97,67	ST	196.766.454.784,00	188.641.154.640,58	95,87
	Persentase Ruang kelas SMA dalam kondisi baik	%	96,00	97,36	101,42	ST			
	Persentase Angka Putus Sekolah SMA	%	0,39	0,02	195,00	ST			
	Jumlah USB SMA yang dibangun	Unit	2,00	2,00	100,00	ST			
	Jumlah Ruang kelas SMA yang dibangun	Ruang	11,00	51,00	463,64	ST			
	Jumlah utilitas SMA yang tersedia	Paket	22,00	22,00	100,00	ST			
	Persentase Tenaga Pendidik SMA yang Bersertifikasi	%	47,00	39,73	84,53	T			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	2	2	100,00	ST	4.500.000.000,00	4.346.902.499,00	96,60
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	42	51	121,43	ST	16.205.522.445,00	14.918.997.338,00	92,06
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	9	9	100,00	ST	4.332.372.600,00	4.017.737.880,00	92,74
Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang	4	4	100,00	ST	2.329.998.600,00	2.117.673.543,00	90,89
Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	Ruang	5	5	100,00	ST	3.104.613.600,00	2.808.056.848,00	90,45
Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	Ruang	3	3	100,00	ST	1.434.603.600,00	1.281.690.047,00	89,34
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	Ruang	3	3	100,00	ST	1.167.926.600,00	1.069.532.510,00	91,58
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	9	12	133,33	ST	4.499.875.600,00	4.186.433.436,50	93,03
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	2	2	100,00	ST	1.023.621.600,00	904.235.377,00	88,34
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	20	22	110,00	ST	10.009.832.449,00	9.469.014.627,00	94,60
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	3	5	166,67	ST	2.342.692.600,00	2.171.825.261,50	92,71
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	26	23	88,46	T	4.211.249.204,00	3.704.140.895,50	87,96



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Sedang/Berat								
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5	8	160,00	ST	1.203.443.600,00	1.153.242.930,50	95,83
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	2	100,00	ST	614.584.000,00	575.396.248,00	93,62
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	2	100,00	ST	593.880.000,00	565.847.107,00	95,28
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	1	100,00	ST	326.417.600,00	320.352.779,50	98,14
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	2	100,00	ST	401.972.600,00	391.833.174,31	97,48
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	1	100,00	ST	183.819.000,00	183.482.341,00	99,82
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	3	150,00	ST	454.252.600,00	415.170.333,50	91,40
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	3	4	133,33	ST	728.169.000,00	644.253.006,59	88,48
Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang	Unit	4	4	100,00	S	787.839.600,00	746.396.536,81	94,74



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Telah Di Rehabilitasi								
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	100	100	100,00	ST	6.415.004.396,00	6.412.345.000,00	99,96
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1	1	100,00	ST	75.917.200,00	75.341.200,00	99,24
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	3	18	600,00	ST	3.207.231.600,00	3.184.314.214,00	99,29
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	22825	22825	100,00	ST	17.256.730.000,00	16.983.538.734,00	98,42
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	93	93	100,00	ST	150.000.000,00	137.598.562,00	91,73
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	700	700	100,00	ST	419.377.206,00	384.471.500,00	91,68
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	30	30	100,00	ST	213.030.000,00	115.064.700,00	54,01
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	56	56	100,00	ST	912.000.000,00	912.000.000,00	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang	Satuan Pendidikan	199	199	100,00	ST	107.660.477.484,00	104.444.063.128,00	97,01



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Mengelola Dana BOS								
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							128.449.053.323,00	121.969.864.467,36	94,96
	Persentase siswa SMK Negeri yang diterima di Dunia Usaha dan Dunia Industri	%	65,00	38,40	59,08	R			
	Persentase Ruang kelas SMK dalam kondisi baik	%	92,00	92,41	100,45	ST			
	Persentase Angka Putus Sekolah SMK	%	0,37	0,12	168,00	ST			
	Jumlah USB SMK yang dibangun	Unit	1,00	1,00	100,00	ST			
	Jumlah Ruang kelas SMK yang dibangun	Ruang	10,00	11,00	110,00	ST			
	Jumlah Utilitas SMK yang tersedia	Paket	5,00	18,00	360,00	ST			
	Persentase Tenaga Pendidik SMK yang Bersertifikasi	%	37,00	33,14	89,57	T			
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	1	100,00	ST	2.959.915.000,00	2.949.164.700,00	99,64
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	11	11	100,00	ST	4.165.670.000,00	3.664.026.764,25	87,96
Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	7	7	100,00	ST	9.475.087.770,00	8.557.795.829,44	90,32
Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 1	Ruang	16	16	100,00	ST	9.431.053.000,00	8.773.032.199,32	93,02
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	6	6	100,00	ST	1.137.370.000,00	1.126.449.082,00	99,04
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah	Ruang	1	1	100,00	ST	527.262.000,00	428.621.470,13	81,29



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Dibangun								
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	15	15	100,00	ST	4.630.655.455,00	4.077.101.132,27	88,05
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	14	14	100,00	ST	3.447.608.000,00	2.911.515.919,71	84,45
Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	1	100,00	ST	387.255.000,00	346.362.472,96	89,44
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	1	100,00	ST	2.540.000.000,00	2.518.182.200,00	99,14
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	2	2	100,00	ST	167.694.916,00	53.104.460,00	31,67
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	7	7	100,00	ST	9.312.218.892,00	8.924.875.314,00	95,84
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	4186	4186	100,00	ST	3.116.000.000,00	2.456.406.100,00	78,83
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	36	36	100,00	ST	150.000.000,00	123.290.250,00	82,19
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	500	500	100,00	ST	310.000.000,00	274.377.074,00	88,51
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan,	Orang	210	210	100,00	ST	349.999.834,00	299.250.650,00	85,50



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi								
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	78	71	91,03	ST	1.304.000.000,00	1.287.576.395,00	98,74
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	111	111	100	ST	75.037.263.456,00	73.198.690.887,00	97,55
Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Ruang kelas SLB dalam kondisi baik	%	98,80	98,44	99,64	ST	26.015.488.924,00	22.680.550.357,39	87,18
	Persentase Angka Putus Sekolah SLB	%	0,53	0	100	ST			
	Jumlah USB yang dibangun	Unit	1,00	0,40	40,00	SR			
	Jumlah Ruang kelas SLB yang dibangun	Ruang	5,00	9,00	180,00	ST			
	Jumlah Utilitas SLB yang tersedia	Paket	4,00	5,00	125,00	ST			
	Persentase Tenaga Pendidik SLB yang Bersertifikasi	%	23,00	18,14	78,87	T			
	Persentase siswa SLB Negeri yang diterima di Dunia Usaha dan Dunia Industri	%	20,20	32,86	162,67	ST			
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	0,4	40,00	SR	1.971.180.000,00	758.293.726,00	38,47
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Ruang	6	9	150,00	ST	1.947.520.000,00	1.862.374.197,99	95,63
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	4	4	100,00	ST	509.180.000,00	489.422.755,00	96,12



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	1	100,00	ST	258.184.306,00	225.622.650,00	87,39
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	2	2	100,00	ST	520.700.000,00	501.863.028,77	96,38
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	5	5	100,00	ST	1.145.675.540,00	1.096.852.582,13	95,74
Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	3	3	100,00	ST	1.804.550.000,00	1.009.527.839,89	55,94
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	18	18	100,00	ST	2.948.911.000,00	2.593.817.215,07	87,96
Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	2	100,00	ST	274.030.000,00	273.167.000,00	99,69
Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	1	100,00	ST	179.930.000,00	179.743.000,00	99,90
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	21	21	100,00	ST	2.004.474.733,00	1.174.899.933,54	58,61
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	13	13	100,00	ST	818.560.000,00	747.978.000,00	91,38
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1	1	100,00	ST	121.618.961,00	118.920.102,00	97,78
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	5	5	100,00	ST	1.299.992.000,00	1.231.955.062,00	94,77
Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit	2	3	150,00	ST	80.000.000,00	72.953.500,00	91,19
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	10	10	100,00	ST	90.000.000,00	69.011.038,00	76,68



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	208	208	100,00	ST	933.193.500,00	825.393.600,00	88,45
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	25	25	100,00	ST	149.034.000,00	109.580.196,00	73,53
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	11	11	100,00	ST	416.000.000,00	338.312.079,00	81,33
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	21	21	100,00	ST	8.542.754.884,00	9.000.862.852,00	105,36
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							372.946.383,00	298.440.180,00	80,02
	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	%	60,50	70,58	116,66	ST			
	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	%	30,50	54,34	178,16	ST			
	Jumlah SMK yang Terevitalisasi	%	27,03	97,30	360,00	ST			
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum yang sesuai dengan kearifan Lokal Pendidikan	Dokumen	1	1	100,00	ST	297.946.383,00	226.444.080,00	76,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Menengah								
	Jumlah Kurikulum SMK yang link and match dengan DUDI	Dokumen	1	1	100,00	ST			
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	40	40	100,00	ST	297.946.383,00	226.444.080,00	76,00
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kurikulum yang sesuai dengan kearifan Lokal Pendidikan Khusus	Dokumen	1	1	100,00	ST	75.000.000,00	71.996.100,00	95,99
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	25	25	100,00	ST	75.000.000,00	71.996.100,00	95,99
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							398.050.000,00	337.798.946,00	84,86
	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	Rasio	726	672	92,47	ST			
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Dokumen Mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Kepri	Dokumen	1	1	100,00	ST	398.050.000,00	337.798.946,00	84,86
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen	1	1	100,00	ST	200.000.000,00	162.981.766,00	81,49
Penataan Pendistribusian	Jumlah Laporan Hasil	Laporan	1	1	100,00	ST	198.050.000,00	174.817.180,00	88,27



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus								
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	%	100	100	100,00	ST	70.000.000,00	62.805.140,00	89,72
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang diberikan rekomendasi perizinan	Sekolah	2	5	250,00	ST	50.000.000,00	44.949.040,00	89,90
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	1	100,00	ST	50.000.000,00	44.949.040,00	89,90
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang diberikan rekomendasi perizinan	Sekolah	1	1	100,00	ST	20.000.000,00	17.856.100,00	89,28
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	1	100,00	ST	20.000.000,00	17.856.100,00	89,28

2. Kesehatan



Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT), dan RSUD Engku Haji Daud (EHD) dengan perincian yang diuraikan sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 96.908.433.378,00 pada tahun anggaran 2023 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp. 94.594.239.587,18 atau sebesar 97,61%. Jumlah indikator program pada urusan Kesehatan sebanyak 18 indikator, dengan pencapaian sebanyak 15 indikator kategori sangat tinggi, sebanyak 2 indikator kategori tinggi, dan sebanyak 1 indikator kategori sedang. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Urusan Kesehatan tahun 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.13
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Kesehatan yang Dilaksanakan Dinas Kesehatan Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/vProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
DINAS KESEHATAN							96.908.433.378,00	94.594.239.587,18	97,61
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							24.444.324.351,00	23.406.373.363,30	95,75
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	ST			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	%	100	100	100	ST	256.211.100,00	254.658.700,00	99,39



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/vProgram/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100	ST	166.140.000,00	165.498.200,00	99,61
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	20	100	ST	90.071.100,00	89.856160.500,00	98,99
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	ST	18.748.569.969,00	17.858.458.315,00	95,25
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	1428	1154	80	T	17.871.190.373,00	17.000.249.780,00	95,13
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100	ST	796.036.000,00	777.772.000,00	97,71
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	100	ST	46.669.591,00	43.877.635,00	94,02
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	1	100	ST	34.674.005,00	34.558.900,00	99,67
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	100	ST	268.988.648,00	268.404.850,00	99,78
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100	ST	125.647.948,00	125.212.900,00	99,65



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/vProgram/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100	ST	143.340.700,00	143.191.950,00	99,90
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	ST	50.000.000,00	47.554.900,00	95,11
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	38	76	T	50.000.000,00	47.554.900,00	95,11
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	ST	636.222.605,00	598.818.232,00	94,12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	ST	6.914.716,00	6.856.050,00	99,15
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	ST	98.248.688,00	90.819.315,00	92,44
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100	ST	4.949.165,00	4.301.000,00	86,90
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	ST	66.524.160,00	63.779.489,00	95,87
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100	ST	27.710.000,00	5.633.028,00	20,33
Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Dokumen Bahan	Paket	1	1	100	ST	17.898.580,00	14.224.400,00	79,47



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/vProgram/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
dan Peraturan Perundang- Undangan	Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan								
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100	ST	31.639.296 ,00	31.514.100,00	99,60
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100	ST	382.338.000,00	381.690.850,00	99,83
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	ST	586.992.790,00	574.051.420,00	97,80
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	100	ST	168.253.841,00	156.801.420,00	93,19
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	100	ST	187.528.500,00	186.590.000,00	99,50
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	100	ST	85.000.000,00	85.000.000,00	100,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	100	ST	146.210.449,00	145.660.000,00	99,62
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	ST	3.257.513.800,00	3.192.491.586,00	98,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	ST	155.000.000,00	154.087.838,00	99,41
Penyediaan Jasa Peralatan	Jumlah Laporan	Laporan	1	1	100	ST	44.863.800,00	44.691.300,00	99,62



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/vProgram/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	100	ST	3.057.650.000,00	2.993.712.448,00	97,91
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	ST	639.825.439,00	613.935.360,00	95,95
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	15	15	100	ST	343.546.800,00	343.321.598,00	99,93
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	15	100	ST	10.799.120,00	10.761.200,00	99,65
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	400	400	100	ST	29.465.940,00	29.361.000,00	99,64
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	100	ST	256.013.579,00	230.491.562,30	90,03
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN							58.560.229.542,00	57.420.611.149,88	98,05



Bidang Urusan Pemerintahan/vProgram/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 Kelahiran Hidup	124	98	121	ST			
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	per 1.000 Kelahiran Hidup	13	12	110	ST			
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	15,3	15,4	99	ST			
	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	ST			
	Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	ST			
	Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	Kab/Kota	5	5	100	ST			
	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	%	92	83.68	91	ST			
	Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	%	68	47	69	S			
	Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	%	43	71	166	ST			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/vProgram/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	94	74	79	T			
	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	%	71	100	141	ST			
	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	90	96	107	ST			
	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	97	88	91	ST			
	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	%	90	95	105	ST			
	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial	%	94	90	96	ST			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	75	75	100	ST	19.962.085.512,00	19.714.892.319,88	98,76
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	1	1	100	ST	10.288.630.060,00	10.283.424.286,88	99,95
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	20	20	100	ST	6.450.000.000,00	6.330.568.698,00	98,15
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan,	Dokumen	4	4	100	ST	369.367.080,00	367.514.223,00	99,50



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/vProgram/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya								
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket	2	2	100	ST	2.854.088.372,00	2.733.385.112,00	95,77
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	86	86	100	ST	37.748.601.110,00	36.875.973.479,00	97,69
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	4000	3591	89	T	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1000	1221	122	ST	220.242.018,00	183.198.239,00	83,18
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	24	24	100	ST	1.341.789.900,00	1.162.564.734,00	86,64
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	1	1	100	ST	28.984.400,00	28.984.400,00	100,00
Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	12	12	100	ST	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/vProgram/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Kesehatan Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	12	12	100	ST	1.082.580.000,00	1.015.933.115,00	93,84
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	24	24	100	ST	238.012.302,00	237.388.000,00	99,74
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	21	21	100	ST	333.079.000,00	332.266.500,00	99,76
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	2	2	100	ST	1.613.046.539,00	1.594.641.750,00	98,86
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	3	3	100	ST	187.112.200,00	186.670.334,00	99,76
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	17	17	100	ST	578.057.024,00	566.034.464,00	97,92
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	1	1	100	ST	28.622.800,00	28.622.800,00	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa	Dokumen	5	5	100	ST	200.146.000,00	193.209.250,00	96,53



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/vProgram/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	(ODMK)								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	1	1	100	ST	1.191.128.589,00	1.180.350.269,00	99,10
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	100	ST	30.375.851.247,00	29.837.808.258,00	98,23
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	100	ST	19.098.000,00	19.098.000,00	100,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	2	100	ST	42.097.091,00	41,428,000,00	98,41
Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	100	ST	21.956.000,00	21.956.000,00	100,00
Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1	1	100	ST	130.298.000,00	129.318.366,00	99,25
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	%	43	43	100	ST	812.464.100,00	792.734.375,00	97,57
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	21	21	100	ST	239.190.200,00	235.966.375,00	98,65
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem	Dokumen	1	1	100	ST	372.197.800,00	369.371.900,00	99,24



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/vProgram/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Informasi Kesehatan								
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	Unit	7	7	100	ST	201.076.100,00	187.396.100,00	93,20
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	%	92	92	100	ST	37.078.820,00	37.010.976,00	99,82
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	2	2	100	ST	17.853.220,00	17.813.600,00	99,78
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	36	36	100	ST	19.225.600,00	19.197.376,00	99,85
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							12.237.033.510,00	12.123.941.559,00	99,08
	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	54	56	103	ST			
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Laporan	1	1	100	ST	12.045.052.921,00	11.939.943.349,00	99,13



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/vProgram/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	233	180	77,25	R	11.828.419.521,00	11.723.323.649,00	99,11
Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Orang	233	180	77,35	R	216.633.400,00	216.619.700,00	99,99
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	%	82	82	100	ST	191.980.589,00	183.998.210,00	95,84
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	55	98	178	ST	78.402.700,00	71.118.200,00	90,71
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	100	ST	113.577.889,00	112.880.010,00	99,39
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							260.995.575,00	260.901.875,00	99,96
	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar	%	87	88	101	ST			
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang	%	79	64	81	T	87.057.325,00	87.052.825,00	99,99



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/vProgram/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha								
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	Sarana	29	33	113	ST	87.057.325,00	87.052.825,00	99,99
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Pembinaan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	%	15	100	666	ST	173.938.250,00	173.849.050,00	99,95
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	1	1	100	ST	173.938.250,00	173.849.050,00	99,95
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							1.405.850.400,00	1.382.411.640,00	98,33
	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	%	71	100	140	ST			
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	%	80	100	125	ST	1.405.850.400,00	1.382.411.540,00	98,33
Peningkatan Upaya Advokasi	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	4	4	100	ST	1.405.850.400,00	1.382.411.540,00	98,33



Bidang Urusan Pemerintahan/vProgram/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi								

RSUD Raja Ahmad Tabib

Alokasi anggaran Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT) adalah sebesar Rp. 283.670.347.991,00 pada tahun anggaran 2023, dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp. 281.751.090.838,00 atau sebesar 99,32%. Jumlah indikator program pada urusan Kesehatan RSUD Raja Ahmad Tabib adalah sebanyak 5 indikator, dengan pencapaian sebanyak 5 indikator tersebut kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2023, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.14
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Kesehatan RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2023



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib							283.670.347.991,00	281.751.090.838,00	99,32
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah Provinsi	Tahun	1	1	100,00	ST	198.741.115.338,00	207.912.834.188,00	104,61
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja RS	Tahun	1	1	100,00	ST	10.000.000,00	8.040.497,00	80,40
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	10.000.000,00	8.040.497,00	80,40
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri	Tahun	1	1	100,00	ST	68.127.294.920,00	67.880.819.074,00	99,61
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	4186	4186	100,00	ST	67.252.868.050,00	67.017.357.324,00	99,65
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	849.426.870,00	844.474.000,00	99,42
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	10.000.000,00	8.326.500,00	83,27
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	1	1	100,00	ST	15.000.000,00	10.661.250,00	71,08



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Tanggapan Pemeriksaan	dan Tindak Lanjut Pemeriksaan								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester RSUD RAT Hasil Koordinasi dengan Pihak Terkait	Laporan	1	1	100,00	ST	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST	150.000.000,00	129.328.000,00	86,22
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	157	628,00	ST	150.000.000,00	129.328.000,00	86,22
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST	1.600.948.083,00	1.406.731.200,00	87,87
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	75.000.000,00	67.809.600,00	90,41
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	638.221.645,00	608.957.500,00	95,41
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	376.215.336,00	354.945.600,00	94,35
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	71.088.562,00	64.859.500,00	91,24
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	35.000.000,00	33.732.400,00	96,38
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	1	1	100,00	ST	405.422.540,00	276.426.600,00	68,18



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	SKPD								
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100,00	ST	443.919.575,00	418.190.380,00	94,20
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100,00	ST	443.919.575,00	418.190.380,00	94,20
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100,00	ST	17.511.591.966,00	17.072.021.560,00	97,49
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	50.000.000,00	27.404.960,00	54,81
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	7.049.417.790,00	6.839.174.461,00	97,02
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	291.973.330,00	291.246.100,00	99,75
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	10.120.200.846,00	9.914.196.039,00	97,96
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100,00	ST	4.378.674.778,00	4.290.496.387,00	97,99
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	10	10	100,00	ST	62.604.641,00	53.165.600,00	84,92



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	26	100,00	ST	472.782.674,00	448.234.773,00	94,81
Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	100,00	ST	3.843.287.463,00	3.789.096.014,00	98,59
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	100,00	ST	106.518.686.016,00	116.728.907.084,00	109,59
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	100,00	ST	106.518.686.016,00	116.728.907.084,00	109,59
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							77.655.490.468,00	67.136.838.721,00	86,45
	Status Akreditasi RSUD Provinsi Raja Ahmad Tabib	Status	Paripurna	Paripurna	100,00	ST			
	Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Status	Satelit	Utama	100,00	ST			
	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Indeks	79	86	108,24	ST			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP	%	81	81	100,00	ST	77.198.194.199,00	66.706.068.130,00	86,41



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								
Pengembangan Rumah Sakit							20.005.645.701,00	11.802.696.299,00	59,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	5	5	100,00	ST	641.364.745,00	550.400.945,00	85,82
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	3	3	100,00	ST	54.104.161.135,00	52.422.470.936,00	96,89
Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	299.246.465,00	293.486.628,00	98,08
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	90	90	100,00	ST	601.944.994,00	512.282.895,00	85,10
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	1	1	100,00	ST	5.568.000,00	2.520.000,00	45,26
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	1.540.263.159,00	1.122.210.427,00	72,86



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	1	1	100,00	ST	457.296.269,00	430.770.591,00	94,20
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	100,00	ST	20.779.800,00	18.250.021,00	87,83
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	100,00	ST	286.516.469,00	279.647.000,00	97,60
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	100,00	ST	150.000.000,00	132.873.570,00	88,58
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							7.273.742.185,00	6.701.417.929,00	92,13
	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	%	70	64	91,16	ST			
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Laporan	1	1	100,00	ST	7.273.742.185,00	6.701.417.929,00	92,13
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	490	490	100,00	ST	6.960.415.564,00	6.400.913.429,00	91,96



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	100	100	100,00	ST	313.326.621,00	300.504.500,00	95,91

Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud

Alokasi anggaran urusan Kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp129.361.244.014,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp124.866.127.970,00 atau sebesar 96,53%. Jumlah indikator program pada urusan Kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebanyak 4 indikator, dengan pencapaian sebanyak 4 indikator kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan Kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.15
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Kesehatan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud							129.361.244.014,00	124.866.127.970,00	96,53
PROGRAM	Persentase	%	100	100	100	ST	75.250.720.083,00	72.852.131.398,00	96,81



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi								
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	%	100	100	100	ST	252.957.635,00	232.922.096,00	92,08
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100	ST	202.957.635,00	184.749.096,00	91,03
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100	ST	50.000.000,00	48.173.000,00	96,35
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	ST	42.502.957.438,00	41.025.264.851,00	96,52
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya Anggaran Untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Setiap Tahunnya	%	100	100	100	ST	41.706.730.958,00	40.243.382.851,00	96,49
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tercukupinya Anggaran Untuk Pembayaran Administrasi Pelaksana Tugas Kegiatan Setiap Tahunnya	%	100	100	100	ST	746.418.980,00	733.588.000,00	98,28



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	10	10	100	ST	49.807.500,00	48.294.000,00	96,96
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	ST	443.352.200,00	425.657.600,00	96,01
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Persentase Kecukupan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sesuai Dengan Jumlah Pegawai	%	100	100	100	ST	393.021.300,00	378.133.500,00	96,21
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang Memadai per Tahun	Dokumen	5	5	100	ST	50.330.900,00	47.524.100,00	94,42
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	ST	1.092.080.342,00	945.039.088,00	86,54
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercukupinya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	%	100	100	100	ST	94.910.000,00	94.250.000,00	99,30
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercukupinya Kebutuhan ATK dan Perlengkapan Kantor Lainnya	%	100	100	100	ST	99.997.700,00	99.009.100,00	99,01
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercukupinya Dokumen Pasien per Tahunnya	%	100	100	100	ST	335.193.400,00	305.358.180,00	91,10
Fasilitasi Kunjungan	Tersedianya Makan	%	100	100	100	ST	149.917.400,00	148.964.000,00	99,36



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Tamu	Minum Tamu dan Rapat								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dalam dan Luar Daerah)	%	100	100	100	ST	315.854.800,00	297.461.808,00	94,18
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2	2	100	ST	601.753.700,00	595.100.000,00	98,89
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2	2	100	ST	601.753.700,00	595.100.000,00	98,89
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	ST	1.350.972.758,00	1.314.728.654,00	97,32
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Telpn, Internet, Air Bersih dan Listrik RS	%	100	100	100	ST	1.350.972.758,00	1.314.728.654,00	97,32
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	ST	5.915.827.467,00	5.824.599.050,00	98,46
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam keadaan aktif (hidup)	%	100	100	100	ST	38.056.048,00	35.959.300,00	94,49



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi baik dan layak pakai	%	100	100	100	ST	591.526.700,00	553.289.760,00	93,54
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Perijinan Sarana dan Prasarana RS	%	100	100	100	ST	1.324.112.340,00	1.319.555.990,00	99,66
Pemeliharaan Mebel	Tercukupinya Anggaran Untuk Perbaikan Mebel RS Setiap Tahunnya	%	100	100	100	ST	49.300.000,00	48.720.000,00	98,82
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kesehatan dan Mesin Lainnya dalam kondisi baik dan layak pakai	%	100	100	100	ST	730.723.500,00	698.406.000,00	95,58
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya gedung/bangunan RS dalam kondisi baik dan layak pakai	%	100	100	100	ST	989.300.879,00	989.250.000,00	99,99
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Soft Ware SIMRS dan Internet RS dalam kondisi baik	%	100	100	100	ST	99.600.000,00	98.920.000,00	99,32
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa kebersihan lingkungan RS	%	100	100	100	ST	1.747.820.000,00	1.747.418.000,00	99,98
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	%	100	100	100	ST	345.388.000,00	333.080.000,00	96,44



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Bangunan Lainnya	atau Bangunan dalam kondisi baik dan layak pakai								
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	Dokumen	5	5	100	ST	23.090.818.543,00	22.488.820.059,00	97,39
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	Dokumen	5	5	100	ST	23.090.818.543,00	22.488.820.059,00	97,39
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							47.876.542.632,00	45.988.777.169,00	96,06
	Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud	Status	Paripurna	Paripurna	100,00	ST			
	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Engku Haji Daud	Indeks	82	85,44	104,20	ST			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	100	100	ST	46.659.991.204,00	46.659.991.204,00	100,00
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat	Unit	1	1	100	ST	22.994.497.944,00	22.870.657.878,00	99,46



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	kesehatan dan SDM agar sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000								
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Persentase Kesesuaian Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan dengan Standar RS Type C (sesuai data di ASPAK)	%	90	100	111	ST	18.874.961.796,00	17.124.978.015,00	90,73
Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Persentase Kesesuaian Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan dengan Standar RS Type C (sesuai data di ASPAK)	%	90	100	111	ST	1.772.440.000,00	1.744.895.000,00	98,45
Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Persentase Kesesuaian Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan dengan Standar RS Type C (sesuai data di ASPAK)	%	90	100	111	ST	1.026.777.500,00	954.700.000,00	92,98
Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Persentase Kesesuaian Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan dengan Standar RS Type C	%	90	100	111	ST	1.440.828.798,00	1.243.804.500,00	86,33



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	(sesuai data di ASPAK)								
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman RSUD EHD	Paket	19	19	100	ST	688.524.200,00	598.480.700,00	86,92
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD	%	82	85,44	104	ST	833.472.128,00	804.777.100,00	96,56
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD	%	85	100	118	ST	833.472.128,00	804.777.100,00	96,56
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Unit Kerja yang Menerapkan SIMRS	%	100	100	100	ST	114.488.700,00	111.893.000,00	97,73
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	1	1	100	ST	114.488.700,00	111.893.000,00	97,73
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Status Akreditasi RSUD EHD Yang Diterbitkan KARS Tahun Dimaksud	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100	ST	268.590.600,00	240.557.545,00	89,56
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Status Akreditasi RSUD EHD Yang Diterbitkan KARS Tahun Dimaksud	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100	ST	268.590.600,00	240.557.545,00	89,56
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							6.233.981.299,00	6.025.219.403,00	96,65
	Persentase Jumlah	%	35	35,15	100	ST			



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud								
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Laporan	5	5	100	ST	5.599.403.699,00	5.549.544.470,00	99,11
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM RSUD EHD	%	100	100	100	ST	5.599.403.699,00	5.549.544.470,00	99,11
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Laporan	1	1	100	ST	634.577.600,00	566.179.827,00	89,22
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud	%	35	35,15	100	ST	634.577.600,00	566.179.827,00	89,22

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan



Pertanahan. Alokasi anggaran untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp385.061.574.103,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp358.335.986.130,05 atau sebesar 93,06%. Jumlah indikator program pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 11 indikator, dengan pencapaian sebanyak 10 indikator kategori sangat tinggi, dan sebanyak 1 indikator kategori rendah. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.16
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							385.061.574.103,00	358.335.986.130,05	93,06
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							28.419.974.149,00	27.415.821.840,04	96,47
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100,00	ST			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang	dokumen	3	3	100	ST	638.718.812,00	475.154.290,00	74,39



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	1	100	ST	75.277.700,00	74.757.700,00	99,31
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100	ST	496.994.172,00	333.951.150,00	67,19
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100	ST	66.446.940,00	66.445.440,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100	ST	17.319.712.607,00	17.072.620.002,00	98,57
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	80	75	93,75	ST	15.728.045.707,00	15.607.442.362,00	99,23
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	1	100	ST	1.522.155.000,00	1.396.036.000,00	91,71
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100	ST	69.511.900,00	69.141.640,00	99,47
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	ST	51.084.970,00	34.163.900,00	66,88
Koordinasi dan Penilaian Barang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik	Laporan	1	1	100	ST	51.084.970,00	34.163.900,00	66,88



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
Milik Daerah SKPD	Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD								
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100	ST	51.650.000,00	43.684.298,00	84,58
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	4	100	ST	55.277.000,00	43.684.298,00	79,03
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100	ST	2.854.969.945,00	2.585.486.492,00	90,56
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2	100	ST	48.326.704,00	35.430.242,00	73,31
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	16	100	ST	918.523.133,00	870.587.500,00	94,78
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	2	100	ST	169.615.731,00	161.313.114,00	95,11
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	7	100	ST	182.673.684,00	172.114.600,00	94,22
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	100	ST	177.224.008,00	167.770.240,00	94,67
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	1	100	ST	47.047.350,00	3.120.000,00	6,63
Penyediaan	Jumlah Paket	Paket	1	3	100	ST	104.048.500,00	103.346.000,00	99,32



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
Bahan/Material	Bahan/Material yang Disediakan								
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100	ST	51.892.500,00	45.035.000,00	86,79
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100	ST	1.155.618.335,00	1.026.769.796,00	88,85
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	5	5	100	ST	1.819.953.794,00	1.780.924.040,02	97,86
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	100	ST	842.643.660,00	817.200.000,00	96,98
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	3	100	ST	397.673.154,00	388.200.000,00	97,62
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100	ST	44.740.000,00	44.350.000,00	99,13
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100	ST	56.185.980,00	55.500.000,00	98,78
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100	ST	478.711.000,00	475.674.040,02	99,37
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100	ST	5.225.864.571,00	4.995.475.575,00	95,59
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Laporan	1	1	100	ST	15.897.000,00	4.780.000,00	30,07



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
	Menyurat								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100	ST	880.769.647,00	797.246.488,00	90,52
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100	ST	49.172.050,00	43.206.600,00	87,87
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100	ST	4.280.025.874,00	4.150.242.487,00	96,97
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100	ST	458.019.450,00	428.313.243,02	93,51
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	40	28	70	S	193.669.750,00	176.109.900,00	90,93
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	28	100	ST	134.805.000,00	127.315.300,00	94,44
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	100	ST	24.350.000,00	24.135.000,00	99,12
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100	ST	105.194.700,00	100.753.043,02	95,78
PROGRAM							22.742.854.665,00	22.381.905.307,67	98,41



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)									
	Jumlah Titik Rawan Banjir	titik	12	12	100	ST			
	Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	%	19,51	10,26	52,59	R			
	Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%)	%	56,09	55,79	99,47	ST			
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang tanggul sungai/ bangunan perkuatan tebing/ pengaman pantai yang dibangun/ dinormalisasi/ direstorasi	meter	1382,52	11049,77	100	ST	22.742.854.665,00	22.381.905.307,67	98,41
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	dokumen	10	8	80	T	2.168.684.513,00	2.163.052.951,93	99,74
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Km	0,5	0,46	91,4	ST	16.720.601.099,00	16.428.227.371,00	98,25
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Km	0,85	6,89	100	ST	2.958.000.000,00	2.940.925.290,00	99,42



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Km	0,67	3,7	100	ST	688.181.553,00	673.502.949,00	97,87
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	8	8	100	ST	207.387.500,00	176.196.745,74	84,96
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							16.150.000.000,00	15.202.333.536,66	94,13
	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	%	97,03	91,82	94,63	ST			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	%	97,03	91,82	94,63	ST	16.150.000.000,00	15.202.333.536,66	94,13
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Peningkatan SPAM Regional	Liter/detik	2,8	2,8	100	ST	16.150.000.000,00	15.202.333.536,66	94,13



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							1.200.000.000,00	890.505.263,73	74,21
	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	%	93,06	87,74	94,28	ST			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	%	93,06	87,74	94,28	ST	1.200.000.000,00	890.505.263,73	74,21
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Rumah tangga	30	30	100	ST	1.014.677.460,00	813.152.170,73	80,14
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	6	6	100	ST	185.322.540,00	77.353.093,00	41,74
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							110.196.605.314,00	94.084.126.370,05	85,38
	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	%	100	100	100	ST			
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ direnovasi/ direnovasi/ dipelihara untuk	gedung	7	7	100	ST	110.196.605.314,00	94.084.126.370,05	85,38



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Strategis Daerah Provinsi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
kepentingan strategis daerah									
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	dokumen	10	16	100	ST	9.588.661.293,00	8.530.000.580,05	88,96
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Unit	1	1	100	ST	9.216.751.951,00	7.432.256.580,00	80,64
Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara	dokumen	10	10	100	ST	91.391.192.070,00	78.121.869.210,00	85,48
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN YA							39.837.281.951,00	37.126.543.588,71	93,20
	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	%	30	100	100	ST			
Penyelenggaraan Penataan	Jumlah Penataan Bangunan dan	Kawasan	4	4	100	ST	39.837.281.951,00	37.126.543.588,71	93,20



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Sub Program	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	3	11	100	ST	7.892.411.340,00	7.859.929.596,50	99,59
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	4	4	100	ST	31.815.226.398,00	29.136.969.779,21	91,58
Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	1	1	100	ST	129.644.213,00	129.644.213,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN							164.247.211.765,00	159.162.729.178,19	96,90



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
	Persentase jalan kondisi baik (%)	%	64,75	70,37	108,68	ST			
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan kondisi baik (%)	%	64,75	70,37	108,68	ST	164.247.211.765,00	159.162.729.178,19	96,90
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	dokumen	21	44	100	ST	6.745.584.000,00	6.503.697.801,00	96,41
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas lahan tersedia (m2)	10000	13252	100	ST	2.452.206.400,00	2.087.150.388,00	85,11
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	dokumen	2	2	100	ST	2.978.605.000,00	2.799.516.434,00	93,99
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	8,46	16,04	100	ST	35.323.904.800,00	34.616.704.707,83	98,00
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Km	4	14,03	100	ST	90.123.715.052,00	87.510.207.108,85	97,10
Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	Km	2	0,83	41,5	SR	3.055.800.000,00	3.008.503.880,00	98,45
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Km	45	57,4	100	ST	3.686.602.120,00	3.546.036.926,00	96,19
Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Meter	6	254	100	ST	9.398.363.239,00	9.026.243.328,51	96,04
Pembangunan Flyover	TUNDA BAYAR 2022						4.098.475.380,00	3.861.885.244,00	94,23
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	dokumen	10	50	100	ST	6.383.955.774,00	6.202.783.360,00	97,16
PROGRAM PENGEMBANGA							998.629.200,00	957.556.294,00	95,89



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
N JASA KONSTRUKSI									
	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	%	10,00	15,54	100	ST			
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	10	15,54	100	ST	621.867.752,00	613.513.563,00	98,66
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	Orang	90	90	100	ST	422.900.204,00	415.135.888,00	98,16
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi	Orang	30	30	100	ST	99.810.670,00	99.560.470,00	99,75
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	orang	50	398	100	ST	99.156.878,00	98.817.205,00	99,66
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Bulan	12	12	100	ST	227.566.808,00	199.271.390,00	87,57
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Laporan	1	1	100	ST	227.566.808,00	199.271.390,00	87,57
Kebijakan Khusus	Jumlah Kebijakan	Indikator	3	3	100	ST	149.194.640,00	144.771.341,00	97,04



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang tersusun	Kinerja Kunci (IKK)							
Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	1	1	100	ST	49.512.000,00	47.025.085,00	94,98
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Laporan	1	1	100	ST	99.682.640,00	97.746.256,00	98,06
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							1.269.017.059,00	1.114.464.751,00	87,82
	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapan/Perda (%)	%	78	90	115,38	ST			
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapan/Perda (%)	%	78	90	115,38	ST	300.000.000,00	248.390.380,00	82,80
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	dokumen	1	1	100	ST	300.000.000,00	248.390.380,00	82,80
Koordinasi dan	Terlaksananya	Laporan	1	1	100	ST	133.237.048,00	118.108.100,00	88,65



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang								
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	dokumen	2	2	100	ST	133.237.048,00	118.108.100,00	88,65
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang	Laporan	1	1	100	ST	485.780.011,00	446.407.011,00	91,89
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	100	ST	250.000.000,00	220.475.011,00	88,19
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	dokumen	1	1	100	ST	235.780.011,00	225.932.000,00	95,82
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Laporan	1	1	100	ST	350.000.000,00	301.559.260,00	86,16
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	dokumen	1	1	100	ST	130.000.000,00	119.289.542,00	91,76
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	dokumen	1	1	100	ST	220.000.000,00	182.269.718,00	82,85



4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Alokasi anggaran untuk Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 209.241.805.683,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp. 206.560.259.110,14 atau sebesar 98,72%. Jumlah indikator program pada urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebanyak 6 indikator, dengan pencapaian sebanyak 5 indikator kategori sangat tinggi, dan sebanyak 1 indikator kategori sedang. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.16
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							209.241.805.683,00	206.560.259.110,14	98,72
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							15.217.670.759,00	14.618.192.618,00	96,06
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan	%	100	97,86	97,86	ST			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Administrasi Kantor								
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan / Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan / Dokumen	2	2	100,00	ST	1.044.765.603,00	985.765.827,00	94,35
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	1.038.465.803,00	981.660.627,00	94,53
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	6.299.800,00	4.105.200,00	65,16
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00	ST	8.166.079.567,00	7.919.368.002,00	96,98
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	448	448	100,00	ST	7.357.487.567,00	7.185.526.002,00	97,66
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	808.592.000,00	733.842.000,00	90,76
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	345.368.748,00	340.622.679,00	98,63



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	132.948.192,00	130.178.438,00	97,92
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	212.420.556,00	210.444.241,00	99,07
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00	ST	565.318.672,00	536.405.577,00	94,89
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	100,00	ST	465.318.672,00	459.780.577,00	98,81
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	10	100,00	ST	100.000.000,00	76.625.000,00	76,63
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00	ST	2.095.591.191,00	1.968.480.489,00	93,93
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	4.170.000,00	4.167.000,00	99,93
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	96.000.000,00	95.800.000,00	99,79
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	40.913.000,00	38.213.000,00	93,40
Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan	Paket	1	1	100,00	ST	316.476.500,00	252.136.000,00	79,67



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Kantor	Logistik Kantor yang Disediakan								
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	121.649.019,00	101.610.000,00	83,53
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100,00	ST	77.376.000,00	72.300.000,00	93,44
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	13.000.000,00	494.000,00	3,80
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	99.711.144,00	98.813.490,00	99,10
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	1.326.295.528,00	1.304.946.999,00	98,39
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Disediakan	Unit	11	11	100,00	ST	65.689.738,00	63.405.000,00	96,52
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	11	11	100,00	ST	65.689.738,00	63.405.000,00	96,52
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	3	100,00	ST	1.560.848.000,00	1.462.347.117,00	93,69
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan	Laporan	1	1	100,00	ST	308.700.000,00	282.725.518,00	91,59



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	1.242.148.000,00	1.169.621.599,00	94,16
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Unit	12	12	100,00	ST	1.374.009.240,00	1.341.797.927,00	97,66
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	3	3	100,00	ST	42.080.000,00	36.451.500,00	86,62
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	100,00	ST	36.145.000,00	27.166.500,00	75,16
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	4	100,00	ST	30.450.000,00	18.135.000,00	59,56
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	166.185.240,00	165.995.227,00	99,89
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	1.099.149.000,00	1.094.049.700,00	99,54



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	i								
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							346.199.700,00	316.408.630,00	91,39
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100,00	ST			
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100,00	ST			
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dokumen	3	3	100,00	ST	317.837.700,00	291.055.032,00	91,57
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1	1	100,00	ST	143.168.000,00	126.693.132,00	88,49
Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	1	1	100,00	ST	139.605.300,00	136.649.450,00	97,88
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah	Dokumen	1	1	100,00	ST	35.064.400,00	27.712.450,00	79,03



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Khusus								
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Orang	45	0	0	SR	28.362.000,00	25.353.598,00	89,39
Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Orang	45	0	0	SR	28.362.000,00	25.353.598,00	89,39
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							8.158.839.985,00	8.058.738.161,00	98,77
	Persentase RTLH yang dibenahi	%	15	15,23	101,53	ST			
	Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	%	72,55	51,77	71,36	S			
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Bulan	12	12	100,00	ST	67.850.700,00	67.047.251,00	98,82
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang	45	0	-	SR	24.646.200,00	24.583.200,00	99,74
Penyusunan/Review/Legalisasi	Jumlah Dokumen	Dokumen	2	0	-	SR	43.204.500,00	42.464.051,00	98,29



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Kebijakan Bidang PKP	Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi								
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh yang ditangani (ha)	Ha	23,51	12,17	51,77	R	8.090.989.285,00	7.991.690.910,00	98,77
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	200	203	101,50	ST	7.555.989.285,00	7.522.955.910,00	99,56
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	Ha	23,51	12,17	51,77	R	535.000.000,00	468.735.000,00	87,61
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							185.519.095.239,00	183.566.919.701,14	98,95
	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk	Unit	13.000	13.000	100,00	ST			



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	terlayani)								
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	Unit	13.000	13.000	100,00	ST	185.519.095.239,00	183.566.919.701,14	98,95
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	13.000	13.000	100,00	ST	185.519.095.239,00	183.566.919.701,14	98,95

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan uraian sebagai berikut:

1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran. Alokasi anggaran untuk Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 27.961.079.516,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp. 27.306.464.301,00 atau sebesar 97,66%. Jumlah indikator program pada Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat sebanyak 5 indikator, dengan pencapaian sebanyak 5 indikator tersebut kategori sangat tinggi.



Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.17
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang Dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran							27.961.079.516,00	27.306.464.301,00	97,66
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							23.339.108.501,00	22.919.703.639,00	98,20
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	ST			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	ST	194.137.968,00	192.734.183,00	99,28
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	100	ST	91.364.200,00	90.975.667,00	99,57
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	laporan	6	6	100	ST	102.773.768,00	101.758.516,00	99,01



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	ST	13.065.501.771,00	12.848.742.546,00	98,34
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang /bulan	71	71	100	ST	12.592.695.771,00	12.383.550.246,00	98,34
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	1	100	ST	442.718.000,00	435.382.000,00	98,34
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	100	ST	30.088.000,00	29.810.300,00	99,08
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	%	100	100	100	ST	205.444.360,00	194.162.051,00	94,51
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	8	8	100	ST	205.444.360,00	194.162.051,00	94,51
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	ST	1.322.504.910,00	1.243.302.591,00	94,01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100	ST	10.175.200,00	9.844.500,00	96,75
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang	paket	1	1	100	ST	502.482.450,00	448.047.000,00	89,17



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	disediakan								
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	1	1	100	ST	19.862.600,00	16.954.100,00	85,36
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100	ST	38.678.000,00	29.384.700,00	75,97
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	100	ST	41.212.100,00	34.883.200,00	84,64
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	1	100	ST	9.877.100,00	9.734.000,00	98,55
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	100	ST	675.724.060,00	670.499.941,00	99,23
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	1	100	ST	24.493.400,00	23.955.150,00	97,80
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	ST	1.292.303.900,00	1.265.766.950,00	97,95
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	5	5	100	ST	1.003.513.500,00	979.547.950,00	97,61
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	1	1	100	ST	288.790.400,00	286.219.000,00	99,11
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa	%	100	100	100	ST	5.744.220.400,00	5.680.889.510,00	98,90



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1	100	ST	169.296.490,00	168.354.350,00	99,44
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1	1	100	ST	21.857.100,00	21.600.000,00	98,82
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	1	100	ST	5.553.066.810,00	5.490.935.160,00	98,88
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100	100	100	ST	1.514.995.192,00	1.494.105.808,00	98,62
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	2	2	100	ST	103.510.000,00	102.016.000,00	98,56
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	9	9	100	ST	244.170.412,00	229.347.400,00	93,93
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5	5	100	ST	21.547.100,00	19.890.000,00	92,31
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	1	1	100	ST	1.145.767.680,00	1.142.852.408,00	99,75



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	yang Dipelihara/ Direhabilitasi								
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							4.086.043.114,00	3.902.474.130,00	95,51
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	%	53,33	53,33	100	ST			
	Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada	%	50	50	100	ST			
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	ST			
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat diselesaikan	%	100	100	100	ST	3.723.281.092,00	3.549.598.689,00	95,34
	Persentase Kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan satlinmas	%	100	100	100	ST			
	Persentase SDM Aparatur Satpol PP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	16	16	100	ST			
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi	kasus	96	96	100	ST	1.175.427.008,00	1.156.732.488,00	98,41



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan								
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	kasus	24	19	79,17	T	373.174.330,00	369.681.243,00	99,06
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	dokumen	1	1	100	ST	400.277.260,00	379.023.900,00	94,69
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dokumen	1	1	100	ST	812.456.700,00	731.428.653,00	90,03
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	orang	40	40	100	ST	148.501.694,00	130.642.100,00	87,97
Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan	dokumen	1	1	100	ST	21.320.000,00	16.897.975,00	79,26



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan								
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	unit	4	4	100	ST	733.157.720,00	711.277.430,00	97,02
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum yang telah dibuat dan dimutakhirkan	Dokumen	1	1	100	ST	53.966.380,00	53.914.900,00	99,90
Penyediaan Layanan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	laporan	1	0	0	SR	5.000.000,00	-	-
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada	%	100	100	100	ST	317.325.084,00	309.001.938,00	97,38
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	laporan	1	1	100	ST	30.896.268,00	27.920.700,00	90,37
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	laporan	1	1	100	ST	266.185.381,00	261.284.525,00	98,16
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	laporan	1	1	100	ST	20.243.435,00	19.796.713,00	97,79
Pembinaan Penyidik Pegawai	Persentase Penyidik	%	100	100	100	ST	45.436.938,00	43.873.503,00	96,56



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Provinsi kepri yang terbina								
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	laporan	1	1	100	ST	45.436.938,00	43.873.503,00	96,56
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							535.927.901,00	484.286.532,00	90,36
	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan / atau tindaklanjutnya	%	70,00	70,00	100	ST			
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindaklanjutnya	%	70	70	100	ST	506.738.346,00	458.693.272,00	90,52
Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	dokumen	1	1	100	ST	92.950.870,00	87.480.700,00	94,11
Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	dokumen	1	1	100	ST	80.380.695,00	74.683.950,00	92,91



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	laporan	1	1	100	ST	243.073.381,00	236.649.122,00	97,36
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Keluarga	40	40	100	ST	90.333.400,00	59.879.500,00	66,29
Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kabupaten/Kota yg dilakukan pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	42,85	42,85	100	ST	29.189.555,00	25.593.260,00	87,68
Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	laporan	1	1	100	ST	29.189.555,00	25.593.260,00	87,68

2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Alokasi anggaran untuk Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 12.933.437.201,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp.



12.699.183.381,07 atau sebesar 98,19%. Jumlah indikator program pada Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat sebanyak 4 indikator, dengan pencapaian sebanyak 3 indikator kategori sangat tinggi, dan 1 indikator kategori tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.18
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang Dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah				2,66			12.933.437.201,00	12.699.183.381,07	98,19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							8.302.053.770,00	8.172.382.283,00	
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100,00	ST	8.302.053.770,00	8.172.382.283,00	98,44
Perencanaan, Penganggaran,	Jumlah Dokumen	Dokumen	6	6	100,00	ST	165.693.534,00	162.087.526,00	97,82



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100,00	ST	66.571.074,00	66.313.121,00	99,61
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	13.817.445,00	13.699.050,00	99,14
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100,00	ST	85.305.015,00	82.075.355,00	96,21
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun	1	1	100,00	ST	5.699.637.808,00	5.622.607.668,00	98,65
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	23	23	100,00	ST	5.342.612.650,00	5.266.069.668,00	98,57
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	2	100,00	ST	357.025.158,00	356.538.000,00	99,86
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paket	4	4	100,00	ST	81.511.700,00	81.038.110,00	99,42
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Bersama Atribut Kelengkapan	Paket	3	3	100,00	ST	61.951.700,00	61.911.000,00	99,93
Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai	Orang	2	2	100,00	ST	19.560.000,00	19.127.110,00	97,79



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00	ST	549.975.772,00	533.636.581,00	97,03
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	8	80,00	T	125.706.563,00	113.941.000,00	90,64
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	5.555.550,00	5.539.753,00	99,72
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	41.599.427,00	39.232.384,00	94,31
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	5.764.730,00	5.719.522,00	99,22
Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	16.710.162,00	16.710.162,00	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	2	100,00	ST	26.380.000,00	26.356.600,00	99,91
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2	100,00	ST	328.259.340,00	326.137.160,00	99,35
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100,00	ST	150.188.700,00	150.185.000,00	99,998
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	100,00	ST	150.188.700,00	150.185.000,00	99,998



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tahun Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1	1	100,00	ST	1.443.637.371,00	1.412.008.372,00	97,81
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	9.039.522,00	8.832.285,00	97,71
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	2	100,00	ST	120.172.670,00	105.070.011,00	87,43
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	100,00	ST	1.311.025.179,00	1.294.706.076,00	98,76
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100,00	ST	211.408.885,00	210.819.026,00	99,72
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	22	22	100,00	ST	150.461.576,00	150.444.492,00	99,99
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	34	34	100,00	ST	24.930.790,00	24.413.834,00	97,93
Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor	Unit	2	2	100,00	ST	36.016.519,00	35.960.700,00	99,85



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi								
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							4.631.383.431,00	4.526.801.098,07	97,74
	Indeks Pencegahan Bencana	Indeks	2,46	2,66	108,13	ST			
	Indeks Penguatan Sistem Pemulihan	Indeks	0,40	0,64	160,00	ST			
	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Indeks	0,30	0,27	90,00	T			
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	%	33,33	33,33	100,00	ST	888.084.644,00	839.881.418,00	94,57
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/ Kota	Orang	600	600	100,00	ST	888.084.644,00	839.881.418,00	94,57
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	45,45	38,96	85,72	T	1.572.402.850,00	1.552.136.417,00	98,71
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/ Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam	Orang	40	40	100,00	ST	586.953.650,00	580.494.495,00	98,90



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	pencegahan dan mitigasi bencana								
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	2	2	100,00	ST	98.185.155,00	92.603.159,00	94,31
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Unit	48	48	100,00	ST	224.858.167,00	222.849.300,00	99,11
Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	1	1	100,00	ST	55.000.000,00	52.832.405,00	96,06
Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	5	5	100,00	ST	450.000.000,00	446.840.800,00	99,30
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	22	22	100,00	ST	141.637.300,00	140.749.448,00	99,37
Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	1	0	0,00	SR	15.768.578,00	15.766.810,00	99,99
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan	%	41,94	41,94	100,00	ST	1.474.935.500,00	1.449.646.962,00	98,29



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Evakuasi Korban Bencana								
Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	4	4	100,00	ST	702.333.922,00	684.759.053,00	97,50
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	460	460	100,00	ST	580.309.233,00	574.106.250,00	98,93
Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Laporan	1	1	100,00	ST	192.292.345,00	190.781.659,00	99,21
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	66,67	66,67	100,00	ST	695.960.437,00	685.136.301,00	98,44
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	2	2	100,00	ST	130.000.000,00	129.415.833,00	99,55
Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	2	2	100,00	ST	510.960.437,00	500.789.003,00	98,01
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Laporan	1	1	100,00	ST	55.000.000,00	54.931.465,00	99,88



6. Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Alokasi anggaran untuk Urusan Sosial pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 27.374.401.002,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp. 26.952.498.381,68 atau sebesar 98,46%. Jumlah indikator program pada urusan Sosial sebanyak 14 indikator, dengan pencapaian sebanyak 12 indikator kategori sangat tinggi, sebanyak 1 indikator kategori tinggi, dan sebanyak 1 indikator kategori sangat rendah. Selengkapnya, pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan Sosial tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.19
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Sosial Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Urusan Sosial							27.374.401.002,00	26.952.498.381,68	98,46
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100,00	ST	12.028.412.995,00	11.846.651.633,00	98,49
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan Perangkat daerah	%	100	100	100,00	ST	683.342.130,00	682.641.741,00	99,90
	Persentase terlaksananya Penganggaran Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST			
	Persentase	%	100	100	100,00	ST			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	1	1	100,00	ST	25.366.600,00	25.276.600,00	99,65
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok	1	1	100,00	ST	180.162.147,00	180.162.147,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	lap	2	2	100,00	ST	197.120.383,00	196.884.494,00	99,88
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lap	1	1	100,00	ST	280.693.000,00	280.318.500,00	99,87
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	100,00	ST	9.064.777.762,00	8.950.888.520,00	98,74
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln	528	528	100,00	ST	8.542.487.762,00	8.428.836.620,00	98,67
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dok	1	1	100,00	ST	522.290.000,00	522.051.900,00	99,95
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah pada	%	100	100	100,00	ST	68.415.996,00	68.284.942,00	99,81



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	perangkat daerah								
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	lap	1	1	100,00	ST	68.415.996,00	68.284.942,00	99,81
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	100,00	ST	49.590.000,00	49.590.000,00	100,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	pkt	56	56	100,00	ST	49.590.000,00	49.590.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	100,00	ST	756.423.211,00	749.910.623,00	99,14
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	pkt	1	1	100,00	ST	13.030.000,00	12.972.200,00	99,56
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	pkt	1	1	100,00	ST	30.638.200,00	30.395.400,00	99,21
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	pkt	1	1	100,00	ST	76.859.682,00	73.211.200,00	95,25
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	pkt	1	1	100,00	ST	83.711.000,00	81.560.100,00	97,43
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dok	1	1	100,00	ST	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	lap	1	1	100,00	ST	5.641.000,00	5.640.000,00	99,98
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	1	1	100,00	ST	535.743.329,00	535.331.723,00	99,92
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100,00	ST	233.815.900,00	230.878.900,00	98,74
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	1	100,00	ST	77.920.000,00	75.660.000,00	97,10
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	14	14	100,00	ST	155.895.900,00	155.218.900,00	99,57
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100,00	ST	894.986.996,00	844.983.061,00	94,41
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lap	1	1	100,00	ST	39.721.000,00	39.500.000,00	99,44
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap	1	1	100,00	ST	79.000.000,00	61.202.010,00	77,47
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	lap	1	1	100,00	ST	776.265.996,00	744.281.051,00	95,88



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100,00	ST	277.061.000,00	269.473.846,00	97,26
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	3	3	100,00	ST	188.107.000,00	181.829.846,00	96,66
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	63	63	100,00	ST	45.970.000,00	44.660.000,00	97,15
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	100,00	ST	42.984.000,00	42.984.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	3,27	10,42	318,55	ST	4.295.822.020,00	4.238.496.196,00	98,67
	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	%	46	40,8	88,70	T			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	lbg	11	35	318,18	ST	4.295.822.020,00	4.238.496.196,00	98,67
	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM) yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	org	115	102	88,70	T			
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	org	40	24	60,00	R	22.296.889,00	22.050.800,00	98,90
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	org	75	78	104,00	ST	238.260.000,00	236.786.837,00	99,38
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	lbg	11	35	318,18	ST	4.035.265.131,00	3.979.658.559,00	98,62
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100	100	100,00	ST	2.797.515.209,00	2.740.617.938,68	97,97



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100	100	100,00	ST			
	Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	%	25	25	100,00	ST			
	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100	100	100,00	ST			
	Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100	100	100,00	ST			
	Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100	100	100,00	ST			
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	org	445	445	100,00	ST	958.690.159,00	933.758.482,00	97,40



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	org	126	126	100,00	ST	474.223.080,00	466.804.540,00	98,44
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	org	319	319	100,00	ST	484.467.079,00	466.953.942,00	96,39
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	org	621	621	100,00	ST	959.694.800,00	946.724.625,00	98,65
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	org	10	10	100,00	ST	393.050.800,00	387.772.894,00	98,66
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	org	611	611	100,00	ST	566.644.000,00	558.951.731,00	98,64
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	org	533	533	100,00	ST	590.402.850,00	573.751.350,00	97,18
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	org	33	33	100,00	ST	170.188.900,00	162.691.000,00	95,59
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	org	500	500	100,00	ST	420.213.950,00	411.060.350,00	97,82



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti	org	10	10	100,00	ST	113.645.600,00	112.329.452,00	98,84
Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	org	10	10	100,00	ST	61.878.700,00	61.445.718,00	99,30
Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	org	10	10	100,00	ST	51.766.900,00	50.883.734,00	98,29
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	org	2.065	2.065	100,00	ST	175.081.800,00	174.054.030,00	99,41
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	org	22	22	100,00	ST	53.916.000,00	53.525.400,00	99,28
Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	org	2.043	2.043	100,00	ST	121.165.800,00	120.528.630,00	99,47
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi	%	0,15	0,32	210,00	ST	6.211.883.840,00	6.106.791.431,00	98,31



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
SOSIAL	produktif								
	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	0,71	13,52	1.898,89	ST			
	Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	31,63	36,11	114,17	ST			
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	KK	130	299	230,00	ST	6.211.883.840,00	6.106.791.431,00	98,31
	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	KK	60	100	166,67	ST			
	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	KK	900	17.090	1.898,89	ST			
	Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau	KK	39.996	45.662	114,17	ST			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	asuransi kesejahteraan sosial								
	Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan	dok	1	1	100,00	ST			
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	KK	40.896	62.752	153,44	ST	3.629.366.655,00	3.559.864.878,00	98,09
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	KK	41.086	63.151	153,70	ST	698.591.192,00	674.612.803,00	96,57
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	KK	190	399	210,00	ST	1.883.925.993,00	1.872.313.750,00	99,38
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100,00	ST	603.286.938,00	586.269.262,00	97,18
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan	org	400	400	100,00	ST	603.286.938,00	586.269.262,00	97,18



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	kebutuhan dasar								
Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	org	200	200	100,00	ST	219.364.676,00	216.971.200,00	98,91
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	org	200	200	100,00	ST	152.408.058,00	149.369.058,00	98,01
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	org	85	85	100,00	ST	37.168.400,00	34.828.900,00	93,71
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	org	400	400	100,00	ST	194.345.804,00	185.100.104,00	95,24
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	%	33,33	11,11	33,33	SR	1.437.480.000,00	1.433.671.921,00	99,74
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		unit	3	1	33,33	SR	1.437.480.000,00	1.433.671.921,00	99,74



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	unit	3	1	33,33	SR	1.437.480.000,00	1.433.671.921,00	99,74

7. Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Alokasi anggaran untuk Urusan Tenaga Kerja pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp29.809.396.203,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp28.853.707.033,00 atau sebesar 96,79%. Jumlah indikator program pada urusan Tenaga Kerja sebanyak 12 indikator, dengan pencapaian sebanyak 8 indikator kategori sangat tinggi, sebanyak 4 indikator kategori tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Urusan Tenaga Kerja tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.20
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Tenaga Kerja Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN TENAGA KERJA							29.809.396.203,00	28.853.707.033,00	96,79



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							24.802.928.599,00	23.979.851.080,00	96,68
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	ST			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Persen	100	100	100	ST	67.380.000,00	60.440.200,00	89,70
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100	ST	25.000.000,00	23.101.750,00	92,41
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	100	ST	22.380.000,00	21.101.850,00	94,29
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100	ST	20.000.000,00	16.236.600,00	81,18
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100	ST	22.338.427.114,00	21.622.387.280,00	96,79
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/bulan	105	105	100	ST	21.844.507.114,00	21.137.627.280,00	96,76



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Tunjangan ASN								
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	31	31	100	ST	493.920.000,00	484.760.000,00	98,15
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	ST	361.032.625,00	345.970.136,00	95,83
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	26	26	100	ST	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	5	100	ST	20.000.000,00	19.870.000,00	99,35
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	100	ST	45.161.702,00	44.620.370,00	98,80
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	5	100	ST	10.394.323,00	9.921.300,00	95,45
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	27	27	100	ST	9.607.200,00	9.360.000,00	97,43
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	178	178	100	ST	265.869.400,00	252.198.466,00	94,86
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100,00	100	ST	253.857.000,00	252.265.000,00	99,37



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	2	100	ST	198.996.000,00	198.865.000,00	99,93
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	18	16	89	T	54.861.000,00	53.400.000,00	97,34
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	ST	1.575.901.060,00	1.504.071.964,00	95,44
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	100	ST	284.867.100,00	270.857.832,00	95,08
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	100	ST	35.070.000,00	34.800.000,00	99,23
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	100	ST	1.255.963.960,00	1.198.414.132,00	95,42
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Persen	100	100	100	ST	206.330.800,00	194.716.500,00	94,37
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	100	ST	98.025.000,00	93.889.500,00	95,78
Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan	unit	2	0	0	SR	7.301.800,00	0	0,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	100	ST	101.004.000,00	100.827.000,00	99,82
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA							12.000.000,00	10.035.200,00	83,63
	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas	Persen	100	100	100	ST			
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase kab/kota yang menyusun perencanaan ketenagakerjaan	Persen	40,8	42,86	105,05	ST	12.000.000,00	10.035.200,00	83,63
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan Penyusunan RTK Mikro	orang	100	65	65	R	12.000.000,00	10.035.200,00	83,63
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							4.392.235.946,00	4.283.678.003,00	97,53
	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	56,41	56,17	99,57	ST			
	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	%	8	7,16	89,5	T			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	kewirausahaan baru								
	Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	%	45,45	38,28	84,22	T			
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	56,41	56,41	100	ST	4.372.235.946,00	4.265.314.003,00	97,55
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Orang	650	674	103,69	ST	4.372.235.946,00	4.265.314.003,00	97,55
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Persentase peserta terlatih yang mendapat bimbingan peningkatan produktivitas	%	52,63	48	91,20	ST	20.000.000,00	18.364.000,00	91,82
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang mendapatkan konsultasi peningkatan Produktivitas	orang	50	50	100	ST	20.000.000,00	18.364.000,00	91,82
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							74.818.500,00	66.133.650,00	88,39
	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	62,00	59,42	95,84	ST			
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,57	68,68	101,64	ST			
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga	Jumlah penerbitan izin Lembaga	dokumen	17	17	100	ST	14.818.500,00	13.265.500,00	89,52



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang terintegrasi	lembaga	10	10	100	ST	14.818.500,00	13.265.500,00	89,52
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja melalui informasi pasar kerja	Persen	72	72	100,00	ST	20.000.000,00	18.548.900,00	92,74
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem Online (karirhub)	orang	500	520	104,00	ST	20.000.000,00	18.548.900,00	92,74
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persentase PMI Memperoleh Pelayanan dan Perlindungan (Pra dan Purna Penempatan)	Persen	11	11	100,00	ST	20.000.000,00	17.104.900,00	85,52
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	orang	100	138	138,00	ST	20.000.000,00	17.104.900,00	85,52
Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja	Persen	2	2	100	ST	20.000.000,00	17.214.350,00	86,07
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan	Orang	50	265	538	ST	20.000.000,00	17.214.350,00	86,07



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	RPTKA								
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							319.943.158,00	310.269.400,00	96,98
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	40	36,21	90,53	T			
	Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	%	100	98,07	98,07	ST			
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang dilayani	persen	38	50	131,58	ST	146.898.726,00	140.912.200,00	95,92
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	8	8	100	ST	146.898.726,00	140.912.200,00	95,92
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum	Persentase Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota	persen	100	100	100	ST	173.044.432,00	169.357.200,00	97,87



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	(UMK) yang ditetapkan								
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan	1	1	100	ST	57.292.100,00	55.654.200,00	97,14
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	Surat Keputusan	7	7	100	ST	115.752.332,00	113.703.000,00	98,23
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN							207.470.000,00	203.739.700,00	98,20
	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	%	12,8	19,15	149,6	ST			
	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	95,5	77,22	80,86	T			
	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	76	75	98,68	ST			
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan	Persen	38	40	105	ST	207.470.000,00	203.739.700,00	98,20
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	perusahaan	500	550	111	ST	158.470.000,00	156.241.550,00	98,59
Penegakan Hukum	Jumlah Kasus	kasus	40	50	125	ST	25.000.000,00	24.056.650,00	96,23



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Ketenagakerjaan di Perusahaan	Permasalahan Hukum yang Diselesaikan								
Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan yang dilaksanakan	Perusahaan	150	165	110	ST	24.000.000,00	23.441.500,00	97,67

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Alokasi anggaran untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp20.656.873.474,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp20.110.070.071,00 atau sebesar 97,35%. Jumlah indikator program pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 9 indikator, dengan pencapaian sebanyak 7 indikator kategori sangat tinggi, dan sebanyak 2 indikator kategori tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.21

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/	Indikator Kinerja Program, Kegiatan,	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023	Capaian Anggaran Tahun 2023
-----------------------------	--------------------------------------	--------	--	-----------------------------



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sub Kegiatan								
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							20.656.873.474,00	20.110.070.071,00	97,35
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							13.485.380.397,00	13.092.593.031,00	97,09
	Persentase Layanan Dukungan administrasi kesekretariatan sesuai SOP	%	100	100	100,00	ST			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100	ST	205.390.389,00	202.863.864,00	98,77
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100	ST	155.236.464,00	152.788.998,00	98,42
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100	ST	50.153.925,00	50.074.866,00	99,84
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan	%	100	100	100	ST	9.272.106.944,00	8.939.157.695,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	39	39	100	ST	8.738.896.549,00	8.506.268.195,00	97,34
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Dokumen	1	1	100	ST	528.463.195,00	429.504.400,00	81,27



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Pelaksanaan Tugas ASN								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100	ST	4.747.200,00	3.385.100,00	71,31
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bulan	12	12	100	ST	58.820.473,00	51.131.564,00	86,93
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100	ST	58.820.473,00	51.131.564,00	86,93
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	ST	1.170.909.352,00	1.161.333.840,00	99,18
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	ST	11.320.800,00	11.064.000,00	97,73
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	ST	65.348.900,00	64.679.000,00	98,97
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100	ST	29.439.100,00	29.105.450,00	98,87
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	ST	96.386.000,00	95.248.900,00	98,82
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100	ST	581.913.952,00	576.608.200,00	99,09
Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Dokumen Bahan	Dokumen	1	1	100	ST	27.000.000,00	26.880.000,00	99,56



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
dan Peraturan Perundang-Undangan	Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100	ST	359.500.600,00	357.748.290,00	99,51
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	ST	2.530.395.539,00	2.493.288.168,00	98,53
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100	ST	220.162.622,00	191.128.647,00	86,81
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100	ST	123.060.000,00	119.615.000,00	97,20
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100	ST	2.187.172.917,00	2.182.544.521,00	99,79
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	%	100	100	100	ST	247.757.700,00	244.817.900,00	98,81
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	3	3	100	ST	237.350.000,00	234.507.900,00	98,80



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Jabatan									
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	1	1	100	ST	6.700.000,00	6.610.000,00	98,66
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	100	ST	3.707.700,00	3.700.000,00	99,79
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							849.532.300,00	823.793.115,00	96,97
	Persentase Pencapaian Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	5,5	12,63	229,64	ST			
	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	28,90	28,64	99,10	ST			
	Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen	%	11,10	8,89	80,09	T			
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Anggaran Responsif Gender (ARG)	Rp	176.000.000.000	217.300.157.265	123,47	ST	64.532.300,00	53.963.215,00	83,62
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	OPD	43	35	81,40	T	64.532.300,00	53.963.215,00	83,62
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada	Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada	Lembaga	20	20	100	ST	650.000.000,00	634.829.900,00	97,67



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Organisasi Kemasyarakatan								
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	100	ST	200.000.000,00	194.681.600,00	97,34
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaaen/Kota	Organisasi	20	34	170	ST	450.000.000,00	440.148.300,00	97,81
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	150	150	100	ST	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	150	150	100	ST	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN							2.544.927.800,00	2.471.725.521,00	97,12



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
PEREMPUAN									
	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	%	43,88	28,96	151,52	ST			
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO	Kasus	221	190	116,31	ST	817.114.800,00	810.565.900,00	99,20
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	100	ST	817.114.800,00	810.565.900,00	99,20
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang terlayani	%	100	100	100	ST	1.075.038.000,00	1.023.780.171,00	95,23
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	100	130	130	ST	899.038.000,00	848.175.071,00	94,34



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Masyarakat								
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	6	6	100	ST	176.000.000,00	175.605.100,00	99,78
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang difasilitasi Penguatan dan Pengembangannya	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan/Layanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang difasilitasi Penguatan dan Pengembangannya	Lembaga	3	3	100	ST	652.775.000,00	637.379.450,00	97,64
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	30	30	100	ST	101.660.000,00	100.043.450,00	98,41
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	250	820	328	ST	551.115.000,00	537.336.000,00	97,50
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							2.596.434.963,00	2.554.134.062,00	98,37
	Persentase Sumbangan Perempuan dalam	%	28,90	28,64	99,10	ST			



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Pendapatan								
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas Lifeskill	Orang	100	1265	1265	ST	2.552.414.230,00	2.510.428.067,00	98,36
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	OPD	20	20	100	ST	100.000.000,00	97.824.500,00	97,82
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	100	ST	2.452.414.230,00	2.412.603.567,00	98,38
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	335	210	62,69	R	44.020.733,00	43.705.995,00	99,29
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Dokumen	1	1	100	ST	44.020.733,00	43.705.995,00	99,29



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Kewenangan Provinsi								
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							10.000.000,00	9.949.044,00	99,49
	Persentase OPD yang memiliki data terpilah Gender dan Anak	%	51,28	81,39	158,72	ST			
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah OPD yang memiliki Data Terpilah Gender dan Anak	OPD	20	34	170	ST	10.000.000,00	9.949.044,00	99,49
Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	1	1	100	ST	10.000.000,00	9.949.044,00	99,49
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							612.372.814,00	608.972.424,00	99,44
	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	74,60	61,08	81,88	T			
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Puspaga yang dibina dan dikembangkan	Jumlah	1	6	600	ST	612.372.814,00	608.972.424,00	99,44
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan	Organisasi	5	6	120	ST	539.392.914,00	536.754.634,00	99,51



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha								
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	100	ST	72.979.900,00	72.217.790,00	98,96
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							558.225.200,00	548.902.874,00	98,33
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	%	86,94	82,09	94,42	ST			
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang terbentuk PATMB	%	38,46	38,46	100	ST	287.385.200,00	279.411.568,00	97,23
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Organisasi	1	1	100	ST	200.000.000,00	192.346.368,00	96,17
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	100	ST	87.385.200,00	87.065.200,00	99,63
Penyediaan Layanan bagi	Persentase Penyediaan	%	100	100	100	ST	270.840.000,00	269.491.306,00	99,50



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Layanan bagi anak								
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Layanan	6	6	100	ST	170.840.000,00	170.604.306,00	99,86
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	100	ST	100.000.000,00	98.887.000,00	98,89

9. Pangan

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan. Alokasi anggaran untuk Urusan Pangan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp23.011.242.370,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp22.143.318.430,00 atau sebesar 96,23%. Jumlah indikator program pada urusan Pangan sebanyak 6 indikator, dengan pencapaian sebanyak 6 indikator kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan Pangan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 1.22
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pangan Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							23.011.242.370,00	22.143.318.430,00	96,23
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							21.810.827.966,00	21.106.968.560,00	96,77
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	ST			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	3	2	66,67	S	270.435.368,00	227.634.589,00	84,17
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100	ST	168.964.278,00	146.743.189,00	86,85
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	1	100	ST	101.471.090,00	80.891.400,00	79,72
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan yang tersusun	Dokumen	1	1	100	ST	16.814.751.061,00	16.404.364.404,00	97,56
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	76	76	100	ST	16.173.881.499,00	15.780.502.404,00	97,57
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	Bulan	12	12	100	ST	640.869.562,00	623.862.000,00	97,35



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100	ST	1.280.501.171,00	1.148.579.410,00	89,70
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	1	100	ST	8.256.525,00	7.155.615,00	86,67
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Laporan	1	1	100	ST	540.497.215,00	507.519.150,00	93,90
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	1	1	100	ST	92.812.368,00	89.884.400,00	96,85
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	1	1	100	ST	159.764.495,00	156.450.860,00	97,93
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	Dokumen	1	1	100	ST	8.007.615,00	6.020.000,00	75,18
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100	ST	33.909.535,00	31.875.000,00	94,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100	ST	437.253.418,00	349.674.385,00	79,97



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang	Bulan	12	12	100	ST	2.248.974.010,00	2.164.150.408,00	96,23
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100	ST	2.875.915,00	2.860.000,00	99,45
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	1	1	100	ST	97.894.304,00	86.532.253,00	88,39
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Laporan	1	1	100	ST	48.015.755,00	48.000.000,00	99,97
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	1	1	100	ST	2.100.188.036,00	2.026.758.155,00	96,50
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	Unit	37	73	197,30	ST	445.914.250,00	434.980.286,00	97,55
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	8	8	100	ST	354.238.600,00	345.870.200,00	97,64
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit	10	10	100	ST	71.520.000,00	69.604.500,00	97,32
Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung	Unit	1	1	100	ST	20.155.650,00	19.505.586,00	96,77



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi								
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							1.109.197.225,00	968.908.820,00	87,35
	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan	%	114	117,44	103,02	ST			
	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	%	≤11	7,71	142,67	ST			
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	87,70	89,9	102,51	ST			
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase jumlah daerah yang di analisis ketersediaan bahan pangan	%	37,5	37,5	100	ST	722.530.966,00	631.588.722,00	87,41
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Laporan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	1	1	100	ST	27.255.000,00	14.721.600,00	54,01
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya	Pangan Berbasisi Sumber Daya Lokal	Laporan	1	1	100	ST	695.275.966,00	616.867.122,00	88,72



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Lokal	yang tersedia								
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Terlaksananya Pengisian Lumbung dan Ketersediaan Cadangan Pangan Provinsi	Paket	1	1	100	ST	187.942.546,00	176.211.884,00	93,76
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Laporan	1	1	100	ST	147.095.590,00	139.289.884,00	94,69
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang di pelihara	Ton	1,5	1,33	88,67	T	40.846.956,00	36.922.000,00	90,39
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Jumlah Kelompok yang menerapkan pola B2SA	Kelompok	7	5	71,43	S	198.723.713,00	161.108.214,00	81,07
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	1	1	100	ST	198.723.713,00	161.108.214,00	81,07
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							31.869.738,00	11.611.350,00	36,43
	Persentase Daerah	%	10	6,6	134,00	ST			



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Rentan terhadap Kerawanan Pangan								
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Laporan Pemantauan Ketahanan Pangan dan Gizi Serta Daerah yang di Intervensi Penanganan Kerawanan Pangan	Laporan	1	1	100	ST	31.869.738,00	11.611.350,00	36,43
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	1	1	100	ST	31.869.738,00	11.611.350,00	36,43
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							59.347.441,00	55.829.700,00	94,07
	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	82	94	114,63	ST			
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Produk Pangan asal Tumbuhan yang Aman	Laporan	1	1	100	ST	59.347.441,00	55.829.700,00	94,07
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi yang di Bina	Dokumen	1	1	100	ST	25.694.126,00	22.467.000,00	87,44
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Sertifikat	2	3	150	ST	33.653.315,00	33.362.700,00	99,14



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Kabupaten/Kota	Lintas Daerah Kabupaten/Kota								

10. Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan. Alokasi anggaran untuk Urusan Pertanahan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.593.237.049,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp2.227.204.218,00 atau sebesar 61,98%. Jumlah indikator program pada urusan Pertanahan sebanyak 1 indikator, dengan pencapaian sebanyak 1 indikator tersebut kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan Pertanahan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.23
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pertanahan Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN PERTANAHAN							3.593.237.049,00	2.227.204.218,00	61,98



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM							3.593.237.049,00	2.227.204.218,00	61,98
	Persentase Permintaan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dari Opd, Kabupaten/ Kota Yang Terfasilitasi	%	100	100	100	ST			
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase Jumlah OPD/Kabupaten/Kota dan Instansi lainnya yang mengajukan permohonan penetapan lokasi yang terfasilitasi	%	100	100	100	ST	3.593.237.049,00	2.227.204.218,00	61,98
Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	dokumen	1	1	100	ST	3.593.237.049,00	2.227.204.218,00	61,98

11. Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Alokasi anggaran untuk Urusan Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp30.743.686.202,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023



sebesar Rp30.343.735.250,00 atau sebesar 98,70%. Jumlah indikator program pada urusan Lingkungan Hidup sebanyak 6 indikator, dengan pencapaian sebanyak 5 indikator kategori sangat tinggi, dan sebanyak 1 indikator kategori sangat rendah. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan Lingkungan Hidup tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.24
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP							30.743.686.202,00	30.343.735.250,00	98,70
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							29.753.156.862,00	29.443.438.543,00	97,18
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	ST			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja OPD	Dokumen	1	2	200	ST	144.763.056,00	141.456.905,00	97,72
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100	ST	78.576.756,00	75.417.417,00	95,98
Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan	Laporan	1	1	100	ST	66.186.300,00	66.039.488,00	99,78



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan, serta Administrasi Keuangan ASN	Tahun	1	1	100	ST	25.746.615.927,0 0	25.105.914.691,00	97,51
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	141	141	100	ST	25.207.973.927,0 0	24.570.302.691,00	97,47
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100	ST	538.642.000,00	535.612.000,00	99,44
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Pegawai	Orang	15	30	200	ST	105.306.843,00	99.878.243,00	94,84
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	17	30	176,47	ST	105.306.843,00	99.878.243,00	94,84
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Tahun	1	1	100	ST	1.421.670.357,00	1.300.601.393,00	91,48
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	ST	17.125.000,00	9.942.800,00	58,06
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	ST	237.538.663,00	211.997.250,00	89,25
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100	ST	64.032.300,00	56.428.500,00	88,13



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	ST	179.924.976,00	155.433.400,00	86,39
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100	ST	72.396.242,00	68.778.186,00	95,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100	ST	122.313.600,00	121.680.000,00	99,48
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	100	ST	67.691.676,00	62.433.050,00	92,23
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100	ST	43.785.800,00	34.386.000,00	78,53
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100	ST	610.272.300,00	572.948.207,00	93,88
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100	ST	6.589.800,00	6.574.000,00	99,76
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor	Tahun	1	1	100	ST	2.469.854.409,00	2.391.265.611,00	96,82
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	5.199.100,00	4.200.000,00	80,78
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	1	1	100,00	ST	150.197.685,00	130.205.637,00	86,69



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	241.477.600,00	235.886.500,00	97,68
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	2.072.980.024,00	2.020.973.474,00	97,49
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahun	1	1	100	ST	410.249.000,00	404.321.700,00	98,56
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	2	200	ST	364.909.000,00	360.416.700,00	98,77
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	3	300	ST	45.340.000,00	43.905.000,00	96,84
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							439.140.835,00	399.828.064,00	91,05
	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	%	100	100	100	ST			



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategi Provinsi	Dokumen	1	1	100	ST	439.140.835,00	399.828.064,00	91,05
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Dokumen	1	1	100	ST	439.140.835,00	399.828.064,00	91,05
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							250.000.000,00	228.935.899,00	91,57
	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	%	100	100	100	ST			
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau	%	100	100	100	ST	250.000.000,00	228.935.899,00	91,57
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	10	10	100	ST	250.000.000,00	228.935.899,00	91,57
PROGRAM PENANGANAN							55.240.700,00	43.960.694,00	79,58



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP									
	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	%	71,43	100,00	140,00	ST			
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan dan tindak pidana serta sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus	3	3	100,00	ST	55.240.700,00	43.960.694,00	79,58
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditanga ni	Dokumen	3	3	100	ST	55.240.700,00	43.960.694,00	79,58
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							246.147.805,00	227.572.050,00	92,45
	Persentase Pengurangan Sampah	%	27	15,62	57,85	SR			
	Persentase Penanganan Sampah	%	72	72	100	ST			
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Penanganan Sampah di TPA	Paket	1	2	200	ST	246.147.805,00	227.572.050,00	92,45
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	Paket	1	2	200	ST	246.147.805,00	227.572.050,00	92,45



12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Alokasi anggaran untuk Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.373.680.368,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp1.284.053.739,00 atau sebesar 93,48%. Jumlah indikator program pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 4 indikator, dengan pencapaian sebanyak 4 indikator tersebut kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.25
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							1.373.680.368,00	1.284.053.739,00	93,48
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							501.372.000,00	465.973.163,00	92,94
	Persentase Kab/ Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk	%	100	100	100,00	ST			
Penyelenggaraan Pendaftaran	Jumlah Kab/ Kota yang mendapat	Kab/Kota	7	7	100,00	ST	269.000.000,00	256.489.146,00	95,35



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Kependudukan	pembinaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk								
Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	100,00	ST	269.000.000,00	256.489.146,00	95,35
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Disdukcapil Kab/Kota yang mendapat pengawasan, pembinaan dan bimbingan terkait administrasi kependudukan	Kab/Kota	7	7	100,00	ST	232.372.000,00	209.475.017,00	90,15
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	100,00	ST	232.372.000,00	209.475.017,00	90,15
PROGRAM PENCATATAN SIPIL							153.830.500,00	145.886.301,00	94,84
	Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	%	30	30	100,00	ST			
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di	Jumlah Kab/Kota yang menyediakan	Kab/Kota	7	7	100,00	ST	153.830.500,00	145.886.301,00	94,84



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Provinsi	Data Peristiwa Penting Pencatatan Sipil yang valid dan akurat								
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	1	1	100,00	ST	153.830.500,00	145.886.301,00	94,84
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							683.277.868,00	637.509.275,00	93,30
	Persentase Kab/ Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri	%	100	100	100,00	ST			
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Kab/Kota dengan Database Kependudukan yang valid dan akurat	Kab/Kota	7	7	100,00	ST	683.277.868,00	637.509.275,00	93,30
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	100,00	ST	628.412.068,00	593.612.781,00	94,46
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	1	1	100,00	ST	54.865.800,00	43.896.494,00	80,01
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN							35.200.000,00	34.685.000,00	98,54



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman	%	100	100	100,00	ST			
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah jenis buku profil kependudukan yang disusun	Buku	2	2	100,00	ST	35.200.000,00	34.685.000,00	98,54
Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen penyediaan data kependudukan Provinsi	Dokumen	2	2	100,00	ST	35.200.000,00	34.685.000,00	98,54

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Alokasi anggaran untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp36.385.751.613,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp35.296.340.841,00 atau sebesar 97,01%. Jumlah indikator program pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebanyak 5 indikator, dengan pencapaian sebanyak 5 indikator tersebut kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 1.26

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							36.385.751.613,00	35.296.340.841,00	97,01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							11.395.179.600,00	11.129.423.441,00	97,67
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100,00	ST			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	5	5	100,00	ST	145.889.600,00	143.602.318,00	98,43
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100,00	ST	27.384.400,00	26.969.689,00	98,49
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	2	2	100,00	ST	48.124.500,00	46.497.046,00	96,62



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	70.380.700,00	70.135.583,00	99,65
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Terpenuhi Hak Keuangannya	%	100	84,09	84,09	T	8.085.583.300,00	7.857.557.542,00	97,18
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	42	37	88,10	T	7.501.085.300,00	7.363.118.592,00	98,16
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	569.498.000,00	481.799.000,00	84,60
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	15.000.000,00	12.639.950,00	84,27
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya peningkatan profesionalisme aparatur	%	100	100	100,00	ST	26.906.400,00	26.892.000,00	99,95
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	5	100,00	ST	26.906.400,00	26.892.000,00	99,95



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Kantor	%	100	100	100,00	ST	1.331.619.000,00	1.318.533.415	99,02
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	6.500.000,00	6.396.700,00	98,41
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	105.973.600,00	104.057.650,00	98,19
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	29.858.000,00	25.803.000,00	86,42
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8	8	100,00	ST	412.420.400,00	409.900.400,00	99,39
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	7.500.000,00	3.977.000,00	53,03
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	769.367.000,00	768.398.665	99,87
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset yang Diadakan	Paket	1	1	100,00	ST	167.081.200,00	165.999.900,00	99,35
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	10	10	100,00	ST	167.081.200,00	165.999.900,00	99,35



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Lainnya yang Disediakan								
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Penyelenggaraan Pelayanan	Bulan	12	12	100,00	ST	1.444.639.300,00	1.426.689.106	98,76
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	9.501.000,00	9.493.400,00	99,92
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	31.695.000,00	30.578.883,00	96,48
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	53.150.000,00	52.360.000,00	98,51
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	1.350.293.300,00	1.334.256.823	98,81
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kondisi Baik	%	100	100	100,00	ST	193.460.800,00	190.149.160,00	98,29
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	8	8	100,00	ST	153.778.800,00	151.708.160,00	98,65



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya								
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	100,00	ST	39.682.000,00	38.441.000,00	96,87
PROGRAM PENATAAN DESA							80.897.576,00	80.815.367,00	99,90
	Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	%	100	100	100,00	ST			
Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan penatausahaan penetapan pusunan pelebagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Desa	275	275	100,00	ST	80.897.576,00	80.815.367,00	99,90
Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Dokumen	1	1	100,00	ST	80.897.576,00	80.815.367,00	99,90
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA							224.191.930,00	220.873.496,00	98,52
	Persentase desa yang difasilitasi	%	2,91	2,91	100,00	ST			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	kerjasama								
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Desa yang difasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Desa	8	8	100,00	ST	224.191.930,00	220.873.496,00	98,52
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	1	100,00	ST	224.191.930,00	220.873.496,00	98,52
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							740.257.386,00	725.393.424,00	97,99
	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	%	34,74	34,74	100,00	ST			
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa	275	275	100,00	ST	740.257.386,00	725.393.424,00	97,99
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	1	100,00	ST	201.350.000,00	198.826.229,00	98,75
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Orang	275	275	100,00	ST	488.409.986,00	476.948.564,00	97,65



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1	1	100,00	ST	50.497.400,00	49.618.631,00	98,26
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							23.945.225.121,00	23.139.835.113,00	96,64
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	%	52,64	52,64	100,00	ST			
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/ Kota yang mendapat pembinaan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi desa	Kab/Kota	7	7	100,00	ST	23.945.225.121,00	23.139.835.113	96,64



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	100,00	ST	19.771.127.595,00	19.169.473.201	96,96
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga	60	60	100,00	ST	149.250.000,00	140.110.000,00	93,88
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	Unit	1	1	100,00	ST	1.119.000.000,00	1.118.764.200,00	99,98



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1	100,00	ST	408.096.000,00	408.082.606,00	100,00
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dokumen	1	1	100,00	ST	497.752.000,00	492.952.724,00	99,04
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	1	1	100,00	ST	1.999.999.526,00	1.810.452.382,00	90,52

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Alokasi anggaran untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp835.958.800,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp821.524.605,00 atau sebesar 98,27%. Jumlah indikator program pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebanyak 3 indikator, dengan pencapaian sebanyak 1 indikator kategori sangat tinggi, sebanyak 1 indikator kategori tinggi, dan sebanyak 1 indikator kategori sangat rendah. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.27
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							835.958.800,00	821.524.605,00	98,27
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							0	0	0
	Contraceptive Prevalence Rate	%	49,50	44,00	88,89	T			
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							10.000.000,00	9.813.000,00	98,13
	Unmetneed	%	9,25	20,60	44,90	SR			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tersosialisasinya Program KKBPK	Dokumen	1	1	100	ST	10.000.000,00	9.813.000,00	98,13
Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Dokumen	1	1	100	ST	10.000.000,00	9.813.000,00	98,13
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							825.958.800,00	811.711.605,00	98,28
	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	%	59,70	64,81	108,56	ST			
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pelaksanaan fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Dokumen	1	1	100	ST	645.958.800,00	308.335.095,00	47,73
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	100	ST	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan	Dokumen	1	1	100	ST	345.958.800,00	8.335.095,00	97,59



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Pengasuhan 1000 HPK								
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah mitra dan organisasi dan masyarakat yang berpartisipasi dalam pemberdayaan dan pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah	50	150	300	ST	180.000.000,00	174.087.900,00	96,72
Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Laporan	1	1	100	ST	180.000.000,00	174.087.900,00	96,72

15. Perhubungan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Alokasi anggaran untuk Urusan Perhubungan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp83.447.260.359,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp78.277.419.058,97 atau sebesar 93,80%. Jumlah indikator program pada urusan Perhubungan sebanyak 4 indikator, dengan pencapaian sebanyak 4 indikator tersebut pada kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan Perhubungan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.28
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Perhubungan Tahun 2023



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN PERHUBUNGAN							83.447.260.359,00	78.277.419.058,97	93,80
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							20.958.442.940,00	20.021.534.452,68	95,53
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100,00	ST			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST	382.016.486,00	375.854.645,00	98,39
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100,00	ST	382.016.486,00	375.854.645,00	98,39
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST	11.779.272.300,00	11.711.097.242,00	99,43
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Tahun	784	784	100,00	ST	10.808.809.304,00	10.748.607.933,00	99,45
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	829.224.000,00	826.504.000,00	99,67
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	18	18	100,00	ST	141.238.996,00	135.985.309,00	96,28



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST	143.134.000,00	140.100.571,00	97,88
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	143.134.000,00	140.100.571,00	97,88
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	100.085.520,00	97.498.261,00	97,41
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	100.085.520,00	97.498.261,00	97,41
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	%	100	100	100,00	ST	189.713.000,00	172.604.401,00	90,98
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	100,00	ST	150.844.000,00	147.576.501,00	97,83
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	1	100,00	ST	38.869.000,00	25.027.900,00	64,39
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST	1.568.894.231,00	1.455.326.529,00	92,76
Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Paket	1	1	100,00	ST	2.644.020,00	-	0,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100,00	ST	299.543.500,00	251.045.500,00	83,81
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	93.000.000,00	86.000.000,00	92,47
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,00	ST	50.000.000,00	42.000.000,00	84,00
Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	142.200.000,00	106.380.000,00	74,81
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	981.506.711,00	969.901.029,00	98,82
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100,00	ST	1.116.311.796,00	1.091.095.000,00	97,74
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1	100,00	ST	741.600.000,00	733.000.000,00	98,84
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	63.825.000,00	51.500.000,00	80,69
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	100,00	ST	235.886.796,00	231.595.000,00	98,18



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100,00	ST	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100,00	ST	4.319.894.601,00	4.174.182.085,00	96,63
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	26.009.600,00	15.137.500,00	58,20
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	136.040.024,00	95.170.843,00	69,96
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	192.000.000,00	191.594.640,00	99,79
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	3.965.844.977,00	3.872.279.102,00	97,64
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100	100	100,00	ST	1.359.121.006,00	803.775.718,68	59,14
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	15	15	100,00	ST	406.465.200,00	388.560.308,00	95,59



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dibayarkan Pajaknya								
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	6	100,00	ST	126.200.000,00	108.980.000,00	86,35
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	54.705.806,00	44.400.000,00	81,16
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	2	100,00	ST	271.750.000,00	261.835.410,68	96,35
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi	Ha	0,10	0	0	SR	500.000.000,00	-	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							7.403.929.325,00	7.320.814.459,95	
	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	Trayek	6,00	6,00	100,00	ST			
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	%	100	100	100,00	ST	861.751.600,00	857.467.763,33	99,50
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	M2	7.000	7.708	110,11	ST	861.751.600,00	857.467.763,33	99,50
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Manajemen dan	%	100	100	100,00	ST	5.141.445.725,00	5.097.669.364,62	99,15



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rekayasa Lalu Lintas								
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	1	1	100,00	ST	4.987.298.725,00	4.963.141.539,62	99,52
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	1	1	100,00	ST	154.147.000,00	134.527.825,00	87,27
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	%	100	100	100,00	ST	100.000.000,00	92.975.871,00	92,98
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalin yang Terawasi	Laporan	1	1	100,00	ST	100.000.000,00	92.975.871,00	92,98
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	%	100	100	100,00	ST	450.783.500,00	426.780.745,00	94,68
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	1	1	100,00	ST	450.783.500,00	426.780.745,00	94,68
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan	%	100	100	100,00	ST	750.000.000,00	747.570.927,00	99,68
Pengendalian dan	Jumlah Laporan	Laporan	1	1	100,00	ST	750.000.000,00	747.570.927,00	99,68



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi								
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Trayek	6	6	100,00	ST	99.948.500,00	98.349.789,00	98,40
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1	100,00	ST	99.948.500,00	98.349.789,00	98,40
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							55.084.888.094,00	50.935.070.146,34	92,47
	Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga	%	40	40	100,00	ST			
	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan	Lintas	18	21	116,67	ST			
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi	Persentase Layanan Pemenuhan Izin Usaha	%	100	100	100,00	ST	449.015.000,00	446.533.989,90	99,45



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Angkutan Laut bagi Badan Usaha								
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1	100,00	ST	449.015.000,00	446.533.989,90	99,45
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Persentase Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	%	100	100	100,00	ST	107.801.000,00	107.468.000,00	99,69
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1	100,00	ST	107.801.000,00	107.468.000,00	99,69



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Provinsi								
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Persentase Layanan Penerbitan Izin Trayek Angkutan Penyeberangan	%	100	100	100,00	ST	187.811.900,00	185.957.000,00	99,01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1	100,00	ST	187.811.900,00	185.957.000,00	99,01
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Persentase Layanan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait	%	100	100	100,00	ST	100.360.000,00	100.040.000,00	99,68
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang,	Laporan	1	1	100,00	ST	100.360.000,00	100.040.000,00	99,68



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas								
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Pelabuhan terbangun/meningkat kapasitasnya	%	40	40	100,00	ST	54.239.900.194,00	50.095.071.156,44	92,36
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Unit	1	1	100,00	ST	973.274.851,00	951.726.982,00	97,79
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Unit	2	2	100,00	ST	7.266.120.714,00	6.005.288.128,62	82,65
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Unit	5	7	140,00	ST	46.000.504.629,00	43.138.056.045,82	93,78

16. Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi Dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Alokasi anggaran untuk Urusan Komunikasi Dan Informatika pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp53.425.729.227,00 dengan penyerapan



anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp53.037.894.701,00 atau sebesar 99,27%. Jumlah indikator program pada urusan Komunikasi Dan Informatika sebanyak 5 indikator, dengan pencapaian sebanyak 4 indikator kategori sangat tinggi, dan sebanyak 1 indikator kategori tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.29
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Komunikasi Dan Informatika Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							53.425.729.227,00	53.037.894.701,00	99,27
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							12.365.261.760,00	12.188.820.563,00	98,57
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100,00	100,00	ST			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST	180.626.763,00	180.080.436,00	99,70
	Persentase terlaksananya Penganggaran Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST			
	Persentase terlaksananya	%	100	100	100,00	ST			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2	2	100,00	ST	90.008.000,00	89.771.136,00	99,74
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Laporan	5	5	100,00	ST	90.618.763,00	90.309.300,00	99,66
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST	9.253.540.987,00	9.109.663.177,00	98,45
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	14	100,00	ST	8.716.515.487,00	8.573.269.177,00	98,36
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang menerima Administrasi Pelaksanaan tugas	Dokumen	12	12	100,00	ST	537.025.500,00	536.394.000,00	99,88
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST	25.964.000,00	25.874.226,00	99,65
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	3	100,00	ST	25.964.000,00	25.874.226,00	99,65
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum	%	100	100	100,00	ST	454.378.930,00	451.712.011,00	99,41



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	9.736.000,00	9.466.000,00	97,23
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	9.998.700,00	9.956.800,00	99,58
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	29.812.100,00	29.390.500,00	98,59
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	300	300	100,00	ST	62.104.400,00	60.502.900,00	97,42
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	9.664.400,00	9.352.000,00	96,77
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	13.600.000,00	13.590.000,00	99,93
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	319.463.330,00	319.453.811,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100,00	ST	2.353.261.080,00	2.328.703.363,00	98,96
Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	1	1	100,00	ST	42.161.800,00	42.136.000,00	99,94



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100,00	ST	2.311.099.280,00	2.286.567.363,00	98,94
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100,00	ST	97.490.000,00	92.787.350,00	95,18
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	Unit	3	3	100,00	ST	85.730.000,00	81.054.350,00	94,55
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	10	10	100,00	ST	11.760.000,00	11.733.000,00	99,77
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							32.370.494.243,00	32.253.307.232,00	99,64
	Nilai keterbukaan informasi publik	Skala Nilai 0-100	80	96,05	120,06	ST			
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran	%	25	25	100,00	ST			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi								
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	%	100	100	100,00	ST	32.370.494.243,00	32.253.307.232,00	99,64
	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi dan SOP yang telah ditetapkan	%	100	100	100,00	ST			
	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi	%	100	100	100,00	ST			
	Persentase komunitas masyarakat/mitra	%	100	100	100,00	ST			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan pemerintah provinsi								
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	1	1	100,00	ST	137.640.692,00	132.932.523,00	96,58
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	12	100,00	ST	1.464.325.298,00	1.459.666.174,00	99,68
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	1	100,00	ST	3.294.654.408,00	3.284.680.595,00	99,70
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	1	1	100,00	ST	201.135.120,00	197.490.952,00	98,19
Layanan Hubungan Media	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Hubungan Media	Layanan	2	2	100,00	ST	15.038.235.144,00	15.033.768.549,00	99,97
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Hasil Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	1	1	100,00	ST	6.935.704.554,00	6.885.472.519,00	99,28
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Dokumen	1	1	100,00	ST	5.065.860,00	3.773.000,00	74,48
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata	Dokumen	1	1	100,00	ST	884.858.428,00	848.383.920,00	95,88



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Daerah	Kelola Komisi Informasi di Daerah								
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Dokumen	1	1	100,00	ST	765.000.000,00	765.000.000,00	100,00
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	100,00	ST	3.643.874.739,00	3.642.139.000,00	99,95
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							8.689.973.224,00	8.595.766.906,00	98,92
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	25	26,23	104,92	ST			
	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	86,05	86,05	T			
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan	Persentase kegiatan, kelembagaan dan pelayanan publik pada pemerintahan	%	72	82,81	115,01	ST	5.066.276.912,00	5.053.695.775,00	99,75



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	provinsi yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain instansi penyelenggaraan negara								
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	86,05	86,05	T			
	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	70	74,42	106,31	ST			
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen	4	4	100,00	ST	114.256.788,00	112.506.081,00	98,47
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	41	37	90,24	T	4.952.020.124,00	4.941.189.694,00	99,78
Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	100	97,67	97,67	ST	3.623.696.312,00	3.542.071.131,00	97,75



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintahan	%	11,11	0	0,00	SR			
	Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	3	2,1	70,00	S			
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	100,00	ST	89.591.007,00	88.478.852,00	98,76
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	3	2	66,67	S	161.773.723,00	160.204.978,00	99,03
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	Unit	41	42	102,44	ST	2.076.006.564,00	2.049.645.043,00	98,73
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	2	3	150,00	ST	121.458.751,00	119.739.670,00	98,58
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang	Unit	13	15	115,38	ST	1.084.081.323,00	1.035.460.704,00	95,52



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Dikembangkan								
Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	1	1	100,00	ST	39.775.885,00	38.558.833,00	96,94
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	1	100,00	ST	51.009.059,00	49.983.051,00	97,99

17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Alokasi anggaran untuk Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp20.193.348.800,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp19.224.359.349,00 atau sebesar 95,20%. Jumlah indikator program pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 9 indikator, dengan pencapaian sebanyak 9 indikator tersebut pada kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.30
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun



2023

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							20.193.348.800,00	19.224.359.349,00	95,20
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							13.479.835.431,00	13.202.956.620,00	97,95
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	ST			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	dokumen	5	5	100,00	ST	335.115.542,00	333.446.780,00	99,50
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	100,00	ST	122.248.000,00	122.113.417,00	99,89
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	dokumen	1	1	100,00	ST	43.974.867,00	43.820.451,00	99,65
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	1	100,00	ST	57.921.000,00	57.480.510,00	99,24
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1	1	100,00	ST	110.971.675,00	110.032.402,00	99,15
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12	100,00	ST	7.429.554.176,00	7.330.616.427,00	98,67
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	bulan	12	12	100,00	ST	6.894.796.531,00	6.796.241.219,00	98,57



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Tunjangan ASN								
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	bulan	12	12	100,00	ST	454.757.645,00	454.718.280,00	99,99
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	6	6	100,00	ST	80.000.000,00	79.656.928,00	99,57
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	pegawai	72	72	100,00	ST	81.642.600,00	76.985.947,00	94,30
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	set	72	72	100,00	ST	56.642.600,00	52.070.947,00	91,93
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	pegawai	72	72	100,00	ST	25.000.000,00	24.915.000,00	99,66
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	100,00	ST	2.835.386.479,00	2.761.962.140,00	97,41
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	bulan	12	12	100,00	ST	10.000.000,00	8.901.364,00	89,01
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan	12	12	100,00	ST	72.246.700,00	71.687.616,00	99,23
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	bulan	12	12	100,00	ST	15.210.000,00	15.066.546,00	99,06
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	bulan	12	12	100,00	ST	119.364.095,00	117.303.519,00	98,27
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	12	100,00	ST	563.000.000,00	562.394.709,00	99,89



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	yang Disediakan								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	laporan	1	1	100,00	ST	498.213.689,00	498.169.735,00	99,99
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	laporan	1	1	100,00	ST	1.557.351.995,00	1.488.438.651,00	95,57
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang	bulan	12	12	100,00	ST	38.950.000,00	38.949.914,00	100,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	bulan	12	12	100,00	ST	38.950.000,00	38.949.914,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya air, listrik, peralatan, perlengkapan dan pelayanan umum kantor Dinas Koperasi UKM Prov. Kepri	bulan	12	12	100,00	ST	2.587.641.634,00	2.497.216.125,00	96,51
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	100,00	ST	25.000.000,00	24.750.000,00	99,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12	12	100,00	ST	17.888.960,00	17.842.000,00	99,74
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan	12	12	100,00	ST	48.000.000,00	47.939.992,00	99,87
Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	bulan	12	12	100,00	ST	2.496.752.674,00	2.406.684.133,00	96,39



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa pemeliharaan barang milik daerah	bulan	12	12	100,00	ST	171.545.000,00	163.895.887,00	95,54
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	bulan	12	12	100,00	ST	146.775.000,00	139.091.887,00	94,77
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	bulan	12	12	100,00	ST	24.770.000,00	24.687.400,00	99,67
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM									
	Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	16,34	15,33	93,81	ST	309.166.661,00	301.781.680,00	97,61
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP Yang mendapatkan fasilitas penerbitan izin usaha	Unit usaha	14	60	428,57	ST	222.657.733,00	218.129.626,00	97,97
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Yang mendapatkan fasilitas penerbitan izin usaha	unit usaha	30	60	200,00	ST	222.657.733,00	218.129.626,00	97,97



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP Yang mendapatkan fasilitasi penerbitan izin usaha	unit usaha	1	1	100,00	ST	86.508.928,00	83.652.054,00	96,70
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah sistem pelayanan perizinan yang tersedia	Sistem/laporan	1	1	100,00	ST	86.508.928,00	83.652.054,00	96,70
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI									
	Persentase Koperasi yang diawasi	%	3,53	6,86	194,33	ST	99.597.500,00	98.651.899,00	99,05
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diawasi	Unit usaha	25	26	104	ST	99.597.500,00	98.651.899,00	99,05
Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan	unit usaha	25	26	104	ST	99.597.500,00	98.651.899,00	99,05



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Perundang Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel								
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI									
	Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya	%	7,87	6,78	86,12	T	40.000.000,00	38.829.600,00	97,07%
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provins	Jumlah Koperasi yang di periksa dan diawasi	Unit usaha	8	24	300	ST	40.000.000,00	38.829.600,00	97,07
Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	jumlah koperasi yang diberikan penilaian kesehatan	Unit usaha	8	24	300	ST	40.000.000,00	38.829.600,00	97,07
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							1.374.530.000,00	1.245.876.679,00	90,64
	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	%	18,08	17,7	94,16	ST			
	Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	%	0,64	1,28	200,78	ST			
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pelatihan		107	132	123,36	ST	340.000.000,00	314.259.392,00	92,43



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
(satu) Daerah Provinsi									
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	107	132	123,36	ST	340.000.000,00	314.259.392,00	92,43
Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah UMKM yang Mengikuti Pelatihan	orang	293	360	122,87	ST	1.034.530.000,00	931.617.287,00	90,05
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan kewirausahaan	Orang	293	360	122,87	ST	1.034.530.000,00	931.617.287,00	90,05
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	%	33,18	46,43	139,93	ST	436.912.808,00	401.748.758,00	91,95
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Mendapat dukungan Pemberdayaan	Init usaha	227	364	160,35	ST	436.912.808,00	401.748.758,00	91,95
Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit Usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	unit usaha	27	13	48,1	SR	314.999.808,00	281.722.600,00	89,44
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam	keluarga	200	351	176	ST	121.913.000,00	120.026.158,00	98,45



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya								
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio Wirausaha Baru	%	28,52	32,73	114,76	ST	2.745.636.400,00	2.741.607.058,00	99,85
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Unit usaha	450	1.522	338,22	ST	2.745.636.400,00	2.741.607.058,00	99,85
Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit usaha UMKM yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	wirausaha	450	1.522	338,2	ST	2.745.636.400,00	2.741.607.058,00	99,85
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan	%	29,36	26,82	91,34	ST	1.707.670.000,00	1.192.907.055,00	69,86
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi	Jumlah UMKM yang dikembangkan	Unit usaha	5500	3405	61,91	R	1.707.670.000,00	1.211.533.618,00	70,95



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah									
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	unit usaha	5220	3027	57,99	R	1.399.839.000,00	896.610.052,00	64,05
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	unit usaha	280	378	135	ST	307.831.000,00	296.297.003,00	96,25

18. Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Alokasi anggaran untuk Urusan Penanaman Modal pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 16.981.769.538,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp 16.643.914.898,00 atau sebesar 98,01%. Jumlah indikator program pada urusan Penanaman Modal sebanyak 8 indikator, dengan pencapaian sebanyak 7 indikator kategori sangat tinggi, dan sebanyak 1 indikator kategori sangat rendah yaitu Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha. Selengkapny pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan Penanaman Modal tahun 2023 disajikan



pada tabel berikut ini:

Tabel 1.31
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Penanaman Modal Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL							16.981.769.538,00	16.643.914.898,00	98,01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100,00	ST	14.103.359.516,00	13.902.452.992,00	98,58
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	%	100	100	100,00	ST	443.611.437,00	441.705.131,00	99,57
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	276.197.700,00	275.553.587,00	99,77
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	55.832.237,00	55.195.080,00	98,86
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	111.581.500,00	110.956.464,00	99,44
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan	%	100	100	100,00	ST	9.776.498.383,00	9.617.896.969,00	98,38



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	42	42	100,00	ST	9.278.672.583,00	9.138.080.569,00	98,48
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	486.230.000,00	468.338.000,00	96,32
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	11.595.800,00	11.478.400,00	98,99
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah teradministrasi dengan baik	%	100	100	100,00	ST	33.347.248,00	33.284.932,00	99,81
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	33.347.248,00	33.284.932,00	99,81
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin Pegawai	%	100	100	100,00	ST	277.170.700,00	273.546.295,00	98,69
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100,00	ST	100.000.000,00	99.988.000,00	99,99
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai	50	50	100,00	ST	177.170.700,00	173.558.295,00	97,96
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST	722.480.886,00	714.154.018,00	98,85
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	1	1	100,00	ST	9.000.000,00	8.779.445,00	97,55



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Bangunan Kantor yang Disediakan								
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	72.218.800,00	71.814.800,00	99,44
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	14.860.000,00	14.419.400,00	97,03
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	100,00	ST	21.393.200,00	21.360.000,00	99,84
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	21.753.333,00	21.685.000,00	99,69
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	583.255.553,00	576.095.373,00	98,77
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	100	100	100,00	ST	1.101.696.365,00	1.090.417.100,00	98,98
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	4	100,00	ST	600.210.724,00	595.190.000,00	99,16
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	100,00	ST	501.485.641,00	495.227.100,00	98,75
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100,00	ST	1.566.210.801,00	1.549.459.059,00	98,93



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	133.058.392,00	124.075.028,00	93,25
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	201.216.025,00	198.616.618,00	98,71
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	79.140.000,00	79.111.798,00	99,96
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	1.152.796.384,00	1.147.655.615,00	99,55
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	%	100	100	100,00	ST	182.343.696,00	181.989.488,00	99,81
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	13	13	100,00	ST	136.920.448,00	136.878.300,00	99,97
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	7	100,00	ST	12.076.000,00	11.820.000,00	97,88
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	33.347.248,00	33.291.188,00	99,83
PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Perusahaan yang mendapatkan	%	95	0	0	SR	391.152.344,00	357.487.761,00	99,83



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
IKLIM PENANAMAN MODAL	Insentif dan kemudahan Berusaha								
	Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi	%	100	100	100,00	ST			
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Regulasi pemberian Insentif dan kemudahan berusaha	Dokumen	1	0	0	SR	238.152.344,00	215.910.850,00	99,83
	Jumlah perusahaan yang mendapatkan insentif dan kemudahan berusaha	Perusahaan	150	0	0	SR			
Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	0	0	SR	238.152.344,00	215.910.850,00	99,83
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi	Dokumen	1	1	100,00	ST	153.000.000,00	141.576.911,00	99,83
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	Dokumen	1	1	100,00	ST	153.000.000,00	141.576.911,00	92,53
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	%	8	8	100,38	ST	503.471.000,00	495.215.254,00	98,36
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Penambahan Investor Dalam Negeri dan Luar Negeri	Investor	6500	6483	99,74	ST	503.471.000,00	495.215.254,00	98,36
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen	1	2	200,00	ST	503.471.000,00	495.215.254,00	98,36
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	%	90	98	108,89	ST	931.975.050,00	925.691.741,00	99,97
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas	Indeks	84,2	85,58	101,64	ST			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan								
Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perizinan dan nonperizinan yang dilayani dengan SOP	%	90	98	108,89	ST	160.602.550,00	159.112.708,00	99,07
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	20	21	105,00	ST	81.184.850,00	80.766.298,00	99,48
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	25	13	52,00	R	79.417.700,00	78.346.410,00	98,65
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase jumlah perizinan dan nonperizinan yang dilayani dengan SOP	%	90	98	108,89	ST	771.372.500,00	766.579.033,00	99,38
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Pelaku Usaha	120	2063	1.719,17	ST	94.601.000,00	92.645.400,00	97,93



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi								
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	Kegiatan Usaha	30	27	90,00	T	63.800.000,00	63.781.800,00	99,97
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	Orang	20	45	225,00	ST	452.000.000,00	451.037.250,00	99,79
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	Kegiatan Usaha	30	40	133,33	ST	160.971.500,00	159.114.583,00	98,85
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	%	100	100	100,00	ST	962.296.528,00	878.675.988,00	91,31
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	%	100	100	100,00	ST	962.296.528,00	881.993.388,00	91,66
Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Pelaku Usaha yang	Pelaku	382	395	103,40	ST	604.796.528,00	563.202.000,00	93,12



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Usaha							
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan usaha	46	95	206,52	ST	357.500.000,00	318.791.388,00	89,17
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data/informasi perkempangan investasi di Kepulauan Riau	%	100	100	100,00	ST	89.515.100,00	84.391.162,00	94,28
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Data/Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Aplikasi Sistem Informasi Terkelola Dengan Baik	%	100	100	100,00	ST	89.515.100,00	84.391.162,00	94,28
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	1	100,00	ST	89.515.100,00	84.391.162,00	94,28

19. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Alokasi anggaran untuk Urusan Kepemudaan Dan Olahraga pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 51.175.805.314,00 dengan penyerapan anggaran



pada akhir tahun 2023 sebesar Rp 49.678.096.155,00 atau sebesar 97,07. Jumlah indikator program pada urusan Kepemudaan Dan Olahraga sebanyak 8 indikator, dengan pencapaian sebanyak 8 indikator tersebut kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.32
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							51.175.805.314,00	49.678.096.155,00	97,07
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100,00	ST	15.609.945.004,00	14.617.200.454,00	93,64
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	210.822.700,00	168.323.961,00	79,84
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	1	1	100,00	ST	69.539.600,00	58.320.175,00	83,87



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	141.283.100,00	110.003.786,00	77,86
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	9.311.242.343,00	8.561.430.971,00	91,95
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	42	42	100,00	ST	8.570.679.139,00	7.964.432.971,00	92,93
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Dokumen	1	1	100,00	ST	716.708.204,00	580.606.000,00	81,01
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Laporan	1	1	100,00	ST	23.855.000,00	16.392.000,00	68,72
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	299.133.432,00	264.264.276,00	88,34
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	299.133.432,00	264.264.276,00	88,34
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan	1	1	100,00	ST	1.996.170.802,00	1.860.633.880,00	93,21
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	100,00	ST	407.853.742,00	382.602.000,00	93,81



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	100,00	ST	46.173.700,00	43.331.000,00	93,84
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	15	100,00	ST	88.197.800,00	83.872.577,00	95,10
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	100,00	ST	390.973.800,00	385.174.200,00	98,52
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,00	ST	9.886.800,00	9.278.500,00	93,85
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1	1	100,00	ST	16.567.622,00	13.307.200,00	80,32
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	100,00	ST	1.036.517.338,00	943.068.403,00	90,98
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	4	4	100,00	ST	1.245.773.924,00	1.237.679.430,00	99,35
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	195.399.015,00	194.223.500,00	99,40
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1	1	100,00	ST	99.726.743,00	98.901.000,00	99,17
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	2	100,00	ST	950.648.166,00	944.554.930,00	99,36
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa	laporan	48	48	100,00	ST	2.123.259.891,00	2.107.251.686,00	99,25



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	100,00	ST	337.370.480,00	331.149.337,00	98,16
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	100,00	ST	203.967.441,00	201.242.114,00	98,66
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	laporan	12	12	100,00	ST	46.500.000,00	43.460.000,00	93,46
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	100,00	ST	1.535.421.970,00	1.531.400.235,00	99,74
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	11	11	100,00	ST	423.541.912,00	418.646.320,00	98,84
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	10	10	100,00	ST	323.541.912,00	321.443.320,00	99,35
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	1	1	100,00	ST	100.000.000,00	97.203.000,00	97,20
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,60	0,60	100,00	ST	2.934.059.000,00	2.883.250.590,00	98,27
	Tingkat Partisipasi	%	5,05	6,31	124,95	ST			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan								
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemuda dalam Peningkatan Kegiatan Ekonomi Mandiri dan organisasi	%	137	137	100,00	ST	2.934.059.000,00	2.883.250.590,00	98,27
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	orang	50	50	100,00	ST	522.770.000,00	506.650.700,00	96,92
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	orang	20	20	100,00	ST	95.608.500,00	85.644.000,00	89,58
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	orang	14	14	100,00	ST	745.667.000,00	745.296.700,00	99,95
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang Terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	orang	38	38	100,00	ST	1.274.592.000,00	1.264.654.040,00	99,22
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Stategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	100,00	ST	96.629.000,00	85.918.700,00	88,92



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	orang	14	14	100,00	ST	198.792.500,00	195.086.450,00	98,14
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	5	17	340,00	ST	31.298.848.798,00	30.845.604.570,00	98,55
	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	0,73	0,73	100,00	ST			
	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	21,15	21,15	100,00	ST			
	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	40,98	40,98	100,00	ST			
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan atlet Muda yang menjadi kewenangan daerah provinsi					SR	5.393.894.093,00	5.221.281.317,00	96,8
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	unit	3	3	100,00	ST	2.283.740.669,00	2.163.627.035,00	94,74
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan	Dokumen	1	1	100,00	ST	726.278.424,00	705.371.994,00	97,12



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Menengah dan Khusus	Menengah dan Khusus								
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	2	2	100,00	ST	2.383.875.000,00	2.352.282.288,00	98,67
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah atlet yang memperoleh medali	Orang	7	17	243,00		7.379.267.335,00	7.112.379.763,00	96,38
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	100,00	ST	6.171.063.500,00	5.904.175.928,00	95,68
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	97	97	100,00	ST	1.208.203.835,00	1.208.203.835,00	100,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase	100	100	100,00		683.687.370,00	676.719.890,00	98,98
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Pelatihan Daerah yang Terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pelatda	9	9	100,00	ST	444.169.770,00	440.303.890,00	99,13
Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	Orang	5	5	100,00	ST	239.517.600,00	236.416.000,00	98,71
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Persentase	100	100	100,00		17.842.000.000,00	17.835.223.600,00	99,96
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi	Dokumen	1	1	100,00	ST	17.842.000.000,00	17.835.223.600,00	99,96



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Keolahragaan								
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	%	9,63	9,63	100,00	ST	1.332.952.512,00	1.332.040.541,00	99,93
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Anggota Pramuka dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Organisasi	1	1	100,00	ST	1.332.952.512,00	1.332.040.541,00	99,93
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	1	1	100,00	ST	1.332.952.512,00	1.332.040.541,00	99,93

20. Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Alokasi anggaran untuk Urusan Statistik pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp120.929.678,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp119.231.343,00 atau sebesar 98,60%. Jumlah indikator program pada urusan Statistik sebanyak 2 indikator, dengan pencapaian sebanyak 2 indikator kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan Statistik tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.33
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Statistik Tahun 2023



Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN STATISTIK							120.929.678,00	119.231.343,00	98,60
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							120.929.678,00	119.231.343,00	98,60
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100,00	ST			
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100,00	ST			
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS	%	100	100	100,00	ST	120.929.678,00	119.231.343,00	98,60
	Persentase survey statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS	%	100	100	100,00	ST			
	Persentase kelengkapan metadata indikator statistik sektoral	%	100	100	100,00	ST			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	1	1	100,00	ST	120.929.678	119.231.343	98,60

21. Persandian



Urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Alokasi anggaran untuk Urusan Persandian pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp320.490.558,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp314.644.408,00 atau sebesar 98,18%. Jumlah indikator program pada urusan persandian sebanyak 1 indikator, dengan pencapaian sebanyak 1 indikator kategori tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan wajib persandian tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.34
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Persandian Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Status	Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target		Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN PERSANDIAN							320.490.558,00	314.644.408,00	98,18
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							320.490.558,00	314.644.408,00	98,18
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indeks KAMI	70,33	60,31	85,75	Tinggi			
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi dan/atau aplikasi persandian	%	94,74	100	105,55	Sangat Tinggi	248.736.364,00	246.490.308,00	99,10



Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Status	Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target		Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	%	80	100	125,00	Sangat Tinggi			
	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi			
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	41	43	104,88	Sangat Tinggi	248.736.364,00	246.490.308,00	99,10
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase titik yang diamankan berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	71.754.194,00	68.154.100,00	94,98
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	41	43	104,88	Sangat Tinggi	71.754.194,00	68.154.100,00	94,98

22. Kebudayaan

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan. Alokasi anggaran untuk Urusan Kebudayaan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp18.889.313.301,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp17.942.249.073,00 atau sebesar 94,99%. Jumlah indikator program pada urusan Kebudayaan sebanyak 8 indikator, dengan



pencapaian sebanyak 7 indikator kategori sangat tinggi, sebanyak 1 indikator kategori tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan Kebudayaan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.35
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Kebudayaan Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN KEBUDAYAAN							18.889.313.301,00	17.942.249.073,00	94,99
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							11.399.801.151,00	11.299.195.785,00	99,12
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100,00	100,00	100,00	ST			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	%	100,00	100,00	100,00	ST	336.752.983,00	336.397.712,00	99,89
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	242.470.048,00	242.182.816,00	99,88



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	94.282.935,00	94.214.896,00	99,93
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100,00	ST	7.748.548.953,00	7.718.344.483,00	99,61
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	35	35	100,00	ST	7.303.060.953,00	7.278.586.483,00	99,66
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12	100,00	ST	445.488.000,00	439.758.000,00	98,71
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST	38.042.000,00	37.692.400,00	99,08
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	stel	75	75	100,00	ST	34.542.000,00	34.192.400,00	98,99
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	10	1	10,00	SR	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST	791.573.261,00	788.390.724,00	99,60
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100,00	ST	42.025.500,00	41.926.000,00	99,76
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	285.940.744,00	284.797.200,00	99,60
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	51.795.400,00	50.992.400,00	98,45



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100,00	ST	29.920.000,00	29.400.000,00	98,26
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00	ST	333.891.617,00	333.275.124,00	99,82
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	100,00	ST	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	%	100	100	100,00	ST	208.747.600,00	207.957.985,00	99,62
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan mesin yang Disediakan	Unit	1	2	200,00	ST	208.747.600,00	207.957.985,00	99,62
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100,00	ST	1.865.942.262,00	1.802.366.855,00	96,59
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100,00	ST	132.948.192,00	132.921.984,00	99,98
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	ST	609.633.330,00	549.133.516,00	90,08
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	28.000.000,00	27.993.000,00	99,98
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Laporan	12	12	100,00	ST	1.095.360.740,00	1.092.318.355,00	99,72



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Umum Kantor yang Disediakan								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100	100	100,00	ST	410.194.092,00	408.045.626,00	99,48
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9	100,00	ST	74.720.000,00	72.887.950,00	97,55
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	7	70,00	S	23.950.000,00	23.801.500,00	99,38
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	132.959.092,00	132.895.776,00	99,95
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	178.565.000,00	178.460.400,00	99,94
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							2.996.298.648,00	2.644.030.659,00	88,24
	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	17,94	18,43	100,00	ST			
	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung	%	1,55	1,79	100,00	ST			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	pertunjukkan seni								
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	%	54,99	56,39	100,00	ST			
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	19,62	23,45	119,52	ST	1.193.219.048,00	1.192.906.951,00	99,97
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Objek	2	5	100	ST	193.219.048,00	192.906.951,00	99,84
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	51	1016	100	ST	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni dan usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	%	3,98	4,95	q124,37	ST	1.803.079.600,00	1.451.123.708,00	80,48
Pelindungan,	Jumlah Objek Pemajuan	objek	457	12132	100	ST	1.503.335.000,00	1.160.475.608,00	77,19



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan								
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	5	3	60	S	299.744.600,00	290.648.100,00	96,97
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL							2.764.605.352,00	2.346.728.046,00	84,88
	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	%	28,16	28,19	100,10	ST			
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan	Orang	775	1289	100	ST	2.764.605.352,00	2.346.728.046,00	84,88
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	364	388	107	ST	121.584.976,00	110.231.510,00	90,66
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti	Sertifikat	8	7	88	T	49.000.000,00	47.600.000,00	97,14



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Proses Standarisasi								
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	10	7	70	T	2.594.020.376,00	2.188.896.536,00	84,38
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH							414.549.196,00	393.855.398,00	95,01
	Persentase SDM sejarawan yang Berkompetensi	%	40,00	40,00	100,00	ST			
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	SDM Sejarawawan yang terlibat	Orang	15	5	33,33	SR	414.549.196,00	393.855.398,00	95,01
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	orang	11	0	0	SR	33.237.048,00	30.760.317,00	92,55
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	Dokumen	1	1	100,00	ST	148.361.300,00	148.126.042,00	99,84
Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	Dokumen	4	5	100,00	ST	232.950.848,00	214.969.039,00	92,28
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							805.078.156,00	797.159.794,00	99,02
	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	37,21%	33,69%	90,54	T			
Penetapan Cagar Budaya Peringkat	Persentase benda, bangunan, struktur, situs,	%	5,46	3,18	58,24	SR	123.317.618,00	123.202.392,00	99,91



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Provinsi	dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi								
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	9	7	77,78	T	123.317.618,00	123.202.392,00	99,91
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Warisan Budaya Tangible yang lestari	Objek	6	12	100	ST	681.760.538,00	673.957.402,00	98,86
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	Objek	2	12	100	ST	310.910.610,00	303.117.406,00	97,49
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang/Bulan	20	16	80,00	T	370.849.928,00	370.839.996,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN							508.980.798,00	461.279.391,00	90,63
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	%	13,48	14,36	100,00	ST			
Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase museum yang dikelola	%	100,00	100,00	100,00	ST	508.980.798,00	461.279.391,00	90,63
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	unit	1	1	100,00	ST	73.203.398,00	66.504.938,00	90,85
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	unit	1	1	100,00	ST	435.777.400,00	394.774.453,00	90,59

23. Perpustakaan



Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Alokasi anggaran untuk Urusan Perpustakaan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp19.599.346.173,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp19.188.220.430,00 atau sebesar 97,90%. Jumlah indikator program pada urusan Perpustakaan sebanyak 3 indikator, dengan pencapaian sebanyak 2 indikator kategori sangat tinggi, sebanyak 1 indikator kategori sedang. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan wajib Perpustakaan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.36
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Perpustakaan Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN PERPUSTAKAAN							19.599.346.173,00	19.188.220.430,00	97,90
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							17.868.982.615,00	17.612.766.766,00	98,57
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100,00	100,00	100,00	ST			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	1	100,00	ST	80.309.540,00	78.496.950,00	97,74
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	Laporan	1	1	100,00	ST	80.309.540,00	78.496.950,00	97,74



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai serata Administrasi melaksanakan Tugas	%	100	100	100,00	ST	11.773.258.317,00	11.644.396.935,00	98,91
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/ Bulan	63	63	100,00	ST	11.333.958.317,00	11.247.442.935,00	99,24
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	15	15	100,00	ST	439.300.000,00	396.954.000,00	90,36
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST	28.895.900,00	28.344.500,00	98,09
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	5	100,00	ST	10.000.000,00	9.966.200,00	99,66
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	100,00	ST	11.395.900,00	11.378.300,00	99,85
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	1	100,00	ST	7.500.000,00	7.000.000,00	93,33
Administrasi Umum	Persentase	%	100	100	100,00	ST	1.025.999.243,00	1.009.480.824,00	98,39



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100,00	ST	19.636.400,00	19.387.770,00	98,73
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	100,00	ST	437.743.990,00	431.428.560,00	98,56
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	275.757.000,00	270.705.020,00	98,17
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	31.510.553,00	30.155.746,00	95,70
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	10	100,00	ST	13.060.900,00	12.972.000,00	99,32
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	30	100,00	ST	248.290.400,00	244.831.728,00	98,61
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya Air, Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor	%	100	100	100,00	ST	4.640.983.340,00	4.544.062.912,00	97,91
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Laporan	12	12	100,00	ST	4.253.500,00	4.250.000,00	99,92



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Menyurat								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	ST	882.329.840,00	876.396.480,00	99,33
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	3.754.400.000,00	3.663.416.432,00	97,58
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	%	100	100	100,00	ST	319.536.275,00	307.984.645,00	96,38
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	10	10	100,00	ST	56.727.250,00	46.198.750,00	81,44
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100,00	ST	164.099.025,00	163.933.695,00	99,90
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	30	30	100,00	ST	98.710.000,00	97.852.200,00	99,13
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							1.412.385.060,00	1.285.986.771,00	91,05
	Nilai tingkat	Nilai	66,47	65,80	98,99	ST			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	kegemaran membaca masyarakat								
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	1. Persentase perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan	%	1,29	1,2169	94,33	ST	1.047.687.157,00	961.264.857,00	91,75
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan	1	1	100,00	ST	180.933.166,00	172.101.866,00	95,12
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Perpustakaan	1	1	100,00	ST	90.421.319,00	88.076.592,00	97,41
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Orang	100	100	100,00	ST	205.139.130,00	197.823.009,00	96,43
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan	1	1	100,00	ST	270.950.000,00	243.228.530,00	89,77
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang	Eksemplar	30	30	100,00	ST	300.243.542,00	260.034.860,00	86,61



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pustaka	Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan								
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat gemar membaca	orang	250	325	130,00	ST	364.697.903,00	324.721.914,00	89,04
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Lokus	3	3	100,00	ST	330.325.138,00	297.240.773,00	89,98
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Perpustakaan	1	1	100,00	ST	34.372.765,00	27.481.141,00	79,95
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO							317.978.498,00	289.466.893,00	91,03
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	15,20	13,33	87,70	T			
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Naskah	5	5	100,00	ST	317.978.498,00	289.466.893,00	91,03
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam	Orang	5	5	100,00	ST	36.700.620,00	22.163.700,00	60,39



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno								
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Eksemplar	3	3	100,00	ST	281.277.878,00	267.303.193,00	95,03

24. Kearsipan

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Alokasi anggaran untuk Urusan Kearsipan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp451.603.800,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp412.879.249,00 atau sebesar (91,60%). Jumlah indikator program pada urusan Kearsipan sebanyak 2 indikator, dengan pencapaian sebanyak 2 indikator kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan wajib Kearsipan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.37
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Kearsipan Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023	Capaian Anggaran Tahun 2023
---	---	--------	--	-----------------------------



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN KEARSIPAN							451.603.800,00	412.879.249,00	91,43
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							434.013.500,00	397.554.519,00	91,60
	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	17,24	18,55	107,60	ST			
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Presentase Arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	4,07	2,70	66,34		325.645.600,00	298.100.743,00	91,54
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	Berkas	5	5	100		216.504.500,00	198.396.006,00	91,64
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	5	5	100		18.696.500,00	17.622.342,00	94,25
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1	100,00		90.444.600,00	82.082.395,00	90,75
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	40,40	47,00	116,34		43.242.400,00	41.658.245,00	96,34
Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi	Arsip	10	10	100		43.242.400,00	41.658.245,00	96,34
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	1. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	0,12	0,11	91,67		65.125.500,00	57.795.531,00	88,74
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pengguna	8	8	100,00		23.320.500,00	23.267.000,00	99,77
Pemberdayaan Kapasitas	Jumlah Laporan Hasil	Laporan	1	1	100,00		41.805.000,00	34.528.531,00	82,59



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi								
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP							17.590.300,00	15.324.730,00	87,12
	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Skor	60,83	63,84	104,95	ST			
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	Daftar	1	1	118,00		17.590.300,00	15.324.730,00	87,12
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Daftar	1	1	100		17.590.300,00	15.324.730,00	87,12

25. Kelautan dan Perikanan



Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Alokasi anggaran untuk Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp64.594.409.374,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp62.981.677.023,05 atau sebesar 97,50%. Jumlah indikator program pada urusan Kelautan dan Perikanan sebanyak 8 indikator, dengan pencapaian sebanyak 6 indikator kategori sangat tinggi dan sebanyak 2 indikator tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan wajib Kelautan dan Perikanan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.38
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan wajib Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN							64.594.409.374,00	62.981.677.023,05	97,50
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							34.127.729.719,00	33.210.484.324,00	97,31
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100,00	100,00	100%	ST			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	3	3	100%	ST	592.353.183,00	587.355.943,00	99,16
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	1	1	100%	ST	474.132.485,00	470.449.971,00	99,22



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Daerah	Perangkat Daerah								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100%	ST	118.220.698,00	116.905.972,00	98,89
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Pegawai serta Administrasi melaksanakan Tugas	Orang	98	98	100%	ST	22.725.169.423,00	22.076.376.805,00	97,15
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	98	98	100%	ST	21.519.962.423,00	20.909.334.305,00	97,16
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100%	ST	1.205.207.000,00	1.167.042.500,00	96,83
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pegawai	Orang	12	12	100%	ST	168.751.960,00	166.408.929,00	98,61
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	12	100%	ST	168.751.960,00	166.408.929,00	98,61
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan	Unit/barang	30	30	100%	ST	1.584.797.633,00	1.531.677.695,00	96,65



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Perlengkapan Kantor dan Logistik								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	100%	ST	9.500.000,00	9.353.912,00	98,46
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	11	11	100%	ST	113.416.976,00	108.089.059,00	95,30
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100%	ST	330.817.086,00	307.667.971,00	93,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100%	ST	28.485.924,00	24.765.247,00	86,94
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100%	ST	38.841.493,00	31.666.500,00	81,53
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100%	ST	1.063.736.154,00	1.050.135.006,00	98,72
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan Mesin Kantor	Unit/Pakrt/ Barang	5	5	100%	ST	124.346.501,00	122.782.400,00	98,74
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	100%	ST	34.541.111,00	33.100.000,00	95,83
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Paket	1	1	100%	ST	79.029.390,00	78.964.000,00	99,92



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	yang Disediakan								
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	100%	ST	10.776.000,00	10.718.400,00	99,47
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya Air,Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	100%	ST	8.146.101.102,00	7.962.575.147,00	97,75
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100%	ST	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100%	ST	1.088.470.301,00	995.307.569,00	91,44
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100%	ST	794.311.432,00	772.314.950,00	97,23
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100%	ST	6.262.319.369,00	6.193.952.628,00	98,91
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin, Gedung dan Bangunan	Unit	34	34	100%	ST	786.209.917,00	763.307.405,00	97,09



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	17	17	100%	ST	488.028.507,00	470.688.432,00	96,45
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	100%	ST	231.769.950,00	229.448.613,00	99,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15	100%	ST	66.411.460,00	63.170.360,00	95,12
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL							2.540.883.151,00	2.318.034.046,00	91,23
	Kawasan Konservasi yang Dikelola	Kawasan	4	4	100%	ST			
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah dokumen peraturan pengelolaan pemanfaatan ruang laut	Dokumen	1	1	100%	ST	1.932.492.554,00	1.752.781.410,00	90,70
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-	Ha	1.211.362,95	1.211.362,95	100%	ST	1.932.492.554,00	1.752.781.410,00	90,70



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Pulau Kecil yang Terkelola								
Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Rekomendasi	100	218	218%	ST	196.126.092,00	178.960.009,00	91,25
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat pesisir yang memperoleh pembinaan	Orang	170	170	100%	ST	412.264.505,00	386.292.627,00	93,70
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	170	170	100%	ST	412.264.505,00	386.292.627,00	93,70
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							16.630.557.233,00	16.453.730.925,35	98,94
	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	307.690,60	317.042,566	103,04%	ST			
	Nilai Tukar Nelayan/NTN (%)	%	115,50	104,14	90%	T			
Pengelolaan Penangkapan Ikan di	Jumlah Bantuan Alat Tangkap dan	Pcs/Unit/	2810	2810	100%	ST	15.837.985.349,00	15.689.212.468,35	99,06



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Alat bantu Penangkap Ikan								
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Dokumen	1	1	100%	ST	33.521.900,00	29.717.791,00	88,65
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Unit	1	1	100%	ST	3.729.797.095,00	3.705.234.100,00	99,34
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Unit	18.684	18.684	100%	ST	12.074.666.354,00	11.954.260.577,35	99,00
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah rekomendasi Perizinan yang dikeluarkan	Dokumen	350	752	215%	ST	139.908.841,00	126.376.403,00	90,33
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomendas i	350	752	215%	ST	139.908.841,00	126.376.403,00	90,33
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Pelabuhan perikanan yang terkelola dan beroperasi	Unit	1	1	100%	ST	233.812.487,00	227.107.766,00	97,13
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan	Unit	3	3	100%	ST	146.545.880,00	140.059.846,00	95,57



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Perikanan	Perikanan yang Tersedia								
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	55	55	100%	ST	87.266.607,00	87.047.920,00	99,75
Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Kapal yang diterbitkan	Dokumen	450	866	192%	ST	418.850.556,00	411.034.288,00	98,13
Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendas i	450	866	192%	ST	418.850.556,00	411.034.288,00	98,13
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							6.698.101.685,00	6.480.031.537,70	96,74
	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	28473,50	31.250,00	109,75%	ST			
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi (%)	%	110,65	96,08	86,83%	T			
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Dokumen Persyaratan dan Prosedur	Dokumen	2	2	100%	ST	3.603.339,00	3.143.700,00	87,24



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan								
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi	2	2	100%	ST	3.603.339,00	3.143.700,00	87,24
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Perbenihan, Pembesaran dan unit usaha baru perikanan budidaya yang tersedia	Unit	125	125	100%	ST	6.694.498.346,00	6.476.887.837,70	96,75
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%	ST	3.570.686,00	3.556.300,00	99,60
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	20	20	100%	ST	3.373.181.858,00	3.264.004.382,70	96,76
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	105	105	100%	ST	1.281.455.712,00	1.205.042.755,00	94,04
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Dokumen	1	2	200%	ST	103.768.844,00	101.820.430,00	98,12



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi	Ha	5	5	100%	ST	1.932.521.246,00	1.902.463.970,00	98,44
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							3.903.425.684,00	3.848.130.796,00	98,58
	Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	90	100	111%	ST			
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Cakupan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut 12 Mil	%	30	30	100%	ST	3.903.425.684,00	3.848.130.796,00	98,58
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	5	5	100%	ST	3.851.238.426,00	3.801.922.596,00	98,72
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan	Dokumen	2	2	100%	ST	42.287.258,00	36.308.200,00	85,86



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Tangkap sampai dengan 12 Mil								
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	1	100%	ST	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							693.711.902,00	671.265.394,00	96,76
	Peningkatan Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	1337,88	18.099,33	1353%	ST			
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan perikanan (SKP) yang diterbitkan	GMP	45	45	100%	ST	174.482.887,00	163.797.942,00	93,88
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendas i	5	5	100%	ST	113.750.286,00	110.425.885,00	97,08
Penyediaan Data dan Informasi Usaha	Jumlah Data dan Informasi Usaha	Dokumen	2	2	100%	ST	60.732.601,00	53.372.057,00	87,88



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko								
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit usaha yang diberikan pembinaan	Unit usaha	100	100	100%	ST	519.229.015,00	507.467.452,00	97,73
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	100	100	100%	ST	35.773.175,00	35.442.374,00	99,08
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan	Unit Usaha	27	25	93%	ST	483.455.840,00	472.025.078,00	97,64



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing								

26. Pariwisata

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas pariwisata. Alokasi anggaran untuk Urusan Pariwisata pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 26.762.341.762,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp26.023.095.629,00 atau sebesar 97,24%. Jumlah indikator program pada urusan Pariwisata sebanyak 9 indikator, dengan pencapaian sebanyak 8 indikator kategori sangat tinggi, dan sebanyak 1 indikator kategori rendah. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan Pariwisata tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.39
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN PARIWISATA							26.762.341.762,00	26.023.095.629,00	97,24



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							11.988.609.443,00	11.708.777.745,00	97,67
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	ST			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah	Dokumen	2	2	100	ST	371.067.283,00	370.586.621,00	99,87
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100	ST	336.925.400,00	336.770.921,00	99,95
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100	ST	34.141.883,00	33.815.700,00	99,04
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan	%	100	100	100	ST	9.192.482.061,00	9.075.425.817,00	98,73
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	47	47	100	ST	8.681.544.207,00	8.580.127.747,00	98,83
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100	ST	496.019.834,00	483.621.800,00	97,50
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	1	1	100	ST	14.918.020,00	11.676.270,00	78,27



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	ST	606.452.200,00	488.980.012,00	80,63
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100	ST	131.547.500,00	111.735.173,00	84,94
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100	ST	67.338.600,00	61.459.494,00	91,27
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	ST	407.566.100,00	315.785.345,00	77,48
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan Mesin Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	Unit	16	16	100	ST	122.132.000,00	119.374.600,00	97,74
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16	16	100	ST	122.132.000,00	119.374.600,00	97,74
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	ST	1.412.403.099,00	1.385.668.389,00	98,11
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100	ST	12.735.860,00	12.730.000,00	99,95
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	ST	74.080.800,00	62.289.200,00	84,08
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	12	12	100	ST	1.325.586.439,00	1.310.649.189,00	98,87



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	%	100	100	100	ST	284.072.800,00	268.742.306,00	94,60
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	100	ST	101.052.000,00	98.306.273,00	97,28
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	100	ST	140.110.800,00	132.784.833,00	94,77
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	60	100	ST	42.910.000,00	37.651.200,00	87,74
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							760.292.930,00	687.998.700,00	90,49
	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	2,4	2,09	87,08	T			
	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	1,8	1,77	98,33	ST			
	Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau.	%	23,80	52,64	221,17	ST			
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	Destinasi	2	2	100	ST	658.164.680,00	619.000.900,00	94,05
Pengadaan/Pemeliharaan/Reha	Jumlah Sarana dan	Unit	3	3	100	ST	275.851.000,00	252.926.300,00	91,69



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
bilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara								
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	1	1	100	ST	32.313.680,00	31.213.400,00	96,60
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Laporan	1	1	100	ST	350.000.000,00	334.861.200,00	95,67
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang difasilitasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Industri	10	10	100	ST	102.128.250,00	68.997.800,00	67,56
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	1	1	100	ST	102.128.250,00	68.997.800,00	67,56
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							13.685.252.939,00	13.319.419.434,00	97,33
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	474.240	1.530.899	322,81	ST			
	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Orang	2.426.092	1.511.354	62,30	R			
	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Milyar Rp	5.142,1	9.740,75	189,43	ST			
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	DT/ Destinasi/ Kawasan	40	40	100	ST	13.685.252.939,00	13.319.419.434,00	97,33



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	yang dilaksanakan								
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	38	38	100,00	ST	11.202.972.000,00	10.933.641.772,00	97,60
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	14	14	100,00	ST	2.258.665.939,00	2.173.446.094,00	96,23
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1	1	100	ST	223.615.000,00	212.331.568,00	94,95
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							99.444.600,00	98.805.350,00	99,36
	Persentase produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	%	2	2,3	115,00	ST			
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Ekosistem	1	1	100	ST	99.444.600,00	98.805.350,00	99,36
Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak	Dokumen	1	1	100	ST	99.444.600,00	98.805.350,00	99,36



Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif								
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							228.741.850,00	208.094.400,00	90,97
	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	%	3	3,95	131,67	ST			
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	82	82	100	ST	228.741.850,00	208.094.400,00	90,97
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	82	82	100	ST	200.984.050,00	183.473.800,00	91,29
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	1	100	ST	27.757.800,00	24.620.600,00	88,70

27. Pertanian

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan. Alokasi anggaran untuk Urusan Pertanian pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp17.367.458.889,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023



sebesar 16.045.211.865,50 atau sebesar 92,39%. Jumlah indikator program pada urusan Pertanian sebanyak 12 indikator, dengan pencapaian sebanyak 12 indikator kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan pilihan Pertanian tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.40
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							17.367.458.889,00	16.045.211.865,50	92,39
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							6.637.258.185,00	5.791.162.204,00	87,25
	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	%	1,25	3,4	272,00	ST			
	Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	%	62,08	89,98	144,94	ST			
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Prasarana Pertanian Yang di adakan	Unit	32	30	93,75	ST	5.028.593.399,00	4.234.991.180,00	84,22
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung	Laporan	2	2	100,00	ST	5.028.593.399,00	4.234.991.180,00	84,22



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Pertanian								
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Produksi Bibit/Benih Tanaman Perkebunan dan Hortikultura Yang Bersertifikasi	Batang	1700	6809	400,53	ST	703.334.398,00	693.636.254,00	98,62
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	800	1247	155,88	ST	42.534.000,00	40.207.600,00	94,53
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	1	1	100,00	ST	501.523.643,00	494.916.650,00	98,68
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Laporan	1	1	100,00	ST	159.276.755,00	158.512.004,00	99,52
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Ekseptor Yang di IB (Inseminasi Buatan)	Ekor	520	642	123,46	ST	905.330.388,00	862.534.770,00	95,27
Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	1	1	100,00	ST	905.330.388,00	862.534.770,00	95,27
PROGRAM PENYEDIAAN							8.778.166.823,00	8.531.562.453,50	97,19



Bidang Urusan Pemerintahan/Progr am/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	%	1,42	1,56	109,86	ST			
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	%	0,77	0,86	111,69	ST			
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	%	3,00	2,92	97,33	ST			
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Penataan Prasarana Pertanian	Ha	250	250	100,00	ST	8.778.166.823,00	8.531.562.453,50	97,19
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	1	100,00	ST	722.640.030,00	639.986.276,00	88,56
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	3	3	100,00	ST	2.882.729.800,00	2.740.989.322,00	95,08
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	1	100,00	ST	48.376.543,00	47.743.110,00	98,69
Pembangunan, Rehabilitasi dan	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana	Unit	1	9	900,00	ST	5.124.420.450,00	5.102.843.745,50	99,58



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Pendukungnya Yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi								
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							650.002.812,00	595.861.774,00	91,67
	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit	%	63	68,84	109,27	ST			
	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	%	59	58,80	99,66	ST			
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah yang Terkendali Dari Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab/Kota	2	3	150,00	ST	443.513.361,00	426.637.124,00	96,19
Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	1	1	100,00	ST	191.352.531,00	189.175.784,00	98,86
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah Penyakit yang Terkendali	Laporan	1	1	100,00	ST	252.160.830,00	237.461.340,00	94,17



Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Sampel Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan Yang Di Uji	Sampel	80	126	157,50	ST	252.160.830,00	237.461.340,00	94,17
Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	1	1	100,00	ST	195.145.251,00	158.457.250,00	81,20
Kesejahteraan Hewan	Jumlah Sertifikat NKV Bagi Unit Usaha	Unit	2	2	100,00	ST	11.344.200,00	10.767.400,00	94,92
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sertifikat	2	2	100,00	ST	11.344.200,00	10.767.400,00	94,92
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							17.718.148,00	10.549.600,00	59,54
	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura)	%	39,5	40,14	101,62	ST			
	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	%	73,6	74,32	100,98	ST			



Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	(Tanaman Pangan)								
	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	%	20	23,81	119,05	ST			
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah yang Dilakukan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Ha	275	275	100,00	ST	17.718.148,00	10.549.600,00	59,54
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	81	89	109,88	ST	17.718.148,00	10.549.600,00	59,54
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							1.284.312.921,00	1.116.075.834,00	86,90
	Nilai Tukar Petani (NTP)	Rasio	99,91	104,16	104,25	ST			
	Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	%	45	43,00	95,56	ST			
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh Yang Menerapkan Teknologi Pertanian	%	33	35	106,06	ST	1.284.312.921,00	1.116.075.834,00	86,90
Pelaksanaan Penyuluhan dan	Jumlah Kelompok Petani Yang Mendapat	Kelompok	12	17	141,67	ST	1.284.312.921,00	1.116.075.834,00	86,90



Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pemberdayaan Petani	Penyuluhan dan Pemberdayaan								

28. Kehutanan

Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Alokasi anggaran untuk Urusan Kehutanan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.242.291.224,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp1.143.737.694,00 atau sebesar 92,07%. Jumlah indikator program pada urusan Kehutanan sebanyak 4 indikator, dengan pencapaian sebanyak 4 indikator kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan pilihan Kehutanan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.41
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pilihan Kehutanan Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							1.242.291.224,00	1.143.737.694,00	92,07
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							507.891.224,00	478.637.035,00	94,24



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	Miliar Rp	27,20	27,13	99,74	ST			
	Rehabilitasi Lahan Kritis	ha	5	5	100,00	ST			
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Terkelolanya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan Lindung	Paket	1	1	100,00	ST	122.092.883,00	115.452.435,00	94,56
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	1	1	100,00	ST	87.393.676,00	83.083.500,00	95,07
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen	1	1	100,00	ST	21.706.516,00	19.521.500,00	89,93
Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Laporan	6	6	100,00	ST	12.992.691,00	12.847.435,00	98,88
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terpenuhinya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Paket	1	1	100,00	ST	297.035.500,00	287.461.100,00	96,78
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	1	1	100,00	ST	297.035.500,00	287.461.100,00	96,78
Pelaksanaan Perlindungan	Perlindungan dan	Tahun	1	1	100,00	ST	50.263.054,00	43.036.600,00	85,62



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pengamanan di Kawasan Hutan								
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Kali	24	24	100,00	ST	22.450.454,00	22.327.600,00	99,45
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	1	1	100,00	ST	27.812.600,00	20.709.000,00	74,46
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Paket	1	1	100,00	ST	38.499.787,00	32.686.900,00	84,90
Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	8	266,67	ST	38.499.787,00	32.686.900,00	84,90
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN							698.494.000,00	636.152.259,00	91,07
	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh	Ha	500	1.411	282,20	ST			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	masyarakat								
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat pada wilayah kelola KPH di Bidang Kehutanan	KPH	6	6	100,00	ST	698.494.000,00	636.152.259,00	91,07
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	5	6	120,00	ST	374.916.900,00	336.652.363,00	89,79
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	34	110,73	325,67	ST	323.577.100,00	299.499.896,00	92,56
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)							35.906.000,00	28.948.400,00	80,62
	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	DAS	2	2	100,00	ST			
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab/ Kota	1	1	100,00	ST	35.906.000,00	28.948.400,00	80,62
Peningkatan Koordinasi dan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka	Kali	2	4	200,00	ST	35.906.000,00	28.948.400,00	80,62



Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Pengelolaan DAS								

29. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Alokasi anggaran untuk Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp21.651.317.539,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp20.864.569.613,11 atau sebesar 96,37%. Jumlah indikator program pada urusan Energi dan Sumberdaya Mineral sebanyak 6 indikator, dengan pencapaian sebanyak 6 indikator kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.42
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA							21.651.317.539,00	20.864.569.613,11	96,37



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
MINERAL									
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN							1.045.785.627,00	1.038.102.478,00	99,27
	Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan	%	54,55	54,55	100,00	ST			
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi	%	100	100	100,00	ST	982.194.857,00	978.131.878,00	99,59
Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	100,00	ST	982.194.857,00	978.131.878,00	99,59
Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Data(dokumen) Penetapan Pajak Air Tanah sesuai Ketentuan dan Peraturan yang berlaku	%	100	100	100,00	ST	63.590.770,00	59.970.600,00	94,31
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	Dokumen	1	1	100,00	ST	28.774.070,00	25.941.300,00	90,16
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	1	1	100,00	ST	34.816.700,00	34.029.300,00	97,74



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN							1.708.940.730,00	1.656.799.050,00	96,95
	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	14,2	14,7	103,52	ST			
Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	14,2	14,7	103,52	ST	1.708.940.730,00	1.656.799.050,00	96,95
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Tersedianya data, peraturan, kebijakan daerah terkait konservasi energi di Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	1	1	100,00	ST	287.585.000,00	282.423.000,00	98,21
Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Sosialisasi kepada Pengguna Energi dalam menerapkan konservasi energi	Kegiatan	1	1	100,00	ST	50.000.000,00	43.855.200,00	87,71
Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terpeliharanya aset EBT di Provinsi Kepulauan Riau	Kwp	15	29	193,33	ST	1371355730,00	1.330.520.850,00	97,02
	Tersedianya sistem data energi	Dokumen	1	1	100,00	ST			
Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis konservasi energi	Orang	20	20	100,00	ST	155.324.000,00	132.950.800,00	85,60
Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi di Provinsi Kepulauan Riau	Laporan	1	1	100,00	ST	6.8622.000,00	6.7869.600,00	98,90



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKA N							5.716.057.448,00	5.522.252.105,11	96,61
	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	100	100	100,00	ST			
	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	100	100	100,00	ST			
	Rasio Elektrifikasi	%	96	97,99	102,07	ST			
Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	100	100	100,00	ST	48.915.000,00	43.449.063,00	88,83
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Rekomendasi	2	2	100,00	ST	13.915.000,00	10.234.600,00	73,55
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga	Laporan	1	1	100,00	ST	35.000.000,00	33.214.463,00	94,90



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provins								
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Operasi Yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	%	100	100	100,00	ST	68.500.000,00	60.899.300,00	88,90
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi	Rekomendasi	8	12	150,00	ST	35.500.000,00	31.850.800,00	89,72
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	1	1	100,00	ST	33.000.000,00	29.048.500,00	88,03
Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	%	100	100	100,00	ST	46.507.000,00	31.414.000,00	67,55
Penyusunan Rekomendasi	Jumlah surat	Dokumen	1	1	100,00	ST	13.507.000,00	750.000,00	5,55



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri								
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Laporan	1	1	100,00	ST	33.000.000,00	30.664.000,00	92,92
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terpenuhinya Penyediaan Listrik bagi Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau	%	100	100	100,00	ST	5.552.135.448,00	5.386.489.742,11	97,02
Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Keluarga	238	238	100,00	ST	776.023.556,00	769.335.797,00	99,14
Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	62	62	100,00	ST	4.776.111.892,00	4.617.153.945,11	96,67



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							13.180.533.734,00	12.647.415.980,00	95,96
	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	100,00	ST			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	411.788.751,00	387.724.530,00	94,16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	234.973.251,00	217.638.530,00	92,62
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	176.815.500,00	170.086.000,00	96,19
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	100,00	ST	9.463.145.947,00	9.048.161.324,00	95,61
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	100,00	ST	8.983.203.207,00	8.587.928.292,00	95,60
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Penyediaan Administrasi ASN	Bulan	12	12	100,00	ST	310.982.500,00	297.072.000,00	95,53
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	100,00	ST	168.960.240,00	163.161.032,00	96,57



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	100,00	ST	110.712.000,00	99.680.200,00	90,04
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	79	79	100,00	ST	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	13	10	76,92	ST	56.712.000,00	45.680.200,00	80,55
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	100,00	ST	1.681.875.140,00	1.625.759.824,00	96,66
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	100,00	ST	179.684.800,00	173.708.700,00	96,67
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor	Bulan	12	12	100,00	ST	82.503.000,00	74.003.100,00	89,70
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	12	100,00	ST	78.166.000,00	68.933.635,00	88,19
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	1.341.521.340,00	1.309.114.389,00	97,58
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	100,00	ST	1.247.698.192,00	1.230.165.372,00	98,59
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa	Bulan	12	12	100,00	ST	1.247.698.192,00	1.230.165.372,00	98,59



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Pelayanan Umum Kantor								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	100,00	ST	265.313.704,00	255.924.730,00	96,46
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9	100,00	ST	209.646.904,00	203.951.820,00	97,28
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemenuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	12	100,00	ST	33.600.000,00	32.777.910,00	97,55
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12	12	100,00	ST	22.066.800,00	19.195.000,00	86,99

30. Perdagangan

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Alokasi anggaran untuk Urusan Perdagangan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp7.369.903.963,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp6.736.967.780,00 atau sebesar 91,41%. Jumlah indikator program pada urusan Perdagangan sebanyak 4 indikator, dengan pencapaian sebanyak 4 indikator kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan Pilihan Perdagangan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.43
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pilihan Perdagangan Tahun 2023



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN PERDAGANGAN							7.369.903.963,00	6.736.967.780,00	91,41
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan	Persen	70	74,38	106,26	ST	857.125.140,00	852.522.007,00	99,46
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Unit	1	0	0,00	SR	857.125.140,00	852.522.007,00	99,46
Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	1	1	100,00	ST	857.125.140,00	852.522.007,00	99,46
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nilai Inflasi	%	3,13 $\pm$ 1	2,76	111,82	ST	4.900.455.958,00	4.316.625.258,00	88,09
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	Koefisien harga barang Pokok dan Barang Penting antar waktu	%	10	8,06	119,4	ST	4.900.455.958,00	4.316.625.258,00	88,09



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Perdagangan									
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	100,00	ST	174.131.466,00	171.707.358,00	98,61
Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	1	100,00	ST	4.726.324.492,00	4.144.917.900,00	87,70
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri	%	3,5	4,88	139,43	ST	414.998.435,00	410.591.568,00	98,94
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi promosi	Pelaku Usaha	30	30	100,00	ST	414.998.435,00	410.591.568,00	98,94
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	30	30	100,00	ST	375.727.325,00	372.022.568,00	99,01
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang	Produk	1	1	100,00	ST	39.271.110,00	38.569.000,00	98,21



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Disusun menjadi Materi Promosi								
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat dilakukan Pengawasan	%	< 20	8,3	158,50	ST	1.197.324.430,00	1.157.228.947,00	96,65
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Perlindungan Konsumen yang disebarluaskan	%	100	100	100,00	ST	1.177.324.347,00	1.137.315.035,00	96,60
Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK	2	2	100,00	ST	1.177.324.347,00	1.137.315.035,00	96,60
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Produk yang diawasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan	%	100	100	100,00	ST	20.000.083,00	19.913.912,00	99,57
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	1	1	100,00	ST	20.000.083,00	19.913.912,00	99,57

31. Perindustrian

Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Alokasi anggaran untuk Urusan Perindustrian pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp19.482.882.433,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar



Rp19.276.959.552,00 atau sebesar 98,94%. Jumlah indikator program pada urusan Perindustrian sebanyak 3 indikator, dengan pencapaian sebanyak 3 indikator kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan pilihan Perindustrian tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.44
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pilihan Perindustrian Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN PERINDUSTRIAN							19.482.882.433,00	19.276.959.552,00	98,94
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persen	39	40,07	102,74	ST	5.106.585.637,00	5.073.017.109,00	99,34
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Nilai Produktivitas Industri Pengolahan	Milyar Rupiah	124,398	132.992	139,94	ST	5.106.585.637,00	5.073.017.109,00	99,34
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	1	100,00	ST	179.358.441,00	179.358.441,00	100,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1	100,00	ST	141.000.000,00	138.759.250,00	98,41
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	Dokumen	1	1	100,00	ST	3.033.247.154,00	3.011.634.333,00	99,29



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri								
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1	100,00	ST	1.664.705.138,00	1.655.678.921,00	99,46
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1	100,00	ST	88.274.904,00	87.586.164,00	99,22
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Dokumen Pengendalian Izin Usaha Industri	Dokumen	1	1	100,00	ST	40.573.009,00	35.978.796,00	88,68
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	100,00	ST	40.573.009,00	35.978.796,00	88,68
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan	Dokumen	1	1	100,00	ST	40.573.009,00	35.978.796,00	88,68



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100,00	ST	14.335.723.787,00	14.167.963.647,00	98,83
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang tersusun	Dokumen	4	4	100,00	ST	252.581.224,00	248.761.345,00	98,49
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100,00	ST	113.771.624,00	113.179.445,00	99,48
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	38.809.600,00	38.793.800,00	99,96
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	100.000.000,00	96.788.100,00	96,79
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	100	100,00	ST	9.232.204.123,00	9.129.533.541,00	98,89
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	40	40	100,00	ST	8.761.974.123,00	8.662.535.541,00	98,87
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	470.230.000,00	466.998.000,00	99,31



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST	1.506.748.884,00	1.488.440.933,00	98,78
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	475.796.000,00	472.922.660,00	99,40
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	85.149.640,00	84.893.400,00	99,70
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	58.000.000,00	57.988.000,00	99,98
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	847.803.244,00	836.531.517,00	98,67
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	40.000.000,00	36.105.356,00	90,26
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100,00	ST	2.924.065.056,00	2.891.974.628,00	98,90
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	3.000.000,00	2.100.000,00	70,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	171.000.000,00	170.960.000,00	99,98
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	100,00	ST	2.750.065.056,00	2.718.914.628,00	98,87



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	yang Disediakan								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	%	100	100	100,00	ST	420.124.500,00	409.511.000,00	97,47
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100,00	ST	332.384.500,00	332.311.000,00	99,98
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	70	70	100,00	ST	87.740.000,00	77.200.000,00	87,99

32. Transmigrasi

Urusan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Alokasi anggaran untuk Urusan Transmigrasi pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp20.000.000,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp19.269.418,00 atau sebesar 96,35%. Jumlah indikator program pada urusan Transmigrasi sebanyak 1 indikator, dengan pencapaian kategori rendah. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dan tindak lanjut rekomendasi DPRD pada urusan Transmigrasi tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.45
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pilihan Transmigrasi Tahun 2023



Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							20.000.000,00	19.269.418,00	96,35
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI							20.000.000,00	19.269.418,00	96,35
	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	%	12,5	6,25	52,00	R			
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Persentase kawasan transmigrasi yang berkembang	Persen	25	16,66	66,64	S	20.000.000,00	19.269.418,00	96,35
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan	2	2	100,00	ST	20.000.000,00	19.269.418,00	96,35

33. Sekretariat Daerah

Urusan penunjang Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh seluruh Biro di Sekretariat Daerah.

1) Biro Administrasi Pimpinan

Alokasi anggaran untuk Urusan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Administrasi Pimpinan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp15.086.677.180,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp14.918.387.802,00 atau sebesar



98,88%. Jumlah indikator program pada urusan Penunjang Sekretariat Daerah Sebanyak 1 indikator, dengan pencapaian indikator kategori tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan penunjang Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Administrasi Pimpinan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.46

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Penunjang Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN							15.086.677.180	14.918.387.802	98,88
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	87	77,10	88,62	T	15.086.677.180	14.918.387.802	98,88
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	3	3	100	ST	256.747.700	255.683.300	99,59
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6	6	100	ST	189.917.500	189.015.300	99,52
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	2	2	100	ST	20.116.200	20.013.500	99,49
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1	1	100	ST	46.714.000	46.654.500	99,87
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	%	87	87	100	ST	693.422.500	692.948.900	99,93
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	paket	3	3	100	ST	507.005.000	506.591.200	99,92



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	70	70	100	ST	186.417.500	186.357.700	99,97
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Frekuensi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	12	100	ST	1.332.071.016	1.323.773.792	99,38
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket	1	1	100	ST	98.279.100	95.514.700	97,19
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	1	1	100	ST	225.466.900	220.623.400	97,85
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	1	1	100	ST	157.864.800	157.478.210	99,76
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	100	ST	850.460.216	850.157.482	99,96
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	25	60	240	ST	251.630.046	251.601.250	99,99
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	25	60	240	ST	251.630.046	251.601.250	99,99
4.01.01.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	100	ST	3.380.823.004	3.295.666.680	97,48
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1	100	ST	20.000.000	20.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	1	1	100	ST	131.947.500	125.760.865	95,31
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	1	1	100	ST	232.200.000	232.000.000	99,91
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	1	1	100	ST	2.996.675.504	2.917.905.815	97,37
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	bulan	12	12	100	ST	137.493.000	137.424.592	99,95



Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	dipelihara								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	2	2	100	ST	84.183.000	84.181.592	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	46	46	100	ST	53.310.000	53.243.000	99,87
Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Materi dan Komunikasi Pimpinan yang terfasilitasi	%	100	100	100	ST	3.140.909.553	3.092.309.264	98,45
Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah dokumen materi pimpinan yang disiapkan	dokumen	573	1109	193,54	ST	333.600.000	332.967.800	99,81
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	laporan	1	1	100	ST	1.173.182.864	1.125.535.396	95,94
Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah laporan pengelolaan dokumentasi pimpinan	laporan	1	1	100	ST	1.634.126.689	1.633.806.068	99,98
4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan sesuai SOP	%	100	100	100	ST	5.893.580.361	5.868.980.024	99,58
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	laporan	1	1	100	ST	2.836.380.718	2.818.843.474	99,38
Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	laporan	1	1	100	ST	2.085.912.043	2.079.864.300	99,71
Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	laporan	1	1	100	ST	971.287.600	970.272.250	99,90

2) Biro Organisasi

Alokasi anggaran untuk Urusan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Organisasi pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.608.373.906,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp2.569.738.117,00 atau sebesar 98,52%. Jumlah indikator program pada urusan Penunjang Sekretariat Daerah Sebanyak 2 indikator, dengan pencapaian sebanyak 2 indikator kategori



sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan penunjang Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Organisasi tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.47
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Penunjang Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Organisasi Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
BIRO ORGANISASI							2.608.373.906,00	2.569.738.117,00	98,52
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1.757.897.600,00	1.741.091.051,00	99,04
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	87	100	115	ST			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100	ST	95.534.460,00	93.678.510,00	98,06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	100	ST	95.534.460,00	93.678.510,00	98,06
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	87	40	45,98	SR	41.874.800,00	33.528.862,00	80,07
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang diberikan atribut	Paket	1	1	100,00	ST	34.374.800,00	29.328.862,00	85,32



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	2	3	150,00	ST	7.500.000,00	4.200.000,00	56,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Frekuensi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00	ST	582.648.990,00	579.992.534,00	99,54
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	100,00	ST	55.430.782,00	54.928.167,00	99,09
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	100,00	ST	12.213.330,00	11.469.000,00	93,91
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Frekuensi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Bulan	12	12	100,00	ST	13.453.200,00	12.120.000,00	90,09
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi Fasilitasi Kunjungan Tamu								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	100,00	ST	501.551.678,00	501.405.367,00	99,97
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	20	20	100,00	ST	222.978.554,00	221.902.600,00	99,52
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan								
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	20	20	100,00	ST	222.978.554,00	221.902.600,00	99,52
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100,00	ST	646.744.096,00	644.132.145,00	99,60



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	1	1	100,00	ST	46.620.000,00	46.590.000,00	99,94
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	100,00	ST	600.124.096,00	597.542.145,00	99,57
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	4	4	100,00	ST	168.116.700,00	167.926.400,00	99,89
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	4	4	100,00	ST	168.116.700,00	167.926.400,00	99,89
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI							850.476.306,00	828.647.066,00	97,43
	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Skor	40,1	45,17	112,64	ST			
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Anjab yg disusun	Dokumen	3	3	100,00	ST	302.357.004,00	297.209.078,00	98,30
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	jumlah OPD Provinsi yang difasilitasi penataan kelembagaannya	Dokumen	1	1	100,00	ST	81.132.000,00	77.738.118,00	95,82
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penataan kelembagaan kab/kota yg difasilitasi	Dokumen	1	1	100,00	ST	76.175.004,00	75.057.900,00	98,53
Penataan Analisis Jabatan	jumlah dokumen analisis jabatan	Dokumen	1	1	100,00	ST	145.050.000,00	144.413.060,00	99,56



Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	5	5	100,00	ST	548.119.302,00	531.437.988,00	96,96
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	jumlah OPD yang dilakukan pembinaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	1	100,00	ST	149.980.000,00	148.317.980,00	98,89
Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	jumlah dokumen monev akuntabilitas kinerja	Dokumen	1	1	100,00	ST	75.242.000,00	68.268.284,00	90,73
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	jumlah OPD yang dievaluasi budaya kerjanya	Laporan	1	1	100,00	ST	81.225.000,00	79.855.912,00	98,31
Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Tatalaksana pemerintah yang dikelola	Dokumen	1	1	100,00	ST	105.381.200,00	101.346.629,00	96,17
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	1	1	100,00	ST	136.291.102,00	133.649.283,00	98,06

3) Biro Umum

Alokasi anggaran untuk Urusan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Umum pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp208.621.412.883,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp203.635.546.231,00 atau sebesar (97,61%). Jumlah indikator program pada urusan Penunjang Sekretariat Daerah Sebanyak 1 indikator, dengan pencapaian indikator kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan penunjang Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Umum tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 1.48
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Penunjang Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Umum Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
BIRO UMUM									
4.01.5.06.5.07.01.0012 Biro Umum							208.621.412.883,00	203.635.546.231,00	97,61
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase	87	154,4	177,47	ST	208.621.412.883,00	203.635.546.231,33	97,61
4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100,0	ST	104.612.548,00	103.618.377,00	99,05
4.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	100,0	ST	104.612.548,00	103.618.377,00	99,05



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100	100	100,0	ST	67.602.690.028,00	66.331.219.119,00	98,12
4.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	320	265	82,8	T	62.798.775.692,00	61.791.293.748,00	98,40
4.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,0	ST	3.367.764.000,00	3.119.522.500,00	92,63
4.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	100,0	ST	612.693.644,00	601.682.787,00	98,20
4.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	100,0	ST	304.748.096,00	302.696.246,00	99,33
4.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,0	ST	102.602.000,00	102.602.000,00	100,00
4.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	100,0	ST	93.441.500,00	93.259.000,00	99,80
4.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	4	100,0	ST	322.665.096,00	320.162.838,00	99,22
4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	Persentase	100	100	100,0	ST	1.616.449.711,00	1.546.893.331,33	95,70



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
4.01.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100,0	ST	143.365.000,00	143.258.874,00	99,93
4.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100,0	ST	707.167.336,00	681.437.584,33	96,36
4.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100,0	ST	175.992.500,00	173.112.500,00	98,36
4.01.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100,0	ST	116.835.000,00	112.445.200,00	96,24
4.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100,0	ST	473.089.875,00	436.639.173,00	92,30
4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	87	87	100,0	ST	1.374.678.803,00	1.251.031.064,00	91,01
4.01.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	6	6	100,0	ST	221.045.848,00	185.641.500,00	83,98
4.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	350	350	100,0	ST	425.824.000,00	402.796.500,00	94,59
4.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	100,0	ST	148.146.307,00	147.149.534,00	99,33
4.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	15	100,0	ST	144.428.000,00	120.460.882,00	83,41



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
4.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	20	100,0	ST	279.300.048,00	269.544.048,00	96,51
4.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	20	100,0	ST	155.934.600,00	125.438.600,00	80,44
4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Frekuensi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,0	ST	41.726.979.057,00	41.283.402.581,00	98,94
4.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,0	ST	9.017.555.551,00	8.881.483.421,00	98,49
4.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,0	ST	672.014.096,00	671.621.346,00	99,94
4.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,0	ST	12.616.603.857,00	12.606.672.287,00	99,92
4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,0	ST	340.321.096,00	338.985.914,00	99,61
4.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,0	ST	111.895.148,00	70.321.000,00	62,85
4.01.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,0	ST	16.341.890.317,00	16.183.689.335,00	99,03
4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,0	ST	2.083.999.700,00	2.020.183.153,00	96,94



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
4.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100,0	ST	423.385.644,00	398.669.063,00	94,16
4.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	100,0	ST	119.313.648,00	111.777.062,00	93,68
4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	41	49	119,5	ST	24.962.731.053,00	23.528.567.457,00	94,25
4.01.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	-		-	-	0,00
4.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	40	48	120,0	ST	20.252.355.000,00	18.901.796.823,00	93,33
4.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	100,0	ST	4.710.376.053,00	4.626.770.634,00	98,23
4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100,0	ST	37.441.754.307,00	36.638.024.879,00	97,85
4.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,0	ST	621.456.649,00	578.615.061,00	93,11
4.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,0	ST	7.965.739.569,00	7.695.981.473,00	96,61
4.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,0	ST	9.718.834.398,00	9.604.981.919,00	98,83
4.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,0	ST	19.135.723.691,00	18.758.446.426,00	98,03



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Bulan	12	12	100,0	ST	21.861.874.419,00	21.467.919.913,00	98,20
4.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	39	39	100,0	ST	745.644.236,00	743.466.513,00	99,71
4.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	210	210	100,0	ST	7.663.744.389,00	7.510.368.898,00	98,00
4.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	400	418	104,5	ST	201.409.096,00	134.935.000,00	67,00
4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	100,0	ST	5.483.178.834,00	5.433.566.850,00	99,10
4.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	6	100,0	ST	895.047.324,00	886.799.541,00	99,08
4.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	18	18	100,0	ST	6.872.850.540,00	6.758.783.111,00	98,34
4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu	Bulan	12	12	100,0	ST	3.295.795.749,00	3.095.744.476,00	93,93
4.01.01.1.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	2	100,0	ST	528.840.899,00	504.272.472,00	95,35



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
4.01.01.1.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	1	100,0	ST	351.249.850,00	350.050.444,00	99,66
4.01.01.1.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2	100,0	ST	140.705.000,00	-	0,00
4.01.01.1.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	2	100,0	ST	2.275.000.000,00	2.241.421.560,00	98,52
4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	Bulan	12	12	100,0	ST	7.423.852.683,00	7.318.023.725,00	98,57
4.01.01.1.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	1	100,0	ST	3.422.091.522,00	3.326.436.074,00	97,20
4.01.01.1.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	1	100,0	ST	2.360.466.136,00	2.352.340.701,00	99,66
4.01.01.1.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	1	1	100,0	ST	1.641.295.025,00	1.639.246.950,00	99,88
4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Bulan	12	12	100,0	ST	1.209.994.525,00	1.071.101.309,00	88,52
4.01.01.1.13.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	1	1	100,0	ST	1.209.994.525,00	1.071.101.309,00	88,52

4) Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Alokasi anggaran untuk Urusan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro pengadaan Barang dan Jasa pada tahun anggaran



2023 sebesar Rp3.272.824.482,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp3.236.367.235,00 atau sebesar (98,89%). Jumlah indikator program pada urusan Penunjang Sekretariat Daerah Sebanyak 2 indikator, dengan pencapaian semua indikator kategori tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan penunjang Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro pengadaan Barang dan Jasa tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.49
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Penunjang Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA							3.272.824.482,00	3.236.367.235,00	98,89
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							2.941.956.089,00	2.911.009.951,00	98,95
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	86	86	100	ST			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen	3	3,00	100,00	ST	92.417.932,00	92.159.350,00	99,72
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	1	1,00	100,00	ST	92.417.932,00	92.159.350,00	99,72
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persen	86	84,50	98,26	ST	192.300.400,00	190.345.600,00	98,98
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Paket	1	1,00	100,00	ST	178.074.800,00	177.120.000,00	99,46
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Orang	5	5,00	100,00	ST	14.225.600,00	13.225.600,00	92,97



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Bulan	12	12,00	100,00	ST	671.420.112,00	667.946.900,00	99,48
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Paket	1	1,00	100,00	ST	2.452.400,00	2.403.800,00	98,02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Paket	1	1,00	100,00	ST	19.970.510,00	19.291.000,00	96,60
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Paket	1	1,00	100,00	ST	4.603.500,00	4.597.500,00	99,87
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Paket	1	1,00	100,00	ST	148.899.600,00	148.556.300,00	99,77
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Paket	1	1,00	100,00	ST	15.238.792,00	15.211.300,00	99,82
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Dokumen	1	1,00	100,00	ST	13.556.500,00	11.400.000,00	84,09
Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	1	1,00	100,00	ST	5.940.000,00	5.811.000,00	97,83
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	1	1,00	100,00	ST	460.758.810,00	460.676.000,00	99,98
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Unit	3	3,00	100,00	ST	113.881.600,00	112.814.400,00	99,06
Pengadaan Mebel		Paket	1	1,00	100,00	ST	5.005.800,00	5.005.800,00	100,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Unit	1	1,00	100,00	ST	32.243.800,00	32.136.000,00	99,67
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit	1	1,00	100,00	ST	76.632.000,00	75.672.600,00	98,75
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Bulan	12	12,00	100,00	ST	1.279.790.322,00	1.260.690.657,00	98,51
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	1	1,00	100,00	ST	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Laporan	1	1,00	100,00	ST	3.965.500,00	3.899.500,00	98,34
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Laporan	1	1,00	100,00	ST	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan	1	1,00	100,00	ST	1.243.024.822,00	1.223.991.157,00	98,47
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Bulan	12	12,00	100,00	ST	592.145.723,00	587.053.044,00	99,14



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah									
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Unit	1	1,00	100,00	ST	197.710.723,00	194.190.915,00	98,22
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Unit	1	1,00	100,00	ST	44.480.000,00	44.000.000,00	98,92
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Unit	1	1,00	100,00	ST	349.955.000,00	348.862.129,00	99,69
4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							330.868.393,00	325.357.284,00	98,33
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	8,3	8,30	100,00	ST			
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persen	8,3	8,30	100,00	ST	47.969.445,00	46.964.021,00	97,90
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		Laporan	1	1,00	100,00	ST	26.075.739,00	25.862.939,00	99,18
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		Laporan	1	1,00	100,00	ST	8.119.806,00	8.001.370,00	98,54
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		Laporan	1	1,00	100,00	ST	13.773.900,00	13.099.712,00	95,11
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Dokumen	1	1,00	100,00	ST	181.392.782,00	179.351.013,00	98,87
Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik		Laporan	1	1,00	100,00	ST	38.208.200,00	36.998.381,00	96,83
Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		Laporan	1	1,00	100,00	ST	130.918.732,00	130.828.932,00	99,93
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		Laporan	1	1,00	100,00	ST	12.265.850,00	11.523.700,00	93,95
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Dokumen	1	1,00	100,00	ST	101.506.166,00	99.042.250,00	97,57
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		Orang	5	5,00	100,00	ST	37.800.900,00	36.826.552,00	97,42
Pembinaan Kelembagaan Pengadaan		Dokumen	1	1,00	100,00	ST	13.705.266,00	13.330.100,00	97,26



Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Barang dan Jasa									
Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		Dokumen	1	1,00	100,00	ST	50.000.000,00	48.885.598,00	97,77

5) Biro Hukum

Alokasi anggaran untuk Urusan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Hukum pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.817.673.057,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp3.559.018.873,00 atau sebesar 93,22%. Jumlah indikator program pada urusan Penunjang Sekretariat Daerah pada Biro Hukum Sebanyak 2 indikator, dengan pencapaian sebanyak 2 indikator kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan penunjang Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Hukum tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.50
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Penunjang Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Hukum Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
BIRO HUKUM							3.817.673.057,00	3.559.018.873,00	93,22
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%		87,00	89,18	102,51	ST	1.839.599.408,00	1.640.487.214,00	89,18
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	5	5	100,00	ST	13.908.000,00	11.655.000,00	83,80



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Perangkat Daerah								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	5	5	100,00	ST	13.908.000,00	11.655.000,00	83,80
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	87	94,13	108,20	ST	150.875.000,00	141.792.099,00	93,98
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Stel	49	47	95,92	ST	30.000.000,00	28.772.600,00	95,91
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Orang	5	1	20,00	SR	46.680.000,00	43.013.000,00	92,14
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	Dokumen	2	2	100,00	ST	74.195.000,00	70.006.499,00	94,35
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Frekuensi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00	ST	1.072.754.600,00	890.152.526,00	82,98
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	100,00	ST	88.041.700,00	86.852.299,00	98,65
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	100,00	ST	15.922.200,00	15.454.000,00	97,06
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	100,00	ST	19.946.000,00	19.498.000,00	97,75
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	12	12	100,00	ST	15.000.000,00	11.091.000,00	73,94
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Bulan	12	12	100,00	ST	933.844.700,00	757.257.227,00	81,09
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100,00	ST	510.014.408,00	504.903.389,00	99,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	100,00	ST	6.000.000,00	5.918.000,00	98,63
Penyediaan Jasa Komunikasi,	Frekuensi Penyediaan Jasa	Bulan	12	12	100,00	ST	10.000.000,00	9.971.000,00	99,71



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	100,00	ST	494.014.408,00	489.014.389,00	98,99
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Bulan	12	12	100,00	ST	92.047.400,00	91.984.200,00	99,93
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12	100,00	ST	77.047.400,00	76.999.200,00	99,94
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12	100,00	ST	15.000.000,00	14.985.000,00	99,90
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	%	100	96,5	96,50	ST	1.978.073.649,00	1.918.531.659,00	96,99
Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Produk Hukum daerah yang difasilitasi penyusunannya	%	100	96,91	96,91	ST	1.321.610.313,00	1.280.743.856,00	96,91
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Persentase produk hukum pengaturan yang difasilitasi	%	100	98	98,00	ST	565.563.177,00	551.132.407,00	97,45
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Persentase Produk Hukum Penetapan yang difasilitasi	%	100	98	98,00	ST	228.800.610,00	221.048.786,00	96,61
Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Persentase Produk Hukum yang didokumentasikan	%	100	96	96,00	ST	153.882.480,00	146.155.697,00	94,98
Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda Kab/Kota yang dievaluasi	%	100	98	98,00	ST	373.364.046,00	362.406.966,00	97,07
Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase bantuan hukum yang difasilitasi	%	100	98	98,00	ST	656.463.336,00	637.787.803,00	97,16
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Penyelesaian masalah hukum yang difasilitasi	Kasus	10	6	60,00	R	378.200.000,00	366.579.577,00	96,93
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah sengketa yang difasilitasi	Sengketa	5	4	80,00	T	278.263.336,00	271.208.226,00	97,46



6) Biro Kesejahteraan Rakyat

Alokasi anggaran untuk Urusan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp139.834.041.757,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp130.729.637.834,00 atau sebesar 93,49%. Jumlah indikator program pada urusan Penunjang Sekretariat Daerah pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sebanyak 2 indikator, dengan pencapaian sebanyak 2 indikator kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan penunjang Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.51
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Penunjang Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Sekretariat Daerah									
Biro Kesejahteraan Rakyat							139.834.041.757,00	130.729.637.834,00	93,49
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							3.068.299.401,00	2.713.203.372,00	88,43
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	87	87	100,00	ST			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100	100	100,00	ST	78.336.700,00	49.275.000,00	62,90
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	2	2	100,00	ST	78.336.700,00	49.275.000,00	62,90



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST	23.449.500,00	17.190.200,00	73,31
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100,00	ST	23.449.500,00	17.190.200,00	73,31
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST	685.676.900,00	476.021.134,00	69,42
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	94.343.400,00	70.289.900,00	74,50
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	591.333.500,00	405.731.234,00	68,61
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	89,47	89,47	T	956.125.500,00	883.992.000,00	92,46
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	307.046.000,00	279.550.000,00	91,04
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	17	15	88,24	T	649.079.500,00	604.442.000,00	93,12
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100,00	ST	1.097.809.301,00	1.083.639.888,00	98,71
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	1	1	100,00	ST	72.303.000,00	66.115.000,00	91,44



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	yang Disediakan								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	1.025.506.301,00	1.017.524.888,00	99,22
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100,00	ST	226.901.500,00	203.085.150,00	89,50
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	100,00	ST	226.901.500,00	203.085.150,00	89,50
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT							136.765.742.356,00	128.016.434.462,00	93,60
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	%	40	40	100,00	ST			
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual yang Dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100,00	ST	122.561.209.856,00	114.497.677.882,00	93,42
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit	1	1	100,00	ST	96.602.970.842,00	90.596.824.952,00	93,78
Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	6	6	100,00	ST	25.958.239.014,00	23.900.852.930,00	92,07
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan Biro	%	100	100	100,00	ST	13.404.929.600,00	12.876.555.345,00	96,06



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Kesejahteraan Rakyat								
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	100,00	ST	12.847.024.900,00	12.450.263.500,00	96,91
Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	1	1	100,00	ST	272.943.300,00	185.335.835,00	67,90
Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	1	1	100,00	ST	284.961.400,00	240.956.010,00	84,56
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100,00	ST	799.602.900,00	642.201.235,00	80,32
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	1	1	100,00	ST	229.666.100,00	191.802.560,00	83,51
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	1	1	100,00	ST	284.927.200,00	234.452.753,00	82,29



Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja								
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen	1	1	100,00	ST	285.009.600,00	215.945.922,00	75,77

7) Biro Perekonomian dan Pembangunan

Alokasi anggaran untuk Urusan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Perekonomian dan Pembangunan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp6.739.897.147,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp6.270.009.414,00 atau sebesar 93,03%. Jumlah indikator program pada urusan Penunjang Sekretariat Daerah pada Biro Perekonomian dan Pembangunan sebanyak 3 indikator, dengan pencapaian sebanyak 3 indikator kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan penunjang Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Perekonomian dan Pembangunan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 1.52

**Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Penunjang Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro
Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Biro Perekonomian dan Pembangunan							6.739.897.147,00	6.270.009.414,00	93,03
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							2.831.036.385,00	2.676.448.976,00	94,54
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	87	100	114,9	ST			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100	ST	359.861.848,00	340.946.573,00	94,74
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	1	1	100	ST	212.455.848,00	196.493.163,00	92,49



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	100	ST	147.406.000,00	144.453.410,00	98,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	%	100	100	100	ST	323.378.770,00	281.639.443,00	87,09
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100	ST	77.728.820,00	68.910.000,00	88,65
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	9	100	ST	131.420.750,00	110.514.259,00	84,09
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	30	30	100	ST	114.229.200,00	102.215.184,00	89,48
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	ST	902.427.427,00	856.544.589,00	94,92



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	ST	233.118.580,00	215.345.900,00	92,38
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100	ST	90.924.600,00	76.436.000,00	84,07
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100	ST	578.384.247,00	564.762.689,00	97,64
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	ST	128.427.828,00	115.140.000,00	89,65
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	100	ST	128.427.828,00	115.140.000,00	89,65
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	ST	847.702.312,00	833.022.861,00	98,27
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100	ST	20.762.730,00	10.874.193,00	52,37



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100	ST	102.400.000,00	102.400.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	1	100	ST	724.539.582,00	719.748.668,00	99,34
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	ST	269.238.200,00	249.155.510,00	92,54
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	15	15	100	ST	243.418.200,00	225.022.510,00	92,57
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	100	ST	25.820.000,00	24.133.000,00	93,47
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							2.638.963.367,00	2.404.261.830,00	91,11
	Persentase rekomendasi dan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	%	92%	100%	108,70	ST			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang disusun	Rekomendasi	4	4	100	ST	959.557.890,00	939.033.887,00	97,86
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	2	2	100	ST	793.533.240,00	783.906.645,00	98,79
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	2	2	100	ST	166.024.650,00	155.127.242,00	93,44
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi dan kebijakan bidang sumberdaya alam yang disusun	Rekomendasi	6	6	100	ST	223.516.060,00	196.441.018,00	87,89
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	2	2	100	ST	61.660.270,00	57.145.237,00	92,68
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	2	2	100	ST	98.794.690,00	83.115.981,00	84,13
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	2	2	100	ST	63.061.100,00	56.179.800,00	89,09
Pengelolaan Kebijakan dan	Jumlah Dokumen Kebijakan BUMD dan	Dokumen	6	6	100	ST	1.455.889.417,00	1.268.786.925,00	87,15



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Koordinasi BUMD dan BLUD	BLUD yang disusun								
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	4	4	100	ST	1.053.043.542,00	887.205.341,00	84,25
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen	2	2	100	ST	402.845.875,00	381.581.584,00	94,72
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							1.269.897.395,00	1.188.987.608,00	93,63
	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual	%	92	100	109	ST			
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	3	3	100	ST	675.898.096,00	645.404.486,00	95,49



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD	Dokumen	1	1	100	ST	253.916.448,00	247.853.093,00	97,61
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN	Dokumen	1	1	100	ST	158.501.648,00	143.947.300,00	90,82
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Dokumen	1	1	100	ST	263.480.000,00	253.604.093,00	96,25
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	3	3	100	ST	593.999.299,00	543.583.122,00	91,51
Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang disediakan	Dokumen	1	1	100	ST	120.751.898,00	113.758.027,00	94,21
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	100	ST	125.339.900,00	112.373.400,00	89,65
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	100	ST	347.907.501,00	317.451.695,00	91,25



34. Sekretariat DPRD

Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Alokasi anggaran untuk Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp159.974.696.588,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp155.311.614.034,65 atau sebesar 97,09%. Jumlah indikator program pada fungsi penunjang Sekretariat DPRD sebanyak 3 indikator, dengan pencapaian 3 indikator kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada fungsi penunjang Sekretariat DPRD tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.53
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, SubKegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi i 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
SEKRETARIAT DPRD							159.974.696.588,00	155.311.614.034,65	97,09
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	ST	81.509.210.346,00	79.057.680.429,65	96,99
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	1	1	100	ST	1.004.400.000,00	985.753.725,00	98,14
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100	ST	222.575.000,00	222.019.270,00	99,75



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100	ST	272.575.000,00	263.671.015,00	96,73
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100	ST	222.575.000,00	215.246.190,00	96,71
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100	ST	25.000.000,00	24.695.700,00	98,78
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100	ST	261.675.000,00	260.121.550,00	99,41
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya	%	100	100	100	ST	13.586.660.095,00	12.678.371.699,00	93,31
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	73	73	100	ST	12.197.729.147,00	11.301.973.135,00	92,66
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100	ST	843.766.000,00	838.606.000,00	99,39
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	100	ST	250.000.000,00	246.771.800,00	98,71
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	100	ST	150.000.000,00	147.323.600,00	98,22
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	100	ST	145.164.948,00	143.697.164,00	98,99
4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Bulan	12	12	100	ST	854.547.460,00	706.698.151,00	82,70



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	60	60	100	ST	754.547.460,00	607.172.151,00	80,47
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	60	100	ST	100.000.000,00	99.526.000,00	99,53
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12	12	100	ST	19.737.591.651,00	19.575.565.580,00	99,18
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	ST	861.483.546,00	846.277.700,00	98,23
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	ST	7.659.241.952,00	7.594.226.675,00	99,15
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100	ST	8.822.111.600,00	8.760.827.439,00	99,31
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100	ST	2.394.754.553,00	2.374.233.766,00	99,14
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset yang diadakan	Unit	10	10	100	ST	1.587.927.763,00	1.554.822.727,00	97,92
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	6	100	ST	1.587.927.763,00	1.554.822.727,00	97,92
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayan	Bulan	12	12	100	ST	7.015.257.400,00	6.788.567.719,00	96,77
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100	ST	1.980.357.400,00	1.916.043.964,00	96,75



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100	ST	5.034.900.000,00	4.872.523.755,00	96,77
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100	100	100	ST	6.616.881.405,00	6.453.700.094,65	97,53
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	60	60	100,00	ST	3.098.896.000,00	3.086.491.355,00	99,60
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	8	100	ST	300.000.000,00	289.746.100,00	96,58
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	500	500	100	ST	171.972.500,00	165.778.500,00	96,40
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	100	ST	1.134.200.982,00	1.054.900.555,65	93,01
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	100	ST	1.911.811.923,00	1.856.783.584,00	97,12
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraanya	%	100	100	100,00	ST	30.755.944.572,00	30.014.360.234,00	97,59
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	45	45	100	ST	30.101.184.572,00	29.500.983.234,00	98,01
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	1	1	100	ST	494.180.000,00	476.643.000,00	96,45
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	45	10	22,22	SR	160.580.000,00	36.734.000,00	22,88



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Layanan Administrasi DPRD	Pemenuhan kebutuhan administrasi DPRD	Bulan	12	12	100	ST	350.000.000,00	299.840.500,00	85,67
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	1	1	100	ST	350.000.000,00	299.840.500,00	85,67
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							78.465.486.242,00	76.253.933.605,00	97,18
	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Skor	74	88,14	119,11	ST			
	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100%	100%	100	ST	78.465.486.242,00		94,38
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi	Dokumen	3	3	100	ST	1.998.012.260,00	1.835.663.400,00	91,87
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1	1	100	ST	409.500.000,00	408.360.000,00	99,72
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	1	1	100	ST	586.736.200,00	511.590.400,00	87,19
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	1	1	100	ST	608.051.460,00	522.612.700,00	85,95
Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	1	1	100	ST	393.724.600,00	393.100.300,00	99,84
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah (APBD DAN APBD P)	Dokumen	2	2	100	ST	175.000.000,00	174.669.800,00	99,81
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	2	2	100	ST	175.000.000,00	174.669.800,00	99,81



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	%	100	100	100	ST	16.606.191.700,00	15.894.827.440,00	95,72
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	1	1	100	ST	1.283.705.000,00	836.476.059,00	65,16
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasidan Dokumentasi Dewan	Dokumen	1	1	100	ST	9.351.524.000,00	9.344.904.515,00	99,93
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	43	43	100	ST	3.212.000.000,00	2.986.321.000,00	92,97
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	1	1	100	ST	2.758.962.700,00	2.727.125.866,00	98,85
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya penyerapan aspirasi Masyarakat di seluruh Dapil	Dapil	7	7	100	ST	28.496.528.063,00	27.869.189.761,00	97,80
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1	1	100	ST	200.000.000,00	199.893.600,00	99,95
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	1	1	100	ST	28.296.528.063,00	27.669.296.161,00	97,78
Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara optimal	%	100	100	100	ST	31.189.754.219,00	30.479.583.204,00	97,72
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	1	1	100	ST	23.683.481.479,00	23.059.563.580,00	97,37
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1	1	100	ST	379.803.000,00	379.338.500,00	99,88
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	1	1	100	ST	320.434.200,00	238.233.300,00	74,35
Fasilitasi Tugas	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	1	1	100	ST	6.806.035.540,00	6.802.447.824,00	99,95



Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD								
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

35. Perencanaan

Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Alokasi anggaran untuk Urusan Perencanaan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp34.535.158.350,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp33.951.067.835,00 atau sebesar 98,31%. Jumlah indikator program pada urusan Perencanaan Sebanyak 4 indikator, dengan pencapaian indikator kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan Perencanaan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.54
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Penunjang Perencanaan Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Status	Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target		Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN							34.535.158.350,00	33.951.067.835,00	98,31
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							26.222.473.898,00	25.938.254.804,00	98,92
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100,00	ST			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran Dan	%	100	100	100,00	ST	247.108.594,00	245.850.763,00	99,49



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Status	Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target		Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Evaluasi Kinerja PD								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	2	2	100,00	ST	141.417.126,00	141.106.766,00	99,78
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	2	2	100,00	ST	43.232.268,00	43.066.467,00	99,62
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	5	5	100,00	ST	62.459.200,00	61.677.530,00	98,75
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST	18.789.447.770,00	18.618.430.454,00	99,09
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	83	83	100,00	ST	18.070.696.770,00	17.901.068.767,00	99,06
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	12	12	100,00	ST	667.786.000,00	666.752.500,00	99,85
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok	1	1	100,00	ST	39.140.000,00	38.951.382,00	99,52
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Lap	18	18	100,00	ST	11.825.000,00	11.657.805,00	98,59
Administrasi Barang Milik	Persentase Pemenuhan	%	100	100	100,00	ST	13.094.000,00	13.004.800,00	99,32



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Status	Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target		Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah								
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	1	1	100,00	ST	13.094.000,00	13.004.800,00	99,32
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST	2.116.336.906,00	2.079.013.247,00	98,24
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	66.141.100,00	65.265.361,00	98,68
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	100.000.000,00	99.166.882,00	99,17
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	250.000.000,00	244.265.650,00	97,71
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	150.000.000,00	146.766.350,00	97,84
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	1	1	100,00	ST	144.110.000,00	144.110.000,00	100,00
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	18.110.000,00	16.160.000,00	89,23
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap	1	1	100,00	ST	267.713.250,00	244.099.551,00	91,18
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	1	1	100,00	ST	942.854.086,00	942.398.336,00	99,95



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Status	Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target		Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dok	3	3	100,00	ST	177.408.470,00	176.781.117,00	99,65
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100,00	ST	558.504.420,00	549.216.250,00	96,84
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	132	132	100,00	ST	382.930.300,00	375.065.000,00	97,95
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	10	10	100,00	ST	175.574.120,00	174.151.250,00	99,19
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100,00	ST	2.891.902.208,00	2.834.570.750,00	98,02
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	12	12	100,00	ST	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	12	100,00	ST	106.230.000,00	94.358.485,00	88,82
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lap	12	12	100,00	ST	242.000.000,00	236.258.000,00	97,63
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	12	12	100,00	ST	2.528.672.208,00	2.488.954.265,00	98,43
Pemeliharaan Barang Milik	Persentase Pemenuhan	%	100	100	100,00	ST	1.606.080.000,00	1.598.168.540,00	99,51



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Status	Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target		Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	25	25	100,00	ST	76.560.000,00	76.422.000,00	99,82
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	22	22	100,00	ST	479.520.000,00	478.096.570,00	99,70
Pemeliharaan Mebel									
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	428	428	100,00	ST	50.000.000,00	49.171.600,00	98,34
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	1.000.000.000,00	994.478.370,00	99,45
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							5.939.832.462,00	5.723.996.143,00	96,37
	Persentase keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota	%	84	100	109,05	ST			
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang tersusun	%	100	100	100,00	ST	4.350.210.808,00	4.217.804.625,00	96,96
Koordinasi Penelaahan	Jumlah Telaahan	Dok	1	1	100,00	ST	992.197.195,00	988.428.565,00	99,62



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Status	Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target		Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah								
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	BA	3	3	100,00	ST	287.749.420,00	255.729.180,00	88,87
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	BA	1	1	100,00	ST	202.970.000,00	202.234.000,00	99,64
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	BA	2	2	100,00	ST	470.225.540,00	468.628.049,00	99,66
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Dok	7	7	100,00	ST	2.397.068.653,00	2.302.784.831,00	96,07
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana	%	100	100	100,00	ST	1.589.621.654,00	1.506.191.518,00	94,75
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Lap	6	6	100,00	ST	821.273.800,00	771.583.859,00	93,95
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Pembangunan Daerah	Lap	2	2	100,00	ST	122.448.000,00	118.334.000,00	96,64
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dok	22	22	100,00	ST	645.899.854,00	616.273.659,00	95,41



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Status	Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target		Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							2.372.851.990,00	2.288.816.888,00	96,46
	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD	%	100	100	100	ST			
	Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	%	95	95	100	ST			
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							507.451.000,00	481.179.458,00	94,82
	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100,00	ST			
	Persentase Keselarasan Muatan RKA Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100,00	ST			
	Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100,00	ST			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir	Dok	1	1	100,00	ST	74.016.700,00	68.712.664,00	92,83



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Status	Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target		Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Lap	1	1	100,00	ST	63.812.000,00	59.318.750,00	92,96
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lap	1	1	100,00	ST	80.224.900,00	76.023.983,00	94,76
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lap	1	1	100,00	ST	160.124.300,00	154.300.300,00	96,36
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Lap	1	1	100,00	ST	129.273.100,00	122.823.761,00	95,01
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							570.469.300,00	567.448.770,00	99,47
	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100	100	100,00	ST			
	Persentase Keselarasan Muatan RKA	%	100	100	100,00	ST			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Status	Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target		Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								
	Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100	100	100,00	ST			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok	1	1	100,00	ST	187.495.700,00	186.981.370,00	99,73
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Lap	1	1	100,00	ST	295.385.500,00	293.817.300,00	99,47
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok	1	1	100,00	ST	87.588.100,00	86.596.100,00	98,87
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							1.294.931.690,00	1.240.242.660,00	95,78
	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang	%	100	100	100,00	ST			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Status	Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target		Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Infrastruktur dan Kewilayahan								
	Persentase Keselarasan Muatan RKA Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100,00	ST			
	Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100,00	ST			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok	1	1	100,00	ST	133.732.000,00	128.639.100,00	96,19
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lap	1	1	100,00	ST	545.343.511,00	525.009.500,00	96,27
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lap	1	1	100,00	ST	164.947.959,00	157.021.600,00	95,19
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	Lap	1	1	100,00	ST	341.131.200,00	327.671.560,00	96,05



Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Status	Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target		Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Daerah Bidang Infrastruktur	RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur								
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Lap	1	1	100,00	ST	109.777.020,00	101.900.900,00	92,83

36. Keuangan

Urusan penunjang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah.

1) Badan Keuangan dan Aset Daerah

Alokasi anggaran untuk fungsi penunjang Keuangan yang dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp872.204.708.666,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp842.197.408.489,00 atau sebesar 96,56%. Jumlah indikator program pada urusan Keuangan yang dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 4 indikator, dengan pencapaian sebanyak 4 indikator kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada fungsi Penunjang Keuangan yang dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 1.55
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Fungsi Penunjang Keuangan yang dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							872.204.708.666,00	842.197.408.489,00	96,56
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100,00	ST	47.839.379.145,00	45.596.953.390,00	95,31
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Dokumen	2	2	100,00	ST	821.377.000,00	785.119.141,00	95,59
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100,00	ST	380.404.695,00	364.937.798,00	95,93
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	175.339.200,00	168.999.395,00	96,38
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	83.206.782,00	78.089.017,00	93,85
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100,00	ST	182.426.323,00	173.092.931,00	94,88
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST	22.310.399.075,00	21.546.044.017,00	96,57
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	95	93	97,89	ST	20.072.091.275,00	19.546.470.577,00	97,38
Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	1	1	100,00	ST	1.844.592.000,00	1.647.226.000,00	89,30



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	100.000.000,00	87.532.251,00	87,53
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	100,00	ST	143.715.800,00	118.417.934,00	82,40
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	150.000.000,00	146.397.255,00	97,60
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST	853.740.400,00	798.369.498,00	93,51
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100,00	ST	97.068.900,00	92.417.500,00	95,21
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	100,00	ST	539.500.000,00	533.778.050,00	98,94
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	23	21	91,30	ST	217.171.500,00	172.173.948,00	79,28
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST	4.211.112.047,00	3.776.938.477,00	89,69
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	89.510.000,00	33.456.400,00	37,38
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	1	1	100,00	ST	60.000.000,00	56.895.000,00	94,83



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Kantor (UPT PEMBERDAYAAN ASET)	Bangunan Kantor yang Disediakan								
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	108.206.520,00	93.524.700,00	86,43
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PEMBERDAYAAN ASET)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	374.745.965,00	372.863.000,00	99,50
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	217.441.120,00	209.866.500,00	96,52
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PEMBERDAYAAN ASET)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	50.000.000,00	46.643.200,00	93,29
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	255.377.480,00	253.870.900,00	99,41
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT PEMBERDAYAAN ASET)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	25.000.000,00	24.085.600,00	96,34
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,00	ST	26.040.000,00	24.480.000,00	94,01
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	114.600.000,00	56.265.000,00	49,10
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	1.845.045.722,00	1.629.928.926,00	88,34
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT DANA BERGULIR)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	125.000.000,00	124.825.629,00	99,86
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT PEMBERDAYAAN ASET)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	395.145.240,00	344.672.727,00	87,23
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	525.000.000,00	505.560.895,00	96,30



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	%	100	100	100,00	ST	3.154.200.275,00	3.088.467.512,00	97,92
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	3	100,00	ST	1.598.605.600,00	1.598.604.960,00	100,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	253.167.626,00	244.965.100,00	96,76
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	69	69	100,00	ST	715.450.419,00	681.170.000,00	95,21
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	1	100,00	ST	305.000.000,00	284.917.852,00	93,42
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	17	17	100,00	ST	281.976.630,00	278.809.600,00	98,88
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100,00	ST	14.501.707.128,00	13.916.894.590,00	95,97
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	200.000.000,00	175.850.000,00	87,93
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PEMBERDAYAAN ASET)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	340.000.000,00	298.698.571,00	87,85
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	230.000.000,00	210.407.600,00	91,48
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	13.189.050.000,00	12.691.165.137,00	96,23
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT PEMBERDAYAAN ASET)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	542.657.128,00	540.773.282,00	99,65
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang Milik Daerah	%	100	100	100,00	ST	1.986.843.220,00	1.685.120.155,00	84,81



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100,00	ST	105.403.800,00	85.100.150,00	80,74
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	32	32	100,00	ST	896.758.850,00	801.843.125,00	89,42
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT PEMBERDAYAAN ASET)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	100,00	ST	4.000.000,00	3.678.000,00	91,95
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	10	100,00	ST	14.932.164,00	14.480.000,00	96,97
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	130	130	100,00	ST	200.000.000,00	91.750.900,00	45,88
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	395.708.806,00	323.910.880,00	81,86
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPT PEMBERDAYAAN ASET)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	150.649.600,00	149.392.000,00	99,17
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT PEMBERDAYAAN ASET)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	69.390.000,00	67.658.000,00	97,50
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT PEMBERDAYAAN ASET)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	150.000.000,00	147.307.100,00	98,20
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							819.691.025.521,00	792.458.277.068,00	96,68
	Presentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan	%	100	100	100,00	ST			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat								
	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	%	100	100	100,00	ST			
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Perentase dokumen RANPERDA APBD Provinsi yang disusun	%	100	100	100,00	ST	5.897.500.000,00	5.674.173.529,00	96,21
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	dokumen	2	2	100,00	ST	309.000.000,00	306.094.032,00	99,06
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	dokumen	2	2	100,00	ST	200.000.000,00	194.838.210,00	97,42
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	dokumen	43	43	100,00	ST	408.040.000,00	393.651.720,00	96,47
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	dokumen	43	43	100,00	ST	350.000.000,00	345.750.120,00	98,79
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	dokumen	2	2	100,00	ST	553.600.000,00	545.200.424,00	98,48
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	dokumen	2	2	100,00	ST	450.000.000,00	411.039.842,00	91,34
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	dokumen	2	2	100,00	ST	720.000.000,00	680.332.039,00	94,49
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	dokumen	1	1	100,00	ST	219.300.000,00	216.650.188,00	98,79
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	dokumen	1	1	100,00	ST	1.830.000.000,00	1.732.957.020,00	94,70
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	dokumen	1	1	100,00	ST	197.560.000,00	192.128.451,00	97,25
Pembinaan Perencanaan	Jumlah Orang yang Mengikuti	orang	88	88	100,00	ST	660.000.000,00	655.531.483,00	99,32



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi								
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Perentase tersedianya Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi RAPBD Kab kota	%	100	100	100,00	ST	2.122.499.992,00	1.896.680.536,00	89,36
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan	7	7	100,00	ST	259.000.000,00	229.398.402,00	88,57
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	laporan	7	7	100,00	ST	230.444.000,00	216.256.170,00	93,84
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	laporan	7	7	100,00	ST	239.300.000,00	215.418.224,00	90,02
Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	dokumen	7	7	100,00	ST	393.000.000,00	279.951.688,00	71,23
Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	laporan	1	1	100,00	ST	579.000.000,00	538.743.934,00	93,05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	dokumen	1	1	100,00	ST	421.755.992,00	416.912.118,00	98,85



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pembinaan penatausahaan Keuangan Daerah	%	100	100	100,00	ST	1.828.750.000,00	1.706.262.446,00	93,30
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	dokumen	1	1	100,00	ST	628.750.000,00	590.951.329,00	93,99
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	dokumen	1	1	100,00	ST	200.000.000,00	196.353.918,00	98,18
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	dokumen	1	1	100,00	ST	310.000.000,00	293.295.669,00	94,61
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	dokumen	1	1	100,00	ST	340.000.000,00	313.200.116,00	92,12
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	1	100,00	ST	150.000.000,00	132.323.874,00	88,22
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	135	135	100,00	ST	200.000.000,00	180.137.540,00	90,07
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu	%	100	100	100,00	ST	2.435.000.000,00	2.288.922.678,00	94,00
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi	Jumlah Laporan Hasil	Laporan	1	1	100,00	ST	150.000.000,00	148.568.804,00	99,05



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah								
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	1	1	100,00	ST	100.000.000,00	99.150.000,00	99,15
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (UPT DANA BERGULIR)	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	1	1	100,00	ST	60.000.000,00	52.107.500,00	86,85
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	1	1	100,00	ST	650.000.000,00	626.574.645,00	96,40
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	2	2	100,00	ST	400.000.000,00	388.212.361,00	97,05
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	1	100,00	ST	100.000.000,00	95.632.494,00	95,63
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Dokumen	1	1	100,00	ST	150.000.000,00	145.538.650,00	97,03



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah								
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	300.000.000,00	286.555.340,00	95,52
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	88	88	100,00	ST	150.000.000,00	128.616.242,00	85,74
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Lembaga	2	2	100,00	ST	375.000.000,00	317.966.642,00	84,79
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan ketersediaan dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	100	100,00	ST	805.887.275.529,00	779.431.935.765,00	96,72
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	350.000.000,00	344.131.860,00	98,32
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	9.250.000.000,00	8.696.414.009,00	94,02
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (UPT Dana Bergulir)	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	458.402.000,00	433.911.766,00	94,66
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	1	100,00	ST	8.400.000.000,00	8.352.581.914,00	99,44
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan	Laporan	1	1	100,00	ST	6.960.777.665,00	2.413.029.129,00	34,67



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Mendesak								
Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	1	1	100,00	ST	780.468.095.864,00	759.191.867.087,00	97,27
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Sistem informasi Pemerintah Daerah yang dikelola	%	100	100	100,00	ST	1.520.000.000,00	1.460.302.114,00	96,07
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	770.000.000,00	740.020.523,00	96,11
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	88	88	100,00	ST	750.000.000,00	720.281.591,00	96,04
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							4.674.304.000,00	4.142.178.031,00	88,62
	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	%	88	85	96,59	ST			
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD tertib pelaporan BMD	%	100	100	100,00	ST	4.674.304.000,00	4.142.178.031,00	88,62
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	1	100,00	ST	560.495.000,00	524.806.200,00	93,63
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	100,00	ST	180.000.000,00	150.669.800,00	83,71
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	300.000.000,00	274.807.500,00	91,60
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	452.294.000,00	427.722.513,00	94,57
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik	Laporan	1	1	100,00	ST	851.072.000,00	730.185.440,00	85,80



Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Daerah								
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	998.255.250,00	928.165.504,00	92,98
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	297.504.000,00	260.648.900,00	87,61
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	327.777.750,00	277.063.250,00	84,53
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	5	100,00	ST	500.000.000,00	392.864.023,00	78,57
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	100,00	ST	206.906.000,00	175.244.901,00	84,70

2) Badan Pendapatan Daerah

Alokasi anggaran untuk fungsi penunjang Keuangan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp121.218.166.877,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp118.460.028.214,00 atau sebesar 97,72%. Jumlah indikator program pada urusan Keuangan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah sebanyak 7 indikator, dengan pencapaian sebanyak 7 indikator kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada fungsi penunjang Keuangan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.56



Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Fungsi Penunjang Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
BADAN PENDAPATAN DAERAH							121.218.166.877,00	118.460.028.214,95	97,72
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							445.973.186,00	409.976.883,95	91,93
	Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer Dibandingkan Target Tahun Berjalan	%	91	82,79	90,98	ST			
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	138.990.500,00	121.360.580,00	87,32
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	138.990.500,00	121.360.580,00	87,32
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Dokumen	2	2	100,00	ST	237.952.000,00	219.797.916,00	92,37
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Dokumen	2	2	100,00	ST	237.952.000,00	219.797.916,00	92,37
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Bahan Tanggapan Bahan Pemeriksaan	Dokumen	1	1	100,00	ST	69.030.686,00	68.818.387,00	99,69
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP	Dokumen	1	1	100,00	ST	69.030.686,00	68.818.387,00	99,69



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD								
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							13.953.343.381,00	13.257.563.806,00	95,01
	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	%	4,99	9,29	186,17	ST			
	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih	%	24	37,83	157,63	ST			
	Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan	Jenis Layana	1	1	100,00	ST			
	Jumlah Wajib Pajak Pegguna Layanan Samsat Unggulan	Pegguna Sistem Aplikasi	15.606	21.033	134,78%	ST			
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	%	4,99	9,29	186,17	ST	13.953.343.381,00	13.257.563.806,00	95,01
	2. Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	%	24	37,83	157,63	ST			
	3. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	%	73	104,93	143,74	ST			
	4. Lama Gangguan Operasional Pelayanan Di Seluruh Kepri	JAM	12	4	800,00	ST			
	5. Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan	Sarpras layanan	1	1	100,00	ST			
	6. Survey Mutu Pelayanan	nilai/skor	82	87,53	106,74	ST			
Perencanaan Pengelolaan	Jumlah Dokumen	Dokumen	2	2	100,00	ST	931.434.188,00	837.722.993,00	89,94



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
Pajak Daerah	Rencana Pengelolaan Pajak Daerah								
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1 Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah 2 Jumlah Laporan Pengembangan Pajak dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen Laporan	2	2	100,00	ST	1.085.834.388,00	1.018.839.689,00	93,83
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	1.147.975.020,00	1.111.285.162,00	96,80
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana Prasarana	32	32	100,00	ST	2.191.977.232,00	2.091.500.432,00	95,42
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Pusat)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana Prasarana	3	3	100,00	ST	418.440.887,00	399.598.115,00	95,50
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana Prasarana	5	5	100,00	ST	602.457.300,00	602.220.000,00	99,96
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana Prasarana	5	5	100,00	ST	245.242.652,00	229.577.023,00	93,61
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana Prasarana	5	5	100,00	ST	331.523.396,00	295.598.779,00	89,16
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana Prasarana	3	3	100,00	ST	309.358.701,00	292.366.477,00	94,51
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (UPTD PPD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana Prasarana	3	3	100,00	ST	103.033.496,00	100.285.788,00	97,33



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
Lingga)									
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana Prasarana	3	3	100,00	ST	80.438.000,00	75.968.000,00	94,44
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana Prasarana	2	2	100,00	ST	47.430.300,00	45.131.250,00	95,15
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana Prasarana	2	2	100,00	ST	35.420.100,00	33.060.000,00	93,34
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana Prasarana	1	1	100,00	ST	18.632.400,00	17.695.000,00	94,97
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	10	10	100,00	ST	674.869.619,00	653.616.124,00	96,85
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	87.480.400,00	87.288.000,00	99,78
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	84.999.773,00	82.594.500,00	97,17
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	77.260.000,00	75.714.500,00	98,00
Pendataan dan Pendaftaran	Jumlah Laporan Hasil	Laporan	1	1	100,00	ST	49.988.966,00	47.427.250,00	94,88



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
Objek Pajak Daerah (UPTD PPD Karimun)	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah								
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	144.656.096,00	143.062.053,00	98,90
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	19.710.000,00	9.900.000,00	50,23
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD PPD Anambas)	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	19.950.000,00	19.950.000,00	100,00
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	167.095.584,00	165.324.821,00	98,94
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	12.668.000,00	12.585.000,00	99,34
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	11.060.800,00	9.770.000,00	88,33
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis	Laporan	1	1	100,00	ST	1.098.848.795,00	1.047.657.378,00	95,34



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
	Data Pajak Daerah								
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	Laporan	1	1	100,00	ST	284.023.954,00	277.998.969,00	97,88
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	327.143.974,00	306.905.607,00	93,81
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	11	11	100,00	ST	3.103.525.038,00	2.990.391.153,00	96,35
Penagihan Pajak Daerah (Pusat)	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	1	100,00	ST	667.639.246,00	596.023.890,00	89,27
Penagihan Pajak Daerah (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	1	100,00	ST	698.192.832,00	692.464.480,00	99,18
Penagihan Pajak Daerah (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	1	100,00	ST	578.102.313,00	572.794.888,00	99,08
Penagihan Pajak Daerah (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	1	100,00	ST	133.312.648,00	127.996.428,00	96,01
Penagihan Pajak Daerah (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	1	100,00	ST	136.594.146,00	133.000.220,00	97,37
Penagihan Pajak Daerah (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	1	100,00	ST	163.491.644,00	158.500.649,00	96,95
Penagihan Pajak Daerah (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	1	100,00	ST	176.392.144,00	166.701.616,00	94,51
Penagihan Pajak Daerah (UPTD PPD Anambas)	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	1	100,00	ST	117.474.096,00	115.402.390,00	98,24



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
Penagihan Pajak Daerah (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	1	100,00	ST	196.405.692,00	195.499.282,00	99,54
Penagihan Pajak Daerah (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	1	100,00	ST	99.419.296,00	97.202.050,00	97,77
Penagihan Pajak Daerah (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	1	100,00	ST	136.500.981,00	134.805.260,00	98,76
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen/target Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	411.777.709,00	362.857.504,00	88,12
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen LHP Laporan	22	22	100,00	ST	2.448.766.228,00	2.327.701.488,00	95,06
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (Pusat)	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen LHP Laporan	2	2	100,00	ST	640.642.588,00	557.451.327,00	87,01
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen LHP Laporan	2	2	100,00	ST	783.861.072,00	771.888.962,00	98,47
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen LHP Laporan	2	2	100,00	ST	222.050.344,00	215.872.158,00	97,22
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah	Dokumen LHP	2	2	100,00	ST	203.543.528,00	198.194.200,00	97,37



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
Daerah (UPTD PPD Bintan)	Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan							
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen LHP Laporan	2	2	100,00	ST	129.723.800,00	125.302.859,00	96,59
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen LHP Laporan	2	2	100,00	ST	166.931.400,00	164.738.200,00	98,69
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen LHP Laporan	2	2	100,00	ST	75.448.500,00	74.683.500,00	98,99
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (UPTD PPD Anambas)	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen LHP Laporan	2	2	100,00	ST	116.218.096,00	115.538.282,00	99,42
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen LHP Laporan	2	2	100,00	ST	40.181.900,00	35.622.000,00	88,65
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan	Dokumen LHP Laporan	2	2	100,00	ST	20.195.000,00	19.000.000,00	94,08



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
	Pengawasan Pajak Daerah								
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen LHP Laporan	2	2	100,00	ST	49.970.000,00	49.410.000,00	98,88
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2	2	100,00	ST	221.692.236,00	207.621.037,00	93,65
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	25.475.000,00	23.466.270,00	92,11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							106.818.850.310,00	104.792.487.525,00	98,10
	Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan PAD lainnya	%	7,31	126,73	1.733,65	ST			
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100,00	ST			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja	Dokumen	4	4	100,00	ST	787.137.464,00	679.882.808,00	86,37
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100,00	ST	243.256.555,00	179.221.127,00	73,68
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	1	1	100,00	ST	31.608.000,00	27.466.800,00	86,90



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	512.272.909,00	473.194.881,00	92,37
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	laporan	1	1	100,00	ST	77.732.543.169,00	77.341.345.622,00	99,50
	2 Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	1	1	100,00	ST			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	189	189	100,00	ST	36.629.708.194,00	36.287.585.335,00	99,07
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	41.073.718.595,00	41.027.123.065,00	99,89
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	29.116.380,00	26.637.222,00	91,49
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	208.234.641,00	192.430.034,00	92,41
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen dan rekonsiliasi dan penyusunan barang Barang milik daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	208.234.641,00	192.430.034,00	92,41
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi, Analisa Startegi dan Pengembangan Kebijakan Retribusi	Dokumen	4	4	100,00	ST	722.323.400,00	653.158.519,00	90,42



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
	Daerah								
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	121.815.200,00	113.203.041,00	92,93
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	238.804.400,00	215.569.478,00	90,27
Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	277.023.500,00	256.254.000,00	92,50
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	84.680.300,00	68.132.000,00	80,46
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemecatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00	ST	470.012.430,00	358.904.827,00	76,36
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	9	9	100,00	ST	261.019.730,00	256.152.900,00	98,14
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Pusat)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100,00	ST	91.661.700,00	90.607.000,00	98,85
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100,00	ST	75.108.200,00	74.955.000,00	99,80
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100,00	ST	33.063.800,00	31.916.000,00	96,53
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (UPTD)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100,00	ST	10.000.000,00	9.966.000,00	99,66



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
PPD Bintan)									
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100,00	ST	13.635.000,00	12.000.000,00	88,01
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100,00	ST	8.635.500,00	8.550.000,00	99,01
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100,00	ST	11.332.530,00	10.962.900,00	96,74
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100,00	ST	9.823.600,00	9.496.000,00	96,67
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100,00	ST	7.759.400,00	7.700.000,00	99,23
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	15	100,00	ST	208.992.700,00	102.751.927,00	49,17
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	83	81	97,59	ST	9.965.123.140,00	9.281.129.615,00	93,14
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11	11	100,00	ST	136.940.175,00	130.284.200,00	95,14
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Pusat)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	86.056.250,00	81.134.000,00	94,28



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	3.768.300,00	3.676.000,00	97,55
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	8.340.400,00	8.137.000,00	97,56
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	7.208.400,00	7.064.200,00	98,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	7.367.500,00	7.105.500,00	96,44
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	7.199.916,00	6.708.500,00	93,17
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	4.848.000,00	4.725.000,00	97,46
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD PPD Anambas)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	2.984.000,00	2.906.000,00	97,39
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	1	1	100,00	ST	4.487.309,00	4.371.000,00	97,41



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
Bangunan Kantor (UPTD PPD Batu Aji)	Bangunan Kantor yang Disediakan								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	472.800,00	340.000,00	71,91
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	4.207.300,00	4.117.000,00	97,85
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	100,00	ST	1.821.284.189,00	1.719.563.600,00	94,41
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pusat)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	1.311.389.235,00	1.254.440.000,00	95,66
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	286.900.692,00	279.220.000,00	97,32
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	55.559.343,00	52.996.000,00	95,39
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	64.137.948,00	58.345.000,00	90,97
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	22.967.743,00	20.515.600,00	89,32
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	20.322.000,00	20.000.000,00	98,42
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Paket	1	1	100,00	ST	25.556.500,00	3.550.000,00	13,89



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
	Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	14.691.985,00	13.162.000,00	89,59
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	6.533.443,00	5.250.000,00	80,36
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	13.225.300,00	12.085.000,00	91,38
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	8	6	75,00	S	421.907.971,00	373.300.000,00	88,48
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Pusat)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	335.516.680,00	305.200.000,00	90,96
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	5.439.600,00	5.300.000,00	97,43
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	31.486.482,00	27.550.000,00	87,50
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	7.069.900,00	5.800.000,00	82,04
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	28.895.000,00	28.050.000,00	97,08
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	-	SR	10.622.200,00	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	-	SR	1.364.358,00	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPTD)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Paket	1	1	100,00	ST	1.513.751,00	1.400.000,00	92,49



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
PPD Kijang)	Disediakan								
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	11	11	100,00	ST	1.273.861.554,00	1.204.733.600,00	94,57
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Pusat)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	418.531.254,00	396.285.500,00	94,68
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	217.248.900,00	203.107.600,00	93,49
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	78.217.900,00	70.256.000,00	89,82
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	76.372.500,00	73.818.900,00	96,66
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	71.119.300,00	69.020.900,00	97,05
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	54.876.400,00	50.196.500,00	91,47
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	51.918.500,00	51.046.300,00	98,32
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PPD Anambas)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	29.818.100,00	29.562.000,00	99,14
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	193.059.800,00	189.366.800,00	98,09
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	51.248.100,00	43.536.700,00	84,95
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	31.450.800,00	28.536.400,00	90,73
Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang	Paket	11	11	100,00	ST	3.175.430.868,00	3.012.841.700,00	94,88



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan								
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Pusat)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	2.685.278.137,00	2.570.462.000,00	95,72
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	194.105.659,00	178.619.400,00	92,02
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	43.424.069,00	38.734.700,00	89,20
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	48.805.339,00	45.707.800,00	93,65
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	24.770.100,00	24.203.500,00	97,71
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	19.596.816,00	13.594.500,00	69,37
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	30.778.000,00	25.747.000,00	83,65
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD PPD Anambas)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	16.804.292,00	16.750.000,00	99,68
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Paket	1	1	100,00	ST	59.764.000,00	54.374.000,00	90,98



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
	Disediakan								
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	20.603.700,00	15.400.000,00	74,74
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	31.500.756,00	29.248.800,00	92,85
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	10	100,00	ST	77.063.609,00	73.612.000,00	95,52
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan (Pusat)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,00	ST	49.920.000,00	49.260.000,00	98,68
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,00	ST	7.119.000,00	5.916.000,00	83,10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,00	ST	6.002.500,00	6.000.000,00	99,96
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,00	ST	3.000.000,00	2.480.000,00	82,67
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,00	ST	3.943.900,00	3.207.000,00	81,32
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,00	ST	1.920.000,00	1.920.000,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Dokumen Bahan	Dokumen	1	1	100,00	ST	640.000,00	450.000,00	70,31



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
dan Peraturan Perundang- Undangan (UPTD PPD Natuna)	Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan								
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,00	ST	1.562.709,00	1.560.000,00	99,83
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,00	ST	960.000,00	960.000,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,00	ST	1.995.500,00	1.859.000,00	93,16
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	11	11	100,00	ST	231.018.500,00	214.027.920,00	92,65
Fasilitasi Kunjungan Tamu (Pusat)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	188.250.000,00	172.777.920,00	91,78
Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	592.000,00	540.000,00	91,22
Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	5.002.500,00	5.000.000,00	99,95
Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	1.188.000,00	1.134.000,00	95,45
Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	3.178.900,00	2.998.500,00	94,33
Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	11.725.500,00	10.980.000,00	93,64
Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Laporan	1	1	100,00	ST	6.970.000,00	6.800.000,00	97,56



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
	Tamu								
Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPTD PPD Anambas)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	4.665.500,00	4.640.000,00	99,45
Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	4.980.000,00	4.762.000,00	95,62
Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	2.991.000,00	2.991.000,00	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	1.475.100,00	1.404.500,00	95,21
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	11	11	100,00	ST	2.645.376.382,00	2.376.550.912,00	89,84
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Pusat)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	896.624.000,00	720.075.904,00	80,31
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	210.743.288,00	206.937.865,00	98,19
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	249.215.614,00	243.878.781,00	97,86
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	66.736.000,00	64.379.500,00	96,47
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	222.609.192,00	212.380.566,00	95,41
Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan	Laporan	1	1	100,00	ST	169.538.000,00	155.845.400,00	91,92



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PPD Lingga)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	370.230.096,00	331.166.536,00	89,45
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PPD Anambas)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	132.957.048,00	132.814.294,00	99,89
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	143.745.144,00	134.465.287,00	93,54
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	69.744.000,00	69.668.000,00	99,89
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	113.234.000,00	104.938.779,00	92,67
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	182.239.892,00	176.215.683,00	96,69
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	15	15	100,00	ST	1.686.101.260,00	1.629.981.055,95	96,67
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	3	100,00	ST	108.260.100,00	96.920.000,00	89,53
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	854.913.747,00	839.728.599,95	98,22
Pengadaan Gedung Kantor	Jumlah Unit Gedung	Unit	11	11	100,00	ST	722.927.413,00	693.332.456,00	95,91



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	28	28	100,00	ST	8.818.589.742,00	8.457.490.986,00	95,91
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	11	11	100,00	ST	49.774.009,00	48.169.000,00	96,78
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Pusat)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	19.411.700,00	18.200.000,00	93,76
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	4.159.000,00	4.150.000,00	99,78
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	8.700.500,00	8.690.000,00	99,88
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	3.153.900,00	3.153.500,00	99,99
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD PPD Anambas)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	1.494.000,00	1.492.000,00	99,87
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	1.900.309,00	1.900.000,00	99,98
Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan	Laporan	1	1	100,00	ST	1.996.500,00	1.686.500,00	84,47



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
Menyurat (UPTD PPD Kijang)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	1.958.100,00	1.897.000,00	96,88
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	11	11	100,00	ST	3.785.617.076,00	3.453.368.994,00	91,22
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Pusat)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	2.637.160.000,00	2.416.621.191,00	91,64
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	98.166.960,00	96.360.647,00	98,16
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	250.000.156,00	233.461.104,00	93,38
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	106.385.950,00	103.516.924,00	97,30
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	285.302.660,00	216.441.018,00	75,86
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	1	1	100,00	ST	51.462.560,00	51.285.901,00	99,66



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
PPD Lingga)	Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	72.516.405,00	68.757.487,00	94,82
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD PPD Anambas)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	62.549.405,00	59.037.932,00	94,39
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	112.632.980,00	102.610.172,00	91,10
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	71.000.000,00	68.152.376,00	95,99
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	38.440.000,00	37.124.242,00	96,58
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6	6	100,00	ST	226.739.509,00	222.206.000,00	98,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pusat)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	136.611.700,00	134.400.000,00	98,38
Penyediaan Jasa Peralatan	Jumlah Laporan	Laporan	1	1	100,00	ST	61.359.000,00	61.350.000,00	99,99



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
dan Perlengkapan Kantor (UPTD PPD Batam Centre)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	2.500,00	-	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	14.400.309,00	13.600.000,00	94,44
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	12.756.000,00	11.256.000,00	88,24
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	1.610.000,00	1.600.000,00	99,38
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	4.756.459.148,00	4.733.746.992,00	99,52
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	151	151	100,00	ST	6.428.785.064,00	6.198.164.058,00	96,41
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	84	84	100,00	ST	2.522.884.326,00	2.402.756.482,00	95,24



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Pusat)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	17	100,00	ST	959.203.472,00	881.514.532,00	91,90
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	18	100,00	ST	766.530.254,00	766.111.650,00	99,95
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	11	100,00	ST	250.585.200,00	220.627.000,00	88,04
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	100,00	ST	170.272.400,00	162.569.000,00	95,48
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	4	100,00	ST	77.410.000,00	77.387.300,00	99,97
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	6	6	100,00	ST	51.200.000,00	51.023.000,00	99,65



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
Operasional atau Lapangan (UPTD PPD Lingga)	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	100,00	ST	77.410.000,00	77.340.000,00	99,91
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD PPD Anambas)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	100,00	ST	10.710.000,00	10.704.000,00	99,94
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	100,00	ST	47.630.000,00	46.850.000,00	98,36
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	100,00	ST	69.905.000,00	66.602.000,00	95,28
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	4	100,00	ST	42.028.000,00	42.028.000,00	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	57	57	100,00	ST	686.660.288,00	615.697.000,00	89,67
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Pusat)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	10	10	100,00	ST	494.676.192,00	434.121.000,00	87,76



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
	Dipelihara								
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	2	100,00	ST	31.559.000,00	31.407.000,00	99,52
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	100,00	ST	14.940.000,00	14.840.000,00	99,33
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	100,00	ST	29.870.000,00	25.198.000,00	84,36
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	100,00	ST	53.645.096,00	52.021.000,00	96,97
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	100,00	ST	20.510.000,00	18.385.000,00	89,64
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	100,00	ST	17.880.000,00	17.880.000,00	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD PPD Anambas)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	100,00	ST	3.570.000,00	3.480.000,00	97,48
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	100,00	ST	4.940.000,00	4.460.000,00	90,28
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	100,00	ST	9.950.000,00	8.785.000,00	88,29
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	100,00	ST	5.120.000,00	5.120.000,00	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10	100,00	ST	3.219.240.450,00	3.179.710.576,00	98,77
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	Unit	1	1	100,00	ST	2.026.443.390,00	2.005.172.536,00	98,95



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Pusat)	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	261.105.641,00	254.269.346,00	97,38
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	226.765.852,00	225.639.816,00	99,50
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	150.320.930,00	150.246.164,00	99,95
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	66.474.096,00	65.414.666,00	98,41
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	122.522.704,00	120.111.004,00	98,03
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD PPD Anambas)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	33.237.048,00	33.230.124,00	99,98
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	199.422.597,00	192.955.701,00	96,76



Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	66.474.096,00	66.204.047,00	99,59
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	66.474.096,00	66.467.172,00	99,99

37. Kepegawaian

Fungsi penunjang Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri. Alokasi anggaran untuk Urusan Kepegawaian pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 17.154.945.061,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp 16.716.067.014,00 atau sebesar 97,44%. Jumlah indikator program pada fungsi penunjang Kepegawaian sebanyak 4 indikator, dengan pencapaian sebanyak 4 indikator kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada fungsi Penunjang Kepegawaian tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.57
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Fungsi Penunjang Kepegawaian Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN							17.154.945.061,00	16.716.067.014,00	97,44
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							14.791.889.947,00	14.443.326.214,00	97,64
	Persentase Tingkat	%	100	100	100,00	ST			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor								
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan , Penganggaran Dan Evaluasi	Dokumen	1	1	100,00	ST	129.652.200,00	128.862.618,00	99,39
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	129.652.200,00	128.862.618,00	99,39
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai setara Administrasi melaksanakan Tugas	Bulan	12	12	100,00	ST	12.645.536.151,00	12.378.478.086,00	97,89
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	58	58	100,00	ST	12.167.360.151,00	11.907.823.821,00	97,87
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	421.236.000,00	414.396.000,00	98,38
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	56.940.000,00	56.258.265,00	98,80
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian	Laporan	1	1	100,00	ST	2.500.000,00	1.000.000,00	40,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	1	100,00	ST	2.500.000,00	1.000.000,00	40,00
Administrasi Umum	Tersedianya Barang	Unit	15	15	100,00	ST	790.447.300,00	774.896.257,00	98,03



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Perangkat Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	11.314.000,00	10.777.516,00	95,26
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	122.909.300,00	121.299.300,00	98,69
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	25.000.000,00	21.793.432,00	87,17
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	37.445.300,00	34.679.603,00	92,61
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	16.494.200,00	13.336.134,00	80,85
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	50	50	100,00	ST	60.573.500,00	56.601.679,00	93,44
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	50	100,00	ST	516.711.000,00	516.408.593,00	99,94
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya Air, Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	100,00	ST	890.324.096,00	843.881.153,00	95,18
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	25.000.000,00	21.922.000,00	87,69
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	1	1	100,00	ST	30.000.000,00	22.956.694,00	76,52



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	48.000.000,00	47.400.000,00	98,75
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	787.324.096,00	751.602.459,00	95,91
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	Unit	10	10	100,00	ST	333.430.200,00	316.208.100,00	94,83
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	10	10	100,00	ST	301.657.100,00	290.475.000,00	96,29
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	2	100,00	ST	20.000.000,00	15.776.400,00	78,88
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	11.773.100,00	9.956.700,00	84,57
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							2.363.055.114,00	2.272.740.800,00	96,18
	Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan	%	45,90	52,75	114,92	ST			
	Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi	%	77	98,26	127,61	ST			
	Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik	%	96	98,9	103,02	ST			
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Pemberhentian Informasi	Dokumen	3	3	100,00	ST	480.750.890,00	463.538.391,00	96,42



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Kepegawaian ASN								
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	1	100,00	ST	330.000.000,00	326.010.899,00	98,79
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	120	120	100,00	ST	20.692.050,00	19.529.550,00	94,38
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	1	100,00	ST	56.549.240,00	48.378.307,00	85,55
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	3	3	100,00	ST	51.930.900,00	49.613.636,00	95,54
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1	1	100,00	ST	21.578.700,00	20.005.999,00	92,71
Mutasi dan Promosi ASN	Tersedianya Dokuemn Hasil Pengelolaan Mutasi Promosi ASN	Dokumen	2	2	100,00	ST	805.082.800,00	766.812.643,00	95,25
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	550	532	96,73	ST	275.099.800,00	259.633.319,00	94,38
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	2	2	100,00	ST	94.983.000,00	93.634.075,00	98,58
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	30	73	243,33	ST	435.000.000,00	413.545.249,00	95,07
Pengembangan Kompetensi ASN	Tersedianya Pegawai yang dinilai kompetensinya	Orang	250	271	108,40	ST	816.133.720,00	812.773.595,00	99,59
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	1	1	100,00	ST	305.949.864,00	304.316.054,00	99,47
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	1	1	100,00	ST	448.249.256,00	447.195.927,00	99,77



Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023				Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Orang	126	459	364,29	ST	61.934.600,00	61.261.614,00	98,91
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai yang dievaluasi kinerjanya	%	100	100	100,00	ST	261.087.704,00	229.616.171,00	87,95
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	1	100,00	ST	61.446.327,00	58.672.943,00	95,49
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	370	659	178,11	ST	57.888.310,00	44.974.637,00	77,69
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	12	12	100,00	ST	88.339.767,00	77.214.517,00	87,41
Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	1	1	100,00	ST	53.413.300,00	48.754.074,00	91,28

38. Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi Penunjang Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Alokasi anggaran untuk fungsi penunjang Pendidikan dan pelatihan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp17.669.707.003,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp17.079.891.616,00 atau sebesar 96,66%). Jumlah indikator program pada fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 2 indikator, dengan pencapaian sebanyak 2 indikator kategori sangat tinggi. Selengkapny pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dan tindak lanjut rekomendasi DPRD pada fungsi Penunjang Pendidikan dan pelatihan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.58
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/	Indikator Kinerja Program,	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023	Capaian Anggaran Tahun 2023
-------------------------------------	----------------------------	--------	--	-----------------------------



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan, Sub Kegiatan								
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
FUNGSI PENUNJANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		Persentase	100	100	100,00	ST	17.669.707.003,00	17.079.891.616,00	96,66%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase	100,00	100,00	100,00	ST	15.867.974.371,00	15.420.661.528,00	97,18%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen	3	3	100,00	ST	174.368.205,00	166.897.924,00	95,72%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	2	2	100,00	ST	128.997.005,00	127.854.985,00	99,11%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen	1	1	100,00	ST	45.371.200,00	39.042.939,00	86,05%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							9.936.222.737,00	9.725.791.730,00	97,88%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Orang	37	38	102,70	ST	9.714.218.737,00	9.526.297.730,00	98,07%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen	4	4	100,00	ST	222.004.000,00	199.494.000,00	89,86%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase	100	100	100	ST	275.687.500,00	255.331.142,00	92,62%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Paket	1	1	100,00	ST	138.404.500,00	135.180.000,00	97,67%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Orang	5	5	100,00	ST	137.283.000,00	120.151.142,00	87,52%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase	100	100	100	ST	1.066.033.116,00	1.000.532.864,00	93,86%
Penyediaan Komponen		Paket	4	4	100,00	ST	17.096.600,00	16.883.200,00	98,75%



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Paket	4	4	100,00	ST	25.851.455,00	24.195.000,00	93,59%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Paket	4	4	100,00	ST	1.494.050,00	1.493.550,00	99,97%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Paket	4	4	100,00	ST	104.833.454,00	88.312.536,00	84,24%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Paket	1	1	100,00	ST	38.265.372,00	22.549.750,00	58,93%
Fasilitasi Kunjungan Tamu		Paket	4	4	100,00	ST	55.276.000,00	37.209.900,00	67,32%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Paket	4	4	100,00	ST	823.216.185,00	809.888.928,00	98,38%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase	100	100	100	ST	2.054.090.173,00	1.965.150.500,00	95,67%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Unit	3	3	100,00	ST	813.305.500,00	754.155.000,00	92,73%
Pengadaan Mebel		Paket	4	4	100,00	ST	637.647.203,00	619.625.500,00	97,17%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Unit	4	4	100,00	ST	603.137.470,00	591.370.000,00	98,05%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase	100	100	100	ST	872.121.136,00	867.395.165,00	99,46%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Laporan	4	4	100,00	ST	7.066.300,00	7.056.000,00	99,85%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Laporan	4	4	100,00	ST	48.000.500,00	48.000.000,00	100,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan	4	4	100,00	ST	817.054.336,00	812.339.165,00	99,42%



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	100	100	ST	1.489.451.504,00	1.439.562.203,00	96,65%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Unit	6	6	100,00	ST	340.195.400,00	310.770.650,00	91,35%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Unit	18	18	100,00	ST	14.960.000,00	14.180.000,00	94,79%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit	4	4	100,00	ST	550.485.735,00	533.373.153,00	96,89%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit	1	1	100,00	ST	583.810.369,00	581.238.400,00	99,56%
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							1.801.732.632,00	1.659.230.088,00	92,09%
	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi	%	34	34,34	101,00	ST			
Pengembangan Kompetensi Teknis		Orang	1400	2155	153,93	ST	642.503.000,00	621.481.762,00	96,73%
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan		Orang	1400	2155	153,93	ST	642.503.000,00	621.481.762,00	96,73%



Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Laporan Orang	2 40	2 39	100 97,50	ST	1.159.229.632,00	1.037.748.326,00	89,52%
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		Laporan	2	2	100	ST	482.772.000,00	418.444.777,00	86,68%
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Orang	40	39	97,50	ST	676.457.632,00	619.303.549,00	91,55%

39. Penelitian dan Pengembangan

Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Alokasi anggaran untuk Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp807.248.000,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp789.676.114,00 atau sebesar 97,82%. Jumlah indikator program pada urusan Penelitian dan Pengembangan sebanyak 2 indikator, dengan pencapaian sebanyak 2 indikator kategori sangat tinggi.



Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.59
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							807.248.000,00	789.676.114,00	97,82
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							807.248.000,00	789.676.114,00	97,82
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	80	100,00	125,00	ST			
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	40	72,72	181,80	ST			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Berkualitas	%	50	50	100,00	ST	376.100.000,00	368.171.271,00	97,89
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Lap	1	1	100,00	ST	376.100.000,00	368.171.271,00	97,89



Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Berkualitas	%	50	50	100,00	ST	225.662.000,00	221.266.755,00	98,05
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dok	1	1	100,00	ST	225.662.000,00	221.266.755,00	98,05
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Fasilitas Penerapan Inovasi Perangkat Daerah Serta Kebijakan Inovasi Di Daerah Yang Terlaksana	%	50	50	100,00	ST	205.486.000,00	200.238.088,00	97,45
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dok	1	1	100,00	ST	132.848.000,00	128.697.588,00	96,88
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Lap	1	1	100,00	ST	72.638.000,00	71.540.500,00	98,49

40. Pengelolaan Perbatasan

Fungsi Penunjang Pengelolaan Perbatasan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Alokasi anggaran untuk Urusan Penunjang Pengelolaan Perbatasan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp8.602.755.252,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp8.277.913.770,00 atau sebesar 96,22%. Jumlah indikator program pada fungsi Penunjang Pengelolaan



dan Perbatasan sebanyak 2 indikator, dengan pencapaian sebanyak 2 indikator kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada fungsi penunjang Pengelolaan Perbatasan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.59
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Fungsi Penunjang Pengelolaan Perbatasan Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
FUNGSI PENUNJANG PENGELOLAAN PERBATASAN							8.602.755.252,00	8.277.913.770,00	96,22
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	87	98,00	112,64	ST	7.589.274.434,00	7.311.620.876,00	96,34
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST	130.287.500,00	128.749.464,00	98,82
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100,00	ST	80.562.200,00	79.825.832,00	99,09
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	100,00	ST	49.725.300,00	48.923.632,00	98,39
Administrasi Keuangan	Terlaksananya	%	100	100	100,00	ST	5.480.237.680,00	5.217.937.555,00	95,21



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Ke- giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	308	308	100,00	ST	5.251.863.680,00	5.012.237.755,00	95,44
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00	ST	228.374.000,00	205.699.800,00	90,07
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksanannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST	51.660.400,00	50.424.000,00	97,61
Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	3	100,00	ST	51.660.400,00	50.424.000,00	97,61
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Frekuensi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST	747.541.816,00	736.673.498,00	98,55
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	74.074.635,00	72.043.400,00	97,26
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	55.790.808,00	48.203.326,00	86,40
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	97.617.500,00	96.632.000,00	98,99
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100,00	ST	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4	100,00	ST	20.901.102,00	20.668.500,00	98,89



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Ke- giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00	ST	475.157.771,00	475.126.272,00	99,99
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	86	86,00	T	697.113.198,00	696.356.000,00	99,89
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1	100,00	ST	446.800.000,00	446.800.000,00	100,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	9.064.000,00	9.050.000,00	99,85
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	21	18	85,71	T	241.249.198,00	240.506.000,00	99,69
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100,00	ST	408.022.040,00	407.244.959,00	99,81
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100,00	ST	4.369.000,00	4.369.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	ST	43.627.500,00	43.622.000,00	99,99
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	ST	360.025.540,00	359.253.959,00	99,79
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	100	100,00	ST	74.411.800,00	74.235.400,00	99,76



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Ke- giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	Daerah yang dipelihara								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100,00	ST	73.536.400,00	73.482.000,00	99,93
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	100,00	ST	875.400,00	753.400,00	86,06
Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelola Perbatasan Yang Terealisasi	%	45	76,68	170,40	ST	1.013.480.818,00	966.292.894,00	95,34
Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelesaian Kerjasama Renduk, dan Rencana aksi Kawasan Perbatasan	%	100	100	100,00	ST	519.109.518,00	478.690.265,00	92,21
Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	408.440.918,00	369.635.493,00	90,50
Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Dokumen	1	1	100,00	ST	110.668.600,00	109.054.772,00	98,54
Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	%	100	100	100,00	ST	262.138.500,00	256.894.081,00	98,00
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan	Dokumen	1	1	100,00	ST	83.464.500,00	82.670.726,00	99,05



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Ke- giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan	Dokumen	1	1	100,00	ST	65.481.000,00	63.587.656,00	97,11
Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Dokumen	1	1	100,00	ST	46.175.700,00	45.266.694,00	98,03
Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Dokumen	1	1	100,00	ST	67.017.300,00	65.369.005,00	97,54
Monitoring dan Evaluasi	Persentase Lokasi Prioritas dan PKSN yang didata/dikaji/diedukasi dalam pengembangan Kawasan Perbatasan	%	100	100	100,00	ST	232.232.800,00	230.708.548,00	99,34
Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen	1	1	100,00	ST	76.683.200,00	75.866.602,00	98,94
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan	Laporan	5	5	100,00	ST	79.050.700,00	78.732.119,00	99,60



Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Perbatasan	Perbatasan								
Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	5	100,00	ST	76.498.900,00	76.109.827,00	99,49

41. Badan Penghubung

Fungsi Penunjang Pengelolaan Penghubung dilaksanakan oleh Badan Penghubung Daerah. Alokasi anggaran untuk Urusan Penunjang Pengelolaan Penghubung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 18.184.950.293,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp. 17.798.120.295,05 atau sebesar 97,87%. Jumlah indikator program pada fungsi Penunjang Pengelolaan Penghubung sebanyak 2 indikator, dengan pencapaian sebanyak 2 indikator kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada fungsi Penunjang Pengelolaan Penghubung tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.60
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Fungsi Penunjang Pengelolaan Penghubung Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
FUNGSI PENUNJANG PENGELOLAAN PENGHUBUNG							18.184.950.293,00	17.798.120.295,05	97,87
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							7.871.715.375,00	7.704.241.094,05	97,87
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100,00	ST			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100,00	ST	291.590.000,00	277.463.694,00	95,16
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100,00	ST	70.000.000,00	65.753.613,00	93,93
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	173.376.000,00	165.554.836,00	95,49
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	48.214.000,00	46.155.245,00	95,73
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST	3.315.024.917,00	3.285.144.681,05	99,10
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	196	196	100,00	ST	3.073.203.407,00	3.043.530.295,05	99,03



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	199.821.510,00	199.752.386,00	99,97
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	42.000.000,00	41.862.000,00	99,67
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	266.148.520,00	227.198.500,00	85,37
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	134	134	100,00	ST	188.412.732,00	172.450.000,00	91,53
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	12	9	75,00	S	77.735.788,00	54.748.500,00	70,43
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Frekuensi Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100	ST	496.762.675,00	487.333.520,00	98,10
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	1	1	100,00	ST	496.762.675,00	487.333.520,00	98,10
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah enunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100,00	ST	63.112.950,00	57.557.728,00	91,20
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Unit	1	1	100,00	ST	63.112.950,00	57.557.728,00	91,20
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100	ST	1.959.283.333,00	1.917.843.715,00	97,88
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	100,00	ST	493.478.740,00	463.322.049,00	93,89



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	12	12	100,00	ST	474.670.050,00	463.809.900,00	97,71
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	100,00	ST	991.134.543,00	990.711.766,00	99,96
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	53	53	100	ST	1.479.792.980,00	1.451.699.256,00	98,10
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	50	50	100,00	ST	1.063.017.507,00	1.038.793.542,00	97,72
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Unit	1	1	100,00	ST	247.200,00	247.200,00	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	2	100,00	ST	416.528.273,00	412.658.514,00	99,07
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG							10.313.234.918,00	10.093.879.201,00	97,87
	Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi	%	87	87,03	100,03	ST			
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Kualitas Pelayanan Penghubung	%	87	87,03	100,03	ST	10.313.234.918,00	10.093.879.201,00	97,87
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Frekuensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Laporan	12	12	100,00	ST	5.685.056.567,00	5.583.013.822,00	98,21



Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Capaian Anggaran Tahun 2023			
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Frekuensi Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Laporan	12	12	100,00	ST	1.258.746.137,00	1.164.123.224,00	92,48
Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Frekuensi Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Laporan	12	12	100,00	ST	1.176.813.940,00	1.169.313.433,00	99,36
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan	12	12	100,00	ST	2.192.618.274,00	2.177.428.722,00	99,31

42. Pengawasan

Fungsi Penunjang Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat. Alokasi anggaran untuk Fungsi penunjang Urusan Pengawasan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp38.206.891.999,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp36.938.832.713,00 atau sebesar 96,68%. Jumlah indikator program pada fungsi penunjang urusan Pengawasan sebanyak 12 indikator, dengan pencapaian sebanyak 11 indikator kategori sangat tinggi, dan sebanyak 1 indikator kategori rendah. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada fungsi Penunjang Pengawasan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.61
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Fungsi Penunjang Pengawasan Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023					Capaian Anggaran Tahun 2023		
		Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023					Capaian Anggaran Tahun 2023		
		Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
FUNGSI PENUNJANG PENGAWASAN							38.206.891.999	36.938.832.713	96,68
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	%	70	40	57	R	30.861.832.572	29.888.028.340	96,84
	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	%	81	98	121	ST			
	Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan	%	100	100	100	ST			
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan (Sesuai SKPD)	%	100	100	100	ST	193.790.400	189.337.900	97,70
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	8	160	ST	115.440.200	112.250.700	97,24
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	7	100	ST	78.350.200	77.087.200	98,39
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Hak Keuangan ASN	%	100	100	100	ST	21.856.032.159	21.549.712.819	98,60
	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan	%	100	100	100	ST			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	78	81	104	ST	21.178.173.159	20.890.401.919	98,64
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100	ST	463.216.000	457.230.000	98,71
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100	ST	214.643.000	202.080.900	94,15
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	%	100	100	100	ST	65.525.800	64.445.300	98,35
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100	ST	40.525.800	39.502.500	97,47
Penatausahaan Barang Milik	Jumlah Laporan Penatausahaan	Laporan	8	8	100	ST	25.000.000	24.942.800	99,77



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023					Capaian Anggaran Tahun 2023		
		Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD								
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	ST	1.735.337.250	1.460.682.694	84,17
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	90	180	200	ST	126.833.750	123.915.200	97,70
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	100	ST	110.318.400	107.167.700	97,14
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	68	78	115	ST	1.189.082.000	960.133.694	80,75
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	100	200	200	ST	309.103.100	269.466.100	87,18
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	ST	5.033.165.048	4.665.704.689	92,70
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	100	100	100	ST	60.020.500	59.184.920	98,61
6.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100	ST	885.381.200	759.743.064	85,81
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	100	100	100	ST	30.397.500	28.033.050	92,22
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100	100	100	ST	565.337.000	557.115.645	98,55
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	100	100	100	ST	293.247.000	260.088.850	88,69
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	30	38	127	ST	102.755.100	93.028.500	90,53
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	60	120	ST	3.011.905.748	2.833.714.160	94,08
Dukungan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Dukungan	Dokumen	4	4	100	ST	84.121.000	74.796.500	88,92



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023					Capaian Anggaran Tahun 2023		
		Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	%	100	100	100	ST	125.592.300	114.645.600	91,28
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	2	100	ST	125.592.300	114.645.600	91,28
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	ST	809.310.000	819.942.289	101,31
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	100	ST	25.000.000	24.976.000	99,90
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	100	ST	60.210.000	60.160.000	99,92
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	13	13	100	ST	724.100.000	734.806.289	101,48
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang- Milik Daerah	%	100	100	100	ST	1.043.079.615	1.023.557.049	98,13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	100	ST	374.995.600	369.783.200	98,61
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	100	ST	367.249.415	354.685.900	96,58
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	30	100	ST	100.834.600	99.701.000	98,88
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	1	1	100	ST	200.000.000	199.386.949	99,69



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023					Capaian Anggaran Tahun 2023		
		Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat	%	<9	<1	100	ST	5.299.936.724	5.101.660.625	96
	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK	%	82	84	102	ST			
	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan	%	80	100	125	ST			
	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB ke Atas	%	81	88	102	ST			
	Rata- Rata Nilai Peer Reviu Antar Irban	%	80	86	102	ST			
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal yang diterbitkan yang sesuai standar audit	Laporan	120	232	193,33	ST	4.107.692.690	4.047.397.261	98,53
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	50	55	110	ST	569.912.990	559.172.836	98,12
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	60	141	235	ST	764.955.000	744.926.300	97,38
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	1	1	100	ST	24.999.600	24.962.000	99,85
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	1	100	ST	76.037.100	73.042.900	96,06
Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kab Kota;	Laporan	3	7	233	ST	730.038.600	729.534.846	99,93
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	100	ST	1.374.684.000	1.373.428.179	99,91
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	26	650	ST	567.065.400	542.330.200	95,64
Penyelenggaraan Pengawasan dengan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan	Laporan	77	85	110,39	ST	1.192.244.034	1.054.263.364	88,43



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023					Capaian Anggaran Tahun 2023		
		Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Tujuan Tertentu	dengan Tujuan Tertentu								
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	2	11	550	ST	60.228.734	59.950.780	99,54
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	75	74	98,67	ST	1.132.015.300	994.312.584	87,84
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN %	%	100	100	100	ST	2.045.122.703	1.949.143.748	95
	Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100%	%	100	100	100	ST			
	Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau	Skor	Hijau	Hijau	100	ST			
	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas	%	14	14	100	ST			
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan Yang di Tetapkan	Dokumenn	3	6	200	ST	855.357.655	852.820.536	99,70
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	4	400	ST	442.588.406	440.719.233	99,58
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	2	100	ST	412.769.249	412.101.303	99,84
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	Laporan	57	79	138,60	ST	1.189.765.048	1.096.323.212	92,15
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	4	13	325	ST	309.639.788	257.020.308	83,01
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	31	24	77,42	T	92.500.000	84.907.815	91,79
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan	Kegiatan	2	8	400	ST	563.625.400	540.331.214	95,87



Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023					Capaian Anggaran Tahun 2023		
		Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target	Status	Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi								
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	20	34	170	ST	223.999.860	214.063.875	95,56

43. Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa Dan Politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Alokasi anggaran untuk Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa Dan Politik pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp123.740.143.621,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp122.752.623.121,00 atau sebesar 99,20%. Jumlah indikator program pada urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa Dan Politik sebanyak 7 indikator, dengan pencapaian sebanyak 7 indikator kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.62



Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Status	Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target		Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							123.740.143.621,00	122.752.623.121,00	99,20
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	ST	12.905.871.897,00	12.783.660.539,00	99,05
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi	dokumen	2	2	100	ST	433.953.132,00	429.966.861,00	99,08
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	1	1	100	ST	367.953.132,00	364.606.811,00	99,09
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	1	1	100	ST	66.000.000,00	65.360.050,00	99,03
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN	%	100	100	100	ST	7.422.792.306,00	7.393.097.997,00	99,60
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	26/bulan	26/bulan	100	ST	6.854.808.306,00	6.825.113.997,00	99,57
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	1	1	100	ST	567.984.000,00	567.984.000,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	ST	57.984.533,00	57.828.000,00	99,73
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket (1 paket = 63 stel)	1	1	100	ST	55.444.215,00	55.290.000,00	99,72
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	1	1	100	ST	2.540.318,00	2.538.000,00	99,91
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Frekwensi ketersediaan kebutuhan pelayanan	bulan	12	12	100	ST	1.624.091.550,00	1.588.919.069,00	97,83



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Status	Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target		Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
	administrasi perkantoran								
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100	ST	53.406.019,00	53.242.350,00	99,69
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	100	ST	102.403.065,00	101.921.615,00	99,53
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1	1	100	ST	31.134.443,00	31.008.000,00	99,59
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	100	ST	1.357.503.443,00	1.323.586.204,00	97,50
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	1	100	ST	9.624.010,00	9.294.400,00	96,58
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	1	100	ST	70.020.570,00	69.866.500,00	99,78
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah yang dapat mendukung kinerja OPD	unit	15	15	100	ST	1.027.256.840,00	1.026.840.000,00	99,96
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	28	28	100	ST	1.027.256.840,00	1.026.840.000,00	99,96
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima	bulan	12	12	100	ST	2.100.145.891,00	2.049.194.636,00	97,57
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1	100	ST	778.234.191,00	776.626.000,00	99,79
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1	1	100	ST	39.945.100,00	39.945.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	1	100	ST	1.281.966.600,00	1.232.623.636,00	96,15
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	40	40	100	ST	239.647.645,00	237.813.976,00	99,23



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Status	Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target		Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8	8	100	ST	213.717.645,00	212.134.976,00	99,26
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	20	20	100	ST	25.930.000,00	25.679.000,00	99,03
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Konflik antar suku dan etnis	%	0	0	100	ST	1.322.783.088,00	1.305.940.109,00	98,73
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tesunnya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	dokumen	1	1	100	ST	1.322.783.088,00	1.305.940.109,00	98,73
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	50	50	100	ST	131.378.488,00	126.068.186,00	95,96
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	45	45	100	ST	1.102.553.600,00	1.101.947.300,00	99,95
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	laporan	1	1	100	ST	88.851.000,00	77.924.623,00	87,70
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK	Tingkat partisipasi memilih dalam Pemilu (PILKADA,	%	100	100	100	ST	83.438.583.900,00	83.416.433.932,00	0,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Status	Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target		Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PILEG, PILPRES,)								
	Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	%	0	0	0	100			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	%	100	100	100	ST	83.438.583.900,00	83.416.433.932,00	99,97
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	150	150	100	ST	23.368.015.400,00	23.353.079.741,00	99,94
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	124	124	100	ST	59.893.650.900,00	59.888.990.221,00	99,99
Pelaksanaan Monitoring,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring	laporan	1	1	100	ST	176.917.600,00	174.363.970,00	98,56



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Status	Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target		Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	%	88	97,39	110,67	ST	5.527.813.713,00	4.970.008.135,00	89,91
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	dokumen	1	1	100	ST	5.527.813.713,00	4.970.008.135,00	89,91
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	orang	250	250	100	ST	396.290.459,00	384.285.900,00	96,97
Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	orang	36	36	100	ST	5.077.224.710,00	4.531.544.250,00	89,25
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi	laporan	1	1	100	ST	54.298.544,00	54.177.985,00	99,78



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Status	Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target		Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik antar Agama	%	0	0	100	ST	1.836.053.958,00	1.784.019.703,00	97,17
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	dokumen	1	1	100	ST	1.836.053.958,00	1.784.019.703,00	97,17
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	50	50	100	ST	362.770.835,00	317.495.937,00	87,52
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	70	70	100	ST	1.421.534.090,00	1.418.133.947,00	99,76
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	laporan	2	2	100	ST	51.749.033,00	48.389.819,00	93,51
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	%	100	100	100	ST	18.709.037.065,00	18.492.560.703,00	98,84



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Status	Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target		Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	dokumen	1	1	100	ST	18.709.037.065,00	18.492.560.703,00	98,84
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	100	100	100	ST	112.974.548,00	111.903.648,00	99,05
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	120	120	100	ST	15.336.704.617,00	15.328.122.784,00	99,94
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	laporan	1	1	100	ST	89.105.400,00	82.081.743,00	92,12



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Status	Capaian Anggaran Tahun 2023		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Target		Anggaran APBD-P 2023	Realisasi 2023	% Realisasi Anggaran
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	dokumen	4	4	100	ST	3.170.252.500,00	2.970.452.528,00	93,70



1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2.1 Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah menjadi satu rujukan penting dalam perumusan isu strategis dan kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan tersebut memuat prioritas pembangunan jangka menengah dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan. Prioritas pembangunan RPJMD tersebut dijabarkan secara operasional sebagai agenda utama pembangunan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama lima tahun. Penyajian permasalahan pokok pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan menjadi delapan kelompok yaitu: 1) Potensi Maritim, 2) Tata Kelola Pemerintahan, 3) Sumber Daya Manusia, 4) Kemiskinan, 5) Kesehatan, 6) Disparitas antar wilayah, 7) Infrastruktur Wilayah dan 8) Budaya Melayu dan Nasional. Sehingga dapat dirumuskan permasalahan strategis dalam pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023, sebagai berikut ini :

a. Potensi Maritim

Sebagai wilayah kepulauan, potensi maritim sangat mendukung didalam pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, namun hingga saat ini belum banyak yang dapat dikembangkan secara optimal, padahal kekayaan ini akan membuka peluang bagi daerah yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat. Kurangnya perhatian dan komitmen kita membangun sektor maritim, sehingga fokus pengembangan sektor ini belum optimal termasuk kebijakan fiskal dan moneter.

Sektor maritim merupakan hal penting di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini selaras dengan kondisi Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas laut sebesar 417.012,97 km² dan terdiri dari 1.796 pulau dan berada posisi yang strategis dan potensial layak menjadi poros maritim. Provinsi Kepulauan Riau menyimpan potensi sumber daya maritim antara lain; perikanan, pariwisata bahari, perkapalan, transportasi perhubungan laut dan energi laut. Propinsi Kepri memiliki garis pantai yang cukup panjang dan menyediakan banyak lokasi objek wisata bahari dengan pemandangan alami, indah dan bagus, tinggal bagaimana mengembangkannya sebagai sektor pariwisata bahari bagian dari ekonomi



maritim, sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan kemakmuran masyarakat.

Pada urusan perikanan, khususnya perikanan tangkap yang memiliki potensi untuk ditingkatkan. Jumlah produksi perikanan tangkap menunjukkan terjadinya peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya, produksi perikanan budidaya mengalami penurunan, namun potensi produksi perikanan budidaya dapat ditingkatkan mengingat potensi perikanan budidaya yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau meliputi budidaya laut seluas lebih kurang 435.000 ha, rumput laut lebih kurang 38.520 ha, dan tambak seluas lebih kurang 4.948 ha. Oleh karena itu, upaya peningkatan ini harus didukung pemerintah daerah dengan tersedianya pakan, benih serta sarana dan prasana yang cukup, terutama untuk pelaku UMKM.

Volume produk olahan hasil perikanan menjadi perhatian selanjutnya. Hal ini disebabkan produk olahan hasil perikanan akan memberikan nilai tambah bagi urusan perikanan. Penjualan dalam bentuk segar hingga saat ini memang masih cukup menguntungkan bagi nelayan, namun demikian ikan segar memiliki dua kelemahan yakni cepat rusak dan nilai tambah yang dihasilkan kecil. Dari data yang disajikan produk olahan perikanan Provinsi Kepulauan Riau masih belum tampak signifikan dibandingkan dengan produksi yang dihasilkan. Peningkatan volume produk olahan sangat ditentukan oleh berkembangnya Unit Pengolahan Ikan (UPI) atau industri perikanan, baik skala UMKM maupun skala besar. Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah terhadap industri pengolahan ikan sangat diperlukan yang berupa tempat pengolahan, akses untuk melakukan ekspor, serta sarana dan prasarana lainnya.

Sebagai negara dengan jumlah laut yang dominan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki arus barang dan orang yang cukup tinggi. Tingginya arus barang maupun arus orang pada mode armada angkutan umum perairan, menjadikan retribusi yang tinggi bagi jasa kepelabuhan. Selain itu retribusi izin bidang perhubungan juga mengalami peningkatan signifikan. Hal ini merupakan potensi untuk ditingkatkan dengan dukungan pelabuhan serta sarana dan prasarana lainnya.



Setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau memiliki ciri khas dan potensi wisata masing-masing. Salah satu wisata yang dapat dioptimalkan adalah wisata bahari. Kawasan-kawasan wisata bahari akan menjadi salah satu daya Tarik wisatawan domestik, nasional, dan internasional. Hal tersebut telah diimplementasikan ke dalam 7 (tujuh) Koridor Pariwisata Daerah yang mengoptimalkan wisata bahari. Arah kebijakan pengembangan pariwisata kemaritiman/bahari untuk dibawa pada pariwisata yang berbasis kemaritiman pada masyarakat lokal. Upaya ini menjadi penting agar supaya kunjungan wisata yang tinggi dapat menciptakan multiplier effect bagi masyarakat lokal. Dengan demikian maka ekonomi lokal akan tumbuh yang selanjutnya diharapkan akan mempersempit kesenjangan antara sektor ekonomi nasional dan sektor ekonomi lokal yang pada gilirannya tentu mempersempit kesenjangan antar wilayah

Pada sisi lain, dukungan terhadap potensi kemaritiman diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap sumber-sumber potensi. Perlindungan tersebut antara lain perlindungan terhadap illegal fishing, unregulated fishing, unreported fishing dan overfishing. Pencemaran laut dari limbah B3 dari kapal yang labuh jangkar, alih fungsi hutan mangrove dan lainnya merupakan hal yang perlu ditangani agar selaras dengan peningkatan potensi kemaritiman. Selain itu, dukungan regulasi untuk kawasan industri kemaritiman mutlak diperlukan.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki wilayah produktif yang merupakan Kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian dengan satuan luasan hektar, luasannya adalah 226.451 ha. Hal ini merupakan salah satu keunggulan wilayah yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau yang dapat menunjang sector perekonomian. Keunggulan wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai Kawasan industri dan memiliki iklim investasi serta dukungan regulasi diharapkan mampu untuk menarik investasi. Kenaikan investasi diharapkan berpengaruh terhadap industri dan perdagangan.

Perhatian terhadap UMKM dan koperasi mutlak diperlukan agar dapat berpartisipasi dalam peningkatan kinerja perekonomian. Keaktifan koperasi dan UMKM ini harus bersinergi atau menjadi bagian dalam pengoptimalan sector kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, industri kecil, konstruksi, perdagangan



dan lainnya dalam peningkatan penerimaan PAD Provinsi Kepulauan Riau.

Salah satu kunci utama keberhasilan pengembangan wilayah adalah kolaborasi yang bersinergi pembangunan antara Propinsi dengan Kabupaten/Kota, akhirnya akan berdampak langsung kepada peningkatan ekonomi daerah maritime dan kesejahteraan masyarakat.

b. Tata Kelola Pemerintahan

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik merupakan bentuk keselarasan dengan SDG's/TPB khususnya pada tujuan ke-16 yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Selanjutnya, tujuan ini diterjemahkan dalam sasaran global berupa mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Lembaga tersebut termasuk pemerintah daerah.

Lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan diterjemahkan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi. Selain itu, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang direpresentasikan dengan nilai SAKIP Provinsi Kepulauan Riau terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan ada peningkatan pada sisi akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan hasil yang positif dan perlu untuk dipertahankan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu menjaga komitmen yang kuat untuk meningkatkan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta perbaikan terus menerus dalam akuntabilitas kinerja pembangunan termasuk kinerja keuangan.

Tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemenuhan SPM yang merupakan menjadi salah satu tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tanggung jawab tersebut adalah untuk menyediakan anggaran pendapatan dan belanja untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.



Pencapaian pelaksanaan SPM di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum seluruhnya maksimal. Berdasarkan hal-hal tersebut maka mempertahankan pemenuhan pelayanan dasar yang berupa SPM harus menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di masa mendatang.

Selanjutnya, tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung dengan perencanaan, pengawasan serta aparatur yang baik. Pada sisi perencanaan diperlukan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan yang lain dan dokumen penganggaran. Konsistensi tersebut antara lain pada dokumen RPJMD, RKPD, RTRW dan APBD. Pada sisi pengawasan, level APIP didorong untuk ditingkatkan. Profesionalitas aparatur ditunjukkan indeks profesionalitas pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Profesionalitas aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu ditingkatkan. Selain itu, profesionalitas aparatur ditunjukkan dengan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana yang timbul serta mampu menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

c. Sumber Daya Manusia

SDM berkualitas di Provinsi Kepulauan Riau tidak lepas dari kualitas pendidikan. Hal ini selaras dengan SDG's/TPB khususnya pada tujuan ke-4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Selaras dengan hal tersebut, pencapaian pelaksanaan SPM di bidang pendidikan belum seluruhnya maksimal. Kondisi sarana dan prasarana perhubungan perlu ada peningkatan, dapat dilihat dari Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro) sebesar 71,43%, Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 96,16%, Persentase Ketersediaan Prasarana lalu lintas 9,67%, Persentase ketersediaan jaringan trayek bus perintis 85,71%, Persentase ketersediaan prasarana sisi darat perhubungan udara 75%, Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut 97,06%, dan Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut 77,78%.

Hal ini memerlukan upaya-upaya yang konsisten untuk pencapaian amanah tersebut. Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus diharapkan dapat



menjadi jembatan untuk Pendidikan yang lebih tinggi dan selaras dengan kebutuhan tenaga kerja atau industri.

Upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan kualitas layanan pendidikan. Pada era Revolusi Industri Keempat (4.0), layanan Pendidikan harus dapat menyelaraskan dengan kondisi tersebut. Kualitas tenaga pendidik harus ditingkatkan sesuai kompetensi dan kondisi yang ada. Salah satu kualitas yang ditingkatkan adalah mengenai metode dan penyampaian pembelajaran jarak jauh.

Aspek lainnya yang perlu ditingkatkan adalah kurikulum yang mengadopsi muatan lokal. Muatan lokal tersebut mempertimbangkan kondisi Kepulauan Riau yang memiliki potensi antara lain potensi kemaritiman, industri dan wisata. Pendidikan yang memiliki “link and match” dengan kebutuhan kemaritiman, industri dan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan persentase lulusan SMK yang diterima di DU/DI dan berwirausaha. Selain itu, peningkatan SDM dapat dilakukan melalui jalur non formal, antara lain melalui Balai Latihan Kerja atau sarana non formal lainnya. Oleh karena itu, sinergitas antara Perangkat Daerah pengampu dengan stakeholders mutlak diperlukan. Muatan lokal yang mempertimbangkan kondisi Kepulauan Riau lainnya adalah budaya Melayu. Karakteristik budaya Melayu akan membentuk SDM yang memiliki karakter sesuai dengan kondisi yang diperlukan di Provinsi Kepulauan Riau.

Pada sisi lain, SDM yang berkarakter tidak dapat lepas dari pertumbuhan dari anak sampai menjadi pemuda serta dewasa. Oleh karena itu, perlindungan anak mutlak diperlukan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas pemuda sebagai sumber daya manusia.

d. Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam rangka mendukung tujuan pertama SDGs/TPB di mana tujuannya adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Sasarannya adalah pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berapa jumlah dan persentase penduduk



miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (poverty gap index).

Tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat mengurangi kemiskinan. Kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut harus efektif dan efisien untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau.

Penurunan tingkat kemiskinan dapat dimulai dari desa. Pengoptimalan lembaga desa diharapkan menimbulkan inovasi-inovasi baru dalam membangun desa. Adanya desa Makmur di Kepulauan Riau akan berimplikasi penurunan kemiskinan di wilayah tersebut. Pada sisi lain, pertumbuhan industri diharapkan menciptakan lapangan kerja baru sehingga berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran.

e. Kesehatan

Upaya-upaya mengoptimalkan layanan kesehatan ditujukan untuk mengoptimalkan cakupan layanan kesehatan. Cakup layanan kesehatan antara lain layanan kesehatan untuk bayi, balita, ibu, gizi, serta dukungan fasilitas kesehatan, tenaga medis dan penanganan penyakit. Layanan kesehatan tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Dengan cakupan layanan kesehatan yang optimal diharapkan meningkatkan kualitas Kesehatan yang ditunjukkan Usia Harapan Hidup. Indikator tersebut merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat.

Secara khusus, kualitas kesehatan pada anak dicerminkan pada prevalensi stunting. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya oleh gizi anak. Dalam rencana pembangunan tersebut, pemerintah memonitor perkembangan kualitas gizi melalui dua indikator yaitu prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun (baduta). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang konsisten untuk semakin meminimalkan prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau.

f. Disparitas antar wilayah

Disparitas atau ketimpangan wilayah merupakan hal yang menjadi



perhatian dalam SDGs/TPB. Pada tujuan ke-10 dinyatakan salah satu tujuan SDGs/TPB adalah mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara. Ketimpangan wilayah ini merupakan salah satu fokus pembangunan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Sasaran dalam tujuan TPB dalam hal ini antara lain meningkatnya PDRB, menurunnya koefisien gini dan menurunnya tingkat kemiskinan.

Berkaitan dengan tingkat kemiskinan, sebaran data penduduk miskin yang berada di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk miskin berada di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna memiliki jumlah penduduk miskin yang paling rendah dibandingkan Kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam sektor pembangunan bidang sosial, ketimpangan dapat dicerminkan dari perbandingan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari masing-masing kabupaten/kota. IPM untuk kabupaten/kota nilai tertinggi terdapat di Kota Batam dan terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pada sisi infrastruktur, ketimpangan wilayah dapat dicermati dari kondisipembangunan infrastruktur di tiap kabupaten/kota. Kondisi geografis yangdihadapi oleh Kepri menjadikan sebuah tantangan bagaimana pembangunaninfrastruktur dapat seimbang antar kabupaten/kotanya. Kebutuhan infrastruktur Jalan, Jembatan, Air Minum, drainase, sanitasi, perhubungan dan lainnya perlu menjadi perhatian oleh pemerintah agar karakteristik kepulauan dengan tujuan percepatan pembangunan dapat menjangkau diseluruh wilayah provinsi Kepulauan Riau.

g. Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur merupakan prasarana yang digunakan untuk mengembangkan atau menunjang proses perbaikan kondisi di suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur akan mendorong pembangunan kota, permukiman dan/atau wilayah yang lebih inklusif, nondiskriminatif, serta berkelanjutan. Secara umum, Kawasan kumuh merupakan implikasi dari pembangunan. Penanganan kawasan kumuh setidaknya meliputi aspek air minum, pengelolaan sampah dan



akses jalan. Hal-hal tersebut memerlukan upaya untuk dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten /kota sesuai SPM dan tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang lebih baik lagi.

Provinsi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan ekonomi, penduduk, urbanisasi, pencemaran air. Hal tersebut mengakibatkan kebutuhan air Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Kabupaten/Kota yang cepat tumbuh dengan angka urbanisasi yang cukup tinggi, seperti Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan, serta Kabupaten Karimun memerlukan strategi tersendiri untuk pemenuhan kebutuhan airnya baik domestik (rumah tangga), perkotaan, maupun industri. Ketahanan air menjadi isu utama, karena tanpa ketersediaan air yang mencukupi maka pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah akan terganggu. Ketahanan air dikaitkan dengan target penyediaan air bersih, mengacu pada target ke-6 Sustainable Development Goals (SDG's) yaitu terpenuhinya kebutuhan air minum pada 2030.

Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota merupakan hal vital. Hal ini sesuai dengan amanat SPM. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus menyediakan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota di masa mendatang. Penyediaan prasarana umum ini menjadi perhatian dalam penanganan Kawasan kumuh dan pemukiman di masa mendatang.

Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan dengan kondisi baik akan memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa. Selanjutnya, kondisi jalan dan jembatan yang baik akan berpengaruh terhadap konektivitas antar wilayah. Kondisi jembatan di Provinsi Kepulauan Riau telah meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi bagian untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai provinsi kepulauan yang sebagian wilayahnya adalah perairan, sector perhubungan perlu menjadi perhatian. Ketersediaan pelabuhan sebagai sarana transportasi utama sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran



konektivitas transportasi antarsatu daerah ke daerah lainnya. Jumlah ketersediaan Pelabuhan laut yang ada di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 adalah sebanyak 33 pelabuhan. Penambahan pelabuhan baru telah diusulkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Review Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Dalam usulan tersebut terdapat 6 (enam) pelabuhan yang diusulkan.

Pembangunan infrastruktur yang menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur di Wilayah Perbatasan. Selain itu, kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan kepulauan menyebabkan masih banyak daerah yang belum merasakan aliran listrik dari PLN. Banyak daerah-daerah terpencil di Provinsi Kepulauan Riau yang belum teraliri listrik. Penyebab utamanya dikarenakan infrastruktur ketenagalistrikan belum tersedia. Hal ini disebabkan rata-rata wilayah yang belum mendapat pasokan listrik merupakan wilayah pedesaan yang secara geografis berada di pulau-pulau yang sangat jauh dari perkotaan atau merupakan wilayah perbatasan. Kondisi Rasio Elektrifikasi (RE) harus ditingkatkan di masa mendatang.

Selain daripada itu, didalam pembangunan infrastruktur perlu juga memperhatikan Global Climate Change. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi, maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. Pemanasan global dapat menyebabkan perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis. Perubahan yang disebabkannya antara lain peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, mempengaruhi masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi.

h. Budaya Melayu dan Nasional

Kebudayaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya manusia (masyarakat) serta mampu membentuk suatu peradaban manusia. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan khasanah budaya baik yang bersifat tangible (aset budaya yang kasat mata) maupun intangible (aset budaya yang tidak kasat mata). Kepulauan Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu dengan potensi peninggalan sejarah maupun adat istiadat Melayu yang unik dan mengagumkan. Keberagaman kebudayaan Melayu di



Kepulauan Riau merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia.

Pada sisi lain, kawasan perbatasan negara di Provinsi Kepulauan Riau yang terbuka dan membentang dari perairan di Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas hingga Kabupaten Natuna yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain akan berakibat rentannya pengaruh budaya asing terhadap kebudayaan Melayu di Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut ditambah dengan terbukanya akses teknologi seluas-luasnya bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang membuat berkurangnya batas-batas suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian budaya Melayu.

Pelestarian budaya Melayu di Kepulauan Riau tercermin pada Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK). Pencapaian ini harus ditingkatkan di masa mendatang dengan diikuti upaya-upaya yang konsisten. Pada aspek Ekonomi Budaya, aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan harus didorong dengan keterlibatan penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan.

Pelestarian kebudayaan didukung dengan pendidikan budaya. Pendidikan budaya merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang inklusif agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam bidang Seni, Budaya, dan Bahasa khususnya budaya Melayu. Pencapaian pendidikan kebudayaan melibatkan unsur pendidikan yang ditunjukkan dengan Rata-rata Lama Sekolah 25 tahun ke atas, Harapan Lama Sekolah, Angka Kesiapan Sekolah, serta melibatkan peran guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau seni budaya. Selain itu, budaya Melayu harus dapat dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat sesuai konteks ketahanan sosial budaya.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki banyak warisan budaya. Hal ini memerlukan upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah)



terhadap pelestarian obyek dan cagar budaya. Pelestarian ini meliputi warisan budaya tangible berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya serta warisan budaya intangible. Warisan budaya intangible termasuk penggunaan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari. Selain itu, partisipasi pelestarian warisan budaya Melayu ditunjukkan dengan masyarakat yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Melayu, mengunjungi peninggalan sejarah/warisan Melayu serta masyarakat yang menggunakan produk tradisional Melayu.

Ekspresi Budaya Melayu merupakan segala aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proses penciptaan karya budaya Melayu yang dihasilkan masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Melayu. Selanjutnya Budaya Literasi merupakan aktivitas serta sarana/prasarana pendukung dalam memperoleh, menguji kesahihan, dan menghasilkan informasi dan pengetahuan untuk pemberdayaan kecakapan masyarakat. Budaya literasi ini harus dikembangkan pada penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat.

Budaya Melayu yang terpelihara dengan baik akan berimplikasi pada budaya secara nasional. Salah satunya adalah budaya menghargai dan menghormati orang lain. Hal ini termasuk dalam kehidupan beragama. Implikasinya adalah terwujudnya harmonisasi antar umat beragama dan antar masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

1.2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

a. Visi

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah ” ***Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya.***”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:



- a) Makmur: Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera.
- b) Berdaya Saing: Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
- c) Berbudaya: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi guna mewujudkan visi diatas, 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

- 1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat;
- 2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan;
- 3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa;
- 4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;
- 5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.

1.2.3 Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan

Program dan kegiatan Prioritas adalah program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimal.



Program dan kegiatan prioritas yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2023 diarahkan pada pelaksanaan tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 yaitu: **“Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Nasional”** yang dijabarkan pada tiga prioritas pembangunan yaitu:

- a. Optimalisasi potensi perekonomian daerah.
- b. Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
- c. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya.

Ringkasan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pendidikan yaitu sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus.

b. Program Pengembangan Kurikulum

- Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah;
- Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus.

c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

- Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

- Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kesehatan yaitu sebagai berikut:



a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;
- Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi;
- Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

- Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK).

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

- Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota;



- Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- b. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.
- c. **Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**
 - Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
- d. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.
- e. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi.
- f. **Program Pengembangan Permukiman**
 - Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
- g. **Program Penataan Bangunan Gedung**
 - Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.
- h. **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**
 - Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- i. **Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**
 - Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan



Regional

j. Program Penyelenggaraan Jalan

- Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

k. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi;
- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi;
- Kegiatan Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

l. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi;
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang;
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi;
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

- Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
- Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
- Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.

b. Program Kawasan Permukiman

- Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan



Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)

- Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman.

d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yaitu sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;
- Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran;

c. Program Penanggulangan Bencana

- Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi;
- Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
- Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
- Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial



Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Sosial yaitu sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

- Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi.

b. Program Rehabilitasi Sosial

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti;
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi.

d. Program Penanganan Bencana

- Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi.

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan tenaga kerja yaitu sebagai berikut:

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

- Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
- Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
- Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

- Kegiatan Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;



- Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi;
- Kegiatan Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

c. Program Hubungan Industrial

- Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota;
- Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi;
- Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

d. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

- Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan.

e. Program Perencanaan Tenaga kerja

- Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).

8. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Transmigrasi yaitu sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

- Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigration.

b. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

- Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan.

c. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

- Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan



Perlindungan Anak

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

- Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi;
- Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi;
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi.

b. Program Perlindungan Perempuan

- Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi;
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

- Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)



- Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi;
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

- Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pangan yaitu sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
- Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi;
- Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi.

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

- Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi;
- Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi.

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

- Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pertanahan yaitu sebagai berikut:

a. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

- Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan



Umum di Wilayah Provinsi.

12. **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pertanian yaitu sebagai berikut:

a. **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

- Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian;
- Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman;
- Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi;
- Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi.

b. **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

- Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian.

c. **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

- Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan;
- Kegiatan Kesejahteraan Hewan.

d. **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

- Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi.

e. **Program Penyuluhan Pertanian**

- Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian;
- Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan.



13. **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut:

a. **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

- Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi;
- Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi.

b. **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

- Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

c. **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**

c. **Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**

- Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

e. **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

f. **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**

- Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi.



g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

- Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi.

h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi.

i. Program Pengelolaan Persampahan

- Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Kehutanan yaitu sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Hutan

- Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
- Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun.

b. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

- Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

c. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

- Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

15. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

- Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan;



- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan.

b. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

- Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan.

c. Program Pencatatan Sipil

- Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi.

d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu sebagai berikut:

a. Program Administrasi Pemerintahan Desa

- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Penataan Desa

- Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat.

d. Program Peningkatan Kerjasama Desa

- Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pengendalian



Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

- Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana

- Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

- Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Perhubungan yaitu sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi;
- Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi;
- Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi;
- Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
- Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

b. Program Pengelolaan Pelayaran



- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi;
- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional;
- Kegiatan Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan;
- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas;
- Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional;
- Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;
- Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional.

19. **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Komunikasi Dan Informatika yaitu sebagai berikut:

a. **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**



- Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

- Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi;
- Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Statistik yaitu sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi.

21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Persandian yaitu sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

- Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi;
- Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi.

22. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah yaitu sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

b. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

- Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang



Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

- Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

d. Program Pengembangan Umkm

- Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah.

e. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

- Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

f. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

- Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

g. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

- Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

23. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Penanaman Modal yaitu sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi.

b. Program Promosi Penanaman Modal

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal



- Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

24. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Kepemudaan Dan Olahraga yaitu sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

- Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi.

b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi;
- Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

25. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Kebudayaan yaitu sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

- Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional



- c. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Pembinaan Sejarah

- Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

- Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi;
- Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

- Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi.

26. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Perpustakaan yaitu sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

- Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi;
- Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

- Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi
- Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah
- Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi.

27. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Kearsipan yaitu sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

- Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi;
- Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi;
- Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

- Kegiatan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun.



c. Program Perizinan Penggunaan Arsip

- Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi

28. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Kelautan Dan Perikanan yaitu sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi;
- Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi;
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil;
- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT;
- Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi;
- Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut.

d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.



e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar.

29. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pariwisata yaitu sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

- Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi;
- Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
- Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

b. Program Pemasaran Pariwisata

- Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

- Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif;
- Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan.

30. Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Energi Dan Sumberdaya Mineral yaitu sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

- Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi;



- Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.

b. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

- Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi

c. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

- Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi;
- Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi;
- Kegiatan Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi;
- Kegiatan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi;
- Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri;
- Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.

31. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Perdagangan yaitu sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

- Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar.



b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

- Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

d. Program Pengembangan Ekspor

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

- Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota;
- Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

- Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri

32. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Perindustrian yaitu sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

- Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional



33. Unsur Penunjang Perencanaan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Unsur Penunjang Perencanaan yaitu sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
- Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

34. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Unsur Penunjang Penelitian Dan Pengembangan yaitu sebagai berikut:

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

35. Unsur Penunjang Keuangan Daerah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Unsur Penunjang



Keuangan yaitu sebagai berikut:

a. **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
- Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota;
- Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
- Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.

b. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

- Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

36. Unsur Penunjang Kepegawaian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Unsur Penunjang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan yaitu sebagai berikut:

a. **Program Kepegawaian Daerah**

- Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
- Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN;
- Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN;
- Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

37. Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Unsur Penunjang Pendidikan Dan Pelatihan yaitu sebagai berikut:

a. **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

- Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis;
- Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi



Manajerial dan Fungsional.

38. Sekretariat DPRD

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD yaitu sebagai berikut:

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

- Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD;
- Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran;
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD;
- Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
- Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD.

39. Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan yaitu sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perbatasan

- Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;
- Kegiatan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan;
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.

40. Unsur Penunjang Pengawasan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Unsur Penunjang Pengawasan yaitu sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

41. Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu sebagai berikut:

- **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**



Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

42. Unsur Penunjang Pengelolaan Penghubung

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Unsur Penunjang Pengelolaan Penghubung yaitu sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Penghubung

- Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.

43. Sekretariat Daerah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah yaitu sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah



- Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan;
 - Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah;
 - Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah.
- b. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum**
- Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan;
 - Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum.
- c. Program Penataan Organisasi**
- Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.
- d. Program Kesejahteraan Rakyat**
- Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual;
 - Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
 - Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.
- e. Program Perekonomian dan Pembangunan**
- Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian;
 - Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam;
 - Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD.
- f. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan**
- Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 - Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- g. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa**
- Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

1.2.4 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,



pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka, SPM tidak lagi dimaknai secara kontekstual sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar (dimaksud) adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
6. Sosial.

Pelaksanaan penerapan SPM oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau saat ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menyempurnakan dan



mencabut pedoman penerapan SPM sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Setiap SPM memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait. Adapun pedoman teknis Penerapan SPM yang mencakup layanan dasar dan mutu layanannya adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Peraturan



Pemerintah ini dengan maksud agar terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintahan daerah dengan mutu tertentu. Tidak hanya itu, SPM juga menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi:

- a. Dasar menentukan kebutuhan pembiayaan daerah, menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan, serta menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja;
- b. SPM dapat dijadikan dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur; dan
- c. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Daerah terhadap masyarakat.

Sebaliknya, masyarakat dapat mengukur sejauhmana pemerintahan daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik, memperjelas tugas pokok pemerintahan daerah dan mendorong terwujudnya *checks and balances* yang efektif serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan hingga tahun 2026. RPJMD merupakan penjabaran dari visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau periode 2021-2026. RPJMD memiliki kedudukan yang strategis dalam perencanaan daerah Provinsi Kepulauan Riau serta merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan;



2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah;
6. Memberikan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah dan kepala daerah.

Untuk menjamin pelaksanaan SPM dapat dikawal dan berjalan dengan baik, maka, indikator SPM dituangkan dalam indikator program RPJMD 2021-2026, yang kemudian indikator-indikator tersebut dibagikan ke Organisasi Perangkat Daerah Pengampu sesuai kewenangannya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kemudian menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada peraturan/keputusan menteri yang membidangi masing-masing urusan. Rencana pencapaian SPM kemudian dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). PP Nomor 13 Tahun 2019 juga menjelaskan bahwa LPPD, LKPJ, RLPPD, serta EPPD disusun berdasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi, dan objektif.

LPPD sendiri adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Menurut PP Nomor 13 Tahun 2019, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Sementara capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan terdiri atas capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari Pemerintah Pusat.

Sebagaimana diketahui, bagian pertama yang perlu dilaporkan dalam LPPD adalah capaian kinerja makro. Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro



meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan. Capaian Kinerja Makro Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 dan 2023 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2023

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Perubahan %
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	76,46	77,11	0,884%
2	Angka Kemiskinan	Persen	6,24%	5,69%	1,96%
3	Angka Pengangguran	Persen	8,23%	6,80%	-16,95%
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,09%	5,20%	48,39%
5	Pendapatan Per-Kapita	Juta Rupiah	141,68	154,18	8,884%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Poin	0,342	0,340	-4,13%

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dapat tergambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), serta merupakan data strategis karena digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja pemerintah. Mengacu pada kategori yang telah ditetapkan, IPM dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut: $IPM < 60$ (rendah), $60 \leq IPM < 70$ (sedang), $70 \leq IPM < 80$ (tinggi), dan $IPM \geq 80$ (sangat tinggi).

IPM merupakan indeks komposit yang mencakup tiga dimensi dasar, yakni:



- a. Umur panjang dan hidup sehat yang digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yakni rata-rata usia yang dapat dicapai oleh bayi sesuai kondisinya pada saat lahir.
- b. Pengetahuan yang diukur berdasarkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS merupakan rata-rata lamanya pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, sedangkan HLS menggambarkan harapan atas rata-rata lamanya pendidikan formal yang dapat dienyam oleh penduduk sejak usia tujuh tahun ke atas.
- c. Standar hidup layak diperoleh dari besar pengeluaran per-kapita yang disesuaikan (PPP).

Secara umum, pembangunan manusia Provinsi Kepulauan Riau terus menunjukkan perkembangan yang positif. Jika dilihat selama 5 tahun terakhir, IPM Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023

Dimensi IPM	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup (AHH)	69,80	69,96	70,12	70,50	70,91
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,83	12,87	12,98	12,99	13,05
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	9,99	10,12	10,18	10,37	10,41
Pengeluaran per Kapita (PPP)	14.466	14.209	14.122	14.469	14.998
IPM Provinsi Kepulauan Riau	75,48	75,79	75,79	76,46	77,11

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

IPM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 adalah 77,11 dan masuk dalam kategori tinggi. Jika dibandingkan dengan IPM pada tahun 2022, IPM pada tahun 2023 mencatat peningkatan sebesar 0,65 poin atau



meningkat sebesar 0,85%. Tidak hanya itu, IPM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 juga tercatat melampaui IPM nasional dimana IPM Nasional pada tahun 2023 adalah sebesar 74,39 atau selisih 2,72 poin dengan Provinsi Kepulauan Riau. Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, IPM Provinsi Kepulauan Riau bahkan menduduki urutan ke-4 tertinggi, dibawah DKI Jakarta (82,46), DI Yogyakarta (81,07), dan Kalimantan Timur (78,20).

2.1.2 Angka Kemiskinan

Untuk mengukur angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau, digunakan data persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau yang bersumber dari BPS Provinsi Kepulauan Riau. Rumus perhitungan persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau adalah jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang hidup di bawah garis kemiskinan (yang didapat berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Indonesia) dibagi jumlah total penduduk Provinsi Kepulauan Riau dikali 100 persen. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, baik kebutuhan makanan maupun nonmakanan. Per Maret 2023, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 142,50 ribu orang (5,69%), atau berkurang sebanyak 9,18 ribu orang jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 151,68 ribu orang (6,24 persen).

Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 142,5 ribu orang (5,69 persen), berkurang sebanyak 9,18 ribu orang (0,55 persen) dibandingkan dengan kondisi September 2022 sebanyak 151,68 ribu orang (6,24%). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan, sebelumnya berada di angka 6,24% namun di tahun 2023 menjadi 5,69 persen.



2.1.3 Angka Pengangguran

Pengukuran angka pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau menggunakan data tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Riau yang bersumber dari Sistem Informasi dan Manajemen Data dasar Regional yang dikelola oleh Bappenas. Berdasarkan laman resmi BPS Provinsi Kepulauan Riau, tingkat pengangguran terbuka didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja dan pengangguran didefinisikan sebagai berikut (BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023):

- Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.
- Pengangguran adalah (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Dalam laman resmi BPS Provinsi Kepulauan Riau, dijabarkan bahwa TPT menunjukkan kemampuan ekonomi suatu daerah untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai TPT di suatu daerah artinya semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan di daerah tersebut. TPT Provinsi Kepulauan Riau per Agustus 2023 adalah sebesar 6,80%. TPT ini mengalami penurunan sebesar 1,43% jika dibandingkan dengan TPT per Agustus 2022, yakni sebesar 8,23%.

- Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan



pengangguran.

- Pengangguran adalah (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

TPT menunjukkan kemampuan ekonomi suatu daerah untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai TPT di suatu daerah artinya semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan di daerah tersebut. TPT Provinsi Kepulauan Riau per Agustus 2023 adalah sebesar 6,80%. TPT ini mengalami penurunan sebesar 1,43% jika dibandingkan dengan TPT per Agustus 2022, yakni sebesar 8,23%.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau, digunakan data PDRB Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan capaian kinerja pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 yang dibandingkan dengan Tahun 2023, maka Provinsi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0,11%. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri sebesar 5,09%, dan dibawah nilai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31%, sementara itu, pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan di angka 5,20%.

2.1.5 Pendapatan per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam satu periode tertentu. Jumlah seluruh nilai tambah (produk) yang ditimbulkan oleh berbagai kegiatan usaha di suatu daerah (region) tanpa memperhatikan



pemilik atas faktor produksi. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 adalah sebesar Rp331.889.500,80 juta rupiah. Angka PDRB ADHB tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022, yakni sebesar Rp308.842.677,50 juta rupiah. Sementara itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023, adalah sebesar Rp200.043.861.44 juta rupiah, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan PDRB ADHK tahun 2022, yakni sebesar Rp 190.163.695,64 juta rupiah.

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau pada 2021 dan 2022 menggunakan Indeks Rasio Gini yang dirilis oleh BPS Provinsi Kepulauan Riau. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1 dimana nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya, Rasio Gini yang semakin mendekati nilai 0, semakin menunjukkan adanya pemerataan pendapatan. Nilai 0 pada Rasio Gini menggambarkan kesetaraan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna dimana satu orang dapat memiliki semua pendapatan sementara yang lainnya tidak memiliki apapun. Indeks Rasio Gini Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 adalah sebesar 0,340. Angka ini turun sebesar 0,002 poin jika dibanding dengan Gini Ratio pada tahun 2022 yang sebesar 0,342.



Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau menggunakan Indeks Gini yang dirilis oleh BPS Provinsi Kepulauan Riau. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1 dimana nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya, Indeks Gini yang semakin mendekati nilai 0, semakin menunjukkan adanya pemerataan pendapatan. Nilai 0 pada Indeks Gini menggambarkan kesetaraan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Indeks Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna dimana satu orang dapat memiliki semua pendapatan sementara yang lainnya tidak memiliki apapun.

Lebih lanjut, ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan masuk dalam kategori ketimpangan “Rendah” bila Indeks Gini kurang dari 0,3; dikatakan ketimpangan “Sedang” bila Indeks Gini antara $> 0,3 - 0,4$; dan Ketimpangan “Tinggi” bila Indeks Gini di atas 0,4. Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 adalah sebesar 0,340. Nilai Indeks Gini tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan nilai Indeks Gini tahun sebelumnya, yakni sebesar 0,342. Angka ini turun sebesar 0,002 poin jika dibanding dengan Gini Ratio pada tahun 2022, dan angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk dalam kategori Sedang.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.



Indikator Kinerja Kunci (IKK) Keluaran (Outcome) yang merupakan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan 8 Urusan Pilihan, adalah sebagai berikut:



2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
1	Pendidikan	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	122	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik sekolah menengah atas yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas yang menerima pembebasan biaya pendidikan	11652	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang	9158	Dinas Pendidikan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		menerima pembebasan biaya pendidikan			
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	2729	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	1812	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	3619	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	2652	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	1116	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	684	Dinas Pendidikan	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	12	Dinas Pendidikan	
		Jumlah tenaga kependidikan pada	742	Dinas Pendidikan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		jenjang sekolah menengah kejuruan			
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	1438	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	879	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kepala sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	153	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	105	Dinas Pendidikan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	8	Dinas Pendidikan	
		Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/workshp pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	14	Dinas Pendidikan	
		Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/workshp pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	924	Dinas Pendidikan	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	677	Dinas Pendidikan	
		Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	15	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah	924	Dinas Pendidikan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Daerah			
		Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan	454	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus	366	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada pendidikan khusus	248	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	81	Dinas Pendidikan	
		Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	78	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	220	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1),	21	Dinas Pendidikan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Kesehatan	sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	71	Dinas Pendidikan	
		Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1	Dinas Kesehatan	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	10	Dinas Kesehatan	
		Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	3	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	41	Dinas Kesehatan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan/atau berpotensi bencana provinsi			
		Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	26	Dinas Kesehatan	
		Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	1	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	26	Dinas Kesehatan	
		Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	1	Dinas Kesehatan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	53,15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	614,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (HA)	804,801	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	250,9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi			
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM	BUMD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Jumlah SPALD Regional	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Total kapasitas SPALD Regional	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	896,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Panjang jalan yang dibangun	13,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Panjang jembatan yg dibangun	148	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	12820	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	3269	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	133	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Panjang jalan yang dipelihara	241	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Panjang jembatan yang dipelihara	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	317	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Tersedianya data dan profil OPD sub	1	Dinas Pekerjaan Umum	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		urusan jasa konstruksi provinsi		dan Penataan Ruang	
		Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kewenangan pengawasannya			
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4	Perumahan Rakyat dan Pemukiman	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	147	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	KK 100, RT 22, UNIT RUMAH 68, JIWA KORBAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			336 JIWA		
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	21	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	104	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	59	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	21	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	
		Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh $\geq 10-15$ Ha	170,54	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	200 UNIT	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	12,17 ha	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	
		Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	445	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	
		Jumlah pengembang yang teregistrasi	22	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	30	Satuan Polisi Pamong Praja & Penanggulangan Kebakaran	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1200	Satuan Polisi Pamong Praja & Penanggulangan Kebakaran	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	21	Satuan Polisi Pamong Praja & Penanggulangan Kebakaran	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	6	Satuan Polisi Pamong Praja & Penanggulangan Kebakaran	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	6	Satuan Polisi Pamong Praja & Penanggulangan Kebakaran	
		Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	11	Satuan Polisi Pamong Praja & Penanggulangan Kebakaran	
		Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Penyediaan/pemutakhiran dokumen	1	Badan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		rencana penanggulangan bencana provinsi		Penanggulanagan Bencana Daerah	
		Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	0	Badan Penanggulanagan Bencana Daerah	
		Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota			
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota			
		Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi			
		Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi			
		Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi			
		Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana			



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		provinsi			
6	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	90	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	90	Dinas Sosial	
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	1	Dinas Sosial	
		Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	41	Dinas Sosial	
		Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	39	Dinas Sosial	
		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	-	Dinas Sosial	
		Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	-	Dinas Sosial	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	-	Dinas Sosial	
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	90	Dinas Sosial	
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	90	Dinas Sosial	
		Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti	2	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	60	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	39	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas	23	Dinas Sosial	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga			
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	23	Dinas Sosial	
		Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	560	Dinas Sosial	
		Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	560	Dinas Sosial	
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (panti)	1	Dinas Sosial	
		Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	-	Dinas Sosial	
		Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	20	Dinas Sosial	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	1	Dinas Sosial	
		Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	-	Dinas Sosial	
		Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	2	Dinas Sosial	
		Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	2	Dinas Sosial	
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	560	Dinas Sosial	
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	560	Dinas Sosial	
		Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	20	Dinas Sosial	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	5	Dinas Sosial	
		Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penuluruhan keluarga	6	Dinas Sosial	
		Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	6	Dinas Sosial	
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	90	Dinas Sosial	
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	90	Dinas Sosial	
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	1	Dinas Sosial	
		Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	1	Dinas Sosial	
		Jumlah perbekalan kesehatan yang	13	Dinas Sosial	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		disediakan di dalam panti			
		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	1	Dinas Sosial	
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	90	Dinas Sosial	
		Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	2	Dinas Sosial	
		Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	2	Dinas Sosial	
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	90	Dinas Sosial	
		Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	12	Dinas Sosial	
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan	1	Dinas Sosial	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		akses ke layanan dan kesehatan dasar			
		Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	2	Dinas Sosial	
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	2	Dinas Sosial	
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	-	Dinas Sosial	
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	10	Dinas Sosial	
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	10	Dinas Sosial	
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	1	Dinas Sosial	
		Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	-	Dinas Sosial	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	10	Dinas Sosial	
		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	1	Dinas Sosial	
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	10	Dinas Sosial	
		Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	2	Dinas Sosial	
		Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	2	Dinas Sosial	
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	10	Dinas Sosial	
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	10	Dinas Sosial	
		Jumlah Gelandangan dan pengemis	2	Dinas Sosial	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti			
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	10	Dinas Sosial	
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	10	Dinas Sosial	
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	10	Dinas Sosial	
		Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	200	Dinas Sosial	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	200	Dinas Sosial	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1	Dinas Sosial	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	85	Dinas Sosial	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	200	Dinas Sosial	
		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	35	Dinas Sosial	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
1	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	100	Dinas Tenaga Kerja	
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	88,48	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja	0	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah kabupaten/kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	100	Dinas Tenaga Kerja	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi KKNI / okupasi	0	Dinas Tenaga Kerja	
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	62,24	Dinas Tenaga Kerja	
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan,	6,19	Dinas Tenaga Kerja	
		Persentase penganggur yang dilatih	23,01	Dinas Tenaga Kerja	
		Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	57,1	Dinas Tenaga Kerja	
		Persentase penyerapan lulusan,	61,9	Dinas Tenaga Kerja	
		Persentase LPK yang terakreditasi	68,75	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	0	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	0	Dinas Tenaga Kerja	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	7,75	Dinas Tenaga Kerja	
		Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	0	Dinas Tenaga Kerja	
		Data tingkat produktivitas total,	52	Dinas Tenaga Kerja	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	98,19	Dinas Tenaga Kerja	
		Persentase Perusahaan yg telah memiliki PKB	10,9	Dinas Tenaga Kerja	
		Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh di perusahaan pada tahun n	60,72	Dinas Tenaga Kerja	
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	99,06	Dinas Tenaga Kerja	
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	90,69	Dinas Tenaga Kerja	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	16,65	Dinas Tenaga Kerja	
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	4,11	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah mogok kerja	1	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah penutupan perusahaan	62	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah perselisihan kepentingan	6	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah perselisihan hak	53	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah Perselisihan PHK	191	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	734	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	213	Dinas Tenaga Kerja	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	Ada	Dinas Tenaga Kerja	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan,	UMP	Dinas Tenaga Kerja	
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	36,36	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	10	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	0	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	16,55	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah lowongan pekerjaan yang	17,628	Dinas Tenaga Kerja	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		tersedia dalam satu wilayah provinsi			
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu provinsi	58	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	23	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi,	8	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi,	11	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi Pasar Kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER),	15	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi	13,97	Dinas Tenaga Kerja	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		keulangannya			
		Jumlah ijin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)/Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang diterbitkan,	100	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah Pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	100	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kebebasan Berserikat,	3,812	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKWI),	23,21	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Pengupahan	23,862	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Jaminan Sosial	24,55	Dinas Tenaga Kerja	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Perempuan	11,158	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	13,935	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan	5	Dinas Tenaga Kerja	
		Jumlah Perusahaan yang mendaftar Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online	25	Dinas Tenaga Kerja	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	35	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	134	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Pangan	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
		Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
		Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan	
		Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan	
		Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	172,082	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan	
		Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	Ada	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan	
		Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	Ada	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan	
		Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	Tidak Ada	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan	
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	Ada	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan	
		Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	Ada	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Kesehatan Hewan	
4	Pertanahan	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi			
		Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan			
		SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur			
		Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya			
5	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	54,93	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	66,97	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah	81,81	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		daerah provinsi,			
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	80,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi	100,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan berdampak lintas kabupaten/kota			
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	50%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Pemanfaatan data kependudukan	40,18%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang			



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan			
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Tidak Ada	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	23,4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	80,81	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	51	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	24,8	Dinas Pemberdayaan Perempuan,	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(MKJP)		Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
		Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	59,9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	28,57	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	5,14	Dinas Pemberdayaan Perempuan,	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
9	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	85,37	Dinas Pehubungan	
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	96,29	Dinas Pehubungan	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi			
10	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	82.92	Dinas Komunikasi dan Informatika	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	85,37	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara	85,07	Dinas Komunikasi dan Informatika	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Negara			
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	80,49	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan		Dinas Komunikasi dan Informatika	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		perundang-undangan			
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	95,12	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	85,37	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	2,1	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city		Dinas Komunikasi dan Informatika	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan			
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah	4,82	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		provinsi			
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	2,83	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	4,19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan	1,21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	22,99	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	4,45	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas	1,09	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	29,45	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1,85	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	3,26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data	5,19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		system (ODS)			
		Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	56,65	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	5,12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	19,41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	3,84	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	12,29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
12	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		provinsi			
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	2 Kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Kegiatan pameran penanaman modal	1 Kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	3 Kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	76 Konsultasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	4.107 Izin dan 991 Non Izin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Laporan realisasi penanaman modal	Rp20.164.872.520.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	393 Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	134 Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
13	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah pemuda yang medapat	38	Dinas Kepemudaan dan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pelatihan kade pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		Olahraga	
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	31	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	78.404	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	Ada	Badan Pusat Statistik	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	25	Badan Pusat Statistik	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	4	Badan Pusat Statistik	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	25	Badan Pusat Statistik	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	4	Badan Pusat Statistik	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	15,64	Badan Pusat Statistik	
		Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	8,53	Badan Pusat Statistik	
15	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah			
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
16	Kebudayaan	umlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	5	Dinas Kebudayaan	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan	29	Dinas Kebudayaan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)			
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	1	Dinas Kebudayaan	
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	579	Dinas Kebudayaan	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	7	Dinas Kebudayaan	
		Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	12	Dinas Kebudayaan	
		Layanan perijzinan membawa cagar		Dinas Kebudayaan	Tidak ada



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data			pengajuan izin rekomendasi untuk membawa benda cagar budaya ke luar provinsi melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP kepada Dinas Kebudayaan
		Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi),		Dinas Kebudayaan	Kegiatan pendukung indikator ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya <i>recofusing</i> anggaran di tahun 2023
		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan,	1	Dinas Kebudayaan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)			
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	480	Dinas Kebudayaan	
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum,	20.107	Dinas Kebudayaan	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Dinas Kebudayaan	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	Dinas Kebudayaan	Tidak ada, karena adanya keterbatasan anggaran sehingga kegiatan tersebut tidak masuk dalam RKA 2023



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	1	Dinas Kebudayaan	-
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	8	Dinas Kebudayaan	-
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	16	Dinas Kebudayaan	-
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Kebudayaan	Tidak ada, karena adanya keterbatasan anggaran sehingga kegiatan tersebut tidak masuk dalam RKA 2023
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Kebudayaan	Tidak ada, karena pendaftaran cagar budaya bukan kewenangan pemerintah provinsi
		Penyelenggaraan kegiatan museum	0	Dinas Kebudayaan	Tidak ada, karena



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang melibatkan masyarakat			sampai dengan tahun 2023 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki museum
17	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,4492	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	13,1466	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,0084	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	1,2169	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	2 Sub Kegiatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Jumlah judul yang tercantum dalam	0	Dinas Perpustakaan dan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		katalog induk Daerah		Kearsipan	
		Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	5 Naskah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	5 Naskah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	1 Item	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
18	Kearsipan	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	33,33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	33,33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	4,0443	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0,5359	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	136	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK			
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
URUSAN PILIHAN					
1	Kelautan dan Perikanan	Jumlah laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (wpp)	101.920	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 - 30 GT	1.427	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	47,06	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	95	Dinas Kelautan dan Perikanan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah kapal yang terdaftar	1.427	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	0	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tidak ada izin yang dikeluarkan karena sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perijinan KKPRL diambil alih oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (KKPRI)
		Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	24,44	Dinas Kelautan dan Perikanan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	20,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	994	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	0	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tidak ada ijin yang dikeluarkan karena sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perijinan KKPRL diambil alih oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Ruang Laut (KKPRI)
		Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku	287	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	2	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	46	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah	0	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tidak ada ijin yang dikeluarkan karena dampak penerbitan



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		provinsi yang diterbitkan			PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Operasionalisasi OSS-RBA, serta belum adanya arahan dan/atau tindak lanjut dari DPM - PTSP selaku OPD yang mewakili kewenangan untuk menyelenggarakan SIPPHP sebagai dasar bagi DKP melanjutkan penyelenggaraan



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					pelayanan penerbitan SIPPHP dan/atau menyelenggarakan pelayanan penerbitan SIPPHP diluar sistem OSS - RBB sebagaimana instruksi Gubernur atas LHP BPK 2022
2	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	624	Dinas Pariwisata	
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	2235	Dinas Pariwisata	
		Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	879.236.660.029	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	131	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Terpadu Satu Pintu	
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	56	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	2,09	Badan Pusat Statistik	
		Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	1,77	Badan Pusat Statistik	
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1530899	Badan Pusat Statistik	
		Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	1511354	Badan Pusat Statistik	
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	16	Dinas Pariwisata	
		Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	Dinas Pariwisata	Tidak ada even pariwisata luar negeri yang diikuti
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	90	Dinas Pariwisata	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	14,33	Dinas Pariwisata	
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	76	Dinas Pariwisata	
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	5	Dinas Pariwisata	
3	Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	30	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan	
		Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman horikultura	217270	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan	
		Dokumen pengawasan benih yang beredar	32	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan	
		Prasarana pertanian yang digunakan	32	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	77,78	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan	
		Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	45	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan	
		Persentase sarana pertanian yang digunakan	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan	
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	23	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan	
		Persentase jumlah usulan usaha pertanian	100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan	
4	Kehutanan	Dokumen penataan hutan wilayah KPH	0	di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak tersedianya dokumen penataan hutan wilayah KPH di Dinas Lingkungan Hidup



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					dan Kehutanan
		Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	66,67	di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		Luas lahan kritis yang direhabilitasi	50,00	di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	1.213	di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	0	di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak tersedianya data luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutang produksi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6	0	di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak tersedianya data luas hutan yang terganggu di Dinas Lingkungan Hidup dan



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Kehutanan
		Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	88,76	di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	ada	di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	30	di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		Menurunnya gangguan kawasan Tahura	0	di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak tersedianya data pemulihan kawasan tahura di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	0	di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak tersedianya data menurunnya gangguan pada kawasan tahura di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	0	di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak tersedianya data jumlah ketersediaan penyuluhan kehutanan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	0	di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak tersedianya data jumlah sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	0	di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak tersedianya data jumlah KHT yang diberikan diklat di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	59	di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	1,2	di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Perda/Pergub terkait izin penggalan, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Perda/Pergub terkait izin penggalan, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Perda/Pergub terkait dengan tata	0	Dinas Energi dan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi		Sumber Daya Mineral	
		Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Perda/Pergub terkait IUJP	1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	36	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Pelaksanaan pembangunan listrik	1	Dinas Energi dan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu		Sumber Daya Mineral	
6	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	56,66	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	4,44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	33,33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	56,66	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra produk ekspor		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Jumlah penanganan pengaduan konsumen	45	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	42	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Jumlah komoditi potensial yang	0	Dinas Perindustrian dan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dipantau		Perdagangan	
		Indeks Kinerja BPSMB	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	33,33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah barang beredar yang diawasi	71	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Tersedianya bangunan pusat distribusi		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Telah ditetapkan badan usaha pengelola pusat distribusi	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Beroperasinya pusat industri		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	8,06	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase laporan harga harian	100	Dinas Perindustrian dan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		melalui sistem informasi harga Kemendag		Perdagangan	
7	Perindustrian	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkan menjadi perda	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	11,11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IUI) bagi industri besar yang diterbitkan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota			
8	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya			
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya			
		Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya			

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi	92,29		



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dalam pendidikan menengah			
		Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	88,82		
2	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1,94		
		Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	94,59		
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100		
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100		
3	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	37,16		
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh	18,92		



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi			
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	100,00		
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	46,10		
		Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0,00		
		Rasio kemandapan jalan	80,78		
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	15,54		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	68,03		



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0,00		
		Persentase Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	20,80		
		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	52,66		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00		
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	50,00		
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	66,67		
		Persentase penanganan pra bencana	100,00		
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100,00		
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00		



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00		
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00		
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00		
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100,00		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
1	Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	57,14		
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2,91		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4.842.914		
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit,	98,19		



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).			
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	60		
		Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang- undangan bidang ketenagakerjaan	11,30		
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	12,63		
		Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	5,51		
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	29,96		
3	Pangan	Persentase cadangan pangan	17,58		
4	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan	0		



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dengan luas izin lokasi yang diterbitkan			
		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100,00		
		Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	91,49		
5	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	74,26		
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	14,29		
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100,00		
		Pemanfaatan data kependudukan	41,86		
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	10,60		
		Persentase peningkatan status desa mandiri	11,00		
8	Pengendalian	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,17		



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	56,88		
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	16,50		
9	Perhubungan	Rasio konektivitas Provinsi	0,60		
		V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,52		
10	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	85,37		
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	88,24		
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	86,71		
11	Koperasi, Usaha Kecil dan	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	48,57		



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Menengah	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	29,86		
12	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	10,67		
13	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,71		
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,01		
		Peningkatan prestasi olahraga	17,00		
14	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100,00		
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100,00		
15	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	60,31		
16	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	66,43		



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	65,80		
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	62,52		
18	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	17,81		
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	27,67		
URUSAN PILIHAN					
1	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	103,64		



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100,00		
2	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	101,92		
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	84,92		
		Tingkat hunian akomodasi	53,45		
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,90		
3	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	19,06		
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	32,33		
4	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	100,00		
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	0,00		



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	1,31		
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	100,00		
		Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	100,00		
6	Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	-4,30		
		Persentase penanganan pengaduan konsumen	97,78		
		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	0,00		
		Tertib Usaha	0,00		
		Persentase kinerja realisasi pupuk	88,68		
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	88,73		
		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	8,06		
7	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	2,55		



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0,00		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	11,11		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besaryang dikeluarkan oleh instansi terkait	0,00		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0,00		



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100,00		
8	Transmigrasi	-			

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	23,07	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Rasio PAD	44,96	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	61,67	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Opini Laporan Keuangan	10,00	Inspektorat Daerah	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,00	Inspektorat Daerah	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,00	Inspektorat Daerah	
2	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	73,51	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	40,57	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	86,50	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	83,35	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga	32,85	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kesehatan			
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	57,51	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	
4	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	3,02	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	19,02	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Assets management	4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,78	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>information on resources available to frontline service delivery units</i>)	96,16	Badan Keuangan dan Aset Daerah	



NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>public access to fiscal information</i>)	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau kepada masyarakat dalam masa 1 (satu) periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan kepada para pihak internal pemerintah maupun eksternal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target kinerja menjadi tolak ukur realisasi program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan e- performance adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi atas capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah setiap triwulan secara transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 yang ditargetkan untuk dicapai.

Apabila semakin tinggi realisasi indikator menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{CAPAIAN KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Sedangkan jika semakin tinggi realisasi indikator menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{CAPAIAN KINERJA} = \frac{(2 \times \text{TARGET}) - \text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	75 % sampai 100 %	Baik
2	55 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

2.3.1 Target Kinerja dalam Perjanjian Kerja

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai 12 Sasaran dan 16 Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja Gubernur tahun 2023. Berikut sasaran dan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang dilakukan evaluasi kinerjanya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,9% - 5,8%
		Pendapatan Per Kapita	81,91 Juta Rupiah
		Indeks Gini	0,329 Indeks
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Pengangguran	9,50%
		Angka Kemiskinan	5,74%
3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	69,95 Indeks
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	70,37 Indeks
5	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	77.14 Indeks
6	Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100%
7	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,30 Indeks
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	15,30%
9	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi	96%
		Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	123,73 Ha
10	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	Rasio Konektivitas	44,25
11	Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Persentase Jalan Kondisi Baik	64,75%
12	Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	63,9 Indeks

2.3.2 Pengukuran Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2023 dan Perbandingan Tahun Sebelumnya

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan target kinerja yang telah ditetapkan, analisis atas pencapaian sasaran pada bagian ini dilakukan dengan melihat realisasi pelaksanaan program untuk setiap bidang kewenangan. Kemudian dilakukan

analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gaps*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Analisis dalam laporan ini dilakukan per indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 yang ditetapkan pada bulan Januari. Dengan ini disampaikan analisa capaian kinerja organisasi yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 sebagai berikut:

Sasaran 1: Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Terlepas dari adanya kritik yang meragukan kemampuan indikator ini untuk mengukur tingkat kesejahteraan, namun sejauh ini indikator tersebut masih dianggap sebagai alat ukur yang sederhana dan mudah digunakan. Tujuan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 salah satunya adalah Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, menunjukkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memanfaatkan potensi yang dimiliki.

Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan terus tumbuh akan berdampak secara langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya jumlah Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang indikator kinerja nya mencakup pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Per Kapita dan Indeks Gini, Biro Perekonomian dan Pembangunan sebagai koordinator merangkum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pendukung indikator Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Perkapita dan indeks Gini tersebut , tidak lepas juga dukungan dari semua elemen baik pemerintah daerah, akademisi, industri, komunitas, dan juga media.

1. Pertumbuhan Ekonomi

A. Data Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Ketercapaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,9% – 5,8%	5,20%	106%

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

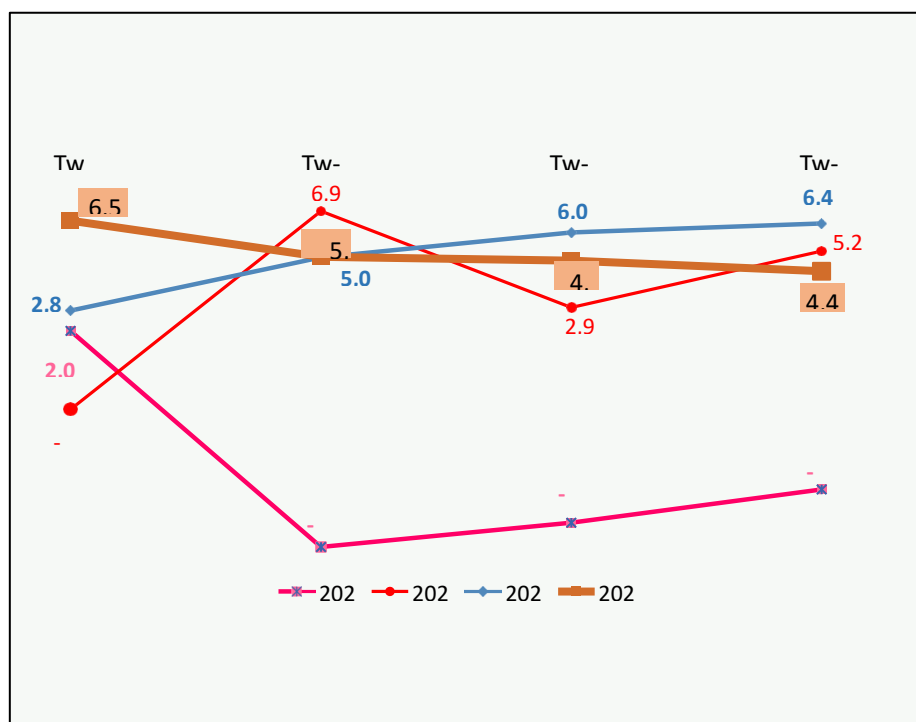
Analisis terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan tabel di atas dapat dilihat kinerja pertumbuhan ekonomi dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 4.9-5.8% pada tahun 2023 dengan capaian realisasi sebesar 5.20% dan capaian kinerja sebesar 96% atau dalam **Kategori Sangat Baik**.

Perekonomian Kepulauan Riau triwulan IV-2023 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya tumbuh sebesar 4,45 persen, tumbuh lebih lambat dibanding pertumbuhan triwulan IV-2022 (y-on-y) yang tumbuh sebesar 6,40 persen. Pertumbuhan tertinggi year on year pada triwulan IV-2023 dicapai oleh Jasa Lainnya sebesar 21,09 persen; diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 12,20 persen dan kategori konstruksi sebesar 11,07 persen.

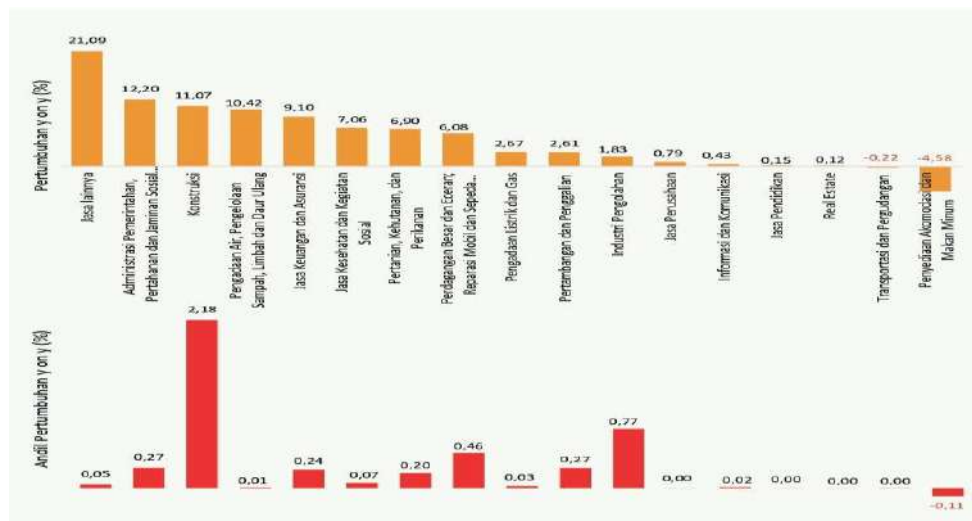
Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan IV-2023 secara year on year, konstruksi memberikan andil pertumbuhan ekonomi sebesar 12,8 persen diikuti industri keuangan sebesar 0,77 persen, dan kategori perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,46 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 13,91 persen; dan Konstruksi sebesar 13,89 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan III-2023 secara *year on year*, Konstruksi memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 2,56 persen; diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan andil sebesar 0,80 persen; dan Informasi dan Komunikasi memberikan andil sebesar 0,51 persen.

Grafik 2.1
Pertumbuhan PDRB Triwulanan, 2020-2023 (y-on-y) (persen)



Grafik 2.2
Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan III 2023 (y-on-y) (persen)

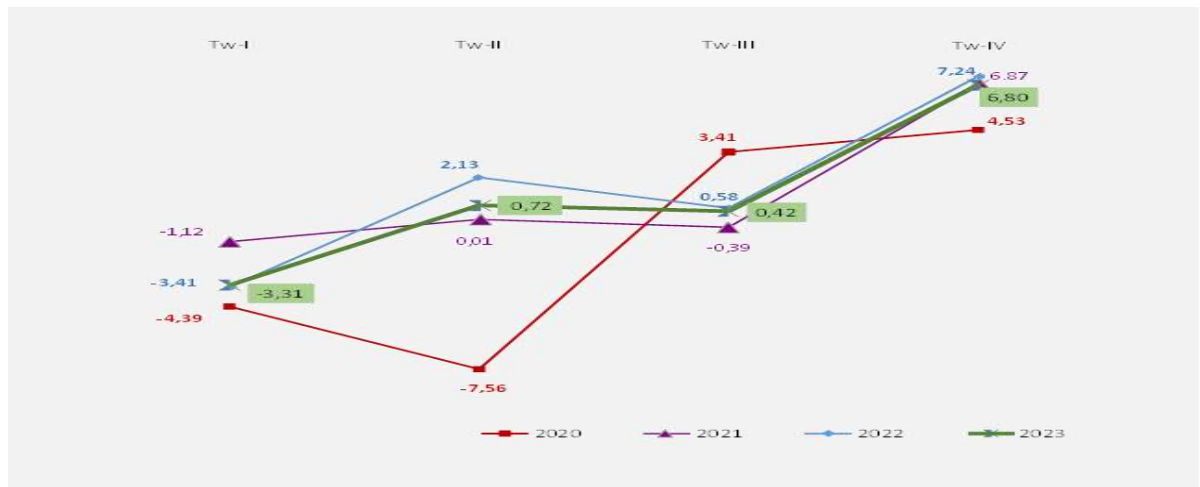


- Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2023 Terhadap Triwulan III-2023 (q-to-q)**

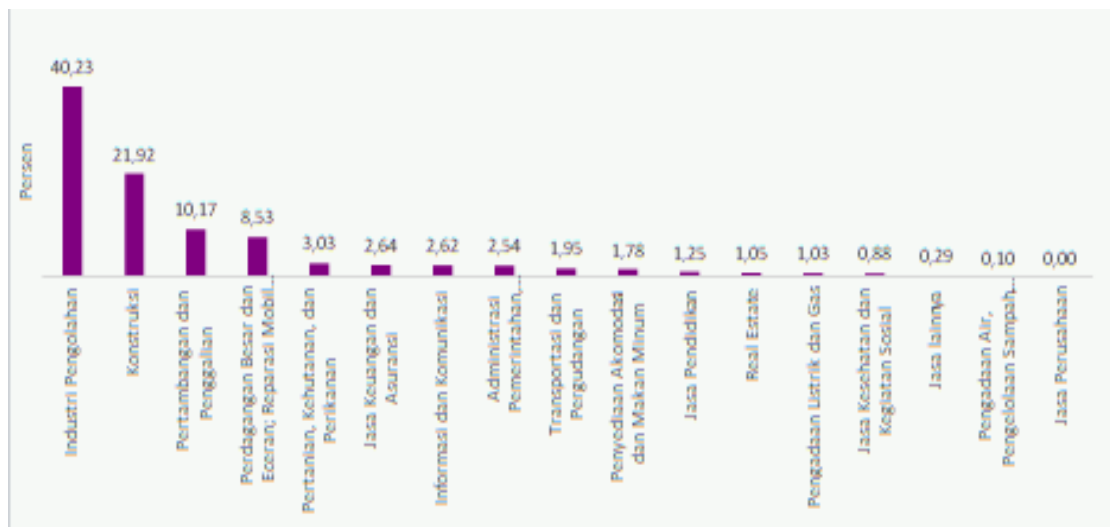
Ekonomi Kepulauan Riau triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 6,80 persen bila dibandingkan dengan triwulan III-2023 (*q-to-q*). Kategori yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 36,69 persen; disusul kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 36,67 persen; diikuti kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 17,14 persen.

Andil pertumbuhan terbesar disumbangkan oleh kategori Industri Pengolahan dengan andil pertumbuhan sebesar 3,86 persen; diikuti kategori Konstruksi dengan andil pertumbuhan sebesar 2,41 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan andil pertumbuhan sebesar 0,67 persen. Struktur Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan IV-2023 masih didominasi oleh Industri Pengolahan (40,23 persen); Konstruksi (21,92 persen); dan Pertambangan dan Pengaliran (10,17 persen).

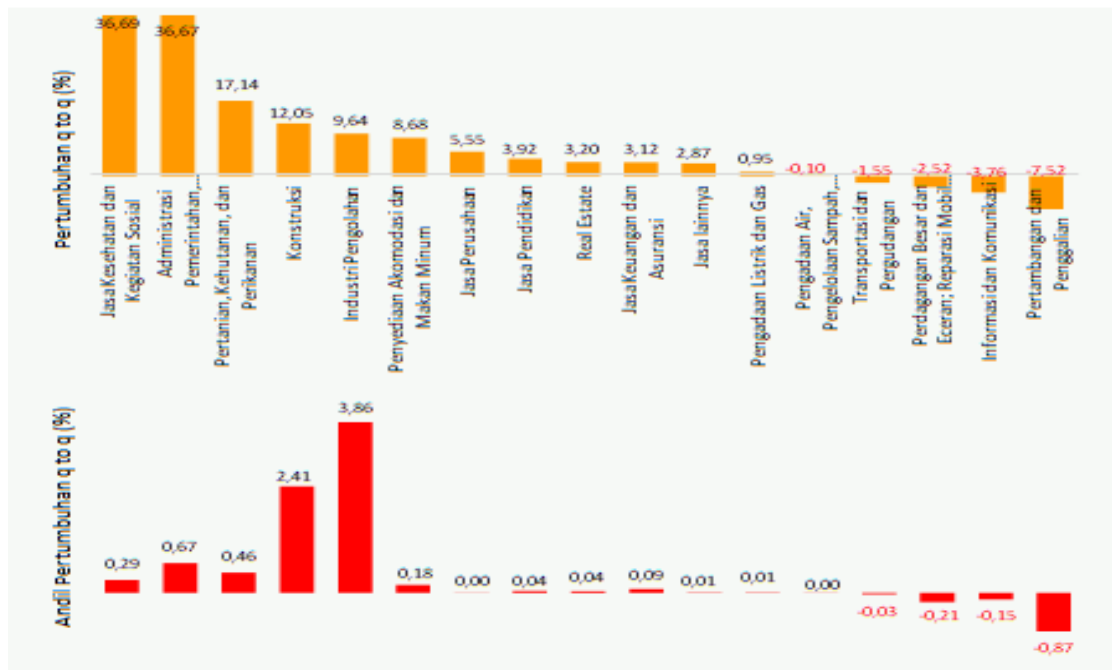
Grafik 2.3
Pertumbuhan PDRB Triwulanan, 2020-2023 (q-to-q) (persen)



Grafik 2.4
Distribusi PDRB (ADHB) Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan IV-2023 (persen)

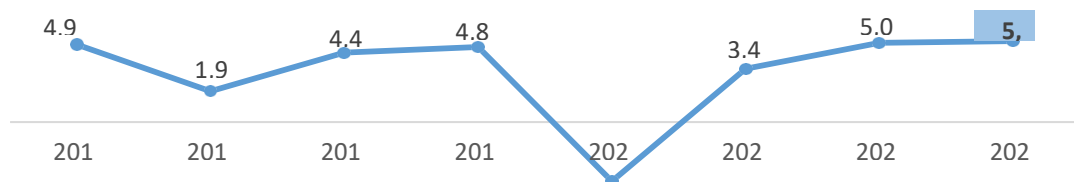


Grafik 2.5
Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan IV 2023 (q-to-q) (persen)



1. Pertumbuhan Ekonomi Kumulatif Triwulan III-2023 Terhadap Kumulatif Triwulan III-2022 (c-to-c)

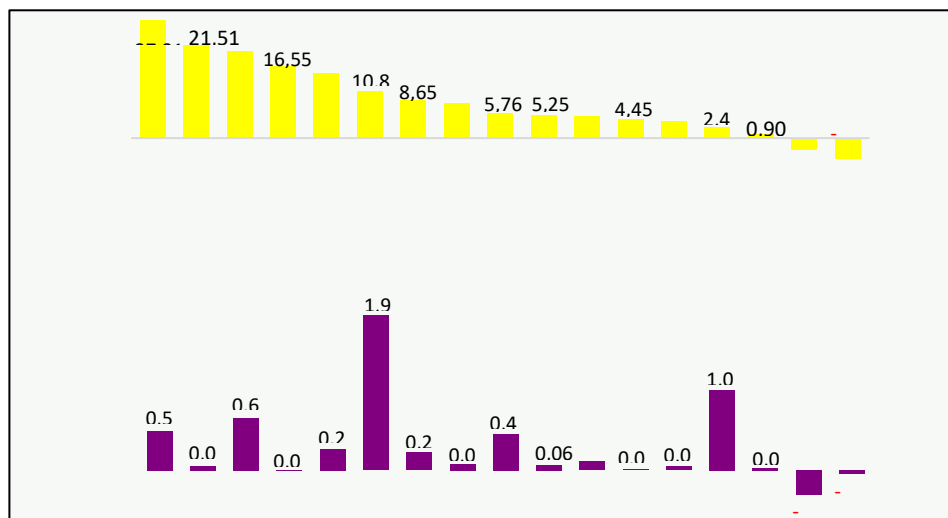
Grafik 2.6
Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha,
Triwulan III – 2016 - 2023 (c-to-c) (persen)



Perekonomian Kepulauan Riau tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,20 persen, tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan tahun 2022 (*c-to-c*) yang tumbuh sebesar 5,09 persen. Pertumbuhan tertinggi tahun 2023 dicapai oleh kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 27,31 persen; diikuti kategori Jasa Lainnya sebesar 21,51 persen; dan kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 19,96 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau tahun 2023 (*c-to-c*), Konstruksi memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 1,99 persen.

Grafik 2.7
Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan III-2023 (*c-to-c*) (persen)



B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

Sebagai perbandingan dari capaian data di atas berikut disampaikan perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 dengan 2023:

Tabel 2.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2023	Kenaikan (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5.09	5.20	0,11 %

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan capaian kinerja pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2023 maka Provinsi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan sebesar 0,11 %. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri sebesar 5,09%, dan dibawah nilai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar

5,31% pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan di angka 5,20%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 andil paling besar berada di sektor konstruksi dan industri pengolahan.

C. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja berdasarkan Target RPJMD

Sebagai Gambaran Target dan Realisasi berdasarkan Target RJMD dapat dilihat dari Tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Target RPJMD	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5.20	4,9 – 5,8%	106%

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan realisasi kinerja pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 maka Provinsi Kepulauan Riau mencapai target yang telah ditetapkan RPJMD (2023). Dimana target RPJMD sebesar 4,9 - 5,8 % dapat tercapai sebesar 5,20.

Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada triwulan IV-2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,59 persen. Pertumbuhan q-to-q triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 0,58 persen, dan secara c-to-c tumbuh sebesar 4,69 persen. Struktur perekonomian Pulau Sumatera secara regional didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara sebesar 23,34 persen, sementara Kepulauan Riau berada pada urutan kelima dengan share sebesar 7,57 persen.

Tabel 2.7
Ringkasan Pertumbuhan Ekonomi per Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan IV-2023

Wilayah	PDRB (miliar rupiah)		Pertumbuhan (%)			terhadap Pulau Sumatera (%)
	ADHB	ADHK	q to q	y on y	c to c	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)



1.	Aceh	61.265,28	39.226,43	7,16	4,15	4,23	5,27
2.	Sumatera Utara	271.385,40	153.716,63	0,53	5,02	5,01	23,34
3.	Sumatera Barat	80.552,36	49.006,16	2,31	4,30	4,62	6,93
4.	Riau	264.218,12	140.806,47	0,10	4,02	4,21	22,73
5.	Jambi	75.384,31	43.011,41	- 1,00	4,03	4,66	6,48
6.	Sumatera Selatan	157.940,33	90.979,81	- 1,90	4,94	5,08	13,59
7.	Bengkulu	25.122,39	13.352,55	3,04	4,76	4,26	2,16
8.	Lampung	112.258,84	66.782,53	- 3,99	5,40	4,55	9,66
9.	Kepulauan Bangka Belitung	26.449,09	15.605,52	2,65	4,00	4,38	2,28
10.	Kepulauan Riau	87.967,66	52.719,49	6,80	4,45	5,20	7,57
	Sumatera	1.162.543,7 8	665.207,02	0,58	4,59	4,69	100,0 0

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Posisi relatif pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebesar 5,20% berada di atas rata-rata Pulau Sumatera sebesar 4,69% dan Nasional sebesar 5,05%. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Wilayah Sumatera tahun 2023, Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi tertinggi.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional

Sebagai Gambaran Target dan Realisasi berdasarkan Target Nasional dapat diliath dari Tabel berikut ini :

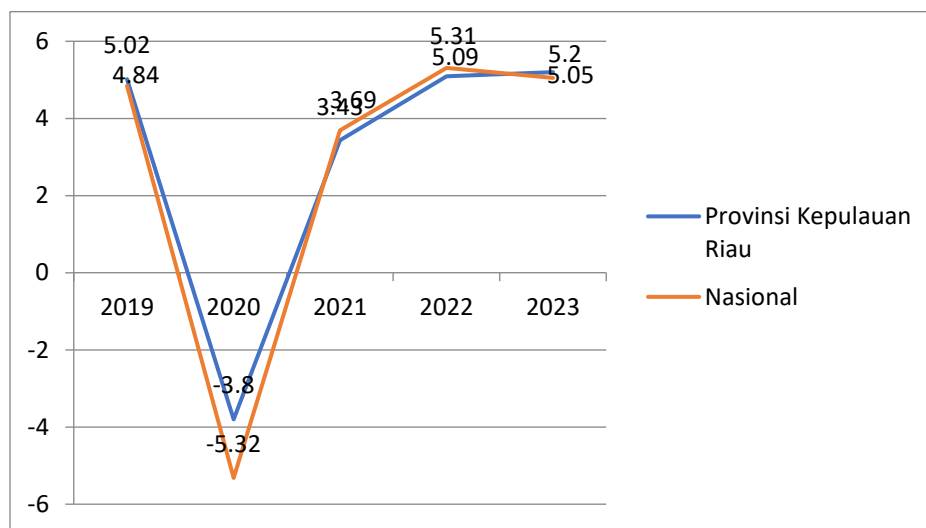
Tabel 2.8
Perbandingan Taerget Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Nasional	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5.20	5,3 – 5,5%	98,11

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 menyatakan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau dibawah target nasional.

Grafik 2.8
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2019-2023 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau 2024 dan BPS Nasional 2024

Dalam rangka mendorong ekonomi daerah, kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 diarahkan pada Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui:

- 1) Melakukan realisasi belanja pemerintah lebih awal terutama belanja modal infrastruktur untuk menghasilkan dampak lebih optimal bagi perekonomian daerah.
- 2) Mendorong kelancaran implementasi program pemulihan ekonomi nasional di daerah.
- 3) Mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus Nongsa digital park dan KEK maintenance, repair and overhaul (MRO) Batam Aero Technic dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja.
- 4) Mendorong pemulihan pariwisata dengan mendorong kesiapan penerapan protokol kesehatan CHSE pada daerah tujuan wisata tertentu, mendorong

pembukaan wisata secara bertahap dan mendorong penggunaan transaksi elektronik non tunai, dan memberikan insentif kepada pelaku usaha pariwisata.

- 5) Mendorong perekonomian dan keuangan yang inklusif dengan cara: mendorong industri eksisting untuk meningkatkan pangsa penggunaan bahan baku berbasis potensi sumberdaya lokal; memprioritaskan investasi dalam pengembangan agroindustri berbasis potensi SDA di Kepri seperti hasil pertanian dan perikanan; mendorong penguatan dan kemitraan serta menjaga daya saing dan kinerja UMKM melalui digitalisasi UMKM, serta meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung (transportasi jalan, jembatan, bandara, pelabuhan) untuk menekan biaya logistik dan konektivitas.

Dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dibentuk tim pengendalian inflasi daerah (TPID Provinsi Kepri) berdasarkan lampiran III huruf a Keputusan Mendagri RI No.500.05-8135 Tahun 2017, terdiri atas :

1. Ketua : Gubernur
2. Pelaksana Harian Tugas : Sekretaris Daerah Provinsi
3. Wakil Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi
4. Sekretaris : Kepala Biro yang membidangi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi
5. Anggota : Kepala Perangkat Daerah di Provinsi yang membidangi urusan perdagangan, pertanian, perhubungan, energi dan sumber daya mineral, perencanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, statistik dan perangkat daerah lainnya yang dianggap perlu.

TPID ini dibentuk dengan tugas dan kewajiban :



1. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada tingkat provinsi;
2. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
3. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
4. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten / Kota; dan/atau
5. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara tertulis setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat:
 - a) Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
 - b) Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
 - c) Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
 - d) Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan
 - e) Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
7. Menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan menyampaikannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui Forum Rapat Koordinasi

Wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional TPID.

9. Melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan arahan kebijakan pengendalian inflasi daerah kepada TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

2 Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita mengindikasikan rata-rata nilai tambah ekonomi suatu daerah yang diterima oleh setiap penduduknya. PDRB per kapita sering digunakan sebagai pendekatan pendapatan per kapita penduduk karena ukuran pendapatan per kapita sulit diperoleh. PDRB per kapita tidak semata-mata mengindikasikan kemakmuran wilayah karena pada kenyataannya distribusi pendapatan suatu wilayah masih belum merata. Ada kelompok masyarakat yang memperoleh pendapatan tinggi, tetapi ada pula yang pendapatannya masih rendah. Meskipun PDRB per kapita suatu wilayah tinggi, tetapi bila tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk juga masih tinggi maka wilayah tersebut belum dapat dikatakan mengalami makmur atau sejahtera. Sehingga, untuk memaknai data PDRB per kapita tidak terlepas dari data dasarnya. Oleh karena itu angka PDRB per kapita dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan data total PDRB. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Data PDRB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara :

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya;

2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun;
3. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah;
4. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah;
5. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang.

A. Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

Berikut disampaikan informasi ketercapaian Pendapatan Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau 2023 :

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Indikator Pendapatan Per Kapita
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pendapatan Per Kapita (ADHK)	81,91 Juta Rupiah	92,93 Juta Rupiah	113

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Analisis terhadap pendapatan perkapita berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kinerja pendapatan perkapita dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 81,91 juta pada tahun 2023 dengan capaian realisasi sebesar 92,93 juta dan capaian kinerja sebesar 113% atau dalam **Kategori Sangat Baik**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Dari capaian data di atas berikut disampaikan perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 dengan 2023.

Tabel 2.10
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan 2023



No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2023	Kenaikan (%)
1.	Pendapatan Per Kapita	89,64 Juta Rupiah	92,93 Juta Rupiah	3,29 %

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Kepulauan Riau capaian kinerja Pendapatan Per Kapita Tahun 2022 sebesar 89,64 Juta Rupiah dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 92,93 Juta Rupiah maka Provinsi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan sebesar 3,29 %.

C. Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan RPJMD

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target RPJMD	Capaian (%)
1.	Pendapatan Per Kapita	92,93 Juta Rupiah	81,91 Juta Rupiah	113

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Analisis terhadap pendapatan Per Kapita dibandingkan dengan target RPJMD berdasarkan tabel di atas dapat dilihat kinerja pendapatan per Kapita dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 81,92 Juta Rupiah pada tahun 2023 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 92,93 Juta Rupiah dan capaian kinerja sebesar 113 %.

2.3.3 PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Triwulan IV-2022, Triwulan III-2023 dan Triwulan IV-2023 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw IV-2022**	Triw III-2023**		Triw IV-2022**	Triw III-2023**	Triw IV-2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.476,49	2.293,76	2.666,89	1.439,81	1.313,94	1.539,10



Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Triw IV- 2023**	Harga Konstan 2010		
	Triw IV- 2022**	Triw III- 2023**		Triw IV- 2022**	Triw III- 2023**	Triw IV- 2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
B. Pertambangan dan Penggalian	8.546,41	9.555,39	8.950,04	5.138,69	5.701,64	5.272,79
C. Industri Pengolahan	34.324,18	32.376,77	35.388,33	21.283,19	19.766,51	21.672,37
D. Pengadaan Listrik dan Gas	884,29	893,83	902,63	513,31	522,08	527,03
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	76,83	85,17	85,67	59,52	65,79	65,72
F. Konstruksi	17.190,05	17.101,21	19.278,26	9.950,77	9.863,89	11.052,16
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Rep- arasi Mobil dan Sepeda Motor	6.912,16	7.649,23	7.504,34	3.812,82	4.149,07	4.044,63
H. Transportasi dan Pergudangan	1.751,44	1.684,92	1.714,67	979,71	992,91	977,56
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.620,55	1.438,17	1.570,15	1.165,60	1.023,37	1.112,22
J. Informasi dan Komunikasi	2.269,27	2.384,78	2.300,80	1.887,11	1.969,21	1.895,24
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.106,45	2.241,88	2.324,52	1.312,39	1.388,47	1.431,81
L. Real Estat	903,43	889,59	920,26	622,55	603,95	623,28
M,N. Jasa Perusahaan	2,60	2,54	2,69	1,86	1,78	1,88
O. Administrasi Pemerintahan, Pertah- anan dan Jaminan Sosial Wajib	1.951,10	1.631,08	2.236,99	1.105,20	907,29	1.240,00
P. Jasa Pendidikan	1.106,27	1.061,63	1.099,17	585,87	564,60	586,75
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	709,58	564,44	771,40	500,00	391,62	535,31
R,S,T,U. Jasa Lainnya	202,54	243,27	250,88	116,98	137,69	141,64
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	83.033,66	82.097,63	87.967,66	50.475,37	49.363,82	52.719,49
PDRB Tahun 2022 Harga Berlaku					308.842,68	
PDRB Tahun 2022 Harga Konstan					190.163,70	
PDRB Tahun 2023 Harga Berlaku					331.889,50	
PDRB Tahun 2023 Harga Konstan					200.043,86	

Keterangan : * Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara



2.3.4 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau q-to-q, y-on-y dan c-to-c Triwulan IV-2023 Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (persen)

Lapangan Usaha	Triw IV-2023 Terhadap Triw III-2023 (q-to-q)**	Triw IV-2023 Terhadap Triw IV-2022 (y-on-y)**	Kumulatif Triw IV-2023 Terhadap Kumulatif Triw IV-2022 (c-to-c)**	Sumber Pertumbu- han (q-to- q)	Sumber Pertumbu- han (y-on- y)	Sumber Pertumbu- han (c-to- c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	17,14	6,90	0,90	0,46	0,20	0,03
B. Pertambangan dan Penggalian	-7,52	2,61	-2,65	-0,87	0,27	-0,32
C. Industri Pengolahan	9,64	1,83	2,48	3,86	0,77	1,03
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,95	2,67	8,03	0,01	0,03	0,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,10	10,42	4,45	0,00	0,01	0,01
F. Konstruksi	12,05	11,07	10,80	2,41	2,18	1,99
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,52	6,08	5,76	-0,21	0,46	0,47
H. Transportasi dan Pergudangan	-1,55	-0,22	14,92	-0,03	0,00	0,27
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,68	-4,58	27,31	0,18	-0,11	0,51
J. Informasi dan Komunikasi	-3,76	0,43	19,96	-0,15	0,02	0,67
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,12	9,10	8,65	0,09	0,24	0,23
L. Real Estat	3,20	0,12	5,25	0,04	0,00	0,06
M,N. Jasa Perusahaan	5,55	0,79	16,55	0,00	0,00	0,00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	36,67	12,20	5,13	0,67	0,27	0,11
P. Jasa Pendidikan	3,92	0,15	3,87	0,04	0,00	0,05
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	36,69	7,06	-4,82	0,29	0,07	-0,05
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2,87	21,09	21,51	0,01	0,05	0,05
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	6,80	4,45	5,20	6,80	4,45	5,20

Keterangan : * Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.12
PDRB Per Kapita Kepulauan Riau

Lapangan Usaha	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	131,88	145,58	154,18



PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	86,58	89,64	92,93
--	-------	-------	-------

Tabel 2.13
PDRB Kepulauan Riau Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Triwulan IV-2022, Triwulan III-2023, dan Triwulan IV-2023 (miliar rupiah)

Komponen	Harga Berlaku		Triw IV-2023**	Harga Konstan 2010		
	Triw IV-2022**	Triw III-2023**		Triw IV-2022**	Triw III-2023**	Triw IV-2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	32.495,14	34.128,88	35.686,10	19.274,64	19.660,72	20.234,02
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	183,98	207,65	216,90	101,61	113,09	117,68
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5.920,57	3.442,81	6.623,71	3.277,69	1.912,94	3.559,03
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	35.207,42	37.385,02	38.983,35	19.839,02	20.886,92	21.655,57
5. Perubahan Inventori	1.442,45	261,87	2.328,93	821,19	143,95	1.270,40
6. Ekspor Barang dan Jasa	113.637,68	114.831,06	111.815,69	81.202,67	82.292,22	78.605,47
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	105.853,57	108.159,65	107.687,02	74.041,45	75.646,01	72.722,69
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	83.033,66	82.097,63	87.967,66	50.475,37	49.363,82	52.719,49

Keterangan : * Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.14
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau *q-to-q*, *y-on-y* dan *c-to-c* Triwulan IV-2023 Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010 (persen)

Komponen	Triw IV-2023 Terhadap Triw III-2023 (<i>q-to-q</i>)**	Triw IV-2023 Terhadap Triw IV-2022 (<i>y-on-y</i>)**	Kumulatif Triw IV-2023 Terhadap Kumulatif Triw IV-2022 (<i>c-to-c</i>)**	Sumber Pertumbuhan (<i>q-to-q</i>)	Sumber Pertumbuhan (<i>y-on-y</i>)	Sumber Pertumbuhan (<i>c-to-c</i>)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,92	4,98	4,17	1,16	1,90	1,66
2. Pengeluaran Konsumsi	4,06	15,82	6,77	0,01	0,03	0,01



LNPRT						
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	86,05	8,58	6,84	3,33	0,56	0,30
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,68	9,16	8,72	1,56	3,60	3,45
5. Ekspor Barang dan Jasa	-4,48	-3,20	-2,46	-7,47	-5,15	-4,19
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-3,86	-1,78	-2,54	-5,92	-2,61	-3,93
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	6,80	4,45	5,20	6,80	4,45	5,20

Keterangan : * Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara

2 Indeks Gini

Indeks Gini, Rasio Gini, atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang pertama kali dikembangkan oleh statistik Italia bernama Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 (International NGO Forum on Indonesia Development, 2018). Salah satu alat ukur yang digunakan dalam mengukur ketimpangan pendapatan yaitu menggunakan indeks Gini. Indeks Gini mengukur ketimpangan pendapatan melalui hubungan antara presentase penduduk dengan presentase pendapatan. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Semakin mendekati 1 maka nilai ketimpangan semakin besar, sebaliknya semakin mendekati 0 maka nilai ketimpangan semakin kecil.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan pulau yang memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau juga merupakan salah satu Provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum diikuti oleh pemerataan pendapatan masyarakatnya.

A. Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

Berikut disampaikan informasi ketercapaian Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau 2023:

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Indikator Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023



No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Gini	0,329 Indeks	0,340 Indeks	89

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Analisis terhadap tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator Indeks Gini dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,329 dengan capaian realisasi sebesar 0,340 dan capaian kinerja sebesar 89% atau dalam **Kategori Baik.**

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tabel 2.16
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2023	Kenaikan (%)
1.	Indeks Gini	0,325 indeks	0,340 Indeks	15%

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan capaian kinerja Indeks Gini Tahun 2022 sebesar 0,325 dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 0,340 maka Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan sebesar 15 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi sedikit penurunan pemerataan pengeluaran di Kepulauan Riau. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan ketimpangan “Rendah” bila Indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan Ketimpangan “Sedang” bila Indeks Gini antara $> 0,3 - 0,4$; dan Ketimpangan “Tinggi” bila Indeks Gini di atas 0,4. Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan nilai indeks gini pada

tahun 2023 sebesar 0,340 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,325. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori Sedang. Hal ini perlu diwaspadai agar peningkatan pendapatan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi (orang kaya) tetapi juga kelompok menengah dan rendah.

C. Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan RPJMD

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target RPJMD	Capaian (%)
1.	Indeks Gini	0,340 Indeks	0,329 Indeks	89

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Analisis terhadap pendapatan Indeks Gini dibandingkan dengan target RPJMD berdasarkan tabel di atas dapat dilihat kinerja Indeks Gini belum mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 0,329 Indeks pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 0,340 Indeks dan capaian kinerja sebesar 89 %.

D. Data Capaian Pemerintah Daerah Terhadap Target Nasional

Berikut ini data perbandingan Capaian dan Target Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Nasional:

Tabel 2.18
Perbandingan Target Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Nasional

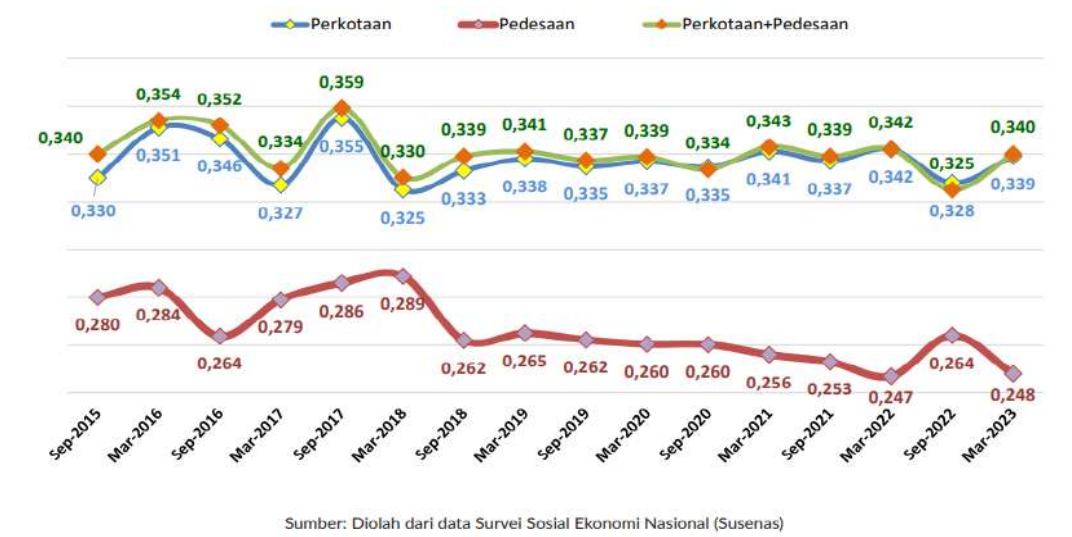
No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Nasional	Capaian (%)
1.	Indeks Gini	0,340	0,375 – 0,378%	89,91

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel di atas Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 menyatakan bahwa capaian Indeks Gini di Provinsi Kepulauan Riau dibawah target nasional.

Grafik 2.9

Perkembangan Gini Ratio, September 2015–Maret 2023



Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kepulauan Riau yang diukur oleh Gini Ratio sebesar 0,340. Angka ini naik sebesar 0,015 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,325. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,339, naik 0,011 poin dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,328. Gini Ratio di daerah pedesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,248, turun 0,016 poin dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,264. Selama periode September 2022 - Maret 2023, distribusi pengeluaran dari kelompok penduduk 40 persen terbawah mengindikasikan penurunan, yaitu dari 20,53 persen pada September 2022 menjadi 20,04 persen pada Maret 2023.

Berdasarkan daerah, distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada periode September 2022-Maret 2023 mengalami penurunan yaitu dari 20,39 persen pada September 2022 menjadi 20,08 persen pada Maret 2023. Kondisi yang berbeda terjadi di daerah pedesaan, dimana distribusi pengeluaran penduduk 40 persen terbawah mengalami peningkatan dari 23,02 persen menjadi 24,76 persen pada periode tersebut.

Gini Ratio pada September 2015 sebesar 0,340. Pada Maret 2023 Gini Ratio tercatat sebesar 0,340, naik 0,015 poin dibandingkan dengan Gini Ratio

pada September 2022 yang sebesar 0,325. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi sedikit peningkatan ketimpangan pengeluaran di Kepulauan Riau selama periode September 2022-Maret 2023. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2022-Maret 2023 Gini Ratio di daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,011 poin yaitu dari 0,328 pada September 2022 menjadi 0,339 pada Maret 2023. Berbeda dengan daerah perkotaan, di daerah perdesaan nilai Gini Ratio mengalami penurunan pada periode September 2022-Maret 2023, yaitu sebesar 0,016 poin.

Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada Maret 2023, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah sebesar 20,04 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi sedikit penurunan pemerataan pengeluaran di Kepulauan Riau, hal tersebut menurun bila dibandingkan dengan kondisi pada September 2022 yang sebesar 20,53 persen. Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan tercatat sebesar 20,08 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini mengarah kepada penurunan distribusi pengeluaran sebesar 0,31 persen dibandingkan kondisi September 2022. Sementara di daerah perdesaan, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah tercatat sebesar 24,76 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini meningkat dibanding kondisi September 2022 yang sebesar 23,02 persen. Perkembangan Distribusi Pengeluaran Maret 2022–Maret 2023 Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia.

Tabel 2.19

Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2022, September 2022, dan Maret 2023 (Persentase)



Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen Terendah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Teratas
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Maret 2022	19,94	36,98	43,08
September 2022	20,39	38,17	41,44
Maret 2023	20,08	37,1	42,83
Perdesaan			
Maret 2022	24,82	39,64	35,54
September 2022	23,02	41,86	35,12
Maret 2023	24,76	40,85	34,39
Perkotaan+Perdesaan			
Maret 2022	20,02	36,97	43,02
September 2022	20,53	38,37	41,09
Maret 2023	20,04	36,96	43,00

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

2 Realisasi Anggaran Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita, dan Indeks Gini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Secara Langsung dalam Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	PROGRAM	APBD-Perubahan		
		Pagu	Realisasi Keuangan	
			Rp.	%
1	3	8	9	10
1	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.428.618.646	2.211.457.686	91,06
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	16.124.440.070	15.955.648.717	98,95
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5.054.047.690	4.926.384.393	97,47
4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.440.400.936	3.394.739.725	98,67
5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	76.029.930	687.998.700	90,49
6	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	13.685.252.939	13.319.419.434	97,33
7	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	99.444.600	98.805.350	99,36
8	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	228.741.850	208.094.400	90,97
9	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	439.140.835	399.828.064	91,05
10	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	250.000.000	228.935.899	91,57
11	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	552.40.700	43.960.694	79,58
12	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	246.147.805	227.572.050	92,45
13	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	472.448.079	443.462.000	93,86
14	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KHUTANAN	698.494.000	636.152.259	91,07
15	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	35.906.000	28.948.400	80,62
16	PROGRAM PELAYANAN ZON USAHA SIMPAN PINJAM	309.166.661	301.781.680	97,61
17	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	99.597.500	98.651.899	99,05
18	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	40.000.000	38.829.600	97,07
19	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.374.530.000	1.245.876.679	90,64
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	436.912.808	401.748.758	91,95
21	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.745.636.400	2.741.607.058	99,85
22	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.707.670.000	1.211.533.618	70,95
23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	857.125.140	852.522.007	99,46
24	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	4.900.455.958	4.316.625.558	88,09
25	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	41.499.435	41.059.156	98,94
26	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.197.324.430	1.157.228.947	96,65
27	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.106.585.637	5.073.017.109	99,34
28	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	40.573.009	35.978.796	88,68
29	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	391.152.344	357.487.761	91,39
30	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	50.347.1000	49.521.52.54	98,36
31	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	931.975.050	925.691.741	99,33
32	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	96.229.6528	881.993.388	91,66
33	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	89.515.100	84.391.162	94,28
34	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.260.927.985	6.747.427.941	92,93
35	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.638.963.367	2.404.261.830	91,11
36	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	54.472.340.251	50.935.248.146	93,51
37	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.109.197.225	968.908.820	87,35
38	PROGRAM PENANGANAN KERAJANAN PANGAN	31.869.738	11.611.350	36,43
39	PROGRAM PENGAWASAN KEAMAMAN PANGAN	59.347.441	55.829.700	94,07
40	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.933.923.787	5.097.525.950	85,9
41	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.653.746.373	3.428.718.708	93,84
42	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	411.397.294	395.114.554	96,04
43	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	17.718.148	10.549.600	59,54
44	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.284.312.921	1.116.075.834	86,9
	JUMLAH	143.001.347.610	134.613.452.487	94,13

Sasaran 2: Menurunnya Angka Kemiskinan

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi akar penyebab kemiskinan salah satunya adalah pola hidup konsumtif. Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam persoalan kemiskinan adalah Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan.

Untuk mengurangi kemiskinan dan melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi, kesehatan, dan sosial yang ada, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan berbagai program yang terkait pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan. Berikut disampaikan penjelasan indikator-indikator dalam mendukung sasaran Menurunnya angka Kemiskinan.

Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), atau yang sering dikenal sebagai angka pengangguran. Angka inilah yang seringkali dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan, sehingga perkembangan TPT dari tahun ke tahun di suatu wilayah akan menjadi perhatian yang sangat serius dari pemerintah daerah. Untuk mencapai sasaran menurunnya angka kemiskinan ditetapkan indikator kinerja yaitu angka pengangguran / Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dengan evaluasi capaian sebagai berikut:

Tabel 2.20
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Angka Pengangguran / Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,5	6,80	128,42

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka merupakan rasio antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. TPT menjelaskan seberapa banyak jumlah pengangguran dalam setiap 100 angkatan kerja.

Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Kriteria Penganggur Terbuka terdiri dari :

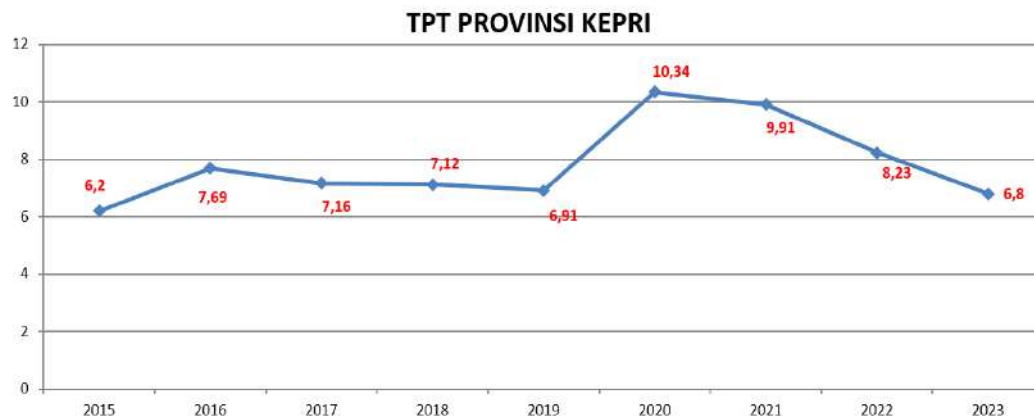
- Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan
- Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan pekerjaan
- Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
- Mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Analisis indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka merupakan rasio dari jumlah penganggur terbuka yakni 74.330 orang dengan jumlah angkatan kerja yakni 1.093.686 sehingga Tingkat Pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,80%. Hasil analisis indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat diketahui bahwa dari target yang telah ditetapkan yakni 9,5 dan terealisasi sebesar 6,80 (**angka TPT semakin rendah semakin baik**) sehingga capaian kinerja adalah sebesar **128,42** persen termasuk dalam kategori kinerja **Sangat Baik**.

Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja Agustus 2023 sebanyak 1.093.686, turun sebesar 166.026 orang dibanding Agustus 2022 sebesar 1.259.712 orang. Sejalan dengan penurunan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan sebesar 0,26 dari 68,94 persen tahun 2022 menjadi 68,68 persen tahun 2023.

Adapun evaluasi tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau mulai Tahun 2011-2023 adalah sebagai berikut :

Grafik 2.10
Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2011-2023



Sumber: BPS Tahun 2023, Diolah

Dalam Dua Belas tahun terakhir, TPT di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Dari periode tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 3,43 poin persen, dari tahun 2020 ke 2022 terjadi penurunan sebesar 2,11 poin persen, dari tahun 2021 sampai 2022 TPT Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan sebesar 1,68 poin. Pada tahun 2018 tercatat TPT Provinsi Kepulauan Riau sebesar 7,12 persen. Dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,21. Pengaruh Covid -19 menyebabkan angka TPT Tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seiring dengan peningkatan perekonomian TPT tahun 2023 mengalami penurunan sampai diangka 6.8 atau turun 1,43 poin dibandingkan tahun 2022 dan 3,11 pada Tahun 2021.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Jika dilihat Berdasarkan tipe daerah/daerah tempat tinggal, TPT perkotaan sebesar 6,77 persen, TPT wilayah perkotaan Lebih rendah dibandingkan TPT di daerah Pedesaan yang sebesar 7,00.

Berbeda dengan TPT perkotaan, TPT Pedesaan mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Dibandingkan Agustus 2022 TPT di daerah Perkotaan menurun sebesar 1,75 persen poin, sementara itu TPT di daerah pedesaan meningkat sebesar 1,12 persen poin. Begitu juga jika dibandingkan dengan Agustus 2019 (kondisi sebelum pandemi COVID-19), TPT di daerah perkotaan lebih rendah 1,02 persen poin, dan TPT di daerah pedesaan lebih tinggi 2,49 persen.

Tabel 2.21
Karakteristik Pengangguran, Agustus 2019—Agustus 2023

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Ags 2019-Ags 2023	Perubahan Ags 2022-Ags 2023
	persen	persen	persen	persen	persen	persen poin	persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,50	10,34	9,91	8,23	6,80	-0,70	-1,43
TPT Menurut Jenis Kelamin							
- Laki-laki	7,97	10,87	9,42	7,78	5,95	-2,02	-1,83
- Perempuan	6,59	9,38	10,72	9,03	8,22	1,63	-0,81
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal							
- Perkotaan	7,79	10,89	10,45	8,52	6,77	-1,02	-1,75
- Pedesaan	4,51	5,41	4,43	5,88	7,00	2,49	1,12

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS, 2023

Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 5,95 persen, terendah dalam lima tahun terakhir. TPT laki-laki lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 8,22 persen. TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2022, yaitu masing-masing sebesar 1,83 persen poin dan 0,81 persen poin. Jika dibandingkan dengan Agustus 2019 (kondisi sebelum pandemi COVID-19), TPT laki-laki menurun sebesar 2,02 persen poin, sedangkan TPT perempuan meningkat 1,63 persen poin.

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penganggur, pada Agustus 2023 mempunyai pola yang berbeda dengan Agustus 2022. Pada Agustus 2023, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/ sederajat) masih yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan

lainnya, yaitu sebesar 9,99 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pada tamatan pendidikan diploma, yaitu sebesar 2,93 persen. Dibandingkan Agustus 2022, penurunan TPT terjadi pada hampir semua kategori tamatan pendidikan kecuali tamatan SD ke bawah dan tamatan universitas. Penurunan TPT terbesar terjadi pada kategori tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat) yaitu sebesar 4,51 persen poin. Sementara peningkatan TPT terjadi pada kategori tamatan SD ke bawah yaitu sebesar 2,13 persen poin dan kategori tamatan universitas yaitu sebesar 1,03 persen poin.

Grafik 2.11
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut tingkat Pendidikan Tahun 2021-2023



Keterangan: ¹⁾ Diploma mencakup Diploma I/II/III
²⁾ Universitas mencakup Diploma IV, S1, S2, S3

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Dibandingkan Agustus 2022, penurunan TPT pada Tahun 2023 terjadi pada hampir semua kategori pendidikan. Sementara peningkatan TPT terjadi pada kategori tamatan SD ke bawah dan Tamatan Universitas. TPT tertinggi kedua terdapat pada Sekolah menengah Atas (SMA) sebesar 7,85 persen, Dan tamanan SMP sebesar 5.87 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang masih belum optimal terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK, SMA dan SMP. Namun begitu, berdasarkan tren karakteristik penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan terdapat penurunan penyerapan tenaga kerja khususnya tamatan berpendidikan SD dan universitas Pada tahun 2023. Berdasarkan data karakteristik penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat

pendidikan, dimana tingkat pendidikan kategori tamatan SMP jauh mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 10.38 menjadi 5.87, atau turun sebesar 4.51 persen poin dari tahun 2023.

Berikut rincian TPT pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023:

Tabel 2.22
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten Kota Tahun 2023

No	Kab/ Kota	Data 2023		
		Jumlah Penganggur Terbuka (Orang)	Angkatan Kerja	TPT
1	Tanjungpinang	5.622	118,104	4,76
2	Bintan	4.543	83.592	5,43
3	Batam	52.203	641.605	8,14
4	Karimun	7,606	126.421	6,02
5	Lingga	1,896	53,889	3,52
6	Natuna	1.809	44,721	4,05
7	Anambas	647	25,354	2,55
8	Provinsi Kepri	74.330	1.093.686	6,80

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023.

Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa TPT tertinggi pada Tahun 2023 terjadi di Kota Batam sebesar 8,14% dan yang paling rendah adalah Kabupaten Anambas sebesar 2,55%.

Adapun Evaluasi tingkat pengangguran terbuka pada setiap Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.23
Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Kabupaten/Kota
Provinsi Kepri Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Ags 2019–Ags 2023	Perubahan Ags 2022–Ags 2023
	persen	persen	persen	persen	persen	persen poin	persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kabupaten Karimun	5,83	8,36	7,20	6,87	6,02	0,19	-0,85
Kabupaten Bintan	8,68	8,86	8,62	6,91	5,43	-3,25	-1,48
Kabupaten Natuna	3,82	4,10	5,15	4,15	4,05	0,23	-0,10
Kabupaten Lingga	4,35	4,41	4,23	3,09	3,52	-0,83	0,43
Kab. Kep. Anambas	3,21	3,44	1,27	2,15	2,55	-0,66	0,40
Kota BATAM	8,31	11,79	11,64	9,56	8,14	-0,17	-1,42
Kota Tanjungpinang	6,31	9,30	6,31	5,27	4,76	-1,55	-0,51
Kepulauan Riau	7,50	10,34	9,91	8,23	6,80	-0,70	-1,43

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan kabupaten/Kota Berbagai kebijakan pemerintah dan usaha terkait penciptaan lapangan kerja tampaknya masih perlu dioptimalkan. Secara absolut, jumlah pengangguran di Kota Batam turun sekitar 52.203 orang. Sehingga, angka TPT Kota Batam menurun sebesar 1,42 dari Agustus 2022 menjadi 8,14 persen pada Agustus 2023. Dari Tabel diatas tingkat pengangguran terbuka paling tinggi adalah di Kota Batam sebesar 8,14 dan yang paling rendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yakni 2,55 %. Namun secara keseluruhan dapat tergambar bahwa terjadi penurunan TPT di hampir kerseluruhan kabupaten/kota kecuali Kabupaten Lingga (Kenaikan 0,43) dan kepulauan Anambas yang mengalami kenaikan sebesar 0,40 pada Tahun 2023.

Tabel 2.24
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2023	Target akhir RPJMD (2026)	%
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,80	7,50	109,33



(TPT)			
-------	--	--	--

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2023 maka Provinsi Kepulauan Riau dibawah dari target RPJMD, di mana pada target RPJMD jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,5%, sedangkan realisasi sebesar 6,80%, sehingga telah mencapai 109,33%. Perbandingan target RPJMD dengan capaian tahun 2026 dijelaskan pada tabel di atas.

Secara Nasional Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2023 sebanyak 147,71 juta orang, naik 3,99 juta orang dibanding Agustus 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 5,32 persen, turun sebesar 0,54 persen poin dibanding Agustus 2022. TPT Provinsi Kepulauan Riau termasuk tertinggi setelah Provinsi Banten dan Jawa Barat Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
TPT Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan TPT se-Indonesia
Tahun 2023

Provinsi	Agustus 2021 (persen)	Agustus 2022 (persen)	Agustus 2023 (persen)	Perubahan Ags 2021-Ags 2022 (persen poin)	Perubahan Ags 2022-Ags 2023 (persen poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	6,30	6,17	6,03	-0,13	-0,14
Sumatera Utara	6,33	6,16	5,89	-0,17	-0,27
Sumatera Barat	6,52	6,28	5,94	-0,24	-0,34
Riau	4,42	4,37	4,23	-0,05	-0,14
Jambi	5,09	4,59	4,53	-0,50	-0,06
Sumatera Selatan	4,98	4,63	4,11	-0,35	-0,52
Bengkulu	3,65	3,59	3,42	-0,06	-0,17
Lampung	4,69	4,52	4,23	-0,17	-0,29
Kepulauan Bangka Belitung	5,03	4,77	4,56	-0,26	-0,21
Kepulauan Riau	9,91	8,23	6,80	-1,68	-1,43
DKI Jakarta	8,50	7,18	6,53	-1,32	-0,65
Jawa Barat	9,82	8,31	7,44	-1,51	-0,87
Jawa Tengah	5,95	5,57	5,13	-0,38	-0,44
D.I. Yogyakarta	4,56	4,06	3,69	-0,50	-0,37
Jawa Timur	5,74	5,49	4,88	-0,25	-0,61
Banten	8,98	8,09	7,52	-0,89	-0,57
Bali	5,37	4,80	2,69	-0,57	-2,11
Nusa Tenggara Barat	3,01	2,89	2,80	-0,12	-0,09
Nusa Tenggara Timur	3,77	3,54	3,14	-0,23	-0,40
Kalimantan Barat	5,82	5,11	5,05	-0,71	-0,06
Kalimantan Tengah	4,53	4,26	4,10	-0,27	-0,16
Kalimantan Selatan	4,95	4,74	4,31	-0,21	-0,43
Kalimantan Timur	6,83	5,71	5,31	-1,12	-0,40
Kalimantan Utara	4,58	4,33	4,01	-0,25	-0,32
Sulawesi Utara	7,06	6,61	6,10	-0,45	-0,51
Sulawesi Tengah	3,75	3,00	2,95	-0,75	-0,05
Sulawesi Selatan	5,72	4,51	4,33	-1,21	-0,18
Sulawesi Tenggara	3,92	3,36	3,15	-0,56	-0,21
Gorontalo	3,01	2,58	3,06	-0,43	0,48
Sulawesi Barat	3,13	2,34	2,27	-0,79	-0,07
Maluku	6,99	6,88	6,31	-0,05	-0,57
Maluku Utara	4,71	3,98	4,31	-0,73	0,33
Papua Barat	5,84	5,37	5,38	-0,47	0,01
Papua	3,33	2,83	2,67	-0,50	-0,16
Indonesia	6,49	5,86	5,32	-0,63	-0,54

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Penduduk bekerja naik sebanyak 30,539 orang dan pengangguran turun sebanyak 5.827 orang. Meskipun Jumlah Angkatan Kerja beserta komponennya secara absolut mengalami Penurunan, namun secara kualitas indikator ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau justru menunjukkan perbaikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2023 sebesar 68,68 persen mengalami Penurunan 0,26 persen point dibanding Agustus 2022. Penurunan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi Penurunan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja maupun sebagai penganggur. Dapat juga dikatakan telah terjadi perpindahan penduduk dari kategori Angkatan kerja ke kategori bukan Angkatan kerja (Penduduk yang sekolah, Mengurus Rumah Tangga dan lainnya). Sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.26
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun Tahun 2019 - 2023

Karakteristik Angkatan Kerja	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Ags 2019-Ags 2023	Perubahan Ags 2022-Ags 2023
	persen	persen	persen	persen	persen	persen poin	persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,69	66,28	68,27	68,94	68,68	3,99	-0,26
TPAK menurut Jenis Kelamin							
- Laki-Laki	83,18	82,86	83,93	86,44	84,92	1,74	-1,52
- Perempuan	45,35	48,93	51,92	50,68	51,95	6,60	1,27
TPAK menurut Daerah Tempat Tinggal							
- Perkotaan	64,98	66,72	68,99	68,96	68,11	3,13	-0,85
- Pedesaan	61,98	62,62	61,77	68,73	73,04	11,06	4,31

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2023, TPAK laki-laki sebesar 84,92 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 51,95 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 1,52 persen poin, sedangkan TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 1,27 persen poin. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, pada Agustus 2023, TPAK Perkotaan sebesar 68,11 persen, lebih rendah dibanding TPAK Pedesaan yang sebesar 73,04. Dibandingkan Agustus 2022, TPAK Perkotaan mengalami

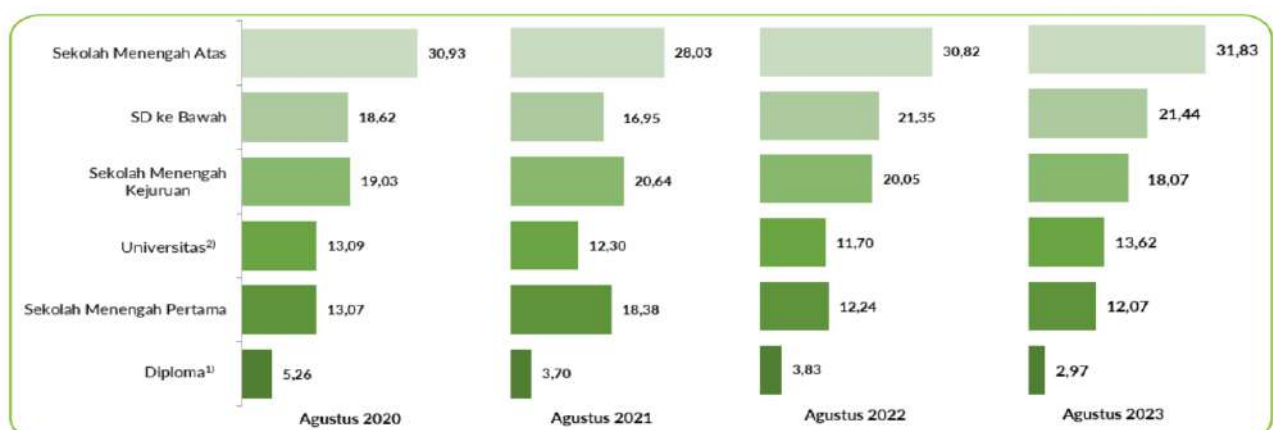
penurunan 0,85 persen poin, sedangkan TPAK Perdesaan mengalami kenaikan sebesar 4,31 persen poin.

Adapun target yang ditetapkan dapat tercapai dikarenakan adanya kondisi perekonomian yang semakin membaik pasca covid-19 yang secara internasional dan nasional sangat berdampak kepada perekonomian sehingga sangat berpengaruh kepada kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data BPS Tahun 2023 tidak adanya lagi Data ketenagakerjaan dan permasalahan pengangguran yang disebabkan oleh pengaruh covid-19.

TPT di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 mengalami Penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan TPT tahun 2022, hal ini dipengaruhi oleh:

1. Tidak adanya lagi komponen ketenagakerjaan yang menunjukkan Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2023 sehingga Komposisi penduduk usia kerja, Bukan Angkatan Kerja (BAK), sementara tidak bekerja, penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja, orang pengangguran yang terdampak COVID-19 Keempat komponen tersebut terus mengalami mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2023.
2. Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2023 didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas Umum sebanyak 324,461 orang (31,83 persen) dan Sekolah Dasar sebanyak 218,549 orang (21,44 persen). Kemudian disusul tamatan sekolah Mengah kejuruan sebesar 18,07 persen Dalam tahun terakhir, Penduduk yang bekerja sebanyak 1.019.356 orang, mengalami penurunan sebanyak 136,641 orang dari Agustus 2022.

Grafik 2.12
Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019 - 2023



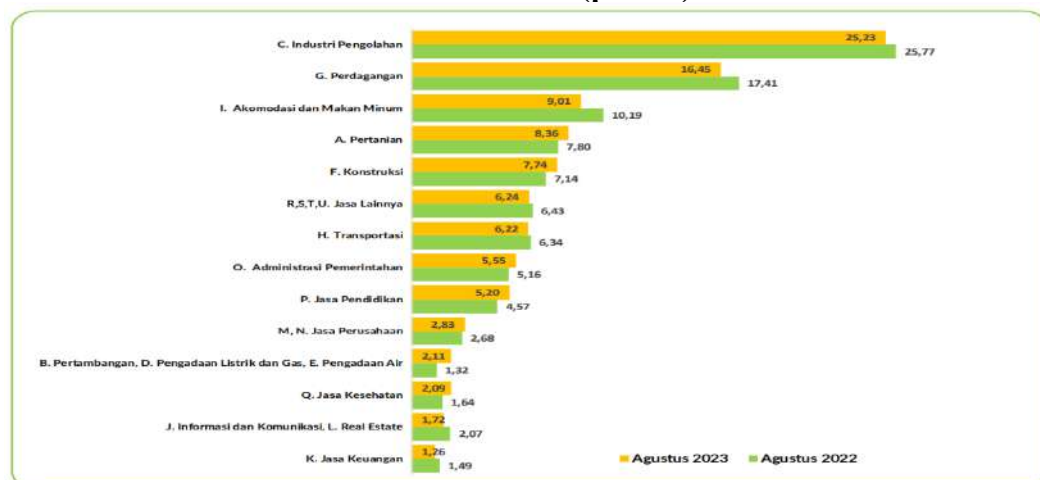
Keterangan: ¹⁾ Diploma mencakup Diploma I/II/III
²⁾ Universitas mencakup Diploma IV, S1, S2, S3

Sumber: Badan Pusat Statistik prov. Kepri Tahun 2023

3. Adanya perubahan kondisi tenaga kerja selama Tahun 2023 tidak terlepas dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Industri Pengolahan yaitu sebesar 25,23 persen; Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,45 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,01 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Agustus 2022, dimana sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menempati posisi keempat terbesar. Dibandingkan Agustus 2022, tujuh lapangan pekerjaan mengalami peningkatan persentase penyerapan tenaga kerja, peningkatan terbesar pada sektor Pertambangan, Pengadaan Listrik dan Gas, dan sektor Pengadaan Air sebesar 0,78 persen poin. Sementara itu, enam lapangan pekerjaan mengalami penurunan persentase penyerapan tenaga kerja, dengan penurunan terbesar pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 1,18 persen poin.

Grafik 2.13
Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, agustus 2022 dan 2023 (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik prov. Kepri, Tahun 2023

- b. Kondisi ketenagakerjaan di beberapa kabupaten/kota pasca pandemi menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja akibat semakin membaiknya kesempatan kerja. Seperti Kota Batam pada Tahun 2023 masih merupakan pusat aktifitas perekonomian di Kepulauan Riau. Dimana menunjukan penurunan angka pengangguran yang cukup signifikan sebesar 1,42 persen dari tahun 2022. Kondisi ini disebabkan beberapa peningkatan produktifitas disektor formal dan informal. Pada Agustus 2023, penduduk Kota Batam yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 29,11 persen, sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 70,89 persen. Persentase penduduk bekerja di kegiatan formal pada Agustus 2023 naik sebesar 3,17 persen poin jika dibandingkan Agustus 2022. Peningkatan penduduk bekerja pada kegiatan formal ini seiring dengan peningkatan penduduk yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap.
- c. Indikator lain yang lebih mendalam menyangkut angkatan kerja adalah pekerja penuh dan pekerja tidak penuh. Indikator ini mampu menjelaskan bahwa seseorang yang bekerja ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, hal ini diindikasikan dari jam kerja rendah. Pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua kelompok yaitu pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu. Penduduk yang dianggap sebagai pekerja penuh waktu (full time worker), yaitu penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam ke atas per minggu, pada Agustus 2023 jumlahnya mencapai 825.548 (80,99 persen). Dibandingkan dengan Agustus 2022 mengalami penurunan sebesar 9,61persen poin. Sementara itu dalam setahun terakhir, pekerja tidak penuh (jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) berkurang sebanyak 45.304 orang (18,94 persen) yaitu dari 239.112 orang pada Agustus 2022 menjadi 193.808 (19,01%) orang pada Agustus 2023. dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2.27
Karakteristik Penduduk Bekerja Berdasarkan Pekerjaan Penuh/Tidak Penuh Tahun 2022-2023

NO	Karakteristik	2022 (org)	2023 (org)	Perubahan 2022-2023	persen
1	Pekerja Penuh > 35 Jam	916.885	825.548	-91.337	9,61
2	Pekerja Tidak Penuh (1-34 Jam)	239.112	193.808	- 45,304	18,94

Sumber, Bursa Resmi Statistik Tahun 2023

A. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk mengatasi TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan program dan kegiatan:

1. Peningkatan Pelayanan ketenagakerjaan melalui mengoptimalkan pelayanan penggunaan aplikasi SIAP kerja yang dapat digunakan dalam layanan pendataan pelatihan di Lembaga pelatihan kerja BLK dan LPK Swasta, Pendaftaran pemagangan Ke luar negeri, sertifikasi BNSP, Pendaftaran pencari kerja di karirhub atau portal Pemda dan Portal Swasta dan layanan ketenagakerjaan lainnya seperti job fair.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mengadakan pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan mendorong siswa SMK yang mengikuti pemagangan, sehingga ketika lulus nanti mereka siap bekerja. Diharapkan nantinya lulusan SMK maupun BLK mampu mengisi pasar kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan.
3. Kegiatan 2023 disusun dengan konsep *tailor made training* dengan pendekatan penempatan di perusahaan, Untuk AK3 umum sinkronisasi program --> praktek di perusahaan, mendapatkan materi langsung di tempat kerja, magang di departemen safety. Training bidang perhotelan yang fokus pada housekeeping,

praktek dilakukan di hotel dengan melibatkan supervisor maupun HRD di hotel. Para peserta pada kesempatan ini praktek di I hotel Batam. Pelatihan las pada kesempatan 2023, training dilakukan dengan melibatkan praktisi dengan adopsi welding prosedur dari perusahaan sehingga akhir training dilibatkan dengan melakukan welding tes.

4. Pada tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan kerja sama dengan perusahaan atas kebutuhan komposisi kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, sehingga pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan melalui program pemagangan.

Adapun program yang dilaksanakan di Tahun 2023 untuk mendukung kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ada 2, yaitu:

- A. Program Penempatan Tenaga Kerja
- B. Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tabel 2.28
Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Pendukung Target Indikator
Angka Pengangguran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN			
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Efesiensi	Ket
1	Menurunnya angka Kemiskinan	Angka Pengangguran	9,5	6,80	128,42	4.467.054.446	4,349,811,653	97,37%	Efisien

Hasil analisis Sasaran Strategis menurunnya angka kemiskinan dengan indikator Angka Pengangguran Terbuka (TPT) diketahui dari target yang telah ditetapkan yakni 9,5 terealisasi sebesar 6,80 (angka TPT semakin rendah semakin baik) sehingga capaian kinerja adalah sebesar 128,42% Kinerja dalam hal ini termasuk dalam kategori kinerja **Sangat Baik**. Demikian juga realisasi anggaran yang mendukung indikator angka Pengangguran adalah Pertama Program Pelatihan dan Produktivitas dengan anggaran sebesar Rp. 4.392.235.946 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 4.283.678.003 (97,53 persen). Kedua Program

Penempatan Tenaga Kerja Rp. 74.818.500 dengan realisasi sebesar Rp. 66,133,650 (88,39 persen). Untuk kedua program tersebut dalam pencapaian target indikator angka pengangguran sebesar Rp. 4.467.054.446 dengan realisasi Rp. 4,349,811,653 atau sebesar 97,37 persen. Realisasi anggaran tersebut termasuk kategori Sangat Tinggi (ST).

B. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Pembangunan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi di Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari kondisi perekonomian makro, dimana pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan utama di bidang ketenagakerjaan baik menyangkut optimalisasi pendayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja. Masalah pokok penyelenggaraan urusan bidang tenaga kerja adalah:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih cukup tinggi khususnya di Kota Batam.
2. Rendahnya kesesuaian kompetensi antara pencari kerja dengan kebutuhan industri.
3. Belum maksimalnya pelayanan informasi pasar kerja mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri.

Sedangkan masalah yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah :

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang tenaga kerja.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- c. Belum terpenuhinya dukungan anggaran dalam mengoptimalkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan.

Sedangkan permasalahan masing-masing bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya yaitu :



- a. Masih terbatasnya tempat uji kompetensi (TUK) beserta sumber daya pendukungnya.
- b. Belum optimalnya produktifitas kerja kepada masyarakat maupun perusahaan.
- c. Terbatasnya alokasi dana pelatihan kerja dan produktivitas dibandingkan jumlah kebutuhan.
- d. Minimnya SDM fungsional pengantar kerja sehingga pelayanan penempatan tenaga kerja belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- e. Sistem, mekanisme, dan sarpras informasi kepada pencari kerja maupun perusahaan belum optimal dan efektif.
- f. Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda dan berpendidikan kurang tertarik di sektor informal.
- g. Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal.
- h. Minimnya kualitas dan kuantitas instruktur dan sumber daya manusia (SDM) pengelola pelatihan sehingga berdampak terhadap pemasaran program pelatihan kepada masyarakat, dunia usaha/industri dan dunia pendidikan.
- i. Masih terbatasnya modul dan standar-standar pelatihan kerja dan pelatihan kewirausahaan.
- j. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelatihan sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang sehingga kebutuhan dunia usaha terhadap lulusan BLK belum optimal terpenuhi
- k. Belum tersedianya alokasi dana dalam pelaksanaan pelayanan perluasan kesempatan kerja dalam rangka Meningkatkan partisipasi ibu rumah tangga untuk menjadi pelaku ekonomi dan juga Meningkatkan pelatihan-pelatihan berbasis kemasyarakatan.

❑ Angka Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS mendefinisikan

penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Persentase penduduk miskin merupakan perbandingan jumlah penduduk miskin provinsi dengan jumlah penduduk provinsi. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin provinsi dibagi dengan jumlah penduduk provinsi, dikali seratus. Angka Kemiskinan dikatakan menurun jika persentase penduduk miskin pada saat dievaluasi lebih rendah daripada persentase penduduk miskin pada tahun atau bulan yang dijadikan perbandingan. Dalam hal ini, persentase penduduk miskin pada tahun 2023 akan dibandingkan dengan tahun 2022.

Tabel 2.29
Evaluasi Capaian Persentase Penduduk Miskin
Tahun 2023

N o	Indikator Kinerja	Targ et	Realisa si	Capai an
1 .	Angka Kemiskinan	5,74	5,69	100,8 7%

Evaluasi terhadap Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 dapat digambarkan dari jumlah penduduk miskin provinsi (142.500 orang) dibagi dengan jumlah penduduk provinsi (2.504.394 orang) dengan nilai persentase 5,69%. Hasil Evaluasi Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 dengan target 5,74% dapat tercapai sebesar 5,69% sehingga capaian kinerja sebesar 100,87% atau dalam kategori kinerja relatif **sangat baik**.

Capaian indikator kinerja Penurunan Angka Kemiskinan didukung oleh 13 Perangkat Daerah dengan 16 (Enam belas) program dengan indikator program dari masing-masing Perangkat Daerah, berikut di tampilkan target dan capaian indikator program dari masing-masing Perangkat Daerah sebagai berikut :



Tabel 2.30
Target dan Realisasi indikator Progra Pendukung Penurunan Angka
Kemiskinan Tahun 2023

No	OPD Penanggung Jawab	Program Pendukung Taskin	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partispasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	100	84,97	84,97
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	98,5	115,00	116,75
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	85	97,74	114,99
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK	%	79	92,29	116,82
			Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	0,37	0,06	200,00
			Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	%	96,11	95,43	99,29
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	%	99,08	100,88	101,82
			Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	Rasio	33,8	35,91	106,24
2	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	124	98	121
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	per100.000 KH	13	12	110



	Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	15,4	15,4	100
		Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	100	100	100
		Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	100	100	100
		Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	Kab/kota	5	5	100
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	%	92	81	89
		Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	%	68	47	69
		Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	%	43	71	166
		Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	94	74	79



			Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas $\geq$ 80% Puskesmas	%	71	100	141
			Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	90	96	107
3	Dinas Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	%	0,15	0,32	213,33
			Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	31,63	36,11	114,16
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Kb	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	28,90	28,64	99,10
5	Dinas Perikanan Dan Kelautan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	307691	317.042,5	103,04
			Nilai Tukar Nelayan/NTN	%	115	104,14	90



		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	28473	31.250	109,75
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Persampahan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi	%	111	96,08	86,83
			Persentase Pengurangan Sampah	%	26	21,73	83,58
			Persentase Penanganan Sampah	%	72	67,65	93,95
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Dikembangkan	%	29,36	26,82	91,34
		Program Pengembangan Umkm	Rasio Wirausaha Baru	%	28,52	32,73	114,76
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Calon Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	56,41	56,17	99,57
			Persentase Calon Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Baru	%	8	7,16	89,5
			Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	%	45,45	38,28	84,22
9	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan	Persentase Angka Kecukupan Energi Tingkat	%	114	117,44	103,02



		Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan				
			Persentase Maksimum Koefisien Harga Pangan Pokok (Beras) Ditingkat Konsumen	%	Cv<10	9,01	110
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	87,70	89,9	102,51
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	%	1.42	1,56	109,96
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	%	0.77	0,86	111,69
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	%	3	2,92	97,33
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	%	52,64	66,67	126,65
11	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Persentase RTLH yang dibanahi	%	15	15,23	101,55
			Persentase luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	%	23,51	12,17	51,77
12	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	96	97,99	98,97
			Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	100	100	100

13	Dinas PU	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	97,03	91,82	94,63
----	----------	---	---	---	-------	-------	-------

Dari capaian indikator program pengentasan kemiskinan di atas secara garis besar sudah dapat terealisasi dengan baik oleh Perangkat Daerah pengampu program Penurunan angka kemiskinan, ada beberapa capaian yang belum terealisasi maksimal khususnya untuk program pendukung penurunan angka kemiskinan pada Dinas Kesehatan, yaitu indikator Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) yang belum tercapai Dimana dari 92 persen yang di targetkan baru terealisasi 81 % dengan alasan (1) Pelaksanaan Actife Case Finding belum maksimal meliputi Investigasi kontak terhadap kontak serumah dan kontak erat, (2) Kab/ Kota melakukan Update Ketersediaan logistik pada Aplikasi SITB : OAT, Non OAT dan Terapi Pencegahan TBC secara realtime, (3) Masih adanya Delay report (Keterlambatan input data) terduga TBC, kasus TBC dan pengobatan ke SITB di tingkat faskes (Klinik dan DPM), (4) Masih Rendahnya Capaian Pemberian Terapi Pencegahan TBC (<10%), 5) Belum semua Lintas Sektor terkait berperan aktif dalam Penanggulangan TBC. Untuk indikator Capaian ODHA yang mendapatkan ARV juga capaiannya masih rendah yaitu dari target 68 % baru terealisasi 47 %, disebabkan karena (1) ODHIV Lost Follow UP (2) ODHIV Pindah Layanan PDP ke Luar Daerah Kepri 3. Kesadaran ODHIV yang Rendah dalam mengkonsumsi ARV. Indikator Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap juga realisasinya belum tercapai maksimal disebabkan karena 1. Kurangnya Petugas Penginput Aplikasi ASIK : Masih ada Petugas Imunisasi merangkap Logistik dan Penginput ASIK oleh 1 orang, ada PKM yang belum punya punya SK Tim Imunisasi (2) Masih ada Bidan Praktek Mandiri (BPM) yang belum didapat datanya. Sebagian besar klinik swasta/DPS dan RS swasta belum diambil ata imunisasi-nya (3) Belum semua petugas di puskesmas memahami Defenisi Operasional (DO) dalam Pelaksanaan Skrinning Imunisasi Tetanus (termasuk Bidan2 Pustu).

Indikator Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja juga belum tercapai maksimal yaitu Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru dari target 8 persen baru terealisasi 7,16 atau sekitar 89,5 persen capaiannya, ini di sebabkan belum optimalnya modul materi setiap pelatihan yang terkait langsung terhadap akses kewirausahaan yang dapat mengembangkan daya kreasi dan inovasi, dan indikator persentase lulusan pelatihan yang di terima kerja juga belum tercapai maksimal dari target 45,45 persen baru terealisasi 38,28 (84,22 persen) hal ini disebabkan kurangnya Kerjasama /link and match dengan dunia usaha dan dunia industry.

Berikut Perbandingan capaian indikator kinerja Angka Kemiskinan dari tahun 2022- 2023:

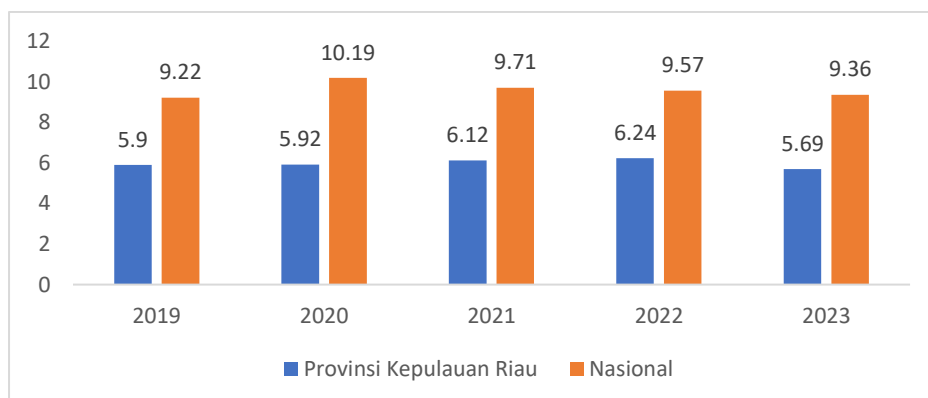
Tabel 2.31
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin Dari Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Angka Kemiskinan	6,03 (148.890 org)	5,69 (142.500 org)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 0,34% (6.400 orang). Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar 67,55 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2022 yaitu sebesar 67,25 persen. Penurunan angka kemiskinan ini kemungkinan dipengaruhi oleh perekonomian Provinsi Kepulauan Riau tampaknya mulai pulih dan menguat pasca pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sebesar 5,47%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.

Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 142,5 ribu orang (5,69 persen), berkurang sebanyak 9,18 ribu orang (0,55 persen) dibandingkan dengan kondisi September 2022 sebanyak 151,68 ribu orang (6,24%). Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan, sebelumnya berada di angka 6,24% namun di tahun 2023 menjadi 5,69 persen. Meski demikian angka kemiskinan Provinsi Kepri masih dibawah angka kemiskinan nasional seperti terlihat pada gambar berikut.

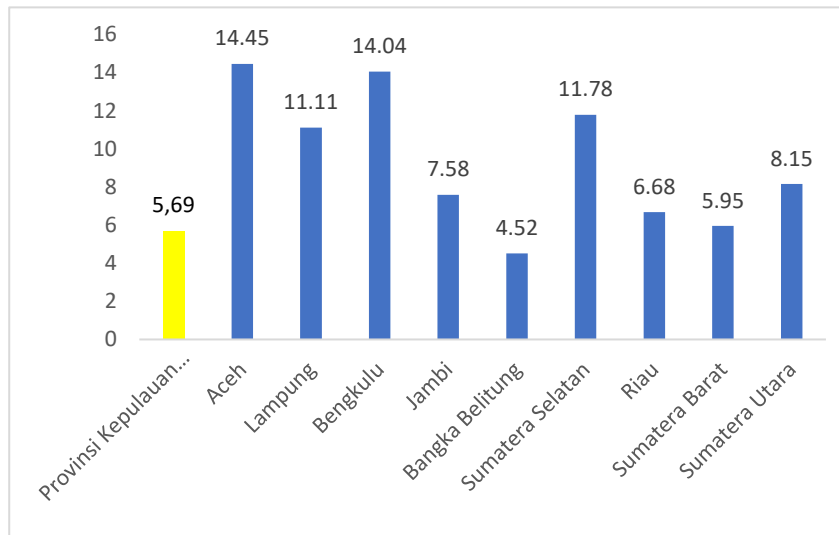
Grafik 2.14
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Jika dibandingkan dengan kemiskinan dengan provinsi lainnya di sekitar Pulau Sumatera, kemiskinan di Kepulauan Riau berada di posisi yang paling rendah kedua setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Grafik 2.15
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2022 September (%).



Sumber: BPS Kepri, 2023

Persentase penyebaran penduduk miskin juga dapat kita lihat di Kabupaten/kota berdasarkan indek keparahannya. Adapun Persentase penyebaran Penduduk Miskin pada setiap Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.32
Persentase Penduduk Miskin Per Kabupaten/Kota Tahun 2023

N o	Kabupaten/Kota	P0	P1	P2	Jumlah Pendud uk Miskin (Ribu Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Karimun	5,9 5	0,5 3	0,0 9	14.330	240.840
2	Bintan	5,9 0	0,6 8	0,1 4	9.860	167.119
3	Natuna	5,2 5	0,7 0	0,1 4	4.300	81.905
4	Lingga	11, 26	1,6 0	0,4 3	10.180	90.409
5	Kepulauan Anambas	6,9 5	0,7 8	0,1 2	3.080	44.317



6	Kota Batam	5,0 2	0,5 9	0,1 3	83.080	1.654.982
7	Kota Tanjungpinang	7,9 5	1,1 8	0,3 3	16.670	209.686
Kepulauan Riau		6,0 3	5,6 9	0,8 2	142.500	2.504.394

Keterangan:

P0 = Persentase Kemiskinan

P1 = Indeks Kedalaman Kemiskinan

P2 = Indeks Keparahan Kemiskinan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 paling besar adalah di Kabupaten Lingga (11,26%) dan yang paling sedikit di Kota Batam (5,02%). Sedangkan jumlah penduduk miskin Tahun 2023 paling besar adalah di Kota Batam (83.080 Jiwa) dan yang paling sedikit di Kabupaten di Kepulauan Anambas (3.080 Jiwa). Di samping itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2023 paling besar adalah di Kabupaten Lingga (1,60%) dan yang paling sedikit di Kabupaten Karimun (0,53%). Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2023, yakni paling besar adalah di Kabupaten Lingga (0,43%) dan yang paling sedikit di Kabupaten Karimun (0,09%).

FAKTOR ANALISIS KEBERHASILAN PENCAPAIAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN

Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau ini dipengaruhi oleh Perekonomian, diketahui mulai pulih dan menguat pasca pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sebesar 5,20%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.

Dinas Sosial sebagai penanggungjawab utama dari program pengentasan kemiskinan ini telah melakukan berbagai Upaya untuk menurunkan angka kemiskinan ini, melalui kegiatan Pengelolaan Data Fakir miskin cakupan Provinsi Kepulauan Riau dalam Program Perlindungan dan jaminan sosial, mereka telah

memberikan bantuan kesejahteraan sosial kepada sebanyak 17.090 kk, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga sebanyak 62,752 kk dari 40.896 kk yang di targetkan di tahun 2023, sebanyak 63.151 kk- yang mendapatkan pengentasan kemiskinan lintas Kab/kota dari 41.086 kk yang di targetkan, serta ada sebanyak 399 kk yang mendapatkan Bantuan pengembangan Ekonomi Masyarakat, sehingga dari pencapaian program ini bisa meningkatkan indikator Program Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya dari target 0,71% terealisasi sebanyak 13,52% sehingga capaian realisasinya mencapai lebih dari 100 %.

Pemerintah Kepri juga meningkatkan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan miskin di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 melalui bantuan sosial dengan tujuan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga dapat mengurangi risiko kemiskinan. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kepri antara lain bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan sembako.

Selain Dinas sosial ada Dinas Pendidikan yang juga berperan dalam penuntasan kemiskinan melalui program Pengelolaan Pendidikan telah memberikan bantuan beasiswa untuk siswa miskin Tingkat SMA dan SMK, pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pendidikan telah memberikan bantuan transportasi laut, darat dan kompensasi SPP bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi sebanyak 22.825 peserta didik Tingkat SMA serta bantuan biaya praktek kerja lapangan peserta didik kurang mampu SMK dan bantuan diklat keterampilan kepelautan bagi Masyarakat kepulauan sebanyak 5.770 peserta didik.

Pemberian beasiswa tidak hanya di berikan kepada siswa SMA dan SMK yang tidak mampu tetapi juga di berikan kepada mahasiswa/yang sedang aktif melaksanakan Pendidikan di jenjang perguruan tinggi dalam negeri, pemberian beasiswa di berikan kepada mahasiswa/i yang orangtuanya atau walinya tidak mampu namun berprestasi yang di buktikan dengan Surat Keterangan Tidak

Mampu (SKTM) dari kelurahan/Desa atau pejabat yang berwenang mengeluarkan atau terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), di tahun 2023 ini ada sebanyak 622 mahasiswa/I yang mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau baik yang terdaftar di kampus yang ada di provinsi Kepri maupun yang berada di luar provinsi Kepri.

Upaya penanggulangan kemiskinan dari bidang Kesehatan dilakukan melalui program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan menyediakan bantuan pembiayaan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu serta memberikan pelayanan jumlah RS yang bekerjasama dengan JKN/KIS serta Jamkesda, disamping itu juga dilakukan Kerjasama lintas sektor untuk pemanfaatan Rumah Singgah yang ditujukan sebagai tempat tinggal sementara bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang sedang mendapatkan pengobatan/perawatan di rumah sakit daerah Jakarta dan Batam.

Mengacu pada RPJMN 2021-2024, pada tahun 2024 ditargetkan minimal 98% penduduk Indonesia telah dilindungi dalam Program JKN-KIS. Untuk mendukung Universal Health Coverage (UHC), Provinsi Kepulauan Riau masih tersisa 1, 59% penduduk yang belum menjadi peserta JKN-KIS.

Dalam mendukung program JKN Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif, integratif dan sistematis. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 telah mencapai 2.73.076 jiwa (96,41 %) dari total penduduk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 2.150.329 jiwa. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah peserta JKN/KIS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 meningkat sebesar 3,7%.

Adapun faktor penentu keberhasilan terhadap capaian Kepesertaan JKN di Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah melalui cukai pajak rokok, baik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi.

2. Telah optimalnya data kependudukan di Provinsi Kepulauan Riau
3. Komitmen Pemda dalam pengintegrasian penduduk kedalam JKN
4. Keterlibatan sektor swasta (perusahaan) yang telah memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada para pekerjanya melalui program BPJS
5. Dinas Kesehatan bersama BPJS terus melakukan evaluasi terhadap kepesertaan JKN dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC).
6. Kerjasama lintas sektor untuk pemanfaatan Rumah Singgah yang ditujukan sebagai tempat tinggal sementara bagi Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang sedang mendapatkan pengobatan/perawatan di rumah sakit daerah Jakarta dan Batam

Di sektor perikanan, Upaya penanggulangan kemiskinan- yang dilakukan pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Kelautan Dan Perikanan antara lain memberikan bantuan kepada 4.040 nelayan berupa 25.888 unit alat atau sarana prasarana yang di butuhkan nelayan untuk pengembangan usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 mil dengan tujuan untuk membantu aktivitas nelayan kecil dalam melakukan penangkapan ikan sehingga menjadi lebih produktif dan dapat meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap, untuk meningkatkan produksi perikanan secara keseluruhan, dengan adanya bantuan dari Pemerintah Daerah kepada para pelaku pembudidaya ikan di laut maka ongkos produksi yang akan dikeluarkan dapat ditekan dan hasil produksi diharapkan dapat dihasilkan secara optimal.

Untuk meningkatkan peluang industri bagi rumah tangga tidak mampu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB telah melakukan kegiatan pemberian pelatihan industri rumah tangga kepada sebanyak 1.265 peserta dari Kabupaten/Kota. Melalui program Peningkatan Kualitas Keluarga kegiatan pemberian pelatihan kepada ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan ibu rumah tangga kepala keluarga yang terdaftar di DTKS, untuk tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan peserta sebagai berikut: (1) Kota Batam (100 Peserta mendapatkan 1 Set Prasmanan untuk setiap kelompok yang berisi 10 orang, 70 Peserta mendapatkan 1 Mixer dan 1 Gilingan Mie/Molen per orang dan 660

Peserta terdiri dari 20 Kelompok Mendapatkan Doorprize Prasmanan, Mixer dan Gilingan Mie/Molen) (2) Kab. Karimun 50 Peserta mendapat Mixer dan Gilingan Mie per Orang (3) Kab. Bintan 50 Peserta mendapat Mixer dan Gilingan Mie per Orang (4) Kota Tanjungpinang 85 Peserta Mendapatkan Doorprize Prasmanan, Mixer dan Gilingan Mie/Molen (5) Kab. Natuna 50 Peserta Mendapatkan Doorprize Prasmanan, Mixer dan Gilingan Mie/Molen (6) Kab. Lingga 50 Peserta Mendapatkan Doorprize Prasmanan, Mixer dan Gilingan Mie/Molen

Upaya penanggulangan kemiskinan di Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau melalui program Pengelolaan Persampahan pemerintah provinsi telah memberikan bantuan kepada 8 kelompok Bank sampah meliputi 6 kelompok bank sampah di kabupaten Lingga, 1 kelompok bank sampah di Kabupaten Bintan dan 1 kelompok bank sampah di Kota Tanjungpinang, di mana setiap bank sampah di berikan sosialisasi, edukasi dan pendampingan pembentukan bank sampah dan di berikan masing-masing unit timbangan manual, buku Tabungan bank sampah dan bantuan 1 unit kendaraan beroda 3 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para petugas bank sampah.

Untuk meningkatkan serapan tenaga kerja sebagai salah satu dari penyebab meningkatnya Tingkat kemiskinan maka dinas Tenaga Kerja melakukan Upaya penurunan kemiskinan melalui program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan mengadakan pelatihan tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan industry dan juga dipersiapkan untuk membuka usaha di dalam sektor informa, pada tahun 2023 ini ada sebanyak 560 orang yang telah mendapatkan pelatihan, peserta pelatihan merupakan peserta yang terdaftar di DTKS. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan kerja sama dengan perusahaan atas kebutuhan komposisi kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, sehingga pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan melalui program pemagangan.

Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pertanian dan Peternakan telah melaksanakan hampir diseluruh wilayah Kabupaten/Kota berpotensi untuk diolah menjadi lahan pertanian dan peternakan mengingat tanahnya subur. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis yang dikembangkan hampir di seluruh

Kabupaten/Kota. Berdasarkan kajian Komoditi/Produk/Jenis Unggulan (KPJu) di Provinsi Kepulauan Riau diperoleh KPJu di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

- Sub sektor Tanaman Pangan adalah padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah.
- Sub sektor Hortikultura adalah cabe, kacang panjang, ketimun, sawi, bayam, kangkung, terong, durian, pisang, nenas, pepaya, manga, manggis
- Sub sektor perkebunan adalah karet, kelapa, sagu, cengkeh, lada, gambir.
- Sub sektor peternakan adalah sapi, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam buras, itik dan kambing

Sektor pertanian sebagai tugas pokok dan fungsi utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat ditingkatkan setiap tahunnya guna mendukung pengembangan dan pembangunan pertanian dalam mencukupi kebutuhan pangan di daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau khususnya petani dan peternak. Maka dari itu konsentrasi pembangunan pertanian dapat digambarkan dan dijelaskan melalui sasaran meningkatnya hasil produksi pertanian yang bertujuan utama untuk peningkatan produksi pertanian di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai bentuk variabel yang terukur dalam pengembangan pertanian.

Persentase RTLH yang dibenahi merupakan salah satu komitmen Kepala Daerah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, ditargetkan sebanyak 15% dan terealisasi 15,23% dari total rekapitulasi rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebesar 1.333 unit rumah, dibandingkan dengan rumah yang ditargetkan semula untuk dilakukan peningkatan dari rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni sebanyak 200 unit rumah di Kabupaten Lingga dan 3 unit rumah di Kabupaten Bintan, sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 101,53%. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

yang ditetapkan 200 unit rumah Suku KAT yang tersebar di 10 (sepuluh) pulau di Kabupaten Lingga, yaitu:

- 1) Pulau Senang Desa Temiang Kecamatan Temiang Pesisir 24 unit rumah;
- 2) Pulau Air Bingkai Desa Tajur Biru Kecamatan Temiang Pesisir 13 unit rumah;
- 3) Pulau Kampung Baru Desa Tajur Biru Kecamatan Temiang Pesisir 14 unit rumah;
- 4) Pulau Air Ingat Desa Baran Kecamatan Senayang 8 unit rumah;
- 5) Pulau Secawar Desa Tanjung Kelit Kecamatan Bakung Serumpun 16 unit rumah;
- 6) Pulau Linau Batu Desa Tanjung Kelit Kecamatan Bakung Serumpun 54 unit rumah;
- 7) Pulau Selat Kongki Desa Penaah Kecamatan Senayang 14 unit rumah;
- 8) Pulau Mentengah Desa Mentuda Kecamatan Daik 30 unit rumah;
- 9) Pulau Pasir Panjang Desa Pasir Panjang Kecamatan Bakung Serumpun 12 unit rumah;
- 10) Pulau Kentar Akat Desa Kentar Kecamatan Senayang 15 unit rumah; dan
- 11) 3 unit rumah di Kabupaten Bintan terdapat di beberapa lokasi antara lain; 1 unit rumah di Desa Sebong Perih Kecamatan Teluk Sebong, 1 unit rumah di Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong, dan 1 unit rumah di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan.

Luas Kawasan Kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi-Kepulauan Riau berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 dimana pengurangan luas kawasan kumuh ditargetkan menjadi seluas 123.73 Ha dan/atau ditargetkan berkurang 23.51 Ha dari realisasi pengurangan luas kawasan kumuh tahun sebelumnya (147.24 Ha - 123.73 Ha). Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023, realisasi pengurangan luas kawasan kumuh sebesar 12.17 Ha atau menjadi 135.07 Ha (147.24 Ha - 12.17 Ha), sehingga Persentase capaian kinerja pengurangan luas kawasan kumuh pada Tahun 2023 sebesar $(12.17 \text{ Ha} : 23.51 \text{ Ha}) \times 100\% = 51.77\%$. Realisasi pengurangan luas kawasan kumuh yang telah ditangani oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan saat ini seluas $(23.30 \text{ Ha} + 12.17 \text{ Ha} = 35.47 \text{ Ha})$, persentase capaian kinerja pengurangan luas

kawasan kumuh yang telah ditangani sampai dengan tahun 2023 seluas 20.80% (35.47 Ha : 170.54 Ha = 20.80%) dari 170.54 Ha. Sedangkan persentase capaian kinerja pengurangan luas kawasan kumuh secara Nasional yang telah ditangani sampai dengan tahun 2023 seluas 0.35% (35.47 Ha : 10.000 Ha = 0.35%) dari 10.000 Ha. Lokasi pengurangan luas kawasan kumuh antara lain terdapat di Sagulung Kota, Baloi Permai dan Sungai Harapan di Kota Batam seluas 8,44 Ha dan Dompok dan Kampung Bulang di Kota Tanjungpinang seluas 3,73 Ha pada lokasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dalam pengurangan luas kumuh, berdasarkan pada keputusan kepala daerah kabupaten/kota. Pada tahun berjalan terdapat revisi keputusan kepala daerah kabupaten/kota tentang luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yang sebelumnya seluas 170,54 Ha menjadi 374,68 Ha.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral juga telah memberikan bantuan kepada Masyarakat kurang mampu yaitu melalui pemberian bantuan pasang baru Listrik (BPBL) kepada 238 Rumah Tangga yang belum berlistrik: di Kota Batam 55 rumah tangga, di Kota Tanjung Pinang 46 rumah tangga, di Kabupaten Karimun 74 rumah tangga dan di Bintan = 63 rumah, selain pemberian bantuan BPBL juga diberikan 1 Mesin Genset 10 kVa untuk 23 rumah tangga dengan jam operasi selama 5 Jam di kepulauan Anambas.

Dari Dinas Pekerjaan Umum melalui program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, telah dilakukan peningkatan SPAM jaringan perpipaan untuk 6.405 kk berdasarkan capaian TW2 Perumda Tirta Kepri.

2. ANALISIS PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN

1. Pada Bidang Kesehatan, Universal Health Coverage (UHC) di Kepulauan Riau mencapai 98%, peran kepersertaan mandiri peserta BPJS baru mencapai 18,7%,. Belum penuhnya kepersertaan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah namun juga pihak penyelenggara yaitu BPJS, karena selain

pembiayaan JKN daerah, pemerintah daerah juga menganggarkan Jamkesda yaitu bantuan transportasi dan penginapan kepada pasien dan keluarga pasien jika dirujuk keluar daerah.

2. Pada Dinas Sosial, saat ini keterediaan BNBA pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tidak menggunakan *system clustering* atau peringkat lagi sehingga pemberian bantuan DTKS dilakukan secara keseluruhan. Pensasaran kemiskinan ekstrim saat ini menggunakan data P3KE (Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem) yang harus dilakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu dengan DTKS, sehingga memperpanjang proses dan biaya di pemerintah daerah kabupaten kota dan pemerintah desa.
3. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, belum sepenuhnya peserta dari kelompok masyarakat miskin yang terdata di DTKS atau kelompok-kelompok tertentu dengan sasaran masyarakat cluster untuk ditingkatkan kemampuan ekonominya karena proses pendataan target sasaran belum berjalan dengan baik.
4. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sulit merubah pola pikir (mindset) masyarakat tentang pengelolaan sampah dan tidak ada fasilitas Tempat Penampungan Sampah (TPS) di lokasi terdekat
5. Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Proposal Badan/ Lembaga terlambat dalam pengajuan sehingga menunggu kebijakan dalam proses pelaksanaan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan Pelaku UMKM masih memiliki pinjaman lain melalui KUR pada Bank Lainnya sehingga tidak dapat diberikan Subsidi Margin 0% sebagaimana ketentuan Perbankan di Bintan Proposal Badan/ Lembaga tidak sesuai dengan ketentuan sehingga tidak dapat dilaksanakan sementara di Batam elum dapat melakukan penyesuaian penerima manfaat dengan data P3KE.
6. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesulitan dalam menentukan titik temu antara kriteria peserta yang masuk data DTKS dengan persyaratan Pelatihan kerja yang harus dipenuhi peserta dalam setiap program pelatihan.

7. Pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan, telambat mau dengan Bulog karena penentuan harga cppd ditingkat pusat dan terlambat dalam pengadaan.
8. Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, lokasi antar Desa dengan Ibu Kota sangat jauh, dan harus banyak menggunakan mobilisasi laut.
9. Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Terkait cakupan pemenuhan kebutuhan listrik dan meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat beberapa kendala di antaranya: Kondisi geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil dan jarak antara pulau yang terpisah jauh sehingga sulit untuk menjangkanya disamping itu rumah tangga yang berada dalam satu pulau kecil juga masih tersebar dengan jumlah rumah tangga yang terbatas sehingga membutuhkan biaya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang cukup besar.

2 REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN

Tabel 2.32
Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Pendukung Target Indikator
Angka Kemiskinan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	5,74	5,69	100,87	119.970.665.843	113.973.514.417	95,00

Hasil analisis sasaran Strategis menurunnya angka kemiskinan dengan indikator Kinerja Angka Kemiskinan terlihat dari tabel diatas bahwa provinsi Kepulauan Riau telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sekitar 0,5 persen Dimana dari target yang telah di ditetapkan di RPJMD pada tahun 2023 sebesar 5,74 persen dapat terealisasi sebesar 5,69 persen (angka kemiskinan semakin rendah semakin baik) sehingga capaian kinerjanya adalah 100,87 dan termasuk dalam kategori kinerja sangat baik. Sementara realisasi anggaran kegiatan yang di



gunakan untuk mendukung indikator angka kemiskinan juga sudah berjalan dengan baik dimana targetkan anggaran sebesar Rp. 119.970.665.843,- dapat terealisasi sebesar Rp. 113.973.514.417,- atau capaian sebesar 95 %. Berikut ini akan di tampilkan pagu Anggaran dan realisasi Anggaran yang di capai untuk setiap program pendukung penurunan angka kemiskinan sebagai berikut :

Tabel 2.33
Pagu dan Realisai Anggaran Program Pendukung Penanggulangan
Kemiskinan Tahun 2023

N0	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Efisiensi
1.	Pengelolaan Pendidikan	20.372.730.000	19.616.529.800	96,29
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	30.329.254.372	29.836.111.258	98,37
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.629.366.655	3.559.864.878	98,09
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2.452.414.230	2.412.603.567	98,38
5.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	15.804.463.449	15.659.494.677,35	99,08
6.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.943.104.821	4.817.863.963	97,47
7.	Program Pengelolaan Persampahan	246.147.805	227.572.050	92,45
8.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	2.745.636.400	2.741.607.058	98,85
9	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.084.081.323	982.329.994	90,61
10.	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.372.235.946	4.265.314.003	97,55
11.	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	187.942.546	176.211.884	93,76
12.	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.656.563.817	5.737.512.226	86,19



13.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	408.096.000	408.082.606	99,99
14.	Kawasan Permukiman	7.555.989.285	7.555.989.285	100
15.	Pengelolaan Ketenagalistrikan	782.639.194	774.093.631	98,91
16.	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.150.000.000	15.202.333.537	94,13
17.	Kesejahteraan Rakyat	2.250.000.000	1.866.000.000	82,93
TOTAL PAGU		119.970.665.843	113.973.514.417	95,00

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berusaha melalui perangkat daerah terkait untuk membantu masyarakat miskin dengan berbagai upaya dengan ketersediaan anggaran pada tahun 2023 tercatat sekitar Rp.119.970.665.843,- dialokasikan untuk penurunan angka kemiskinan melalui beberapa program yang sudah dijalankan, dari pagu yang tersedia dapat terealisasi pada tahun 2023 sebesar Rp.113.973.514.417,- atau sekitar 95,00 % dari pagu yang dianggarkan. Pelaksanaan program penurunan kemiskinan ini juga mengalami berbagai kendala atau permasalahan di lapangan, mulai dari kendala akses tujuan pelaksanaan kegiatan, masalah peserta pelatihan, kurangnya *link and macth* kebutuhan tenaga kerja dengan dunia usaha, dan juga sulitnya untuk menyesuaikan data kemiskinan yang ada di DTKS.

Sasaran 3: Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

📌 Indeks Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH Nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Provinsi di

Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.

Mulai tahun 2020 ini, indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO₃, dan Fecal Coli; Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan kondisi tutupan hutan dan vegetasi non hutan, serta dipengaruhi oleh keberadaan kanal dan kejadian kebakaran jika berada di kawasan ekosistem gambut; dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat.

Dasar hukum penyusunan IKLH sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024.
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara.

6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.16/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020- 2024.
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup berkaitan dengan menjaga kualitas lingkungan untuk kelestarian pembangunan. Selama 5 tahun belakangan kondisi lingkungan hidup di Kepulauan Riau terus menunjukkan penurunan kualitas. Ukuran kualitas lingkungan hidup menunjukkan angka yang terus menurun, baik dari air, udara maupun dari tutupan lahan. Berikut disajikan kinerja urusan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu :

1. Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter :
 - TSS - Total Fosfat
 - pH - NO₃, dan
 - DO - Fecal Coli
 - BOD - COD
2. Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU) yang diukur berdasarkan parameter :

- SO₂

- NO₂

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung;
4. Indeks Kualitas Ait Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat.

Berikut disampaikan informasi ketercapaian kualitas lingkungan hidup Provinsi Kepulauan Riau 2023 :

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Indikator Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kualitas Lingkungan Hidup	69,95	74,26	106

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Pada Tahun 2023 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau sebesar 74,26 dari target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 69,95 dengan Rating **Sangat Baik** dengan Indeks Respon sebesar 8,32. Sehingga IKLH Provinsi Kepulauan Riau masuk peringkat ke 19 dari 38 Provinsi di Indonesia. Hasil capaian kinerja IKLH dari perhitungan 4 indikator yaitu:

- a. Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 54,93 dengan rating Sedang;
Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan yang terjadi pada musim kemarau yang membuat volume air sungai berkurang di Kab/Kota, terjadi pencemaran air akibat pengerukan atau pemotongan tebing tanah untuk pelebaran jalan dan influent lain melalui selokan-selokan air yang ada di sekitar waduk di Batam, terbatasnya ketersediaan anggaran untuk melakukan pemantauan kualitas air.
- b. Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 90,13 dengan rating Sangat Baik;

Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan, hasil evaluasi dari 7 kab/kota dimana berdasarkan evaluasi tersebut indeks respon daerah pada Program Langit Biru pada umumnya kab/kota tersebut memiliki kebijakan dan peraturan, SDM, serta implementasi berupa menyiapkan sarana prasarana seperti pedestrian, jalur sepeda, Ruang Terbuka Hijau (RTH), penerapan area rendah emisi (LEZ); melaksanakan program seperti Car Free Day (CFD) dan gerakan masyarakat (germas) bersepeda. Sementara itu, target dan capaian pada IKU.

Tabel 2.35
Indeks Kualitan Udara Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepri

No	Kab/Kota	Target IKU	Capaian IKU	Kriteria
1	Kab. Bintan	88,76	93,62	Baik
2	Kab. Karimun	90,41	93,05	Baik
3	Kab. Kep. Anambas	85,55	89,37	Baik
4	Kab. Lingga	93,57	95,04	Baik
5	Kab. Natuna	86,06	89,37	Baik
6	Kota Tanjungpinang	87,84	86,37	Baik
7	Kota Batam	86,30	84,12	Baik

Data kualitas udara merupakan data hasil pengukuran langsung yang mewakili (1) area padat kendaraan (transportasi), (2) area pemukiman, (3) area perkantoran dan (4) area industri pada 7 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Pemilihan 4 lokasi yang mewakili 4 jenis aktivitas pada setiap kabupaten/kota tidak boleh berada dalam 1 lokasi yang sama, namun minimal berjarak 1 kilometer dari titik satu ke titik lainnya. Pemilihan 4 lokasi tersebut adalah:

1. Transportasi Lokasi di daerah transportasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak emisi gas buang yang keluar dari kendaraan bermotor terhadap kualitas udara disekitar jalan raya yang dilakukan pemantauan kualitas udaranya. Jarak titik pengambilan sampel kurang lebih 5 - 10 meter dari bahu jalan. Metodologi LAPORAN IKLH 2021 13.

2. Pemukiman Lokasi di daerah pemukiman dipilih untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya emisi gas buang yang keluar dari kegiatan di sekitar pemukiman padat.
3. Perkantoran/pasar/komersial Lokasi di daerah perkantoran/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/ komersil. Pengukuran dilakukan secara otomatis dan atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata rata tahunan. Parameter yang dipantau adalah NO₂ dan SO₂ dengan durasi pemantauan dalam setahun adalah sebagai berikut: • Passive sampler: minimal 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali) • Manual aktif: minimal 24 hari per tahun (2 kali per bulan @24 jam) • AQMS fixed station: minimal 65% data (238 data harian per tahun) • AQMS mobile station: minimal 20 data harian per bulan (240 data harian per tahun) Jumlah titik sampling menurut provinsi dapat dilihat pada Tabel 6. Jumlah titik sampling ini merupakan gabungan antara titik sampling menggunakan metode passive sampler baik yang dilakukan dengan dana APBN maupun APBD ditambah dengan titik sampling pemantauan udara ambien otomatis kontinu (AQMS)

Tidak tercapainya Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kota Batam karena adanya pembukaan Kawasan industri, penambahan ruas jalur jalan dan bertambahnya jumlah transportasi di Kota Batam sehingga menyebabkan target indeks kualitas udara di Kota Batam belum tercapai. Namun jika dilihat dari skor dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Batam masih masuk **kategori Baik**. Target Indeks Kualitas Udara (IKU) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam pada tahun 2022 sebesar 86,20 dengan capaian 87,71, sehingga di tahun 2023 Pemerintah Kota Batam meningkatkan target IKU sebesar 86,30 yaitu naik 0,1 dari tahun sebelumnya dengan harapan dapat tercapai seperti pada tahun sebelumnya. Keberhasilan pemantauan udara di provinsi Kepulauan Riau tidak lepas dari adanya instrumen AQMS yang difasilitasi oleh Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di letakkan di 2 (dua) lokasi yaitu Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Air Quality Monitoring System (AQMS) adalah Alat Pemantau Kualitas Udara Otomatis untuk mengetahui tingkat pencemaran udara.

- c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 66,97 dengan rating Sedang;
Pada data Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), terdapat 7 kab/kota yang meningkat nilai IKTL. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan luas ruang terbuka hijau di Provinsi Kepulauan Riau. Seperti di Pemukiman dan Taman Kota, baik dalam bentuk taman lingkungan maupun penghijauan pekarangan. Ruang terbuka hijau permukiman yang dikelola dengan baik akan memberikan sumbangsih yang berarti pada luasan ruang terbuka hijau kota seluruhnya.
- d. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 81,81 dengan rating Baik.
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) mengalami kenaikan karena dari 7 Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi, yang meningkat mutunya. Peningkatan kualitas air laut tentu tak terlepas dari adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir seperti penanaman mangrove, partisipasi masyarakat dalam pengolahan pesisir dan laut dan tentu perbaikan di hulu, hal ini terlihat naiknya IKA dan IKTL. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air laut dipengaruhi 80% oleh pencemaraan dan kerusakan di darat (*LANDBASE POLLUTION*).

Adapun realisasi IKLH 2023 sebesar 74,26 indeks sedangkan tahun 2022 sebesar 74,13 sehingga ada kenaikan 0,13 indeks dibanding tahun 2022. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.36
Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023
----	---------	-----------	------------	------------

	Strategis	Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja 2023
1.	Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	69,73 Indeks	74,13 Indeks	106,31 %	69,95 Indeks	74,26 Indeks	106,16%
		Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	20 %	50 %	250 %	20 %	20 %	100%
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	76,75 Indeks	85,56 Indeks	111,48 %	77,39 Indeks	81,81 Indeks	105,71%
		Indeks Kualitas Air (IKA)	56,70 Indeks	56,79 Indeks	100,16 %	56,80 Indeks	54,93 Indeks	96,71%
		Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU)	88,25 Indeks	90,27 Indeks	102,29 %	88,35 Indeks	90,13 Indeks	102,01%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	59,08 Indeks	58,00 Indeks	98,17 %	59,09 Indeks	66,97 Indeks	113,33%

❓ Alternative solusi yang dilakukan

a. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Peningkatan kualitas air laut tentu tak terlepas dari adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir seperti penanaman mangrove, partisipasi masyarakat dalam pengolahan pesisir dan laut dan tentu perbaikan di hulu, hal ini terlihat naiknya IKA dan IKTL. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air laut dipengaruhi 80% oleh pencemaran dan kerusakan di darat diantaranya disebabkan oleh :

- Pembuangan sampah di laut
- Pembuangan Limbah oleh sektor industri
- Reklamasi pantai
- Rusaknya ekosistem laut dan terumbu karang

Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi aturan dan tidak melakukan pencemaran terhadap air laut dengan cara membuang sampah dilaut. Selain itu pemerintah juga harus tegas kepada oknum atau pihak perusahaan yang melakukan pembuangan limbah yang tidak di olah atau tidak aman bagi lingkungan, serta kepada perusahaan yang melakukan kegiatan reklamasi pantai agar patuh pada peraturan yang berlaku. Pemerintah Daerah dalam hal ini baik Kabupaten/Kota juga Provinsi harus melakukan pemantauan air laut secara periodik yaitu 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 22 tahun 2021.

b. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan yang terjadi pada musim kemarau yang membuat volume air sungai berkurang di Kabupaten/Kota, terjadi pencemaran air akibat pengerukan atau pemotongan tebing tanah untuk pelebaran jalan dan influent lain melalui selokan-selokan air yang ada di sekitar waduk di Batam.

Alternatif solusi yang dilakukan agar Indeks Kualitas Air (IKA) dapat di tingkatkan yaitu dengan cara :

- Ketersediaan anggaran untuk melakukan pemantauan
- Melakukan pemantauan kualitas air sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebanyak 4 kali pemantau dalam setahun (PP 22 Tahun 2021)
- Pemberdayaan Instrumen Pemantauan secara online kualitas air yang ada di Sei jago di Tanjung Uban Kabupaten Bintan dan sekaligus penyediaan petugas beserta honorarium petugas jaga.

c. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan indeks kualitas udara (IKU) adalah dengan cara :

- Pemerintah Daerah dalam hal ini baik Kabupaten/Kota juga Provinsi harus melakukan pemantauan udara secara periodik yaitu 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 22 tahun 2021.

- Melaksanakan kembali kegiatan uji emisi, karena sejak tahun 2014 uji emisi sudah tidak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengurangi Kendaraan Pribadi.
- Membatasi Penggunaan Pendingin Udara.
- Efisiensi Penggunaan Listrik sebagai Solusi Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca.
- Kurangi Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

d. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Penyediaan ruang terbuka hijau di suatu kota tidak hanya selalu dari pemerintah, seperti penyediaan taman kota, jalur hijau, dan lainnya. Namun, penyediaan ruang terbuka hijau juga dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran penghuni kota akan pentingnya ruang terbuka hijau. Berbagai jenis ruang terbuka hijau dapat dilakukan di lahan privat milik masyarakat atau swasta. Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyediaan ruang. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan anggaran untuk melakukan program dan kegiatan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan beserta besaran anggaran pendukung

Pelaksanaan program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan pagu anggaran Rp. 250.000.000,- yang dialokasikan untuk penganugerahan dan penyerahan sertifikat Penghargaan Perusahaan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup pada periode penilaian tahun 2021 - 2022 serta dilakukan inspeksi ke lapangan kepada perusahaan peserta program penilaian peringkat kinerja perusahaan periode tahun 2022 – 2023, Program Pengelolaan persampahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 246.147.805,- dialokasikan untuk pengelolaan sampah berupa pemberian bantuan kepada 8 (delapan) kelompok bank sampah yaitu 6 (enam) kelompok bank sampah di Kab. Lingga, 1 (satu) kelompok di Kab. Bintan dan 1 (satu) di Kota Tanjung Pinang. Program pengelolaan hutan dengan pagu anggaran sebesar Rp.



297.035.500,- dialokasikan untuk pengawasan supaya hutan tersebut tetap lestari dan tidak dirusak oleh masyarakat dan penanaman mangrove seluas 2 (dua) Hektar di Batam. Maka capaian kinerja IKLH Tahun 2023 sebesar 74,26 dari target 69,95 dari program yang langsung mengampu indikator tersebut belum ada tetapi program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai pendukung atas keberhasilan seperti pada tabel berikut :

No	Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	(%)
1	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	250.000.000	228.935.899	91,57
1.1	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	250.000.000	228.935.899	91,57
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	246.147.805	227.572.050	92,45
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	246.147.805	227.572.050	92,45
3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	297.035.500	287.461.100	96,78
3.1	Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	297.035.500	287.461.100	96,78
JUMLAH		793.183.305	743.969.049	93,80

2 Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Pencapaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja			Target RPJMD	Standar Nasional
		2021	2022	2023		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	69.95	73.19	74.13	74.26	69.95	73,08

Pencapaian kinerja IKLH sebesar 74,26 dari target 69,95 merupakan hasil dari kegiatan dari berbagai lintas sektor. Analisa efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja DLHK tahun 2023 adalah :

- Sumber Daya Manusia (SDM) ;



Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang menangani Lingkungan Hidup ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sehingga perlu adanya penambahan sumber daya manusia yang sesuai dengan keahlian. Adapun jumlah sumber daya manusia yang ada saat ini sebanyak 11 (sebelas) orang yang tersebar di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebanyak 6 (enam) orang, UPTD. Laboratorium Lingkungan sebanyak 2 (dua) orang dan di Bidang persampahan, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan 3 (tiga) orang, seperti tabel dibawah ini :

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN
1.	Roki, S.H	19840712 201001 1 021	Penata Tk.I / III.d	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2.	Erlangga Wisnu Wardana, S.E	19760627 200604 1 023	Penata Tk.I / III.d	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
3.	Vera Herlina, S.Sos	19881007 201101 2 008	Penata Tk.I / III.d	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
4.	Axsal, SKM., M.Kes	19800524 200604 1 012	Penata Muda Tk.I / III.b	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
5.	Iran Andrianto, S.E	19790615 201101 1 004	Penata Tk.I / III.d	Penelaah Dampak Lingkungan
6.	Cici Septiarini, S.Si.	19851117 201101 2 009	Penata Tk.I / III.d	Analisis Lingkungan Hidup
7.	Mardinayanti, S.Si.	19840331 201101 2 011	Penata Muda Tk.I / III.b	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama
8.	Milya Hariza, S.T.P.	19761223 201101 2 002	Penata Muda / III.a	Pengendali Dampak Lingkungan Mahir
9.	Rupi'ah, S.P.	19730315 200502 2 006	Penata Tk.I / III.d	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
10.	Raden Mariadi N, S.P.	19841105 200904 1 002	Penata Tk.I / III.d	Pengendali



				Dampak Lingkungan Ahli Muda
11.	Said Syahro Marfandy, S.E.	19751019 201001 1 007	Penata Tk.I / III.d	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda

- Sarana

Saat ini sarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau diantaranya adalah :

o AQMS mobile station

AQMS mobile station yang ada saat ini ada 2 (dua) lokasi yaitu 1 (satu) di Kota Batam tepatnya di batua Aji dan 2 (dua) di Kota Tanjungpinang yang terletak di Pamedan.

o UPTD. Laboratorium Lingkungan

Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau di Jalan Pramuka No.7B Sekupang – Batam. UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah di dukung dengan instrumen atau peralatan untuk pengujian kualitas air, baik air bersih maupun air laut.

Sasaran 4: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah upaya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik guna mempercepat proses pembangunan nasional sampai ke daerah. Tata kelola pemerintahan berimplikasi erat pada bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat yang merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Semakin baik tata kelola pemerintahan, maka semakin baik pula pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pembangunan dapat terwujud.

Reformasi Birokrasi menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahkan Presiden

tentang Reformasi Birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Hal tersebut dapat terwujud apabila ada upaya Reformasi Birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Upaya reformasi diharapkan semakin berkualitasnya tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan Reformasi Birokrasi hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Dalam rangka pencapaian kondisi tersebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menerbitkan Roadmap Reformasi Birokrasi Nomor 460 Tahun 2023 dengan mempertajam Sasaran, indikator dan target beserta rencana aksi Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2024.

Dalam memenuhi Sasaran Strategis RPJMD bidang Tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif telah ditetapkan indikator kinerja sebagaimana target dan capaian sebagai pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kuat dan Antisipatif

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi	70.37	73.56	104.53%

Indeks Reformasi birokrasi merupakan nilai hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai gambaran sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukkan Indeks Reformasi Birokrasi yang ditargetkan sebesar 70,37 dapat dicapai sebesar 73,56 dengan persentase capaian sebesar 104,53%. Berikut disampaikan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Terdapat target Kegiatan Utama Roadmap RB yang perlu disusun berdasarkan pada baseline tahun sebelumnya dan target nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023) – Rencana aksi yang disusun harus berupa "how to" atau langkah-langkah untuk mencapai kegiatan utama dan mempertajam rencana aksi yang disusun agar dapat mencapai sasaran kegiatan utama
2. Implementasi AKIP sudah sangat baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Pada Road Map RB 2021-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada Road Map RB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2024 setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan dikaitkan

dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan kegiatan percepatan (acceleration). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

Keberhasilan Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 didukung dengan pencapaian Sasaran Reformasi Birokrasi General dan Tematik sebagai berikut :

REFORMASI BIROKRASI GENERAL

Tabel 2.38
Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi General Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target	Capaian
1	Terimplementasinya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi (persen)	100%	100%
2	Terimplementasikannya Kebijakan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN dengan Baik	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai (persen)	75%	75%
3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE (persen)	100%	-
		Indeks SPBE	2,9	2,68
4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegritasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi	Indeks Perencanaan Pembangunan	93.00	83,82
		Nilai SAKIP	75.00	76.14



No.	Sasaran	Indikator	Target	Capaian
	Pemerintah			
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0 Unit WBK/ WBBM	0
		Tingkat Maturitas SPIP	3.00	3.00
		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	100.00	100
		Hasil Survei Penilaian Integritas	72.00	70.58
6	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Dan Regulasi	Indeks Reformasi Hukum	75.00	79,80
		Indeks Kualitas Kebijakan	0.00	-
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral	Tingkat Digitalisasi Arsip	85	90,40
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,6	1,9
8	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Indeks Tata Kelola Pengadaan	80	90,11
		Opini BPK	WTP	WTP
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	88.00	89.25
9	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Dan Fungsional	Indeks Sistem Merit	316.00	330,5
10	Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN Yang Efektif Dan Efisien			
11	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja			
12	Terwujudnya Rekrutmen Pegawai ASN yang Efektif dan efisien			
13	Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN			
14	Terwujudnya Percepatan Peningkatan Kapasitas Pegawai ASN			
15	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Sistem Merit Dan Sistem Manajemen ASN			
		Indeks BerAkhlak	70.00	56

No.	Sasaran	Indikator	Target	Capaian
16	Terwujudnya pelayanan publik secara prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84.00	84,91
		Indeks Pelayanan Publik	4,1	4,13
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	86.00	86,74

Beberapa informasi capaian Sasaran Reformasi Birokrasi General Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terimplementasinya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi

Terimplementasinya kebijakan penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari tingkat Penyederhanaan birokrasi dengan target sebesar 100 % dengan capaian sebesar 100%. Penyetaraan jabatan dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan. Implementasi penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdapat 433 jabatan struktural telah dialihkan menjadi jabatan fungsional dengan rincian Jabatan administrator sebanyak 14 Jabatan dan jabatan pengawas sebanyak 419 jabatan.

2. Terimplikasinya Kebijakan Sistem kerja dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik

Terimplementasinya kebijakan sistem kerja dengan model fleksibel dilingkungan Provinsi Kepulauan Riau dengan target 100 % dan telah tercapai sebesar 75 %. Kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja yang disahkan pada tanggal 11 Oktober 2023 dan telah pernah disosialisasikan di lingkungan perangkat daerah difasilitasi oleh Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 20 November 2023 di Batam. Hasil evaluasi dari Kemendagri bahwa Implementasi Sistem Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah Kategori B. Faktor penyebab tercapainya target indikator ini, adalah sistem kerja telah menjadi 3 prioritas kerja penyederhanaan birokrasi di

provinsi Kepulauan Riau setelah tahapan penyederhanaan struktur organisasi dan penyederhanaan jabatan (dari jabatan struktural ke jabatan fungsional) dilakukan.

3. Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional

Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari indikator indeks SPBE dengan target sebesar 2,9 dan capaian sebesar 2,68. Belum tercapainya target Indeks SPBE dikarenakan belum adanya Arsitektur SPBE, Road Map SPBE, Rencana Induk SPBE, dan belum melaksanakan audit TIK.

4. Terimplementasinya sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Terimplementasinya sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan dengan target sebesar 93,00 dengan capaian sebesar 83,82 dan indikator Nilai Sakip dengan target sebesar 75 dan capaian sebesar 76,14. Indeks Perencanaan Pembangunan masih belum meningkat sesuai dengan target RPJMD, namun beberapa upaya sudah dilakukan dengan cara adanya keselarasan antara muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota serta muatan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD didukung dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang semakin baik dan intensif antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi dengan Badan Perencanaan Kabupaten/Kota serta dengan Mitra Perangkat Daerah. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan senantiasa memastikan keterlibatan dan peran serta yang aktif dari Kab/Kota dan Perangkat Daerah dalam rangka merumuskan perencanaan pembangunan. Selain itu didukung pula dengan Sumber Daya Manusia Fungsional Perencana yang semakin memadai serta pemanfaatan sistem informasi perencanaan yang terintegrasi memungkinkan terjadinya keselarasan antar dokumen perencanaan.

Tercapainya nilai Sakip di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau didukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan, Hasil evaluasi terhadap nilai Sakip Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/282/AA. 05/2023 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023.

5. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Meningkatnya kualitas pengawasan dapat dilihat dari :

- Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dengan target sebesar 3.00 dan tercapai sebesar 3.00 Berdasarkan Lembar kerja Evaluasi Kementerian PAN dan RB seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyusun dan memperbaiki perencanaan dengan baik, khususnya terkait keselarasan antara sasaran, kualitas indikator, target kinerja, dan kelengkapan komponen perencanaan di beberapa OPD yang belum tepat, Peningkatan implementasi Manajemen resiko pada Provinsi Kepulauan Riau melalui penyediaan sumber daya dan peningkatan kompetensi pegawai.
- Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

Zona integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L/P yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat atau komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK/WBBM) harus memenuhi standar syarat indikator yang telah ditentukan, diantaranya adalah dalam dua tahun terakhir tidak ada kerugian negara yang belum diselesaikan, tidak ada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, adanya komitmen pimpinan dan pegawainya akan bekerja berdasarkan indikator dan target kerja yang jelas, dengan menandatangani Pakta

Integritas, penguatan akuntabilitas harus ditingkatkan dengan menyusun indikator kinerja, menetapkan target kinerja, serta meningkatkan capaian kinerja.

Pencanangan ZI Provinsi Kepulauan Riau sudah dilaksanakan pada tanggal 4-5 Oktober 2023 di Best Western Premiere Panbil Batam, dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP, Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala UPT Batam Center, Kepala Dinas Kesehatan, Perangkat Daerah yg ditetapkan dalam program OLGOZI (Dinas Penduduk dan Catatan Sipil, Rumah Sakit, SAMSAT) namun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum terbentuk koordinator/satgas ZI, Unit yang dicanangkan masih memiliki temuan APIP/BPK yang belum selesai di tindaklanjuti.

- Hasil Survey Penilaian Integritas

Hasil Survei Penilaian Integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan target sebesar 72.00 dengan capaian sebesar 70.58. Berikut salah satu rekomendasi dari Kemenpan RB terhadap hasil Survey Penilaian Integritas yaitu Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit serta penerapan sanksi dan hukuman praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.

6. Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi

Meningkatnya kualitas kebijakan dan Regulasi dapat diukur dari Kualitas Kebijakan dan Indeks Reformasi Hukum, Indeks ini sebagai instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi.

Pada tahun 2023 telah terbit Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menetapkan di dalamnya Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Kualitas Kebijakan dilanjutkan,

disinergikan, dan disederhanakan untuk mengukur Area Perubahan Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan. Salah satu inisiatif yang perlu menjadi agenda ke depan adalah menerapkan prinsip-prinsip pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dalam manajemen kebijakan di setiap instansi Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi pada provinsi Kepulauan Riau telah didapat indeks reformasi hukum dengan bobot 79,80 dari 148 produk hukum daerah yang telah difasilitasi.

7. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan arsip digital dan Data Statistik Sektoral

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan arsip digital di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari :

- Pada tahun 2023 ANRI telah melaksanakan pengawasan Pengelolaan Arsip Elektronik sebagai indeks Tingkat Digitalisasi Arsip dalam Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB General) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Reformasi Birokrasi.
- Adapun hasil pengawasan pengelolaan arsip elektronik yang merupakan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 392 Tahun 2023 tentang Nilai Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Tahun 2023 serta Keputusan Kepala ANRI Nomor 395 Tahun 2023 tentang Nilai Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023. Nilai tingkat digitalisasi arsip pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar **90,40 (sembilan puluh koma empat nol)** dengan kategori AA (**Sangat Memuaskan**).

HASIL PENILAIAN :

A. DIGITASI ARSIP

(untuk arsip statis)

- Unit Kearsipan Pemerintah Daerah (Bidang Penyelenggaraan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau) telah melakukan alih media dan sudah sesuai dengan standar. Alih media sesuai dengan standar adalah melaksanakan prosedur alih media yaitu:
 1. Menyusun Berita Acara Alih Media Arsip;
 2. Menyusun Daftar Arsip yang Dialihmediakan; dan
 3. Melakukan autentikasi arsip pada hasil alih media.

B. IMPLEMENTASI ABKD (Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis)

(untuk arsip dinamis)

1. Pemerintah Daerah telah menggunakan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) versi live serta telah terdapat transaksi pengguna minimal 5 perangkat daerah dan ke instansi lain di luar pemerintah daerah.
2. Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis pada Pemerintah Daerah melaksanakan proses bisnis penciptaan arsip, penggunaan arsip, dan pemeliharaan arsip (pemberkasan).
3. Pemerintah Daerah telah melakukan pembuatan draft/konsep naskah dinas sesuai Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Naskah dinas ditandatangani menggunakan Sertifikat Elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik, dikirim sesuai tujuan, dilakukan pengendalian, dan dicatat pada agenda naskah dinas keluar.
4. Pemerintah Daerah melakukan penandatanganan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSN.
5. Naskah Dinas telah teregistrasi, terdistribusi, dilakukan pengendalian naskah dinas masuk, dan dicatat pada agenda naskah dinas masuk secara elektronik melalui aplikasi kearsipan dinamis.

6. Pengguna Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis pada Pemerintah Daerah melakukan pemberkasan terhadap naskah dinas lebih dari 20% s.d. 50%.

C. SUMBER DAYA ABKD (Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis)

1. Pemerintah Daerah memiliki Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis yang telah dilakukan seluruh Audit TIK.
2. Pemerintah Daerah telah memiliki Sumber Daya Manusia yang memenuhi kompetensi teknis dalam pengelolaan arsip elektronik melalui bimbingan teknis.
3. Pemerintah Daerah telah memiliki sarana penyimpanan arsip elektronik berupa data center minimal memenuhi persyaratan tier 3. Penjelasan Tier 3 – Concurrently Maintainable Tier 3 memiliki persyaratan seluruh data center harus memiliki lebih dari satu sumber listrik dan jaringan sehingga tidak ada shutdown. Tingkat uptime server juga dibatasi maksimal 99,982% atau sekitar 1,5 jam dalam satu tahun. Untuk urusan uptime server antara tier 2 dan tiga terpaut perbedaan yang cukup jauh. Untuk tier 3 keatas, saat terjadi maintenance atau penggantian komponen tidak perlu dilakukan shutdown.
4. Pemerintah Daerah telah terdapat tim helpdesk dalam rangka penerapan aplikasi bidang kearsipan dinamis yang ditetapkan dalam surat keputusan/surat perintah.

D. JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL

1. Lembaga Kearsipan Daerah terdaftar sebagai simpul dan telah melakukan proses unggah pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional secara terjadwal minimal 1 (satu) tahun sekali.
2. Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan 4 (empat) sampai 6 (enam) dari 8 (delapan) tanggung jawab sebagai simpul pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

8. Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Pengelolaan Keuangan dan Aset

Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Pengelolaan Keuangan dan Aset di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat di lihat dari:

- Indeks Tata Kelola Pengadaan

Indeks Tata Kelola Pengadaan di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau dengan target nilai Baik dan tercapai dengan nilai Sangat Baik. Hal ini dapat dilihat dari terwujudnya perencanaan yang baik dalam perumusan Kebijakan, pendampingan dan pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, Terlaksananya Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa serta Pembinaan SDM, Kelembagaan dan pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa yang tepat fungsi, Jumlah Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa yang berkompetensi telah sesuai dengan rencana aksi pemenuhan kebutuhan.

- Opini BPK

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah meraih opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2023. Berbagai Upaya atau strategi yang dilakukan untuk mempertahankan opini WTP yaitu meningkatkan sistem pengendalian internal (SPI), penetapan regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, Meningkatkan kapasitas aparatur penyusun laporan keuangan dan pengurus barang perangkat daerah melalui bimbingan teknis dan penyempurnaan pengelolaan barang dan pengelolaan barang yaitu aplikasi SIPD. SIPD dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik terkait perencanaan pembangunan daerah sampai pelaporan keuangan daerah.

Gambar 2.16
Penghargaan Keberhasilan Menyusun Dan Menyajikan Laporan Keuangan Dengan Opini WTP



- Tindaklanjut rekomendasi BPK

Tindaklanjut hasil rekomendasi BPK dengan target sebesar 88% dan dapat tercapai sebesar 89,25. Hal ini dapat terwujud karena perangkat daerah kooperatif dalam menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK.

9. Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan dan Fungsional, Terselenggaranya Manajemen talenta yang efektif dan efisien, Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil layak dan berbasis kinerja, Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien, terwujudnya Percepatan transformasi digital manajemen ASN, terwujudnya Percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN

Dalam mewujudkan Penataan kepegawaian di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau telah ditetapkan indikator kinerja yaitu indeks sistem merit. Sistem merit sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Adapun tujuan penerapan sistem merit adalah untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional, berintegritas, profesional, adaptif, kolaboratif, memiliki nilai dasar dan etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi,

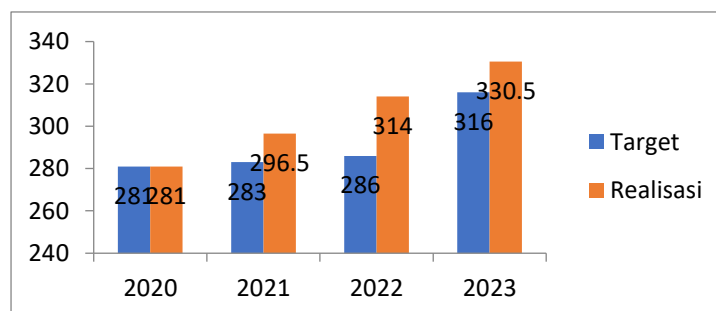
dan nepotisme Penerapan Penilaian Sistem Merit pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dimulai sejak tahun 2020 yang dilakukan penilaian oleh KASN melalui Aplikasi SIPINTER berdasarkan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019.

Tabel 2.39
Capaian Indeks sistem Merit Provinsi Kepulauan Riau

NO	INDIKATOR KINERJA	NILAI TERTINGGI	REALISASI			
			2020	2021	2022	2023
1	Aspek Perencanaan Kebutuhan	40	37,5	37,5	40	40
2	Pengadaan	40	32	34	34	38
3	Pengembangan Karir	130	67,5	65	72,5	80
4	Promosi dan Mutasi	40	20	20	20	20
5	Manajemen Kinerja	80	60	70	72,5	77,5
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40	30	35	40	40
7	Perlindungan dan Pelayanan	16	16	16	16	16
8	Sistem Informasi	24	18	19	19	19
		Skor Nilai	281	296,5	314	330,5
		Indeks	0,68	0,72	0,75	0,81
		Kategori	III	III	III	IV
		Sebutan	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

10. Meningkatnya kepatuhan terhadap Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN

Grafik 2.17
Perbandingan Target dan Realisasi indeks Sistem Merit



Hasil Indeks Sistem Merit di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 281 pada tahun 2020, yang berarti penerapan system merit dalam manajemen ASN di provisni Kepulauan Riau dalam kategori III dengan 296,5 tahun 2022 memperoleh nilai 314, ditahun 2023 mengalami peningkatan dengan perolehan nilai 330,5 dalam kategori IV dengan sebutan **Sangat Baik**.

Gambar 2.17
Penghargaan Nilai Sistem Merit Provinsi Kepulauan Riau



Dalam memenuhi kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari indikator Indeks BerAkhlak. Berdasarkan survey Pemetaan Budaya Kerja dimana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diikuti oleh 1100 Responden dengan nilai indeks 57,5% di kategori B Cukup Sehat. Dalam rangka meningkatkan nilai-nilai BerAKHLAK diperlukannya penguatan budaya kerja ASN BerAKHLAK diantaranya dengan mengadakan internalisasi berupa Kick off/Launching Core Values ASN BerAKHLAK, penguatan komitmen pimpinan, sosialisasi dan internalisasi pemahaman core values BerAKHLAK Penyelarasan Sistem memasukkan budaya kerja ke dalam system pembelajaran terintegrasi, mengikat budaya dengan system pengelolaan kinerja (SPK), Menyelaraskan SPK dengan system penghargaan, manajemen talenta dan karier. Adapun

kegiatan yang terlaksana selama tahun 2023 dalam rangka mendukung meningkatkan Indeks BerAkhlak, sebagai berikut :

1. 7 edisi Seri Webinar “NGOPI TIME” Nilai BerAkhlak, dengan peserta lebih dari 12.000 ASN;
2. Terlaksananya “Quiz ASN BerAkhlak” antar OPD secara daring yang memperbutkan piala bergilir Gubernur Kepri.

11. Terwujudnya pelayanan publik secara prima

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas atau prima merupakan salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Instansi pemerintah memiliki tugas mendasar untuk memberikan pelayanan prima (excellent service) dan harus memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Terwujudnya pelayanan publik secara prima dapat dilihat dari ketercapaian indikator berikut :

- Indeks Pelayanan Publik

Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Indeks pelayanan publik Provinsi Kepulauan Riau dengan target sebesar 4,1 dan capaian sebesar 4,13 kategori Sangat Baik. Faktor penyebab tercapainya target indikator ini, antara lain telah terbangunnya koordinasi yang baik antara Biro Organisasi dengan Perangkat Daerah yang dinilai, sehingga perangkat daerah dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publiknya dengan memenuhi aspek-aspek dan indikator yang dinilai.

Gambar 2.18
Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik



- Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil dari kegiatan pengukuran dengan cara survey secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 84,00 dan tercapai sebesar 84,91 kategori Baik. Faktor penyebab tercapainya target antara lain adalah telah terbangunnya kesadaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan kewajiban Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan melaporkan hasilnya serta adanya upaya dari Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Hal-hal yang telah dilakukan terkait hal ini, antara lain Biro Organisasi telah melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah terkait tatacara pelaksanaan SKM dan selalu berkoordinasi untuk pelaporan hasil SKM melalui surat.

- Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan

Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik adalah penilaian untuk mengukur tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pada Kementerian/lembaga/Daerah terhadap Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian ini merupakan upaya pencegahan mal administrasi dengan kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif dengan hasil akhir berupa opini pelayanan publik. Nilai Tingkat kepatuhan pelayanan publik Provinsi Kepulauan Riau sebesar 86,74 (Zona Hijau, kategori B Kualitas Tinggi). Salah satu faktor penyebab tercapainya target adalah telah terjalinnya kolaborasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimana penyelenggaraan

pelayanan publik saling bekerjasama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal yang telah dilakukan untuk pencapaian target ini yaitu melakukan koordinasi baik dengan Perangkat Daerah yang dinilai maupun dengan Ombudsman dan dilaksanakannya Asistensi Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman.

Gambar 2.19
Penghargaan kepatuhan pelayanan publik





Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit Reformasi Birokrasi terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. Konsep Reformasi Birokrasi Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Tabel 2.40
Capaian Reformasi Birokrasi Tematik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	5,74	5,69
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	15,3	15,4
3.	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	(3.13)±1	(3.13)±1
4.	Peningkatan Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	23.000 Miliar	11.308 Miliar
		Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	13.500 Miliar	8.856 Miliar
5	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk dalam negeri	96,20	96.16

Informasi capaian Sasaran Reformasi Birokrasi Tematik Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Penurunan Angka Kemiskinan (Angka Kemiskinan)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS

mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Persentase penduduk miskin merupakan perbandingan jumlah penduduk miskin provinsi dengan jumlah penduduk provinsi. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin provinsi dibagi dengan jumlah penduduk provinsi, dikali seratus. Angka Kemiskinan dikatakan menurun jika persentase penduduk miskin pada saat dievaluasi lebih rendah daripada persentase penduduk miskin pada tahun atau bulan yang dijadikan perbandingan. Dalam hal ini, persentase penduduk miskin pada tahun 2023 akan dibandingkan dengan tahun 2022.

Evaluasi terhadap Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 dapat digambarkan dari jumlah penduduk miskin provinsi (142.500 orang) dibagi dengan jumlah penduduk provinsi (2.504.394 orang) dengan nilai persentase 5,69%.

Hasil Evaluasi Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 dengan target 5,74% dapat tercapai sebesar 5,69% sehingga capaian kinerja sebesar 100,87% atau dalam kategori kinerja relatif **sangat baik**.

2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Digitalisasi Stunting)

Stunting adalah Keadaan gagal tumbuh dan kembang, gagal pertumbuhan tinggi badan tidak tercapai sesuai dengan anak seusianya (-2 SD Median) dimana kecerdasan intelektual dan emosional tidak tercapai dengan ciri-ciri tinggi badan lebih pendek dari seusianya, anak menjadi lebih pendiam dan apatis, tidak banyak melakukan eye contact, IQ nya rendah, pertumbuhan melambat tanda pubertasnya juga melambat, wajah tampak lebih muda dari usianya dan pertumbuhan gigi terlambat.

Indeks PB/U atau TB/U menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Indeks ini dapat mengidentifikasi anak-anak yang pendek (*stunted*) atau sangat pendek (*severely stunted*), yang disebabkan oleh gizi kurang dalam waktu lama atau sering sakit. Anak-anak

yang tergolong tinggi menurut umurnya juga dapat diidentifikasi. Anak-anak dengan tinggi badan di atas normal (tinggi sekali) biasanya disebabkan oleh gangguan endokrin. Prevalensi stunting adalah jumlah balita yang mempunyai panjang badan atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur (PB/U atau TB/U - 3 SD < - 2 SD). Untuk data prevalensi stunting didapat melalui hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dipublikasikan setiap tahun oleh Kementerian Kesehatan RI. Per tahun 2023, capaian prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau dari hasil data SSGI sebesar 15,4%. Namun untuk rincian perhitungan capaian tersebut tidak dipublikasikan.

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2023 maka persentase stunting Provinsi Kepulauan Riau baik. Prevalensi stunting Tahun 2023 ditargetkan sebesar 15,3%, dikarenakan data SKI tahun 2023 belum dipublikasikan maka capaian tahun 2023 menggunakan data SSGI tahun 2022 di mana prevalensi stunting mencapai angka 15,4%, dengan capaian kinerja sebesar 99,3% atau dalam kategori **baik**.

3. Terkendalnya tingkat inflasi daerah (Tingkat Inflasi)

Stabil dan Terkendalnya Inflasi Kepulauan Riau triwulan IV dikarenakan Inflasi yang terkendali. Hasil dari konsistensi, inovasi, dan sinergi dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Pada bulan Desember 2023, Tim Pengendalian Inflasi Daerah terus melaksanakan kegiatan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta penyaluran bahan pangan bersubsidi di berbagai Kab/Kota disertai dengan koordinasi melalui High Level Meeting (HLM) TPID yang dipimpin oleh Kepala Daerah. Penguatan sinergi juga telah dilakukan dengan lembaga/instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi pasokan yang ditandai dengan Peluncuran Mobil Pasar Keliling oleh TPID Kota Batam bersinergi dengan Asosiasi Distributor yang menjual komoditas dengan harga distributor dan menjangkau seluruh kelurahan/kecamatan. Lebih lanjut, dalam rangka memperkuat strategi

pengendalian inflasi, TPID Kepulauan Riau telah melaksanakan capacity building di tingkat kota dan kabupaten se-Provinsi Kepulauan Riau.

- Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Di Daerah

Beberapa permasalahan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan IV Tahun 2023 antara lain:

1. Kenaikan tarif angkutan udara akibat tingginya permintaan jelang libur Nataru. Angkutan udara sebesar 0,07 persen; dan angkutan laut sebesar 0,06 persen.
2. Komoditas utama penyumbang inflasi tersebut yakni kenaikan harga bayam, bawang merah, kacang panjang, dan tomat.
3. Peningkatan curah hujan dan gelombang laut yang berpotensi menurunkan pasokan ikan segar dan mempengaruhi produksi aneka cabai, sayur – sayuran.
4. Kenaikan sub kelompok rokok dan tembakau mengalami inflasi sebesar 128,95% pada Desember 2023.
5. Pakaian dan alas kaki komoditas yang dominan memberikan andil inflasi mtm, yaitu sepatu anak sebesar 0,01% tingginya permintaan jelang masuk sekolah semester baru.
6. Komoditas Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang memberikan sumbangan inflasi yaitu: sewa rumah sebesar 0,10 persen; kontrak rumah sebesar 0,09 persen; dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03 persen.
7. Komoditas Kesehatan yang memberikan sumbangan inflasi yaitu: obat-obatan dan produk kesehatan sebesar 0,80 persen; dan sub kelompok jasa kesehatan lainnya sebesar 0,17 persen.
8. Kenaikan Harga Ikan di provinsi Kepulauan Riau lantaran nelayan tidak melaut karena angin kuat, sehingga membuat stok ikan berkurang.

- Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi Di Daerah

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV tahun 2023 terkendali oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Beberapa kegiatan di triwulan IV ini terkait pengendalian inflasi sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1. Pada bulan Desember 2023, TPID telah melaksanakan kegiatan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta penyaluran bahan pangan bersubsidi di berbagai Kab/Kota disertai dengan koordinasi melalui High Level Meeting (HLM) TPID yang dipimpin oleh Kepala Daerah.
2. Inflasi yang terkendali tersebut merupakan hasil dari konsistensi, inovasi, dan sinergi dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kepulauan Riau dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
3. Penguatan sinergi juga telah dilakukan dengan lembaga/instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi pasokan yang ditandai dengan Peluncuran Mobil Pasar Keliling oleh TPID Kota Batam bersinergi dengan Asosiasi Distributor yang menjual komoditas dengan harga distributor dan menjangkau seluruh kelurahan/kecamatan.
4. TPID Kepulauan Riau telah melaksanakan capacity building di tingkat kota dan kabupaten se-Provinsi Kepulauan Riau.

- Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Di Daerah

Berapa evaluasi terkait kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :

1. Mendorong peningkatan efisiensi biaya logistik, interkoneksi antar daerah/provinsi baik melalui jalur darat maupun jalur laut sehingga dapat mendorong kelancaran arus barang dan meminimalkan disparitas harga antar daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan membuka rute

pelayaran baru maupun peningkatan kapasitas kapal pengangkut yang sudah ada sehingga akan mempersingkat waktu tempuh serta memperlancar proses pengiriman dan arus bongkar muat bahan pangan strategis.

2. Mendorong penggunaan Smart Green House untuk mengatasi masalah siklus tanam agar memperoleh produktivitas tanaman yang berkesinambungan sepanjang tahun sehingga jumlah pasokan tetap stabil.
 3. Penguatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) yakni mendorong implementasi MoU Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang sudah ada dan memperluas kerja sama dengan daerah baru lainnya dengan melibatkan BUMD/asosiasi distributor/koperasi/kelompok tani/nelayan yang dapat dilakukan melalui Forum Bussiness Matching antara produsen dan distributor.
 4. Meningkatkan extra effort pengendalian inflasi menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan sebagai upaya penguatan operasional Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023, serta sosialisasi dan koordinasi penguatan operasionalisasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023.
 5. Optimalisasi pemanfaatan APBD khususnya Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi juga success story inovasi distribusi pangan di daerah perbatasan.
 6. Mendorong perkembangan harga komoditas berupa beras, rokok kretek filter, cabai merah, emas perhiasan, sewa rumah. Upaya ini dapat dilakukan dengan menekan laju inflasi.
- Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Di Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merekomendasikan beberapa kebijakan pengendalian inflasi kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.



1. Memperkuat sinergi dan koordinasi pengendalian inflasi TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota baik jangka pendek maupun jangka Panjang dengan mengacu pada Peta Jalan (roadmap) Pengendalian Inflasi yang telah disusun, serta melakukan evaluasi secara periodik terhadap implementasi roadmap tersebut terutama untuk mengendalikan inflasi komoditas pangan.
2. TPID akan terus mengawal inflasi dengan memperkuat GNPIP. Penguatan GNPIP akan dilakukan melalui pelaksanaan HLM TPID, optimalisasi KAD, serta monitoring harga dan pasokan.
3. Memperkuat pemantauan kondisi pasokan dan harga bahan pangan di tingkat pedagang dan distributor, termasuk margin di setiap rantai distribusi terutama pada komoditas pangan strategis. Koordinasi dengan distributor perlu terus dilakukan untuk memperoleh informasi kondisi pasokan terkini dan arah harga ke depan sebagai dasar penyusunan upaya antisipasi pengendalian inflasi.
4. Meningkatkan intensitas pemantauan kondisi pasokan dan harga bahan pangan di pasar serta distributor secara intensif khususnya pada komoditas pangan strategis antara lain bayam, kangkong, telur ayam ras, cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, dan kacang panjang untuk memastikan kecukupan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan sehingga tidak melebihi ketentuan HET. Koordinasi yang lebih intensif dengan distributor juga diperlukan untuk mendapatkan informasi prospek harga dan pasokan untuk menyusun langkah antisipasi di tengah peningkatan inflasi dalam beberapa bulan terakhir.
5. Melakukan operasi pasar murah bersama distributor dan pihak lainnya khususnya untuk komoditas pangan strategis terutama aneka cabai dan telur ayam disertai dengan upaya menambah pasokan dari daerah lain yang memiliki tingkat harga lebih rendah dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau.

6. Mendorong peningkatan efisiensi biaya logistik, interkoneksi antar daerah/provinsi baik melalui jalur darat maupun jalur laut sehingga dapat mendorong kelancaran arus barang dan meminimalkan disparitas harga antar daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan membuka rute pelayaran baru maupun peningkatan kapasitas kapal pengangkut yang sudah ada sehingga akan mempersingkat waktu tempuh serta memperlancar proses pengiriman dan arus bongkar muat bahan pangan strategis.
7. Mengamankan ketersediaan pasokan, TPID berupaya meningkatkan produksi pangan lokal, mendorong dan mengoptimalkan program tanam pekarangan, meningkatkan produksi ikan budidaya air tawar dan air laut, serta pemenuhan pakan ternak dengan harga lebih terjangkau.

4. Peningkatan Investasi

Untuk mencapai sasaran meningkatnya realisasi investasi, ditetapkan dua indikator kinerja yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dengan evaluasi capaian sebagai berikut :

Tabel 2.41
Realisasi Investasi PMA dan PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	23.000 Miliar	11.308 Miliar	49,16
2	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	13.500 Miliar	8.856 Miliar	65,6

**data BKPM / Kementerian Investasi Tahun 2024*

Jumlah nilai realisasi investasi PMA tahun 2023 sebesar Rp. 11.308.680.000.000 (Sebelas Triliun Tiga Ratus Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Juta Rupiah) dari target sebesar Rp. 23.000.000.000 (Dua Puluh Tiga Triliun Rupiah) atau terealisasi sebesar 49,16% dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk realisasi investasi PMDN sebesar Rp. 8.856.600.000.000

(Delapan Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Ribu Rupiah) dari target Rp13.500.000.000.000 (Tiga Belas Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah) atau terealisasi 65,6% dari target yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026. Namun jika dibandingkan dengan target nasional yang ditetapkan oleh BKPM/Kementerian Investasi kepada Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 20,5 Triliun (gabungan PMA dan PMDN), maka nilai realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 20,1 Triliun atau sekitar 98% dari target yang ditetapkan.

- Nilai Realiasi Investasi PMA

Nilai Realisasi Investasi diperoleh dari dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang rutin dilaporkan oleh perusahaan. Setiap investor yang melakukan penanaman modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. LKPM adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi perusahaan. LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi yang dilakukan. LKPM juga mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan di setiap lokasi dan bidang usaha investasi, kecuali bidang usaha perdagangan. Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penanaman modal di bidang usaha perdagangan, LKPM cukup berdasarkan lokasi yang telah dinyatakan pada Izin Prinsip.

Dari tabel diatas diketahui realisasi investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sebesar Rp. 11.308.680.000.000, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 23.000.000.000.000 atau capaian 49,16% dari target yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026. Capaian nilai realisasi investasi PMA masih belum mampu mencapai target yang ditetapkan dikarenakan banyak rencana penanaman modal asing yang tidak terealisasi.

Tabel 2.42
Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi Investasi PMA (Rp)
2021	15.237.808.300.000
2022	13.403.492.655.000
2023	11.308.680.000.000

**data BKPM Tahun 2024*

Berdasarkan tabel diatas, terlihat realisasi investasi PMA pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 15,6% dibandingkan dengan capaian nilai realisasi investasi PMA tahun 2022 atau sekitar Rp. Rp. 2,09 Triliun. Penurunan nilai realisasi ini disebabkan sejumlah rencana penanaman modal asing di provinsi Kepulauan Riau tidak terlaksana dikarenakan berbagai alasan.

Nilai realisasi investasi PMA di Provinsi Kepulauan Riau masih didominasi oleh Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Karimun, jauh meninggalkan capaian empat kabupaten/kota lainnya. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar terjadi pemerataan realisasi investasi. Salah satu yang menjadi hambatan adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung di kabupaten Anambas, Lingga, dan Natuna. Walaupun potensi yang ditawarkan cukup tinggi, namun minimnya sarana pendukung menjadi hambatan tersendiri bagi perkembangan investasi di daerah tersebut.

- Nilai Realisasi PMDN

Sebagaimana nilai realisasi PMA, nilai realisasi PMDN juga dapat diketahui dari LKPM yang disampaikan oleh perusahaan yang berinvestasi di suatu daerah. Data akhir realisasi yang dikeluarkan oleh BKPM sebagai lembaga yang berwenang menyampaikan data investasi di Indonesia, nilai realisasi investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sebesar Rp. 8.856.600.000.000 (Delapan Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) dari target Rp. 13.500.000.000.000 (Tiga Belas Triliun

Lima Ratus Miliar Rupiah) yang ditetapkan dalam RPJMD. Adapun nilai realisasi investasi PMDN tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.43
Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi Investasi PMDN (Rp)
2021	9.768.685.700.000
2022	4.817.424.100.000
2023	8.856.600.000.000

**data BKPM Tahun 2024*

Dari tabel diatas terlihat nilai realisasi investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 45,6% atau Rp. 4,03 Triliun. Peningkatan capaian nilai realisasi investasi PMDN dikarenakan bergairahnya ekonomi dalam negeri yang ditunjang dengan berbagai fasilitas insentif penanaman modal baik dari kawasan FTZ maupun diluar FTZ.

5. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri (Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri)

Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong penggunaan anggaran pemerintah yang efektif (tepat sasaran), efesiensi, serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang jasa dan modal pemerintah. Strategi yang digunakan salah satunya adalah dengan mendominasi e-katalog pengadaan barang/jasa dengan produk buatan dalam negeri.

Berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2022, Pemerintah Daerah wajib Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada

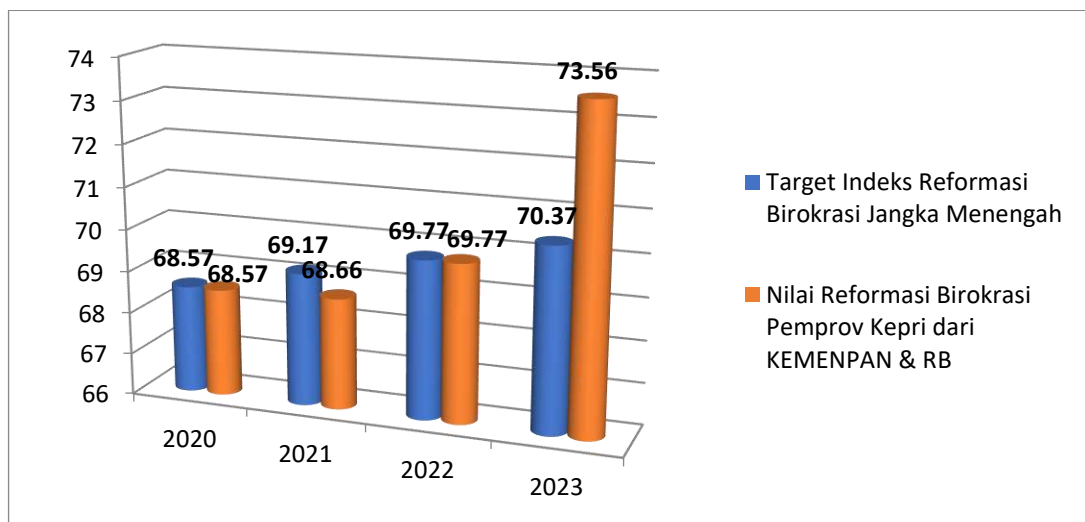
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 95% dari belanja pemerintah melalui APBD.

Target Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebesar 96,20% dari pagu Belanja Barang dan Jasa serta Modal (kecuali Modal Tanah) yaitu Rp 1.967.901.517.320, dengan capaian realisasi sebesar Rp 1.966.962.280.809 (96,16% terhadap pagu). Belum tercapainya target dikarenakan ada belanja impor sebesar Rp 165.320.511.607.

PERKEMBANGAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berikut disampaikan perkembangan capaian indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau dan target Indeks Reformasi Birokrasi sesuai yang tertuang pada dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.

Grafik 2.18
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi dan Target RPJMD Provinsi Kepulauan Riau



Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa pada tahun 2020 dan 2022 nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan yang ditargetkan oleh Target Jangka Menengah, pada tahun 2021 dan 2023 nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diatas target jangka



menengah, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai dari tahun sebelumnya.



Tabel 2.44
REALISASI ANGGARAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	
				TARGET	REALISASI
1	Terimplementasinya kebijakan penyederhanaan birokrasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Program Penataan Organisasi	81,132,000	77,738,118
2	Terimplementasikannya Kebijakan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN dengan Baik	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	Program Penataan Organisasi	105,381,200	101,346,529
3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	Program pengelolaan aplikasi informatika	161,767,902	160,204,978
		Indeks SPBE		51,009,059	49,983,051
4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegritasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Perencanaan Pembangunan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5,939,832,462	5,723,996,143
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2,372,851,990	2,288,870,888
		Nilai SAKIP	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2,372,851,990	2,288,870,888
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	86,689,600	86,652,000
			Program Penataan	75,242,000	68,268,284



NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	
				TARGET	REALISASI
			Organisasi		
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan dan Asistensi	22,148,115	22,148,115
		Tingkat Maturitas SPIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	43,408,800.00	43,408,800.00
		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	388,333,814	388,333,814
		Survei Penilaian Integritas	Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan dan Asistensi	-	-
6	Meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi	Indeks reformasi hukum	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	565,563,177	551,132,407
		Indeks kualitas kebijakan			
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik	Tingkat Digitalisasi Arsip	Program Pengelolaan Arsip	23.320.500	23.258.100
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	120,929,678	119,231,343
8	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, pengelola keuangan dan aset	Indek Tata Kelola Pengadaan	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	330,868,393	325,357,284
		Opini BPK	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	206,906,000	175,244,901
			Program Pengelolaan	1,224,267,248	1,170,965,935



NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	
				TARGET	REALISASI
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Keuangan Daerah		
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	840,992,100	817,969,200
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	567,065,400	542,330,200
9	1. Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Dan Fungsional	Sistem Merit	Program Kepegawaian Daerah	864,330,791	837,795,860
	2. Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN Yang Efektif Dan Efisien				
	3. Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja				
	4. Terwujudnya Rekrutmen Pegawai ASN yang Efektif dan efisien				
	5. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Sistem Merit Dan Sistem Manajemen ASN				
	Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN yang Memiliki Kompetensi		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,801,732,632	1,659,230,088
10	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Indeks BerAkhlak	Program Penataan Organisasi	81,225,000	79,855,912
11	Terwujudnya pelayanan publik	Survey Kepuasan	Program Penataan	136,291,102	133,649,283



NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	
				TARGET	REALISASI
	secara prima	Masyarakat (Indeks)	Organisasi		
		Indeks Pelayanan Publik (Indeks)			
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Nilai)			
		TOTAL ANGGARAN		18,440,820,453	17,712,584,021
		PERSENTASE REALISASI ANGGARAN		96.05	

Sasaran 5: Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter

Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan umur harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia diperoleh melalui hal-hal sebagai berikut:

a. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

b. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

c. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok menurut status capaiannya. Adapun pengelompokan tersebut adalah:

1. sangat tinggi: $IPM \geq 80$
2. tinggi: $70 \leq IPM < 80$
3. sedang: $60 \leq IPM < 70$
4. rendah: $IPM < 60$

Dari uraian diatas dapat kami gambarkan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepri sebagai informasi ketercapaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau 2023 :

A. Target dan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	77,14	79,08	102

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Analisis terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kinerja Indeks Pembangunan Manusia dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 77,14 pada tahun 2023 dengan capaian realisasi sebesar 79,08 indeks dan capaian kinerja sebesar 102 atau dalam **Kategori Tinggi**.

B. Perbandingan Realisasi dan capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tabel 2.47
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2023	Kenaikan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	78,48	79,08	0,6 %

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022 mencapai 79,08 meningkat 0,6 poin (0,76 persen) di bandingkan tahun sebelumnya (78,48).

C. Perbandingan Realisasi dan capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dan dan RPJMD

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target RPJMD	Capaian (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	79,08	77,14	102

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Analisis terhadap pendapatan Indeks Pembangunan Manusia dibandingkan dengan target RPJMD berdasarkan tabel di atas dapat dilihat kinerja indek Pembangunan Manusia dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 77,14 pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 79,08 Indeks dan capaian kinerja sebesar 102 %.

D. Perbandingan Realisasi dan capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dan Target Nasional

Tabel 2.49
Perbandingan Target Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Nasional	Capaian (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	79,08	73,31 - 73,49	107

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel Target Kinerja di atas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 menyatakan bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau diatas target nasional. Selama 2020-2023, IPM Provinsi Kepulauan Riau meningkat sebesar 0,59 Tahun. Peningkatan IPM Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh peningkatan dimensi penyusunannya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui umur harapan hidup saat lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui harapan lama sekolah (HRS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) dan dimensi standar hidup layak yang diukur melalui pengeluaran riil perkapita pertahun yang disesuaikan.

Dari sisi dimensi umur panjang dan hidup sehat, UHH lahir di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 74,90, artinya bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk hidup hingga 74,90 tahun, lebih lama 0,28 tahun atau mengalami kenaikan 0,3 % dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun 2022. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (LFSP2020).

Perkembangan IPM Kepulauan Riau Tahun 2020-2023 Selama empat tahun terakhir, pembangunan manusia di Kepulauan Riau terus mengalami kemajuan. IPM Kepulauan Riau meningkat dari 77,69 pada tahun 2020 menjadi 79,08 pada tahun 2023. Selama periode tersebut, status IPM Kepulauan Riau selalu berada pada status IPM “tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)” dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,59 persen per tahun.

Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Kepulauan Riau Tahun 2020-2023 IPM Kepulauan Riau tahun 2023 tumbuh 0,76 persen dibandingkan tahun 2022 dan tumbuh 1,79 persen dibandingkan tahun 2020. Peningkatan IPM Kepulauan Riau tahun 2023 didorong oleh peningkatan semua dimensi pembentuknya, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan indikator Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH); dimensi pengetahuan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), serta pengeluaran riil per kapita per tahun yang merupakan indikator dari dimensi standar hidup layak.

Grafik 2.19
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau, 2022-2023



Tabel 2.50
Perkembangan Indikator-Indikator Indeks (IPM) Kepulauan Riau, 2020-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) (tahun)	74,25	74,36	74,62	74,90
Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	12,87	12,98	12,99	13,05
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	10,12	10,18	10,37	10,41
Pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan (ribu rupiah)	14.209	14.122	14.469	14.998
IPM	77,69	77,87	78,48	79,08

Perkembangan IPM Kepulauan Riau dan indikator penyusunnya selama 2020-2023 dapat dilihat pada Grafik dan Tabel diatas. Berdasarkan data di atas

dapat dilihat bahwa hanya RLS yang mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 1,87 persen menjadi 0,39 persen. Sementara indikator lainnya mengalami percepatan pertumbuhan. HLS mengalami percepatan pertumbuhan yang cukup signifikan menjadi sebesar 0,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya 0,08 persen. UHH mengalami sedikit percepatan pertumbuhan, yaitu dari 0,35 persen menjadi 0,38 persen. Sedangkan Pengeluaran Riil per Kapita juga mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 3,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya 2,46 persen.

❑ Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup (UHH). Untuk meningkatkan kualitas data, pada tahun 2023, BPS melakukan updating sumber data UHH hasil SP2010 dengan hasil LF SP2020 yang menyediakan data parameter kependudukan terbaru. Hal ini dengan mempertimbangkan perubahan karakteristik demografi dalam 10 tahun terakhir. UHH Kepulauan Riau saat lahir terus meningkat dari tahun ke tahun. UHH Kepulauan Riau yang sebesar 74,25 pada tahun 2020, naik secara berturut-turut hingga mencapai 74,90 pada tahun 2023 yang artinya bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,90 tahun. Selama 4 tahun terakhir (2020-2023), UHH Kepulauan Riau telah meningkat sebesar 0,65 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,29 persen per tahun.

Dalam meningkatkan keberhasilan ada beberapa upaya yang dilakukan, yaitu :

- Melengkapi sarana prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau puskesmas dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Salah satunya yaitu alat USG, logistik pemeriksaan laboratorium bagi ibu, bayi, dan calon pengantin, alat stabilisasi ibu dan bayi dengan komplikasi, fasilitas dalam ambulans sebagai sarana rujukan kegawatdaruratan;

- Pelaksanaan refreshing deteksi risiko dini dan penapisan faktor risiko ibu dan bayi bagi bidan – bidan di wilayah kerja puskesmas.

Grafik 2.20
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kepulauan Riau, 2020 – 2023



Gambar 2.20
Kegiatan yang Menunjang Meningkatkan UHH Kepulauan Riau



2 Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan dibentuk oleh 2 (dua) indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Selama 4 tahun terakhir (2020-2023), HLS Kepulauan Riau rata-rata meningkat 0,46 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,95 persen per tahun. Jika dibandingkan tahun 2022, HLS Kepulauan Riau meningkat sebesar 0,06 tahun (0,46 persen) dan RLS meningkat sebesar 0,04 tahun (0,39 persen).

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

1. Ketersediaan sarana, prasarana sekolah yang mencukupi;
2. Adanya Bantuan Pendidikan untuk warga yang kurang mampu agar bisa sekolah untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan tinggi.

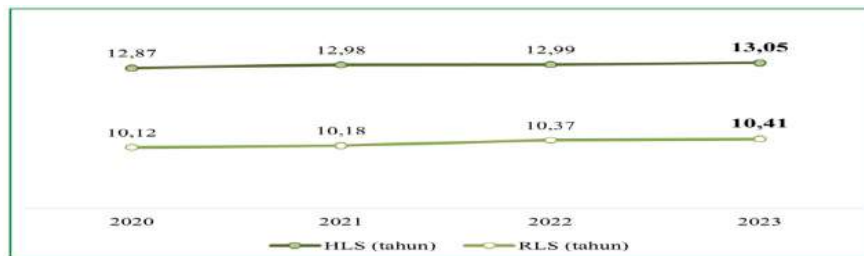
Faktor Penghambat:

Masih adanya anak putus sekolah yang disebabkan bukan karena faktor pembiayaan namun disebabkan faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak.

Solusi:

1. Akan diadakan sebuah tim unit reaksi cepat untuk pendataan anak tidak sekolah.

Grafik 2.21 **Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** **Kepulauan Riau, 2020–2023**



Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran riil per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023 pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) penduduk Kepulauan Riau mencapai Rp 14.998.000 per tahun. Dimensi standar hidup layak tahun 2023 mulai meningkat kembali, seiring dengan pemulihan ekonomi Kepulauan Riau yang terus berlanjut. Selama empat tahun terakhir (2020-2023), pengeluaran riil per kapita Kepulauan Riau telah meningkat sebesar Rp. 789.000 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,83 persen per tahun.

Grafik 2.22
Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan Kepulauan Riau (ribu rupiah)
2020–2023



Perkembangan IPM Kepulauan Riau Tahun 2020-2023 Selama empat tahun terakhir, pembangunan manusia di Kepulauan Riau terus mengalami kemajuan. IPM Kepulauan Riau meningkat dari 77,69 pada tahun 2020 menjadi 79,08 pada tahun 2023. Selama periode tersebut, status IPM Kepulauan Riau

selalu berada pada status IPM “tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)” dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,59 persen per tahun. Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Kepulauan Riau Tahun 2020-2023 IPM Kepulauan Riau tahun 2023 tumbuh 0,76 persen dibandingkan tahun 2022 dan tumbuh 1,79 persen dibandingkan tahun 2020. Peningkatan IPM Kepulauan Riau tahun 2023 didorong oleh peningkatan semua dimensi pembentuknya, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan indikator Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH); dimensi pengetahuan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), serta pengeluaran riil per kapita per tahun yang merupakan indikator dari dimensi standar hidup layak.

Grafik 2.23
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau 2020–2023



2 Realisasi Program dan Anggaran dalam Mendukung Indikator Kinerja Tahun 2023

Tabel 2.51
Realisasi Belanja berdasarkan Program Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Program Pengelolaan Pendidikan	343,849,050,681	332.123.887.540	96,59
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	183.690.074.285	177.004.165.941	96,36
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kujuruan	146.924.996.066	142.125.535.790	96,73



Pengelolaan Pendidikan Khusus	13.233.980.330	12.994.185.809	98,18
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	795.960.700	766.615.950	96,31
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	795.960.700	766.615.950	96,31
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	58.560.229.542	57.423.795.849,88	98,06
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	19.962.085.512	19.716.590.319,88	98,77
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	37.748.601.110	36.877.460.179	97,69
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	812.464.100	792.734.375	97,57
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	37.078.820	37.010.976	99,82

Sumber Data : Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIPP)

Sasaran 6: Peningkatan Mutu dan Akses Layanan Pendidikan

2 Angka Partisipasi Sekolah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Indonesia, mulai merancang berbagai gebrakan untuk kemajuan dunia pendidikan Indonesia. dengan mencetuskan sistem pendidikan bernama Merdeka Belajar. Hal ini mengacu kepada visi pendidikan Indonesia 2035 yang dirumuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Indonesia yaitu:

“Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.”

Rancangan sistem pendidikan ini terdiri dari bermacam strategi yang memasukkan peran seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menjadi agen perubahan. Mulai dari institusi pendidikan, guru, siswa, keluarga, dunia usaha / industri, serta masyarakat yang tergabung dalam organisasi penggerak, perusahaan teknologi edukasi, dan lainnya. Harapannya adalah agar terciptanya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Strategi-strategi yang disusun untuk mendukung gebrakan Merdeka Belajar ini terdiri dari 10 kebijakan pendidikan baru hasil pembaharuan dari sistem sebelumnya. 10 kebijakan tersebut tertuang dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020 – 2035.

2.3.5 Kebijakan Pendidikan Baru pada Sistem Pendidikan Merdeka Belajar:

1. Menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah (TK – SD – SMP – SMA, informal)
2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah
3. Membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi
4. Memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian
5. Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata
6. Membangun sekolah / lingkungan belajar masa depan
7. Memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan
8. Mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi
9. Membentuk pendidikan tinggi kelas dunia
10. Menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih

Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas Pendidikan.

Menurut Badan Pusat Statistik Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mendapatkan pendidikan.

Tabel 2.52
Capaian Sasaran Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan
Tahun 2023

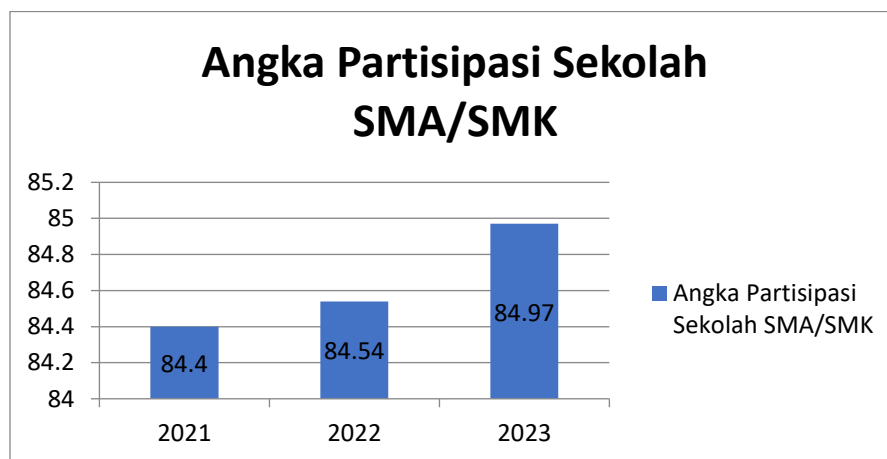
N0	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100	84,97	84,97

Sumber: Data BPS

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebesar 84,97 atau 84,97% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan **Kategori Kinerja BAIK**, Capaian 84,97% merupakan hasil dari perhitungan Jumlah Penduduk usia 16-18 tahun yang masih sekolah (79145) dibagi Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun (93145) dikali 100%. Ini berarti bahwa sekitar 84,97% Penduduk usia 16-18 Tahun di Provinsi Kepulauan Riau terdaftar dan masih aktif mengikuti pendidikan, baik di pendidikan formal maupun nonformal. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Pemenuhan Target Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Menengah sebesar 100%. Dengan belum mencapainya target APS 100% menandakan bahwa di Provinsi Kepulauan Riau masih ada sekitar 15% belum atau tidak sedang sekolah pada usia 16-18 Tahun. Kondisi ini mesti dicarikan jalan keluar agar terjadi peningkatan sehingga program wajib belajar 12 tahun dapat tercapai, meskipun saat ini Provinsi Kepulauan Riau masih mencanangkan wajib belajar 9 Tahun.

Grafik 2.24
Perbandingan Realisasi Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Tahun 2023, 2022 dan Tahun 2021



Sumber Data BPS

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK pada tahun 2023 sebesar 84,97% mengalami kenaikan 0,47 % dengan persentase capaian sebesar 84,97%, dibandingkan Realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK tahun 2022 yaitu 84,54%.

Meskipun belum mencapai target 100%, Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau, ini sebagai alat untuk melihat efektivitas program pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dan melihat capaian target pembangunan pendidikan, Peningkatan ini juga karena Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan yang sudah meningkat setiap tahunnya. Program Pemberian Bantuan Biaya Personil Peserta Didik pada tahun 2023 yang dijalankan Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau dapat mengurangi beban orang tua dalam menyekolahkan anaknya, sehingga anak tetap dapat sekolah. Meski belum mencapai target APS akan tetapi Angka Partisipasi Kasar (APK) di tahun 2023 mencapai angka 115% dan Angka Partisipasi Murni (APM) mencapai angka 92,29% meningkat pada jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK) di tahun 2023.

Grafik 2.25
Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK



Adapun program/kegiatan pendukung guna meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK sebagai berikut:

1. Pemerataaaan Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan fisik pendidikan lainnya, khususnya di wilayah yang angka partisipasinya masih rendah,
2. Pemberian Bantuan bagi siswa tidak mampu melalui bantuan transportasi darat dan laut, kompensasi SPP dan juga bantuan bagi siswa yang melaksanakan magang.
3. Melakukan koordinasi secara terus menerus baik di internal Dinas Pendidikan, maupun dengan Instansi/lembaga terkait, serta pemerintah pusat

dalam rangka mendorong pemenuhan SPM di bidang pendidikan khususnya jenjang menengah.

Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Kabupaten/Kota tahun 2021 s/d 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.53
Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Menurut Kabupaten/Kota

Wilayah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota (Persen)				
	16-18				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kepulauan Riau	82,9	84,6	84,4	84,54	84,97
Kabupaten Karimun	77,82	77,16	76,91	77,41	76,92
Kabupaten Bintan	90,8	90,20	90,36	90,42	92,54
Kabupaten Natuna	76,54	77,57	77,55	77,59	75,86
Kabupaten Lingga	79,21	80,11	79,06	79,11	80,3
Kabupaten Kepulauan Anambas	87,86	88,90	78,3	83,64	88,36
Kota Batam	81,46	84,74	79,88	82,16	85,85
Kota Tanjungpinang	90,91	91,51	85,83	88,44	87,03

Sumber: BPS Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Kabupaten Bintan pada Tahun 2023 mencapai angka 92,54% atau 4,18% lebih tinggi di bandingkan Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sebesar 88,36%. Pencapaian angka partisipasi sekolah di Kabupaten Bintan di bandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi, ini berarti Penduduk usia 16-18 Tahun di Kabupaten Bintan terdaftar dan masih aktif mengikuti pendidikan, baik di pendidikan formal maupun nonformal. Di Tahun 2023 ini Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Kabupaten Natuna memiliki Persentase yang kecil hanya sebesar 75, 56% di banding dengan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, Hal ini menunjukkan bahwa, hanya terdapat 75% penduduk yang berpartisipasi sekolah dari 100% penduduk usia 16-18 tahun di Kabupaten Natuna pada tahun 2023, ini menandakan belum meratanya akses layanan pendidikan di Kabupaten Natuna, sehingga angka partisipasi sekolahnya rendah.

Perbandingan capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.54
Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK secara Nasional

Provinsi	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Tahun 2021	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Tahun 2022	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Tahun 2023
Kepulauan Riau	84,40	84,54	84,97
Nasional	73,09	73,15	73,42

“Sumber data BPS

Berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK usia 16-18 tahun di Provinsi Kepulauan Riau masih lebih tinggi 11,55% di bandingkan capaian secara nasional. Ada beberapa kendala

yang di hadapi pada tahun 2023 dalam rangka Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau yaitu:

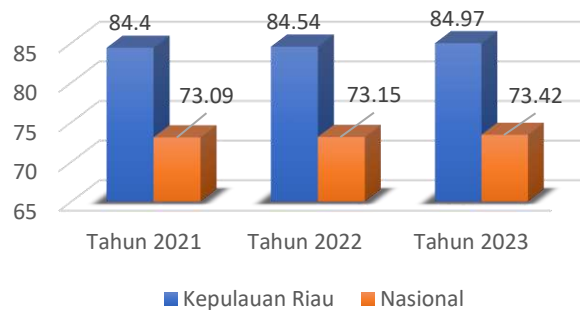
1. Faktor Geografis, yaitu jarak antar sekolah yang jauh, sehingga keterbatasan akses terhadap satuan pendidikan terutama yang ada di Pulau Pulau; hal ini bisa di lihat dengan Angka Partisipasi yang tinggi di daerah perkotaan seperti Kota Tanjungpinang dan Kota Batam;
2. Pemerataan Sarana dan Prasarana yang belum seluruhnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
3. Tingkat kesejahteraan sosial calon peserta didik, khususnya dari keluarga berpenghasilan rendah.

Beberapa hal yang di lakukan Dinas Pendidikan terkait penanganan kendala tersebut di atas yaitu:

- a. Dinas Pendidikan secara konsisten untuk memberikan Bantuan transportasi, baik laut, darat, serta bantuan magang bagi Siswa SMK.
- b. Menyediakan kelas jauh bagi peserta didik yang jauh jaraknya dengan sekolahnya.
- c. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana seperti Ruang Kelas Belajar, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dan akan dilakukan pemetaan kebutuhan Sarana dan Prasarana dan akan dilakukan program ketuntasan sesuai arahan Kemendikbudristek.
- d. Pemetaan bagi siswa yang tidak mampu, sehingga bisa masuk sekolah dengan gratis.

Grafik 2.26
Perbandingan Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Provinsi
Kepulauan Riau dan Nasional

PERBANDINGAN PENCAPAIAN APS SMA/SMK



Dukungan terhadap Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Pada Tahun 2023 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menjalankan 3 (Tiga) Program pembangunan untuk urusan pendidikan yaitu:

1. Program Pengelolaan Pendidikan, Pagu Program sebesar Rp 351.230.997.031,- dengan realisasi Rp.333.646.538.263,- atau 94,99%, yang di tunjang oleh 3 Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas pagu sebesar Rp. 196.766.454.784 dengan realisasi Rp. 188.817.370.948, - atau 95,96%.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kujuruan pagu sebesar Rp. 128.449.053.323 dengan realisasi Rp.122.147.481.924, - atau 95,09%.
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus pagu sebesar Rp. 26.015.488.924, - dengan realisasi Rp. 22.681.685.391 atau 87,19%.

2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini di tahun 2023 hanya menjalankan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi pagu Rp. 398.050.000 realisasi 337.798.946 atau 84,86%.

3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan



Pagu program ini sebesar Rp 70.000.000, - dengan realisasi Rp 62.805.140, - atau 89,72%, yang di tunjang dengan 2 Kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat pagu sebesar Rp 50.000.000, - dengan realisasi Rp 44.949.040, - atau 89,90%.
- 2) Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah pagu sebesar Rp 20.000.000, - dengan realisasi Rp 17.856.100, - atau 89,28%.

Data alokasi belanja Dinas Pendidikan Tahun 2023 berdasarkan Program terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.55
Realisasi Belanja berdasarkan Program Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Program Pengelolaan Pendidikan	351.230.997.031	333.646.538.263	94,99
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	196.766.454.784	188.817.370.948	95,96
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kujuruan	128.449.053.323	122.147.481.924	95,09
Pengelolaan Pendidikan Khusus	26.015.488.924	22.681.685.391	87,19
Program Pengembangan Kurikulum	372.946.383	298.440.180	80,02
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	297.946.383	226.444.080	76,00
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	75.000.000	71.996.100	95,99
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	398.050.000	337.798.946	84,86
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	398.050.000	337.798.946	84,86
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	70.000.000	62.805.140	89,72
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	50.000.000	44.949.040	89,90



PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	20.000.000	17.856.100	89,28

Sumber Data: Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIPP)

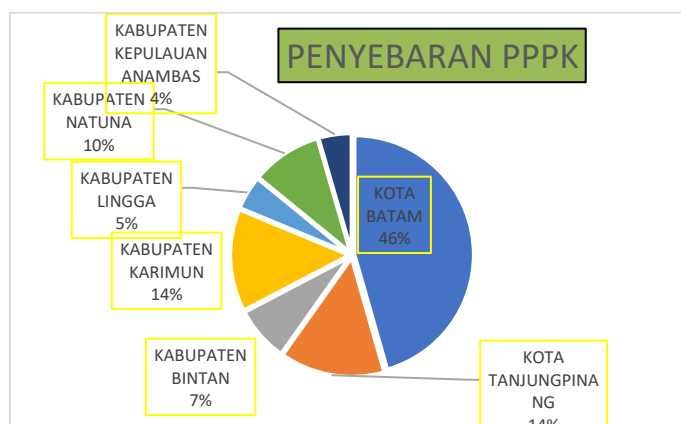
Dalam rangka upaya meningkatkan Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan melaksanakan Pemerataan tenaga pendidik dengan penerimaan PPPK di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mampu menutup lubang-lubang kekurangan tenaga pendidik, terutama di sekolah yang berada di pulau-pulau. Tahun 2023 sebanyak 667 PPPK tersebar di Kabupaten Kota se Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.56
Jumlah PPPK di Provinsi Kepulauan Riau

KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PPPK
KOTA BATAM	304
KOTA TANJUNGPINANG	95
KABUPATEN BINTAN	50
KABUPATEN KARIMUN	93
KABUPATEN LINGGA	31
KABUPATEN NATUNA	64
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	30
TOTAL	667

Data Olahan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Grafik 2.27
Penyebaran PPPK di Provinsi Kepulauan Riau



2 Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

a. Anggaran

Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dasar atas pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Target kinerja urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau, Alokasi belanja pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau bidang pendidikan mengalami kenaikan pada Tahun 2023 dibanding Tahun 2022. Kenaikan sebagai bukti nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bidang Pendidikan. Anggaran yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK bersumber selain dari APBD juga berasal dari Dana Alokasi Khusus. Anggaran yang tersedia dalam pemberian bantuan biaya personil bagi peserta didik diharapkan mampu menekan angka Putus Sekolah peserta didik hingga bisa mencapai angka partisipasi sekolah secara maksimal.

Dengan adanya anggaran bidang pendidikan diharapkan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kepulauan Riau yang indikatornya salah satunya peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK, dan juga Peningkatan anggaran sebagai upaya dalam meningkatkan Mutu dan akses layanan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau.

Penganggaran ditahun 2023 dalam mendukung peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung seperti Penambahan Ruang kelas baru mengalami penurunan karena hampir diseluruh sekolah sudah mulai tercukupi Ruang Kelas Baru di tahun 2022 membangun Ruang Kelas baru sebanyak 143 ruang sedangkan di tahun 2023 penambahan ruang kelas baru hanya sebanyak 71 ruang yang tersebar untuk jenjang Sekolah menengah Atas, sekolah menengah kejuruan dan Pendidikan khusus, ada pun dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan dinas pendidikan terus melakukan upaya Penataan dan Pendistribusian Tenaga Pendidik, dengan penambahan P3K sebanyak 667 di tahun 2023 diharapkan dapat menutup kekurangan guru guru yang ada saat ini.

b. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan Program/kegiatan dan Sub kegiatan telah dilaksanakan melalui keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan. Penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi, tim penilai, pemberi masukan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan pendidikan.

Jumlah sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan pada tahun 2023 berkurang karena adanya memasuki masa pensiun dan mutasi, namun demikian komitmen pelayanan tetap dilaksanakan, ini terbukti dengan adanya Cabang Dinas di Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna sebagai perpanjangan tangan Kepala Dinas Pendidikan dalam mengurus administrasi kependidikan. Secara umum dengan Sumber Daya Manusia yang ada saat ini berpengaruh terhadap peningkatan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan. Tingkat pengetahuan dan keterampilan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Perhatian terhadap SDM perlu ditingkatkan khususnya dalam kreativitas dan inovasi agar dapat menjamin kelangsungan Pelayanan pada Dinas Pendidikan.

c. Sarana dan Prasarana Penunjang

Ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia sudah mulai terpenuhi meskipun tidak secara keseluruhan, akan tetapi pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi pendidikan tetap berjalan dengan baik seperti pengurusan legalisir ijazah, Pengurusan Pindah rayon dan pengurusan administrasi tenaga pendidik (Guru). Di tahun 2023 Dinas Pendidikan Provinsi dalam rangka meningkatkan pelayanan telah membangun ruang pelayanan.

Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

❑ Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan masyarakat, kultur, maupun negara. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara. Kesetaraan gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Jadi kesetaraan gender bukan hanya dimaknai dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja. Sementara itu, keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Tahun 2023 masih menggunakan data tahun 2022, dikarenakan data IPG Tahun 2023 baru dikeluarkan oleh BPS Pada Agustus 2024. Capaian dari indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai berikut :

Tabel 2.56
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,30	93,50	100,21%

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan dengan diskripsi capaian terpisah antara laki-laki dan perempuan. IPG adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan dengan kriteria yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data disajikan terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Untuk mengetahui capaian kinerja meningkatnya kualitas hidup Perempuan dan anak melalui, rincian IPG Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dan tahun 2023:

Tabel 2.57
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – Tahun 2023
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,20	93,30	93,49	93,50	100,31%	100,21%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 target IPG sebesar 93,20 dengan realisasi target sebesar 93,49 serta untuk capaian 100,31%, pada tahun 2023 target sebesar 93,30 dengan realisasi target 93,50 serta untuk capaian 100,21%.

IPG digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG Kepri dalam kurun

waktu tahun 2018 - 2022 mengalami peningkatan, Berikut evaluasi realisasi indikator indeks pembangunan gender Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.58
Evaluasi Realisasi Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,97	93,10	93,31	93,49	93,50

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) disetiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,97, pada Tahun 2019 meningkat menjadi 93,10, pada Tahun 2020 menjadi 93,31, pada tahun 2021 naik kembali sebesar 93,49 dan pada tahun 2022 menjadi 93,50 jauh diatas target yang sudah ditetapkan yaitu 93,30.

Berikut rincian IPG Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022:

Tabel 2.59
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018 – 2022

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)				
		2022	2021	2020	2019	2018



1	KEPULAUAN RIAU	93.50	93.49	93.31	93.10	92.97
2	Karimun	91.12	91.00	91.25	90.91	91.48
3	Bintan	93.78	93.53	93.12	93.10	92.79
4	Natuna	91.86	91.95	91.67	91.72	91.62
5	Lingga	90.48	89.73	89.25	89.26	89.29
6	Kepulauan Anambas	91.14	90.30	90.27	90.16	90.12
7	Kota Batam	94.75	94.51	94.43	94.42	94.22
8	Kota Tanjung Pinang	97.14	97.14	96.79	96.77	96.47
9	INDONESIA	91.63	91.27	91.06	91.07	90.99

Sumber BPS, 2023

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) dalam kurung waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan capaian setiap tahunnya bahkan capaiannya melebihi capaian IPG Nasional Tahun 2023.

IPG Tahun 2023 (93,50) menunjukan kenaikan dari tahun sebelumnya (93,49). kenaikan IPG Tahun 2023 dapat dilihat pada tiga komposit pendukung IPG antara lain : Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, dan Angka Pengeluaran Perkapita.

☐ Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Tabel 2.60
Rata – Rata Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau

	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
	2021	2022	2021	2022
KEPULAUAN RIAU	10,30	10,50	10,06	10,23
Karimun	8,49	8,73	7,82	8,14
Bintan	8,95	8,97	8,56	8,68
Natuna	9,14	9,25	8,83	8,84

Lingga	7,38	7,44	6,67	6,93
Kepulauan Anambas	7,65	7,68	6,85	7,10
Kota Batam	11,34	11,36	11,04	11,05
Kota Tanjung Pinang	10,44	10,68	10,26	10,48

Sumber BPS, 2023

HLS menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang di harapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada tahun 2022 HLS penduduk laki-laki sebesar 12,85 tahun dan penduduk perempuan sebesar 13,15 tahun. Hal ini menunjukkan hampir tidak ada ketimpangan dalam hal harapan lama sekolah di Provinsi Kepri antara perempuan dan laki-laki atau juga menunjukkan bahwa hampir setaranya harapan lama sekolah bagi perempuan dengan laki-laki di Indonesia.

Dalam pembangunan suatu bangsa, pendidikan yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan yang akan menentukan arah perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dan negara. Pendidikan merupakan faktor penting dalam kemajuan pembangunan manusia karena pendidikan membawa dampak yang positif bagi kualitas manusia.

❑ Rata-rata Lama sekolah (RLS)

Indikator pembentuk IPG selanjutnya adalah RLS seperti halnya pembentuk indikator IPM. Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: (1) *partisipasi sekolah* (2) *jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki* (3) *ijazah tertinggi yang dimiliki* (4) *tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki*. Selama periode 2021 - 2023 capaian RLS penduduk laki-laki masih lebih tinggi dari capaian penduduk perempuan. Kondisi ini ditunjukkan oleh capaian yang mengalami kesenjangan.

❑ Pada indikator Pengeluaran Perkapita

Penduduk laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan capaian penduduk perempuan. Pada tahun 2021 terjadi kesenjangan pendapatan yang sangat tinggi untuk penduduk laki laki penduduk perempuan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama adalah terkait dengan kesempatan kerja dan keterampilan yang dimiliki. Untuk melihat lebih rinci capaian pengeluaran perkapita di provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.61
Pengeluaran Perkapita (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun)
di Provinsi Kepulauan Riau

	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
	2021	2022	2021	2022
Karimun	20 212	20 614	12 362	12 651
Bintan	18 830	18 830	9 615	9 947
Natuna	21 839	21 839	12 319	12 600
Lingga	21 049	21 240	11 521	11 612
Kepulauan Anambas	17 693	17 971	9 808	9 957
Kota Batam	17 083	17 338	9 173	9 304
Kota Tanjung Pinang	26 356	27 027	17 304	17 748

Sumber BPS 2023

Perbandingan target akhir RPJMD dengan capaian tahun 2023 disajikan seperti pada tabel di bawah:

Tabel 2.62
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target akhir RPJMD
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
----	-------------------	--------	-----------	--------------



1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,30	93,50	100,21%
----	---------------------------------	-------	-------	---------

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2023 maka Provinsi Kepulauan Riau masih diatas target pada akhir periode RPJMD (2023), di mana pada akhir periode RPJMD jumlah Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kepulauan Riau ditargetkan sebesar 93,30, namun terealisasi sebesar 93,50 atau dengan capaian 100,21%. Jika di bandingkan secara nasional dengan daerah lain, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2023 berada pada urutan ke- 6. Berikut data lengkap dari seluruh Provinsi se-Indonesia :

Tabel 2.63
Capaian Kinerja IPG Berdasarkan Provinsi se Indonesia Tahun 2023

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) SE-INDONESIA		
RANGKING	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2022
	INDONESIA	91.63
1	D I YOGYAKARTA	94.99
2	DKI JAKARTA	94.93
3	SULAWESI UTARA	94.89
4	SUMATERA BARAT	94.72
5	BALI	94.36
6	KEPULAUAN RIAU	93.50
7	MALUKU	93.20
8	SULAWESI SELATAN	93.14
9	NUSA TENGGARA TIMUR	92.96
10	SUMATERA SELATAN	92.95
11	JAWA TENGAH	92.83
12	ACEH	92.24
13	SULAWESI TENGAH	92.24
14	BANTEN	92.18
15	JAWA TIMUR	92.08
16	BENGKULU	91.36
17	NUSA TENGGARA BARAT	91.08
18	SUMATERA UTARA	91.06
19	SULAWESI TENGGARA	91.04
20	LAMPUNG	90.58
21	MALUKU UTARA	90.30
22	JAWA BARAT	89.80



INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) SE-INDONESIA		
RANGKING	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2022
22	SULAWESI BARAT	89.79
24	KEP. BANGKA BELITUNG	89.55
25	KALIMANTAN SELATAN	89,44
26	KALIMANTAN TENGAH	89.20
27	JAMBI	88.95
28	RIAU	88.71
29	GORONTALO	88.12
30	KALIMANTAN UTARA	87.85
31	KALIMANTAN BARAT	87.61
32	KALIMANTAN TIMUR	86.61
33	PAPUA BARAT	83.61
34	PAPUA	81.04

Capaian IPG Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 sebesar 93,50 jauh diatas angka capaian Nasional yaitu sebesar 91,63, kondisi ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat serius dalam memperhatikan kesetaraan gender dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun beberapa program pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Gender Provinsi (IPG) antara lain:

1) Meningkatkan kontribusi perempuan dalam pendapatan

Kegiatan yang dilaksanakan dari dana APBD tahun 2023 antara lain **Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi** Rp. 135.000.000,- dengan Realisasai Rp. 135.000.000,- (100%), **Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi** Rp. 450.000.000,- dengan Realisasi Rp. 440.148.300,-(97,81%). Selanjutnya kegiatan **Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota** Rp. 100.000.000,- dengan Realisasi Rp. 97.824.500,- (97,82%). Dan terakhir kegiatan **Pengembangan**



Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan

Provinsi Rp. 2.452.414.230,- dengan Realisasi Rp. 2.412.603.567,- (98,38%).

Adapun rincian program / kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat di tabel bawah ini:

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		FISIK
						Rp	%	
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat Peningkatan Kapasitas	135.000.000	135.000.000	100	100
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	450.000.000	440.148.300	97,81	100
3.	Program Peningkatan	Peningkatan Kualitas	Advokasi Kebijakan	Jumlah Pereangkat	409.350.900	400.484.795	97,83	100



	Kualitas Keluarga	Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga Untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1.872.163.302	1.842.636.220	98,42	100

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian program / kegiatan / sub kegiatan ini ialah :

- Rendahnya pendapatan ekonomi perempuan dilihat dari rendahnya angka rata-rata pengeluaran perkapita perempuan dimana hal ini dikarenakan kurangnya perempuan untuk bekerja pada sektor formal. Hal ini dikarenakan pengeluaran perkapita adalah proaksi dari pendapatan atau tingkat kesejahteraan secara ekonomi.
- Masih banyaknya perempuan yang enggan untuk mengikuti pelatihan pelatihan untuk peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas khususnya dibidang ekonomi.

Kebijakan pembangunan nasional telah menetapkan kesetaraan gender merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan yang dilihat dari Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Saat ini perempuan masih harus menghadapi berbagai ketimpangan, mulai dari mengakses, berpartisipasi, ikut menentukan arah, serta menikmati manfaat pembangunan. Hambatan yang dialami perempuan untuk mengakses layanan yang disebabkan persoalan struktur dan budaya patriarki, seperti pembatasan pendidikan perempuan serta capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah di mana saat ini laki-laki sebesar 10,30 tahun dan perempuan sebesar 10,06 tahun. inilah menjadi salah satu inisiasi peningkatan Life skill perempuan dan sekolah perempuan di Provinsi Kepulauan Riau.

2 Efektifitas dan Efisiensi Sumber Daya

Dalam upaya mencapai sasaran : Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, Dinas P3AP2KB memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 90 orang, dengan rincian 39 org pegawai PNS, 26 Org pegawai PTT dan 25 Org pegawai THL dengan struktur organisasi terdiri dari 1 org Kepala Dinas, 6 orang pejabat Eselon III, 4 org Pejabat Eselon IV atau 28 orang pejabat fungsional yang disetarakan. Pegawai PTT dan THL dilingkungan Dinas P3AP2KB disamping berada di Dinas, juga berada di UPTD PPA, Workshop dan Puspaga (Pusat Pembelanjaran Keluarga) dalam upaya pemberian perlindungan kepada perempuan dan anak, peningkatan keterampilan dan penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga.



❓ Kendala yang dihadapi

- Pembinaan dan pendampingan lebih lanjut belum optimal dilakukan terhadap peserta peningkatan kapasitas baik ekonomi maupun sosial karena terkendala dengan lingkup jangkauan dinas.

❓ Solusi

- Salah satu upaya dilakukan pemerintah selain meningkatkan life skill perempuan adalah mendorong perempuan terlibat dalam perekonomian dan membangun jejaring sosial.
- Tindak lanjut berupa dukungan sosial dan support system dari Pemerintah. Perlu peraturan-peraturan yang menguntungkan perempuan. Termasuk juga institusi atau kelembagaan-kelembagaan harus mendukung perempuan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% EFISIENSI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan gender (IPG)	93,30	93,50	100,21%	2.866.514.202,00	2.818.269.315,00	98,32	Efisien

Sasaran 8: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam UU No. 36 tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Dalam rangka terwujudnya sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat maka ditetapkan indikator kinerja yaitu Prevalensi stunting.

Stunting adalah keadaan gagal tumbuh dan kembang, gagal pertumbuhan tinggi badan tidak tercapai sesuai dengan anak seusianya, di mana kecerdasan intelektual dan emosional tidak tercapai dengan ciri-ciri tinggi badan lebih pendek dari seusianya, anak menjadi lebih pendiam dan apatis, tidak banyak melakukan *eye contact*, IQ nya rendah, pertumbuhan melambat tanda pubertasnya juga melambat, wajah tampak lebih muda dari usianya dan pertumbuhan gigi terlambat. Prevalensi stunting adalah jumlah balita yang mempunyai panjang badan atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur (PB/U atau TB/U $-3\text{ SD} < -2\text{ SD}$).

Indeks PB/U atau TB/U menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Indeks ini dapat mengidentifikasi anak-anak yang pendek (*stunted*) atau sangat pendek (*severely stunted*), yang disebabkan oleh gizi kurang dalam waktu lama atau sering sakit. Anak-anak yang tergolong tinggi menurut umurnya juga dapat diidentifikasi. Anak-anak dengan tinggi badan di atas normal (tinggi sekali) biasanya disebabkan oleh gangguan endokrin.

Stunting disebabkan oleh banyak faktor bukan hanya faktor kesehatan saja melainkan faktor multi sektor. Beberapa penyebab stunting diantaranya adalah praktek pengasuhan yang tidak baik seperti kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, bayi 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI Eksklusif dan balita tidak mendapatkan MP-ASI yang padat gizi. Selain itu, penyebab lain stunting adalah terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC (*Ante Natal Care*), Post Natal dan pembelajaran dini yang berkualitas. Studi menyebutkan bahwa 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi, menurunnya tingkat kehadiran anak di Posyandu. Kurangnya akses Ibu hamil dan Balita ke makanan bergizi seperti makanan bergizi mahal menyebabkan 1 dari 3 ibu hamil anemia. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi juga menjadi salah satu faktor penyebab stunting, data menunjukkan 1 dari 5 rumah tangga masih BAB di ruang terbuka. 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih dan cuci tangan dengan benar masih rendah.

Evaluasi capaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prevalensi Stunting	15,3	15,4*	99,3

*Catatan * : Data SSGI tahun 2022*

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2023 maka persentase stunting Provinsi Kepulauan Riau baik. Prevalensi stunting Tahun 2023 ditargetkan sebesar 15,3%, dikarenakan data SKI tahun 2023 belum dipublikasikan maka capaian tahun 2023 menggunakan data SSGI tahun 2022 di mana prevalensi stunting mencapai angka 15,4%, dengan capaian kinerja sebesar 99,3% atau dalam kategori **baik**.

Sementara itu, capaian pada indikator prevalensi stunting pada tahun 2023 apabila diperbandingkan dengan target nasional maka sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.65
Capaian Kinerja Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau berbanding target nasional Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prevalensi Stunting	16	15,4*	103,8

*Catatan * : Data SSGI tahun 2022*

Setiap tahun terjadi penurunan kasus stunting yang cukup signifikan, terlihat dengan perbandingan prevalensi stunting Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2019 – 2023. Kendala yang dihadapi dalam penanganan stunting adalah tenaga gizi terbatas, penimbangan balita masih rendah sehingga belum bisa

menjangkau *total coverage* seluruh sasaran balita, alat antropometri di Posyandu belum semua terstandar, masih terdapat Pengukuran BB dan TB yang dilakukan oleh kader yang belum terorientasi pemantauan pertumbuhan. Rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu melakukan validasi data setiap bulan melibatkan lintas program dan lintas sektor, penggerakan masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat sehingga lebih banyak balita yang datang ke Posyandu, Revitalisasi posyandu melalui orientasi kader dan peningkatan sarana prasarana posyandu seperti pengadaan antropometri kit.

Penurunan prevalensi stunting terlihat tren penurunan, hal ini bisa dilihat dari perbandingan capaian prevalensi stunting tahun 2023 sudah mencapai 15,4% dari sebelumnya tahun 2019 sebesar 16,8%. Perbandingan target dan realisasi prevalensi balita stunting di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66
Capaian Kinerja Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 – 2023

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prevalensi stunting	2019	20,8	16,8	119,4
		2020	20,3	16,8	117,3
		2021	20	16,3	118,5
		2022	15,8	15,4	102,5
		2023*	15,3	15,4	99,3

Catatan * : Data SSGI tahun 2022

Berikut jumlah prevalensi stunting di 7 kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 – 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.67
Prevalensi Stunting se- Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2023

NO	Kabupaten Kota	2021	2022	2023*
1.	KARIMUN	17,6	13,3	13,3
2.	BINTAN	20	17,8	17,8
3.	NATUNA	17,8	18	18
4.	LINGGA	25,4	18,9	18,9
5.	KEPULAUAN ANAMBAS	21,7	14	14
6.	BATAM	17,5	15,2	15,2
7.	TANJUNGPINANG	18,8	15,7	15,7
8.	PROVINSI	17,6	15,4	15,4

*Catatan * : Data SSGI tahun 2022*

Pada tahun 2023, prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau tertinggi di Kabupaten Lingga dengan capaian 18,9 % dan terendah di Kabupaten Karimun 13,3%. Apabila dilihat angka Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan semua Kabupaten/Kota mengalami penurunan, kecuali Kabupaten Natuna yang mengalami kenaikan prevalensi sebesar 0,2%. Penurunan prevalensi tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 7,7% disusul dengan lingga (6,5%) dan karimun (4,3%).

Berikut disampaikan prevalensi stunting di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2021 – 2023 :

Tabel 2.68
Prevalensi stunting di Indonesia Tahun 2022-2023

NO	Kabupaten Kota	2022	2023
1.	BALI	10,9	8
2.	DKI JAKARTA	16,8	14,5
3.	LAMPUNG	18,5	15,2
4.	KEPULAUAN RIAU	17,6	15,4
5.	DI YOGYAKARTA	17,3	16,4

6.	RIAU	22,3	17
7.	dst		
8.	INDONESIA	24,4	21,6

*Catatan * : Data SSGI tahun 2022*

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara nasional prevalensi stunting di Indonesia menetap dari tahun 2022 sebesar 21,6% menjadi 21,6% pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan data tahun 2023 masih menggunakan data SSGI tahun 2022, disebabkan belum keluarnya data SKI tahun 2023 begitu juga dengan data prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan data SSGI 2022, menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi terendah nomor 4 se-Indonesia setelah Bali, DKI Jakarta dan Lampung dalam hal prevalensi stunting. Untuk pengukuran kinerja, maka capaian prevalensi stunting Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam kategori **sangat baik** karena sudah melampaui target dengan capaian kinerja sebesar 102,6%.

Keberhasilan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau merupakan hasil dari peran aktif lintas program dan lintas sektor. Prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau dapat diturunkan dan mencapai target kinerja ditetapkan karena peran dari berbagai pihak yang turut terlibat dalam Penanganan stunting sesuai yang diamanatkan pada perpres 72 tahun 2021. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menerbitkan beberapa regulasi diantaranya SK Gubernur Nomor 901 tahun 2022 mengenai Tim Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kepulauan Riau dan Surat Edaran Gubernur nomor : B/445.4/25/DINKES-SET/2023 tentang pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan WUS.

Upaya sensitif yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas PU dan Dinas Perkim terkait penyediaan akses air bersih dan sanitasi.

- Setiap keluarga miskin harus memiliki Jaminan Sosial berupa KIS (Kartu Indonesia Sehat)
- Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas PP dan KB terkait layanan kesehatan dan KB
- Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
- Optimalisasi Pemanfaatan/Konsumsi Pangan Sayur, Buah dan Protein bersumber hewani kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan
- Kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan melalui program ketahanan pangan dan gizi.
- Meningkatkan konsumsi Ikan melalui Program Gemarikan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan

Selain upaya sensitif, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kesehatan dan jajarannya juga melakukan upaya-upaya spesifik dalam menangani permasalahan dan pencegahan stunting diantaranya.

Upaya spesifik :

- Pemberian bantuan F100 bagi balita kasus gizi buruk
- Pelacakan kasus gizi buruk dan gizi kurang bagi balita yang tidak datang ke Posyandu melalui *sweeping*
- Pemberian Suplemen Taburia pada balita stunting
- Pengadaan Antropometri Kit Dalam Rangka Pemantauan Pertumbuhan
- Perawatan kasus gizi buruk di Puskesmas dan Rujukan ke Rumah Sakit *serta* Pemantauan kasus gizi buruk pasca perawatan (*Follow up*)
- Distribusi dan Pemberian PMT lokal bagi Ibu Hamil dan Balita gizi kurang
- Konseling pada keluarga melalui kunjungan rumah
- Program 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) berupa pemberian tablet Fe (zat besi) pada Ibu Hamil, IMD, ASI Eksklusif, MP-ASI
- Pemberian tablet Fe kepada Remaja putri dengan konsumsi 1 tablet perminggu sepanjang tahun.

- Konseling pra nikah kepada calon pengantin dengan berkerjasama dengan KUA
- Integrasi program KIA – Gizi melalui Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita
- Sosialisasi Gerakan AKSI BERGIZI di sekolah melalui media massa dan elektronik.

Kedepannya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga akan terus mengupayakan agar upaya preventif dalam pencegahan stunting melalui perbaikan status gizi remaja putri, calon ibu, ibu hamil dan Balita. Sehingga semakin dini stunting dideteksi maka penanganan akan semakin mudah.

2 Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Jumlah total anggaran pada Dinas Kesehatan tahun 2023 termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Rp. 96.908.433.378,00.- (Sembilan Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)

Tabel 2.69
Realisasi Keuangan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023
yang Menunjang Penurunan Prevalensi Stunting
Provinsi Kepulauan Riau

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	KET
1	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.341.789.900	1.162.564.734	86,6	
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.082.580.000	1.015.933.115	93,8	
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	333.079.000	332.266.500	99,7	
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.613.046.539	1.597.826.450	99,0	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	KET
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				
			Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.405.850.400	1.379.226.940	98,1	
			Total Anggaran	5.776.345.839	5.487.817.739	95,0	Efisien

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis “meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” melalui pelaksanaan Program/kegiatan dalam upaya menurunkan prevalensi stunting per tahun 2023 sebesar Rp. 5.776.345.839,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.487.817.739,- atau 95,0%. Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, sebagai berikut :

1. Anggaran :

Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dari alokasi anggaran yang terserap, sebagaimana tercatat pada tabel diatas mampu terserap sebesar 95,0% dengan kategori efisien. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan seperti peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan dan kader posyandu, pelaksanaan promosi kesehatan untuk penurunan stunting melalui berbagai media, pemberian obat gizi dan suplemen bagi ibu hamil/menyusui serta pencegahan anemia bagi remaja putri, pengadaan antropometri kit dan sebagainya. Untuk anggaran yang tidak terserap dikarenakan adanya perubahan Kurikulum Modul Pelatihan dari Kementerian Kesehatan RI sehingga menyebabkan sisa anggaran pada honorarium pelatih dan biaya lainnya, selain itu juga terdapat peserta dari kabupaten/kota yang tidak hadir

serta transportasi Anambas yang awalnya menggunakan pesawat berubah menggunakan angkutan laut.

2. SDM :

Jumlah SDM di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang terlibat untuk penurunan prevalensi stunting berada dibawah Bidang Kesehatan Masyarakat namun untuk pelaksanaannya mencakup lintas bidang, sedangkan untuk pelaksanaan di Kabupaten/Kota didukung oleh tenaga gizi, bidan, perawat, penyuluh kesehatan dan melibatkan peran semasyarakat melalui kader posyandu.

Sasaran 9: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar

❏ Rasio Elektrifikasi

Berikut dapat dilihat capaian kinerja Percepatan Infrastruktur Dasar dengan indikator Rasio Elektrifikasi tahun 2023:

Tabel 2.70
Capaian Kinerja Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar
Rasio Elektrifikasi Tahun

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian
1	Rasio Elektrifikasi	96 Rasio	97,99 Rasio	102 Rasio

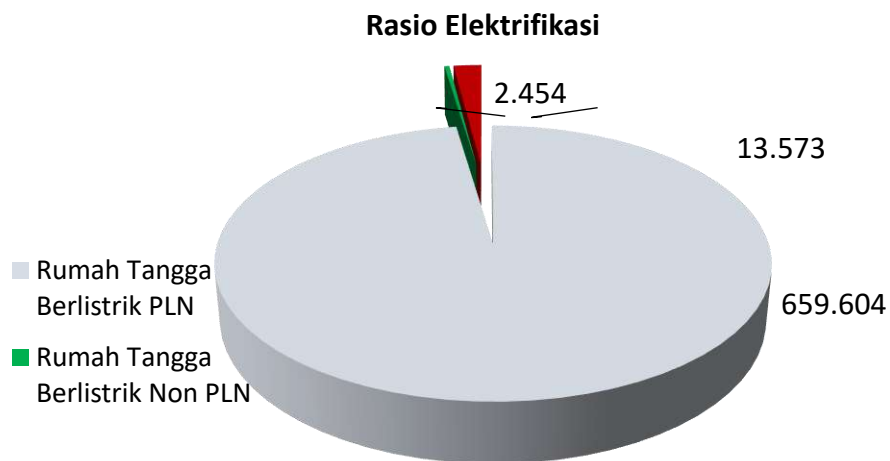
Evaluasi terhadap persentase rasio elektrifikasi tahun 2023 dapat digambarkan jumlah rumah tangga yang memakai tenaga listrik (baik dari PLN maupun Non PLN) sebesar 662.058 RT dibagi dengan jumlah rumah tangga Provinsi Kepulauan Riau sebesar 675.631 RT= 97,99%. Hasil analisis Rasio Elektrifikasi pada tahun 2023 dengan target sebesar 96 Rasio dapat tercapai sebesar 97,99 Rasio sehingga capaian kinerja sebesar 102 Rasio atau dalam kategori **kinerja Sangat Baik**.

Penambahan yang sangat signifikan ini disebabkan meningkatnya penyambungan listrik kepada masyarakat oleh PT. PLN (Persero) dengan terlaksananya beberapa program ketenagalistrikan seperti kegiatan Bantuan Penyambungan Listrik (BPBL) bagi Rumah Miskin, kegiatan pengadaan mesin genset, kegiatan peningkatan mutu layanan listrik kepada masyarakat serta adanya kegiatan penambahan pembangunan ketenagalistrikan dari PT. PLN (Persero) di beberapa daerah di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau. Keberhasilan pencapaian Sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dan Program Energi Baru Terbarukan dengan kegiatan, yaitu:

1. Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, berupa bantuan pemasangan instalasi listrik baru kepada masyarakat tidak mampu yang tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang belum berlistrik, dan
2. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan dengan melakukan pengadaan dan pemasangan serta pengadaan pembangkit listrik tenaga diesel (Genset) di pulau-pulau yang belum berlistrik.
3. Pelaksanaan konservasi energi di wilayah Provinsi dengan melakukan penyusunan peraturan daerah tentang rencana umum energi daerah yang membahas mengenai rencana penggunaan energi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Capaian kinerja dibidang ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan dengan jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik PLN, rumah tangga yang menggunakan listrik Non-PLN (baik yang diadakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, swasta) dan rumah tangga yang belum menggunakan listrik ditampilkan sebagai berikut :

Grafik 2.28
Kondisi Rasio Elektrifikasi Tahun 2023



Untuk kondisi rasio elektrifikasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan sebagai berikut:

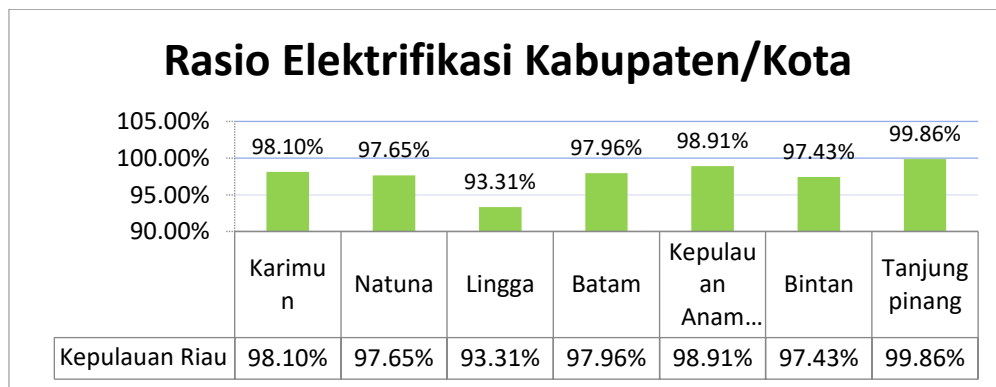
Tabel 2.71
Data Rasio Elektrifikasi
Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga Berlistrik				Rumah Tangga Belum Berlistrik	RE (%)
			PLN	Non-PLN	LTSHE	Jumlah		
1	Karimun	83.237	81.519	139	-	81.658	1.579	98,10%
2	Natuna	24.932	24.347	-	-	24.347	585	97,65%



3	Lingga	30.944	28.662	211	-	28.873	2.071	93,31%
4	Batam	369.796	360.392	1.815	63	362.270	7.526	97,96%
5	Kepulauan Anambas	15.203	15.017	20	-	15.037	166	98,91%
6	Bintan	58.866	57.145	206	-	57.351	1.515	97,43%
7	Tanjungpinang	92.653	92.522	-	-	92.522	131	99,86%
Total Provinsi Kepri		675.631	659.604	2.391	63	662.058	13.573	97,99%

Grafik 2.29
Rasio Elektrifikasi
Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023



Keterangan:

1. Jumlah Rumah Tangga Berlistrik PLN berdasarkan Data Unit Layanan Pelanggan PT. PLN (Persero) UP3 Tanjungpinang dan Pemegang Wilayah Usaha Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Jumlah Rumah Tangga Berlistrik Non PLN berdasarkan wilayah yang mendapatkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan pembangkit listrik tenaga surya secara Komunal baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berikut realisasi serta capaian kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2023:

Tabel 2.72
Realisasi dan Capaian Kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2023

Indikator kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian
Rasio Elektrifikasi	95,5 Rasio	96,32 Rasio	101 Rasio	96 Rasio	97,99 Rasio	102 Rasio

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi dan capaian kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 ke tahun 2023 terdapat peningkatan yaitu pada tahun 2022 dengan target 95,50% terealisasi sebesar 96,32% dengan persentase capaian 101%, sedangkan pada tahun 2023 realisasi meningkat menjadi 97,99 Rasio dari target sebesar 96 Rasio dengan persentase capaian sebesar 102 Rasio.

Adapun perkembangan Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

Tabel 2.73
Evaluasi Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018-2022

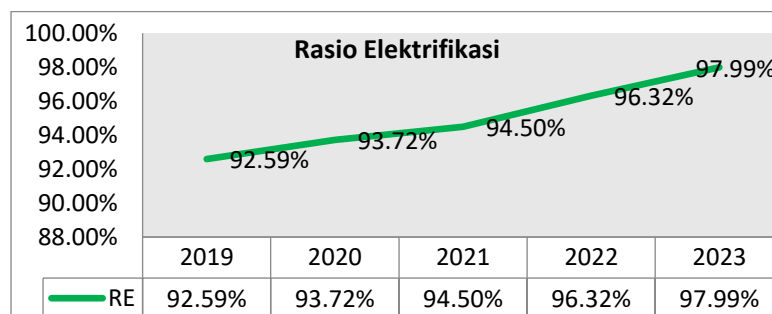
No	Indikator kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Jumlah Pelanggan Rumah Tangga (RT)	539.421	628.596	635.593	650.793	662.058

2	Jumlah Rumah Tangga (RT)	582.570	670.701	672.614	675.631	675.631
3	Rasio Elektrifikasi	92,59%	93,72%	94,50%	96,32%	97,99 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan rasio elektrifikasi dari tahun 2019 ke tahun 2023. Pada tahun 2019 realisasi rasio elektrifikasi sebesar 92,90%, pada tahun 2020 meningkat menjadi 93,72%, lalu pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 94,50%, tahun 2022 juga meningkat menjadi 96,32%, tahun 2023 kembali meningkat menjadi 97,99%.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2019-2023 dapat digambarkan seperti grafik dibawah ini :

Grafik 2.30
Pencapaian Realisasi Kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2019-2023



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan Rasio Elektrifikasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2019 Rasio Elektrifikasi sebesar 92,59% sedangkan sampai dengan tahun 2023 meningkat menjadi 97,99 Rasio maka ada peningkatan sebesar 5,42%.

Dalam rangka peningkatan cakupan pemenuhan kebutuhan listrik dan meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat beberapa kendala yaitu:

1. Kondisi geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil dan jarak antara pulau yang terpisah jauh dan keterbatasan anggaran baik di PT. PLN (Persero), Pemerintah Pusat maupun APBD.
2. Rumah tangga yang berada dalam satu pulau kecil juga masih tersebar dengan jumlah rumah tangga yang terbatas sehingga membutuhkan biaya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang cukup besar.
3. Adanya peraturan pemerintah yang meminta untuk melakukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berbasis energi bersih sehingga juga membutuhkan biaya investasi yang cukup besar.

Berdasarkan kendala tersebut diatas, upaya yang dilakukan diantaranya yaitu:

1. Melakukan pengadaan pembangkit dengan kapasitas kecil pada pulau-pulau dengan jumlah penduduk yang terbatas serta berada pada satu kawasan yang terpusat serta melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan pemerintah daerah setempat, tokoh masyarakat, alim ulama dan pemilik lahan yang akan dihibahkan atau jalur yang dilalui jaringan distribusi.
2. Melakukan kerjasama dengan PT. PLN (Persero) untuk melakukan serah terima operasi mesin-mesin genset aset pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat melakukan pelayanan ketenagalistrikan kepada masyarakat secara maksimal serta bekerjasama untuk melakukan *supporting system* pembangkit pada pulau-pulau yang telah dibangun pembangkit listrik tenaga surya oleh PT. PLN (Persero).

Berdasarkan laporan capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023, nilai Rasio Elektrifikasi nasional adalah sebesar 99,78%. Nilai tersebut lebih tinggi dari capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau disebabkan dari

kegiatan perluasan jaringan distribusi yang tidak dapat dilaksanakan pada kondisi daerah kepulauan.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja:

A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

1. Anggaran

Realisasi Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 sebesar 96,4 % dengan realisasi fisik secara keseluruhan sebesar 100%.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia/personil pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau telah cukup memadai dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

B. Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan.

Program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dalam menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Rasio Elektrifikasi sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dengan Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Rp. 5.716.057.448,- terealisasi Rp. 5.522.252.106 (96,61%) pada sub kegiatan :
 - Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu.
 - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.
2. Program Pengelolaan Energi Terbarukan dengan Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi dengan pagu Rp. 1.708.940.730,-, terealisasi Rp. 1.038.102.478,- (99,27%).

❏ **Pengurangan Luas Kawasan Kumuh**



Pengurangan Luas Kawasan Kumuh merupakan Pengurangan Luas Total Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi dikurangi Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang ditangani pada Tahun n (Tahun Berjalan). Berikut diinformasikan Luas Kawasan Kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan RPJMD 2021-2026:

NO	KOTA/KAB	SK TERAKHIR	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA SK	LUAS KUMUH (HA)
1	BINTAN	435/IX/2014	BINTAN UTARA	TANJUNG UBAN KOTA	13.60
SUB JUMLAH				1	13.60
1	LINGGA	17/KPTS/I/2017	LINGGA	PANGAK LAUT	10.02
2	LINGGA	17/KPTS/I/2017	SINGKEP BARAT	MAROK TUA	13.30
SUB JUMLAH				2	23.32
1	BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	BULANG	PANTAI GELAM	12.38
2	BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	BULANG	TEMOYONG	14.88
3	BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	BULANG	BATU LEGONG	12.18
4	BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	SAGULUNG	SAGULUNG KOTA	10.70
5	BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	BATAMKOTA	BALOI PERMAI	11.67
6	BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	SEKUPANG	SUNGAI HARAPAN	12.60
7	BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	SEKUPANG	TANJUNG PINGGIR	10.84
8	BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	BATUAMPAR	BATU MERAH	14.60
SUB JUMLAH				8	99.85
1	TANJUNGPINANG	594 Tahun 2019	BUKIT BESTARI	TANJUNGPINANG TIMUR	11.79
2	TANJUNGPINANG	594 Tahun 2019	BUKIT BESTARI	DOMPAK	11.16
3	TANJUNGPINANG	594 Tahun 2019	TANJUNGPINANG TIMUR	KAMPUNG BULANG	10.82
SUB JUMLAH				3	3.77
	TOTAL			14	170.54

Berikut uraian Pengurangan Luas Kawasan Kumuh yang terealisasi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.74
Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja



Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
Percepatan Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	123,73 Ha	135,07 Ha

Hasil evaluasi Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Tahun 2023 dengan target 123.73 Ha hanya terealisasi sebesar 135.07 Ha, sehingga Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Tahun 2023 hal ini belum mencapai target. Dibandingkan dengan tahun 2022 Luas Kawasan Kumuh mengalami pengurangan dari 147.24 Ha menjadi 135.07 Ha, ditahun 2023 Luas Kawasan Kumuh hanya berkurang sebesar 12.17 Ha. Sehingga capaian kinerja Indikator Pengurangan Luas Kawasan Kumuh tahun 2023 hanya sebesar 51.77 % atau dalam kategori kinerja “CUKUP”.

Tabel 2.75
Data Capaian Akuntabilitas Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran berjalan

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Realisasi Kinerja			Target RPJMD	Standar Nasional
			2021	2022	2023		
(5.1.1) Percepatan Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	123,73 Ha	381,45 Ha	147,24 Ha	135.07 Ha	170.54 Ha	10.000 Ha

Luas Kawasan Kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan RPJMD 2021-2026 adalah seluas 170,54 Ha yang merupakan kondisi tahun dasar. Pada Tahun anggaran 2022 sudah terealisasi pengurangan seluas 23.30 Ha menjadi 147.24 Ha dari 170.54 Ha. Sedangkan yang diharapkan berkurang pada Tahun 2022 menjadi seluas 145.27 Ha atau berkurang

seluas 25.27 Ha, sehingga Persentase capaian kinerja pengurangan luas kawasan kumuh pada Tahun 2022 sebesar $(23.30 \text{ Ha} : 25.27 \text{ Ha}) \times 100\% = 92.20\%$.

Pada Tahun 2023 pengurangan luas kawasan kumuh ditargetkan menjadi seluas 123.73 Ha dan/atau ditargetkan berkurang 23.51 Ha dari realisasi pengurangan luas kawasan kumuh tahun sebelumnya (147.24 Ha - 123.73 Ha). Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023, realisasi pengurangan luas kawasan kumuh sebesar 12.17 Ha atau menjadi 135.07 Ha (147.24 Ha - 12.17 Ha), sehingga Persentase capaian kinerja pengurangan luas kawasan kumuh pada Tahun 2023 sebesar $(12.17 \text{ Ha} : 23.51 \text{ Ha}) \times 100\% = 51.77\%$.

Realisasi pengurangan luas kawasan kumuh yang telah ditangani oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan saat ini seluas (23.30 Ha + 12.17 Ha = 35.47 Ha), persentase capaian kinerja pengurangan luas kawasan kumuh yang telah ditangani sampai dengan tahun 2023 seluas 20.80% (35.47 Ha : 170.54 Ha = 20.80%) dari 170.54 Ha. Sedangkan persentase capaian kinerja pengurangan luas kawasan kumuh secara Nasional yang telah ditangani sampai dengan tahun 2023 seluas 0.35% (35.47 Ha : 10.000 Ha = 0.35%) dari 10.000 Ha.

Berikut perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Tahun 2023 dan Tahun 2022:

Tabel 2.76
Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	147.24 Ha	92.20%	135.07 Ha	51.77%

Berdasarkan capaian realisasi kinerja Tahun 2022 maka indikator kinerja Pengurangan Luas Kawasan Kumuh mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.77
Perbandingan Target dan Realisasi Kineja Tahun 2022-2023

Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	145.27 Ha	147.24 Ha	123.73 Ha	135.07 Ha

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi dari Tahun 2022 ke Tahun 2023. Pada Tahun 2022 Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi sebesar 23.30 Ha sedangkan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 12.17 Ha. Adapun Penanganan Kumuh pada setiap Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.78

No	Kabupaten/ Kota	SK. Terakhir	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Luas Kumuh (Ha)	Realisasi Tahun 2023	
						Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Anggaran Penanganan Kumuh (Rp)
1	Kota Batam	KPTS.290/HK/X/2019	Sagulung	Sagulung Kota	10,70	4,41	1.478.598.000,00
			Batamkota	aloi Permai	11,67	2,24	749.391.000,00
			Sekupang	Sungai Harapan	12,60	1,79	599.469.000,00
Jumlah						8,44	2.827.458.000,00
2	Kota Tanjungpinang	594 Tahun 2019	Bukit Bestari	Dompok	11,16	2,71	908.480.000,00
			anjungpinang	Kampung	10,82	1,01	339.596.000,00



			Timur	Bulang			
Jumlah						3,73	1.248.076.000,00
Jumlah Realisasi Pengurangan Dan Anggaran Penanganan						12,17	4.075.534.000,00

Lokasi Dan Realisasi Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Tahun 2023

Diharapkan kedepan lebih memperhatikan alokasi anggaran dan titik lokasi kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, serta perhatian dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang sangat mendukung keberhasilan dalam penanganan pengurangan luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Penanganan permukiman kumuh dilakukan pada lokasi permukiman kumuh yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota, berdasarkan penilaian indikator dan kriteria kumuh yang tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dapat dilihat perbandingan realisasi capaian indikator kinerja Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dengan target nasional pada tabel berikut :

Tabel 2.79
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional

Indikator	Target Nasional	Realisasi Kinerja Provinsi	Capaian Kinerja
Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	10.000 Ha	135.07 Ha	1.35%

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat 2024, salah satunya menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 4,4% (menjadi 10.000 ha).

- ❑ Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan realisasi kinerja;

Dalam pengurangan luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dapat terealisasi antara lain terdapat di Sagulung Kota, Baloi Permai dan Sungai Harapan di Kota Batam seluas 8,44 Ha dan Dompok dan Kampung Bulang di Kota Tanjungpinang seluas 3,73 Ha, belum tercapainya target kinerja indikator pengurangan luas kawasan kumuh di Provinsi Kepulauan Riau disebabkan oleh belum adanya kesesuaian anggaran untuk pengurangan luas kawasan kumuh.

Pada tahun berjalan terdapat revisi keputusan kepala daerah kabupaten/kota tentang luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yang sebelumnya seluas 170,54 Ha menjadi 374,68 Ha, sehingga pada Tahun 2024 dengan luas 374,68 merupakan kondisi tahun dasar pada Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026. Harapan kedepan kepada pemangku kepentingan agar dapat mengalokasikan anggaran yang khusus diperuntukkan pengurangan luas kawasan kumuh dan/atau anggaran yang ada dapat diarahkan dengan baik dalam pengurangan luas kawasan kumuh yang merupakan tujuan indikator daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, pengurangan luas Kawasan kumuh dapat dilakukan dengan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan dengan perizinan, standar teknis dan kelayakan fungsi.

Keseuaian standar teknis dan kelayakan fungsi dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis, antara lain :

- a. Bangunan Gedung;
 - b. Jalan lingkungan;
 - c. Penyediaan air minum;
 - d. Drainase lingkungan;
 - e. Pengelolaan air limbah;
 - f. Pengelolaan persampahan; dan
 - g. Proteksi kebakaran.
- ☐ Alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Meninventarisasi kembali paket-paket pekerjaan fisik yang berada pada Program Peningkatan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) pada oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau terutama pada titik-titik lokasi yang berada di kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2023.
- ☐ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan beserta besaran anggaran pendukung;
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman di Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman, yang memberi dampak pada pengurangan luas kawasan kumuh, melalui paket-paket pekerjaan fisik di titik-titik lokasi yang berada di kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- ☐ Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya;
- Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dari alokasi anggaran yang terserap, sebagaimana tercatat pada tabel diatas merupakan paket-paket pekerjaan fisik yang berada pada Program Peningkatan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) terutama pada titik-titik lokasi yang berada di kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi

pada Tahun Anggaran 2023. Sedangkan Program Kawasan Permukiman pada kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dan kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, belum bisa merealisasikan pengurangan luas kawasan kumuh pada titik lokasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Penggunaan sumber daya manusia di lingkungan internal jumlah Sumber Daya Manusia/Personil terkait tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau cukup memadai dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, berjumlah 91 (sembilan puluh satu) orang, yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) orang ASN, 22 (dua puluh dua) orang PTT dan 37 (tiga puluh tujuh) orang THL.

Upaya eksternal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau yang perlu dilakukan adalah memberikan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk pembinaan pencegahan kelompok agar potensi Kawasan permukiman kumuh tidak bertambah dan menjadi Kawasan Kumuh.

Dokumentasi dalam mendukung capaian akuntabilitas kinerja Tahun 2023 antara lain sebagai berikut;







Sasaran
Penginta

2 Rasio Konek
Indika

struktur dan

faktor kinerja

angkutan darat, angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) pada provinsi.
Berikut ini adalah data jumlah layanan trayek angkutan darat (Angkutan



Perkotaan dan AKDP) dan Lintas angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) pada provinsi.

Tabel 2.80
Data Trayek Angkutan Darat Dalam Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

No	Trayek Angkutan Darat
1	Tanjungpinang – Tanjung Uban (Kab. Bintan)
2	Tanjung Uban (Kab. Bintan) – Tanjungpinang
3	Tanjungpinang – Berakit (Kab. Bintan)
4	Berakit (Kab. Bintan) – Tanjungpinang
5	Tanjungpinang – Kijang (Kab. Bintan)
6	Kijang (Kab. Bintan) – Tanjungpinang

Tabel 2.81
Data Lintasan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2023

NO	Lintas Penyeberangan
1	Dabo – Kuala Tungkal
2	Dabo – Penarik
3	Matak - Midai
4	Midai - Penagi
5	Penagi - Subi
6	Serasan - Sintete
7	Subi - Serasan



NO	Lintas Penyeberangan
8	Tambelan – Sintete
9	Tanjung Balai Karimun – Mengkapan Sei. Selari
10	Tanjung Balai Karimun - Kundur
11	Dabo - Tanjungpinang
12	Tanjung Pinang – Tanjung Balai Karimun
13	Tanjung Uban – Matak
14	Tanjung Uban – Tambelan
15	Tanjung Uban – Telaga Punggur
16	Batam - Jakarta
17	Batam - Medan
18	Telaga Punggur – Dabo
19	Telaga Punggur – Kuala Tungkal
20	Telaga Punggur – Mengkapan Sei Selari
21	Tanjung Balai Karimun – Telaga Punggur

Berdasarkan data trayek dan lintas angkutan diatas maka indikator rasio konektivitas pada tahun 2023 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio konektivitas
Rumus	:	$\text{Rasio konektivitas} = (\text{IK1} \times \text{bobot angkutan jalan}) + (\text{IK2} \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi



	x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut) • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) : • Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKDP • Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKDP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) : • Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil • Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan atau: 1) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingdibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutanjalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan
--	---



	lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas : 1) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 2) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 3) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5
--	--

Tabel 2.82
Realisasi Trayek / Lintas Angkutan Tahun 2023

No	Trayek/Lintas	Tahun 2023		Bobot Lintas	Bobot Angkutan	Kebutuhan s/d Tahun 2026
		Target	Realisasi			
1	Trayek Angkutan Jalan	6	6	1	30%	10
2	Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	21	21	0,5	70%	24

	(jumlah trayek yang dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi)			(IK1 x bobot angkutan jalan)		Persentase Akhir IK1
IK1	=	$\frac{6 \times 1}{10}$	=	0,6	X	30%
					=	18 rasio



	(jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi)	IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Persentase Akhir IK2
IK2	$= \frac{21 \times 0,5}{24} = 0,4375$	X 70%	= 30,625 rasio

$$\text{Rasio Konektivitas} = \text{IK1} + \text{IK2} = 18 \text{ rasio} + 30,625 \text{ rasio} = 48,63 \text{ rasio}$$

Tingkat Capaian Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.83
Tingkat Capaian Kinerja Rasio Konektivitas
Tahun 2023

No	Indikator kinerja	Target (rasio)	Realisasi (rasio)	Capaian (%)
1	Rasio Konektivitas	44,25	48,63	109

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 target capaian indikator Rasio Konektivitas Kepulauan Riau pada tahun 2023 ditetapkan sebesar adalah 44,25 rasio maka tingkat capaian indikator tersebut adalah 109% sehingga capaian kinerja dalam kategori **kinerja sangat baik**.

Berikut data capaian sasaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau dengan indikator sarannya yaitu rasio konektivitas tahun sebelumnya tabel berikut :

N	Trayek/Lintas	Tahun 2022	Bobot	Bobot	Kebutuha
---	---------------	------------	-------	-------	----------



o		Target	Realisasi	Lintas	Angkutan	n s/d Tahun 2026
1	Trayek Angkutan Jalan	6	6	1	30%	10
2	Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	21	21	0, 5	70%	24

Dihitung dengan menggunakan rumus rasio konektivitas di atas maka didapatkan rasio sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.84
Data Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2023

No	Indikator kinerja	Target (rasio)	Realisasi (rasio)	Tingkat Capaian
1	Rasio Konektivitas	44,25	48,63	109%

Pada tabel berikut terdapat peningkatan capaian realisasi atas indikator kinerja rasio konektivitas dari Tahun 2022 ke Tahun 2023. Pada Tahun 2023 realisasi rasio konektivitas sebesar 48,625, sehingga tingkat capaian pada tahun 2023 melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu mencapai persentase sebesar 109% atau dalam kategori sangat baik.

Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja rasio konektivitas pada tahun 2021 dan tahun 2023 dapat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.85

**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2021,
2022 dan Tahun 2023**

TAHUN	Indikator kinerja	Target (rasio)	Realisasi (rasio)	Tingkat Capaian
2021	Rasio Konektivitas	38,4 2	38,42	100 %
2022	Rasio Konektivitas	41,3 3	44,25	107 %
2023	Rasio Konektivitas	44,2 5	48,63	109 %

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan sasaran “Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau” dengan indikator kinerjanya “rasio konektivitas” dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021- 2026. Sedangkan pada tingkat Nasional menetapkan indikator kinerja rasio konektivitas nasional (khususnya angkutan darat) pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 73,5 rasio.

Tabel 2.86
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Tingkat
Nasional dengan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023**

URAIAN	Indikator kinerja	Realisasi
Nasional	Rasio Konektivitas	73,5 rasio
Provinsi Kepulauan Riau	Rasio Konektivitas	48,63 rasio
Tingkat Capaian Provinsi dibanding Nasional		66,15%

Di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 telah ditetapkan sasaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau” dengan indikator kinerjanya “rasio konektivitas”. Berdasarkan

RPJMD tersebut sampai dengan tahun 2026 target rasio konektivitas ditetapkan sebesar 65 rasio pada tahun 2023 telah tercapai 48,625 rasio atau sudah tercapai 74,80% dari target akhir RPJMD.

Tabel 2.87
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target akhir RPJMD

N o	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Realisasi	Capaian
1	Rasio Konektivitas	65 rasio	48,625 rasio	74,80%

Keberhasilan dalam mencapai target indikator yang ditetapkan tidak terlepas dari dukungan program/kegiatan untuk mencapai target tingkat capaian kinerja rasio konektivitas pada tahun anggaran 2023 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Riau. Maka Dinas Perhubungan telah membuat Rencana Kerja Tahun 2023 dengan merencanakan melaksanakan program/kegiatan yaitu:

- ❑ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi
 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi
 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- ❑ Program Pengelolaan Pelayaran, dengan kegiatan sebagai berikut:



- Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi
 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional
 - Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan
 - Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
- 2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan sebagai berikut :
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Pendapatan Kewenangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dibagi atas dua aspek, aspek pertama yaitu kinerja pembangunan yang dinilai melalui

pencapaian sasaran strategis dengan capaian sebesar 100%, sedangkan aspek yang kedua yaitu kinerja keuangan yang dinilai dari tingkat penyerapan dana dari jumlah pagu anggaran yang disediakan untuk mencapai indikator kinerja sesuai program dan kegiatan yang ditetapkan adalah sebesar Rp 83.447.260.359,- dengan capaian realisasi keuangan Rp 78.278.152.059,- atau sebesar 93,81%. Realisasi Keuangan ini dibawah target yang ditetapkan dikarenakan pada 31 Desember 2023 terdapat pekerjaan yang tidak diajukan pembayarannya karena ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena beberapa hal. Secara rinci capaian realisasi keuangan program dan kegiatan pendukung capaian indikator kinerja rasio konektivitas tahun 2023 sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.88
Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Pendukung

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	7.403.929.325	7.320.814.459,95	98,88
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	861.751.600	857.467.763,33	99,50
2	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	5.141.445.725	5.097.669.364,62	99,15
3	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi	100.000.000	92.975.871	92,98
4	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi	450.783.500	426.780.745	94,68
5	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	750.000.000	747.590.927	99,68
6	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah	99.948.500	98.347.789	98,40



NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
II	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	55.084.888.094	50.935.248.146,34	92,47
1	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	449.015.000	446.533.989,90	99,45
2	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Intern	107.801.000	107.468.000	99,69
3	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	187.811.900	185.957.000	99,01
4	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	100.360.000	100.040.000	99,68
5	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	54.239.900.194	50.095.249.156,44	92,36
III	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	20.958.442.940	20.022.089.452,68	95,53
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	382.016.486	375.854.645	98,39
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.779.272.300	11.711.652.242	99,43
3	Administrasi Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah	143.134.000	140.100.571	97,88
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100.085.520	97.498.261	97,41
5	Administrasi Kepegawaian Daerah	189.713.000	172.604.401	90,98
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.568.894.231	1.455.326.529	92,76



NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.116.311.796	1.091.095.000	97,74
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.319.894.601	4.174.182.085	96,63
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.359.121.006	803.775.718,68	59,14
JUMLAH		83.447.260.359	78.278.152.069	93,81

Keberhasilan dalam mencapai indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 juga tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia yang tersedia sesuai struktur organisasi yang ada sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.89
Kinerja Sumber Daya Manusia yang terlibat

No	Sasaran	Kinerja			Sumber Daya Manusia	
		Target	Realisasi	Capaian	Kebutuhan	eksistensi
1	Rasio Konektivitas	44,25 rasio	48,63 rasio	109%	290	159

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi maupun tujuan dan sasaran yang diberikan oleh Kepala Daerah

kepada Dinas Perhubungan dibutuhkan pegawai (ASN) sebanyak 290 orang sedangkan yang tersedia adalah 159 orang pegawai (terdiri dari 54 ASN, 22 PTT dan 83 THL).

Sebagian besar pegawai dari pimpinan sampai dengan tingkat staff memiliki andil dalam mencapai indikator yang telah ditetapkan antara yaitu Kepala Dinas yang melakukan pembinaan, memberikan arahan, dan melakukan evaluasi terhadap upaya pencapaian indikator. Pada tingkat Kepala Bidang (1 orang) dan Kepala Seksi (2 orang), Fungsional Ahli Kebijakan Muda (1 Orang) pada Bidang LLAJ yang dibantu oleh staff-staff yang ada sebagai pelaksana Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan mencapai target penyediaan trayek angkutan jalan maupun mempertahankan trayek angkutan jalan yang sudah berjalan. Pada Program Pengelolaan Pelayaran dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Kepelabuhanan (1 orang Kepala Bidang dan 2 Orang Kepala Seksi) yang bertugas menyediakan prasarana pelabuhan (pelabuhan penyeberangan dan Bidang Angkutan Perairan (1 orang Kepala Bidang dan 2 Orang Kepala Seksi) yang bertugas menyediakan angkutan penyeberangan dan lintas penyeberangannya.

Kedua bidang ini saling berkoordinasi kedalam maupun keluar (Kementerian Perhubungan) yang dibantu oleh staff-staff yang ada telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai target kinerja penyediaan lintas angkutan penyeberangan. Kinerja sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tersebut telah dapat diukur. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang diuraikan diatas, maka secara rata-rata persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Riau dalam kategori sangat baik.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 ini didukung dengan pelaksanaan pekerjaan yang diadakan pada tahun 2023,

mulai dari pembangunan infrastruktur, pengadaan kapal untuk peningkatan konektivitas transportasi angkutan darat dan perairan.

Sasaran 11: Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir

❏ Persentase Jalan Kondisi Baik

Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir merupakan salah satu hal yang penting untuk menunjang perekonomian masyarakat. Salah satu Infrastruktur penting untuk pendukung Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir adalah Infrastruktur Jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan dengan kondisi baik akan memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa antar wilayah. *Jalan kondisi Baik* dapat didefinisikan sebagai jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan. Secara harafiah jalan didefinisikan sebagai jalur di mana masyarakat mempunyai hak untuk melewatinya tanpa diperlukannya izin khusus untuk itu.

Jalan merupakan prasarana transportasi yang sangat penting dalam menunjang segala kebutuhan manusia baik itu dalam kegiatan perekonomian dan sosial masyarakat. Pekerjaan terkait infrastruktur jalan merupakan tupoksi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau (Dinas PUPP). Untuk mendukung sasaran strategis dari Provinsi Kepulauan Riau yaitu Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir, Dinas PUPP menetapkan Indikator kinerja sesuai RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026 yaitu Persentase Jalan Kondisi Baik dengan target awal perencanaan 61,75%.

Jalan kondisi Baik merupakan salah satu sasaran yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026. Untuk mencapai sasaran

Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir, ditetapkanlah indikator kinerja berupa *Persentase Jalan Kondisi baik*. Capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.90
Capaian Kinerja Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir Tahun 2023
(Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Gubernur Kepulauan Riau
Tahun 2023)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Jalan Kondisi Baik (%)	64,75	70,37	108,68

Untuk tahun 2023, target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis adalah 64,75%, setelah dilakukan survey kondisi jalan oleh Bidang Bina Marga Dinas PUPP, capaian realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 70,37% dengan persentase sebesar 108,68%.

Untuk menghitung capaian kinerja persentase jalan kondisi baik tahun 2023 adalah membandingkan kondisi kemantapan ruas jalan kondisi baik dengan panjang ruas jalan sesuai dengan SK Gubernur Kepulauan Riau No 1863 tahun 2016 dengan Panjang ruas jalan 896,45 Km. Untuk tahun selanjutnya di capaian kinerja tahun 2024, indikator kinerja persentase jalan kondisi baik berubah menjadi indikator kinerja persentase jalan kondisi mantap (kondisi baik + kondisi sedang) dikarenakan adanya perubahan RPJMD yang dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2023 hingga awal tahun 2024. Untuk perbandingannya akan menggunakan panjang ruas jalan provinsi terbaru yang sudah dikeluarkan oleh gubernur yaitu Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 485 Tahun 2023 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 03 April 2023 dengan panjang ruas jalan 620,76 Km.

Tabel 2.91
Perhitungan Capaian Kinerja Persentase Jalan Kondisi Baik



Jalan Kondisi Baik Tahun 2023 (A)	Total Jalan Provinsi Sesuai SK Gubernur Kepulauan Riau (B)	Capaian Kinerja jalan Kondisi Baik Tahun 2023 (B/A*100)
630,86 KM	896,45 KM	70,37%

Persentase jalan kondisi baik merupakan perbandingan dari jumlah jalan provinsi kondisi baik dengan panjang jalan provinsi. Analisis terhadap Persentase jalan provinsi kondisi baik Tahun 2023 dapat digambarkan dengan panjang jalan provinsi kondisi baik di tahun 2023 yaitu 630,86 KM dibagi dengan total panjang jalan provinsi yakni 896,45 KM dengan persentase 70,37%. Hasil analisis jalan provinsi kondisi baik dengan target sebesar 64,25 % dapat tercapai sebesar 70,37% sehingga capaian kinerja sebesar 109,53% atau dalam kategori **kinerja sangat baik**.

Dibandingkan dengan capaian tahun lalu, capaian tahun 2023 ada penurunan kinerja sebesar 6,17% dari 76,55% ke 70,37%. Penyebab penurunan kinerja untuk sasaran pembangunan antar pulau dan antar pesisir dikarenakan menurunnya kualitas jalan di hampir seluruh kabupaten/kota (kecuali Tanjungpinang) setelah dilakukannya survey jalan oleh Bina Marga Dinas PUPP. Untuk Data Penurunan Jalan per Kabupaten/Kota akan disajikan di Tabel 3... tentang Perbandingan Kondisi Jalan Baik Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023 dan juga ada penurunan anggaran khusus sub kegiatan pemeliharaan rutin jalan dari 2022 sebesar Rp 3.462.111.764 menjadi Rp 1.558.050.040 di 2023. Namun dibandingkan dengan target kinerja, realisasi kinerja masih melewati target kinerja yang ditetapkan.

Tabel 2.92

No	Indikator Kinerja	Target Sesuai RPJMD dan Renstra (%)	Realisasi (%)	Capaian Realisasi Kinerja %
----	-------------------	--	------------------	-----------------------------------



1	Persentase Jalan Kondisi baik (%)	63,25%	76,55%	121,03%	Perbandingan Realisasi Kinerja
		64,25%	70,37%	109,53%	

a Tahun 2022-2023

Untuk perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD, untuk saat ini masih menggunakan target akhir RPJMD lama, namun untuk tahun depan, target akhir RPJMD terbaru akan menggunakan Target baru sesuai indikator kinerja yang juga akan berubah di RPJMD terbaru.

Tabel 2.93
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan kondisi akhir RPJMD (2026)

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	%
1	Persentase Jalan Kondisi Baik (%)	69,25	70,37	101,62

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Target Akhir RPJMD adalah 69,25% sedangkan Realisasi Tahun 2023 adalah 70,37 % sehingga Capaian Kinerja sebesar 101,62 %, namun untuk capaian kinerjanya menurun dari tahun 2022 kendati sudah melewati target kinerja yang telah ditetapkan.

Berikut evaluasi capaian indikator kinerja persentase jalan Provinsi kondisi baik dari Tahun 2018-2023:

Tabel 2.94
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019-2023



No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1	Persentase jalan kondisi baik (%)	71,49	73,64	73,24	74,51	75	76,38	63,25	76,55	63,25	70,37

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja persentase jalan provinsi kondisi baik dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Dari capaian kinerja tahun 2023 dan tahun sebelumnya, tabel dibawah ini merupakan jalan kondisi baik per kabupaten/kota di Kepulauan Riau.



Tabel 2.95
Perbandingan Kondisi Jalan Baik Kabupaten/Kota
Se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023

Panjang Jalan (Km)		Jalan Kondisi Baik Tahun 2019		Jalan Kondisi Baik Tahun 2020		Jalan Kondisi Baik Tahun 2021		Jalan Kondisi Baik Tahun 2022		Jalan Kondisi Baik Tahun 2023	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Tanjungpinang	70,23	51,56	73,42	52,03	74,09	55,99	79,73	57,46	81,81	57,83	82,34
Batam	112,35	110,63	98,47	116,48	103,68	117,35	104,45	102,85	91,54	96,85	86,20
Bintan	139,10	130,71	93,97	131,17	94,30	132,55	95,29	130,80	94,03	127,2	91,45
Karimun	143,72	112,31	78,15	112,81	78,49	116,96	81,38	116,12	80,80	109,72	76,34
Lingga	236,72	138,35	58,44	138,61	58,55	141,55	59,80	131,66	55,62	119,88	50,64
Anambas	51,00	28,76	56,39	28,76	56,39	29,09	57,04	46,07	90,32	21,4	41,96
Natuna	143,33	87,86	61,30	88,05	61,43	91,19	63,63	101,25	70,64	97,98	68,36
TOTAL	896,45	660,17	73,64	667,91	74,51	684,67	76,38	686,20	76,55	630,86	70,37



Berdasarkan dari tabel di atas, bahwa kondisi ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Provinsi Kepulauan Riau yang telah diperbaiki, ditingkatkan, dan dibangun melalui APBD Provinsi maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) sepanjang 8,93 Km melalui Program penyelenggaraan jalan provinsi. Kondisi rusak yang masih harus diperbaiki sepanjang 265,60 km, namun karena akan adanya perubahan target kinerja dari kondisi baik ke mantap serta akan memakai Ruas Jalan Provinsi Terbaru sesuai SK Gubernur tahun 2023, Kondisi rusak yang masih harus diperbaiki akan berubah setelah survei kondisi jalan dengan SK Gubernur terbaru dilakukan. Realisasi kinerja tahun 2023 menurun dari 2022 dikarenakan adanya Penurunan kualitas jalan dari baik ke sedang di hampir seluruh kabupaten/kota di Kepri kecuali Tanjungpinang.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jalan kondisi baik terpanjang pada tahun 2023 berada di Kabupaten Lingga sepanjang 127,2 km dan yang terpendek berada di Kabupaten Anambas dengan panjang 21,4 km. Jika dilihat lebih lanjut untuk kondisi jalan kondisi baik dari tahun 2019-2023, jalan kondisi baik terpanjang di Tahun 2022 berada di Kabupaten Lingga (131,66 Km) (Tahun 2021 berada di Kabupaten Lingga (141.55 Km), Tahun 2020 berada di Kabupaten Lingga (138.61 km) dan 2019 berada di Kabupaten Lingga Untuk Kabupaten Lingga, panjang jalan kondisi baik memperlihatkan kecenderungan meningkat pada periode tahun 2018-2022 karena Kabupaten Lingga memang memperoleh alokasi anggaran untuk meningkatkan kondisi jalan pada periode waktu tersebut mengingat Kabupaten Lingga memiliki ruas jalan provinsi yang paling panjang, yang membutuhkan alokasi anggaran setiap tahun untuk meningkatkan panjang jalan kondisi baik.



Gambar 2.31
Dokumentasi Peningkatan Jalan Nusantara Kabupaten Bintan



Gambar 2.32
Dokumentasi Pembangunan Jalan Tiangau, Kab Kepulauan Anambas



Gambar 2.33
Dokumentasi Rekonstruksi Simp Bukit Leman – Trans Batubi Kab Natuna



Gambar 2.34
**Long Segmen Penanganan Ruas Jalan Sei Asam - Sebele - Penarah - Lebu
Kabupaten Karimun (DAK - Tematik 03)**



Gambar 2.35
Peningkatan Jalan Belungkur (lanjutan), Kab. Lingga



Untuk menunjang pencapaian kinerja, alokasi anggaran merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Untuk mendukung tercapainya sasaran **Pembangunan antar pulau dan pesisir**, alokasi anggaran yang memadai perlu dianggarkan agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Alokasi anggaran untuk mendukung indikator di anggarakan di Program Penyelenggaraan jalan dan kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi pada Tahun Anggaran 2023. Beberapa pekerjaan yang mendukung sasaran yang dimaksud berada pada sub kegiatan Pembangunan jalan, Rekonstruksi jalan dan Rehabilitasi Jalan. Berikut adalah program/kegiatan penunjang yang dilaksanakan di tahun 2023. Sebagian besar pekerjaan yang telah dianggarkan di tahun 2023 telah



selesai dikerjakan semuanya dan juga analisis efektifitas dan efisiensi sumber daya

Tabel 2.96
Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian
Indikator Kinerja Tahun 2023

Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI					
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN					
Pembangunan Jalan Tiangau, Kab. Kepulauan Anambas	2.000.000.000	1.970.011.000	98,50	100,00	1,50
Pembangunan Jalan Lingkar Serasan, Kab. Natuna	130.000.000	129.596.000,00	99,69	100,00	0,31
Labur Buras Jalan Lingkar Serasan, Kab. Natuna	130.000.000	129.596.000	99,69	100,00	0,31
Pembangunan Jalan Sp. Setajam - Serteh, Kabupaten Lingga	964.788.000	964.712.900	99,99	100,00	0,01
TOTAL ANGGARAN SUB KEGIATAN	3.224.788.000	3.193.915.900	99,04%	100	0,96
SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN					
Peningkatan Jl. Nusantara Kijang Kab. Bintan	700.000.000	678.000.000	96,86	100,00	3,14
Peningkatan Jalan Letung - Kuala Maras Kabupaten Kepulauan Anambas (DAK - Tematik 05)	24.425.000.000	24.424.997.000	100,00	100,00	0,00



Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
Peningkatan Jalan Muka Kuning - Tg. Piayu, Kota Batam	2.877.080.500	2.877.079.200	100,00	100,00	0,00
Long Segmen Penanganan Ruas Jalan Sei Asam - Sebele - Penarah - Lebuh Kabupaten Karimun (DAK - Tematik 03)	13.579.642.000	13.579.640.000	100,00	100,00	0,00
Rekonstruksi Jalan Bukit Leman - Trans Batubi, Kabupaten Natuna (DAK - Tematik 01)	11.392.427.000	11.392.000.000	100,00	100,00	0,00
Peningkatan Jalan Belungkur (lanjutan), Kab. Lingga	2.959.099.000	2.959.099.000	100,00	100,00	0,00
TOTAL ANGGARAN SUB KEGIATAN	55.933.248.500	55.910.815.200	99,96	100,00	0,04
SUB KEGIATAN REHABILITASI JALAN					
Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp. Sungai Buluh - Sp. Jagoh, Kab. Lingga	3.000.000.000	2.994.963.000	99,83	100	0,17
TOTAL SUB KEGIATAN	3.000.000.000	2.994.963.000	99,83	100	0,17
TOTAL ANGGARAN	62.158.036.500	62.099.694.100	99,91	100,00	0,09



Untuk mencapai sasaran, organisasi membutuhkan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang tersedia tentunya perlu dikelola dengan baik agar sasaran organisasi dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengelolaan sumber daya yang baik dapat dilihat dari besaran efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya terkait. Dari tabel diatas, terlihat efisiensi anggaran sebagian besar pekerjaan tidak sampai lebih dari 10% yang artinya dari anggaran yang diberikan, hampir seluruhnya terealisasi dan terpakai untuk pekerjaan terkait sehingga anggaran yang telah diberikan tidak banyak yang menjadi SILPA dan dari efektivitas pekerjaan, sebagian besar telah selesai dengan tepat waktu sebelum tahun anggaran berakhir. Dari tabel diatas juga, kesimpulan yang dapat diambil secara umum adalah bahwa efektivitas dan efisiensi sumber daya anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 menunjukkan bahwa anggaran yang telah diberikan berhasil terserap dengan baik dan efisiensi anggaran sangat baik serta efektivitas kinerja juga sangat baik karena pekerjaan penunjang program/kegiatan berhasil selesai sesuai waktu yang diharapkan.

Efektivitas dan Efisiensi sumber daya anggaran dapat tercapai karena hal tersebut didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target program kinerja;
2. Adanya upaya – upaya strategis dalam optimalisasi pencapaian kinerja OPD;
3. Melaksanakan perencanaan anggaran untuk menunjang kewenangan OPD sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap jalannya kegiatan;

Penyebab Keberhasilan Capaian Program/Kegiatan penunjang indikator kinerja yang telah dilaksanakan di tabel 3... dan Efektivitas Efisiensi Sumber Daya Anggaran dapat tercapai karena hal tersebut didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut :



1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung.

Dinas PUPP Provinsi Kepri memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target program/kegiatan penunjang kinerja. Pentingnya SDM yang mendukung agar Program/Kegiatan bisa terlaksana dengan baik serta dapat menyelesaikan hambatan/gangguan selama berlangsungnya Program/Kegiatan yang berlangsung;

2. Upaya Strategis agar optimalnya pencapaian kinerja OPD.

Adanya upaya – upaya strategis dalam optimalisasi pencapaian kinerja OPD seperti selalu menganggarkan dan melakukan survey kondisi jalan setiap tahun untuk membantu dalam merencanakan infrastruktur transportasi yang efisien dan efektif serta dalam merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan transportasi untuk masyarakat;

3. Perencanaan Anggaran sesuai Kewenangan OPD

Melakukan perencanaan anggaran untuk menunjang kewenangan OPD seperti Dinas PUPP Provinsi Kepri yang kewenangannya adalah Jalan Provinsi di Kepulauan Riau dengan Indikator Kinerja persentase jalan kondisi baik sesuai dengan mekanisme yang berlaku;

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin.

Dinas PUPP Provinsi Kepri selalu Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap jalannya kegiatan seperti melakukan rapat mingguan setiap hari senin terkait kemajuan seluruh progres pekerjaan fisik yang ada di Dinas PUPP bersama Kepala Dinas dan *Stalkholder* yang berkepentingan untuk membahas apa-apa saja hambatan/kendala serta apa yang dibutuhkan dalam melakukan suatu proyek agar proyek tersebut dapat terlaksana dengan baik dan hasil kinerja yang maksimal sesuai yang diharapkan.

Berikut ini adalah perbandingan total anggaran pendukung capaian kinerja antara tahun 2022 dan 2023.



Tabel 2.97
Perbandingan Persentase Penambahan Anggaran Pendukung Kinerja
Panjang Jalan Kondisi Baik Pada Tahun 2022 dan 2023

No	Program	Tahun	Anggaran	Persentase penambahan Anggaran dari tahun sebelumnya
1	Program Penyelenggaraan Jalan	2022	Rp.44.556.794.700	69,69%
2	Program Penyelenggaraan Jalan	2023	Rp 62.099.694.100	

Dari tabel diatas, Persentase penambahan anggaran bertambah dikarenakan untuk tahun 2023 anggaran pekerjaan pendukung capaian kinerja jalan kondisi baik bertambah dari 2022 sekitar Rp 17.542.899.400 sehingga pertambahan persentase anggaran dari tahun lalu sebesar 69,69%.

Sasaran 12: Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat

2 Indeks Pembangunan Kebudayaan

IPK juga digunakan sebagai indikator pembangunan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2021-2026. RPJMD Dengan Misi keempat yang bertemakan “ Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan Nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di antaranya yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dapat diwujudkan dengan meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas, revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila,



memperkuat moderasi beragama, serta meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan.

Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kebudayaan dapat memperkuat jati diri dan karakter bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mampu mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Untuk mendukung pemajuan kebudayaan diperlukan data dan informasi yang memadai agar pemajuan kebudayaan tepat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingatnya pentingnya data dan informasi dalam pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pusat Statistik memiliki inisiatif menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan disusun dengan mengacu pada konsep Culture Development Indicators (CDIs) UNESCO. CDIs UNESCO memiliki serangkaian dimensi dan indikator yang menyoroti tentang kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membantu individu dan masyarakat untuk memperluas pilihan hidup, dan beradaptasi pada perubahan. Adapun Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat



memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:

- (1) dimensi ekonomi budaya;
- (2) dimensi pendidikan;
- (3) dimensi ketahanan sosial budaya;
- (4) dimensi warisan budaya;
- (5) dimensi ekspresi budaya;
- (6) dimensi budaya literasi; dan
- (7) dimensi kesetaraan gender.

Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor. Berdasarkan Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2023, pembangunan kebudayaan Kepulauan Riau cukup baik, namun masih perlu terus ditingkatkan. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan pada di provinsi Kepulauan Riau dengan rentang nilai 0 – 100 sebesar 56,50 sedangkan untuk indeks pembangunan tingkat nasional 55,13. Pada tahun 2023 untuk realisasi indeks Pembangunan di Kepulauan Riau lebih tinggi dari nasional ,Adapun nilai untuk setiap dimensi sebagai berikut: dimensi ekonomi budaya (20,97), dimensi pendidikan (80,55), dimensi ketahanan sosial budaya (76,92), dimensi warisan budaya (43,18), dimensi ekspresi budaya (29,00), dimensi budaya literasi (64,73), dan dimensi kesetaraan gender (54,85). Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2023 Dimensi Pendidikan memiliki nilai paling tinggi, sementara dimensi ekonomi budaya memiliki nilai paling rendah dibandingkan dengan dimensi lainnya sama, Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Kepulauan Riau dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya dan muatan lokal pada pendidikan cukup baik. Namun kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan ekonomi masih perlu terus ditingkatkan. diharapkan pembangunan kebudayaan dapat semakin terarah dan berkualitas. Publikasi Indeks Pembangunan



Kebudayaan ini akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan yang knowledge-based, agar perumusan kebijakan pembangunan kebudayaan dapat lebih presisi sesuai kondisi masing-masing daerah. Selain itu Indeks Pembangunan Kebudayaan juga dapat dimanfaatkan oleh para akademisi dan peminat kajian kebudayaan untuk memperkaya data dan informasi terkait kebudayaan. Capaian kinerja Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya, Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.98
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	63,90	56,50	88,41

Dari tabel diatas Capaian IPK Provinsi Kepulauan Riau sebesar 56,50 sedangkan target yang di tetapkan sebesar 63,90 sebagaimana yang tersaji pada tabel diatas. Hasil Analisis indeks pembangunan kebudayaan dengan target sebesar 63,90% hanya dapat tercapai sebesar 56,50% sehingga capaian kinerja sebesar 88,41% atau dalam kategori **Baik**.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan di provinsi Kepulauan Riau masih membutuhkan usaha dan kerja keras dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat guna mencapai hasil yang optimal, Pemerintah, lembaga budaya, dan masyarakat harus berperan aktif dalam memperkenalkan dan mempromosikan budaya lokal kepada masyarakat Indonesia maupun dunia. Festival budaya, pameran seni, pertunjukan tradisional, dan publikasi budaya lokal bisa menjadi sarana yang efektif untuk mengangkat kekayaan budaya Indonesia. Melalui promosi yang baik, budaya lokal dapat



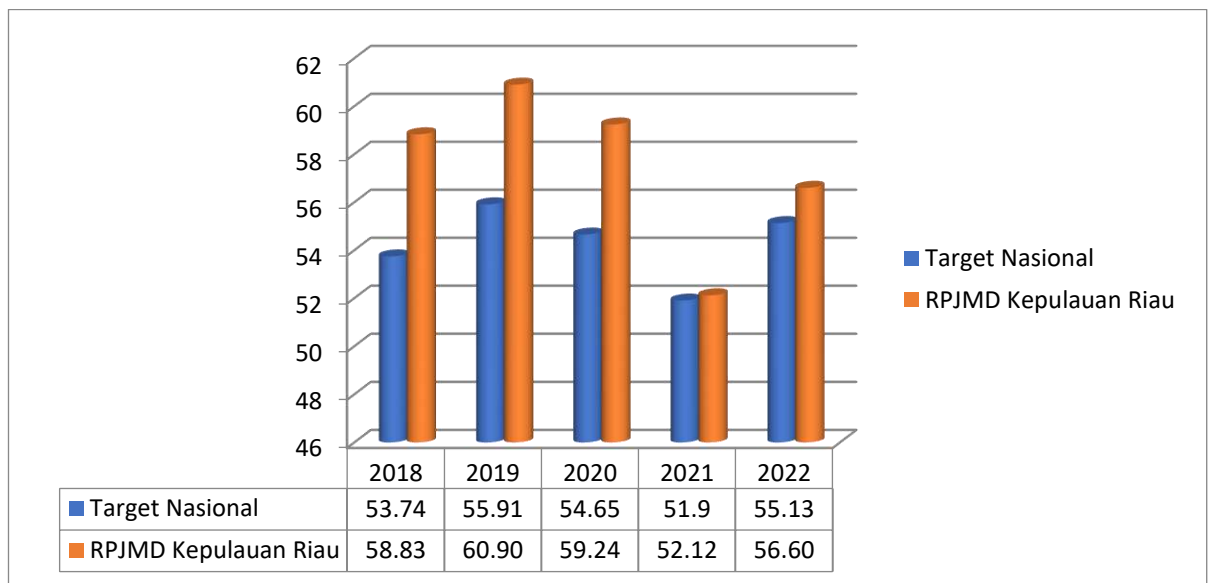
memberikan daya tarik dan keunikan tersendiri bagi wisatawan mancanegara, serta menjadi sumber rasa kebanggaan bagi masyarakat Indonesia sendiri. dan dapat meningkatkan ekonomi dalam bidang kebudayaan.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2022 s/d 2023:

Tabel 2.99
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (RPJMD)

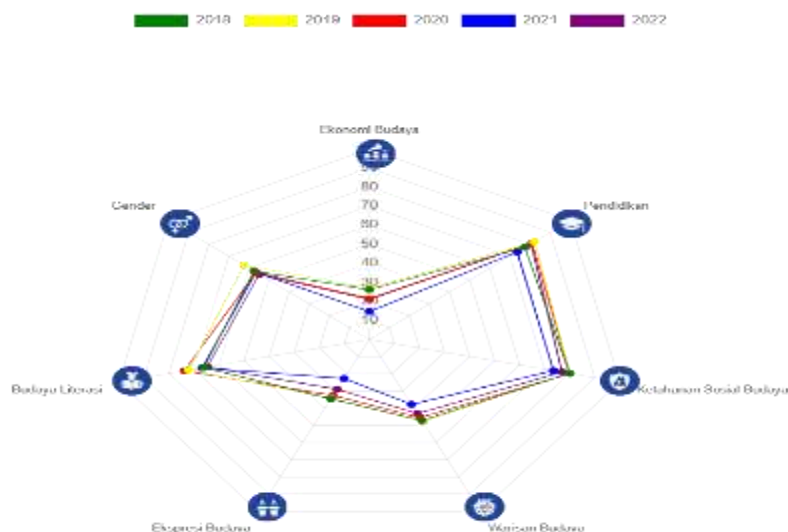
No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Target akhir RPJMD	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
1	Indeks pembangunan kebudayaan	52,12	63,90	56,60	88,41	66,90	83,10

Grafik 2.36
Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dan tahun lalu dengan nasional



Sumber data IPK direktorat kebudayaan, Bapennas, Bps nasional

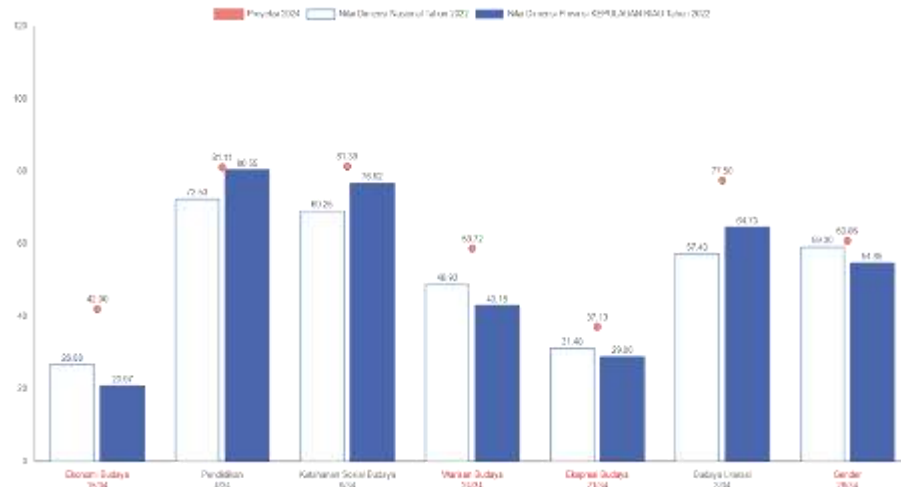
Jika dilihat dari tabel dan grafik diatas Skor IPK Provinsi : 56,60 • Di atas skor IPK Nasional (55,13) • Peringkat 7 dari 34 Provinsi Capaian IPK 2022 Provinsi Kepulauan Riau: 52,12 (ada kenaikan sebesar 4,48 poin) Dimensi dengan skor tertinggi ada pada Dimensi Pendidikan, sedangkan yang terendah adalah Dimensi Ekonomi Budaya. Pada Tahun 2023 Target akhir RPJMD yang ditetapkan oleh dinas kebudayaan sebesar 56,60%, jika kita bandingkan target yang ditetapkan tahun 2022 dengan realisasi capaian hanya sebesar 52,12 % masih ada 83,10 % capaian ini merupakan kewajiban dinas kebudayaan untuk menyelesaikan sampai dengan Akhir RPJMD



Dimensi	Nilai indeks	
	Nasional	Kepulauan Riau
Ekonomi Budaya	26,88	20,97
Pendidikan	72,53	80,55
Ketahanan Sosial Budaya	69,25	76,92
Warisan Budaya	48,92	43,18
Ekpresi budaya	31,48	29,00
Budaya Literasi	57,40	64,73
Gender	59,30	54,85
Total	55,13	56.50

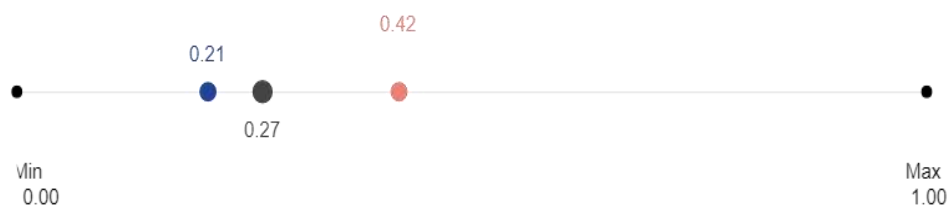
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 3 dimensi yang memiliki nilai indeks di atas angka nasional adalah posisi 1 dimensi pendidikan, pada posisi ke-2, dimensi ketahanan sosial budaya pada posisi ke-3, dimensi budaya literasi. 4 dimensi lainnya berada di bawah angka nasional, yaitu : dimensi ekonomi budaya,dimensi warisan budaya, dimensi ekspresi budaya dan dimensi gender masih sama dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Nilai Dimensi



Analisis IPK 2022 Provinsi Kepri per Indikator - Dimensi Ekonomi Budaya

Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan, terhadap masyarakat 15 tahun ke atas (persen)



Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri



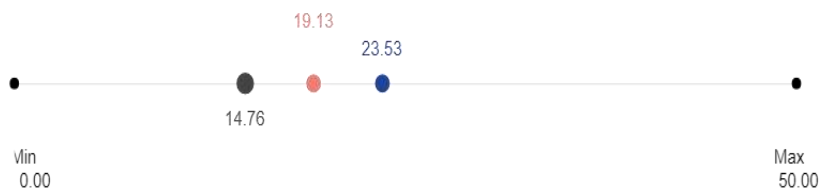
2 Analisis IPK 2023 Provinsi Kepri per Indikator - Dimensi Warisan Budaya

- Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi



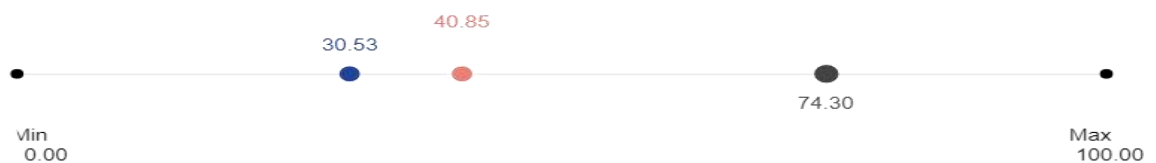
Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

- Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi



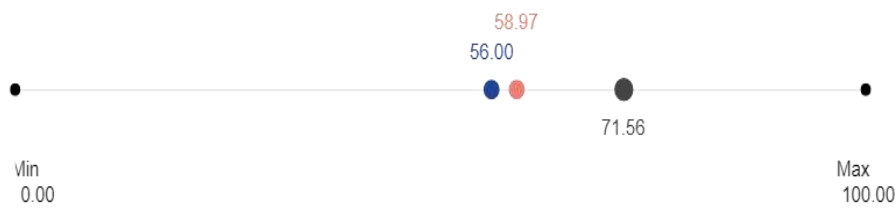
Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari



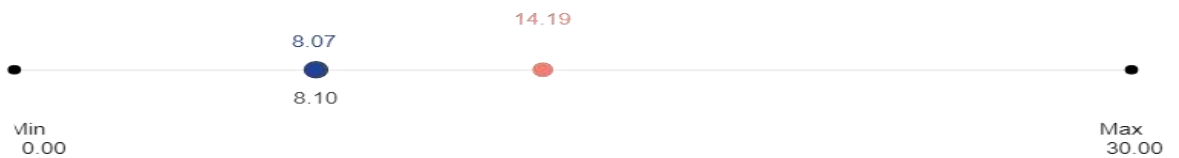
Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni



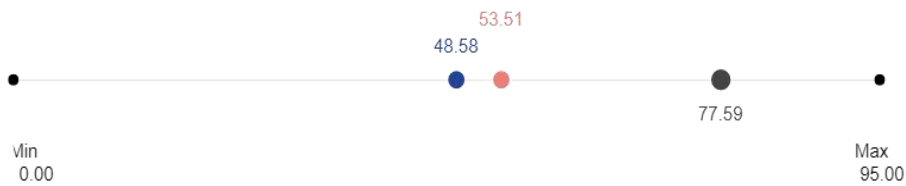
Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/wardun



Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

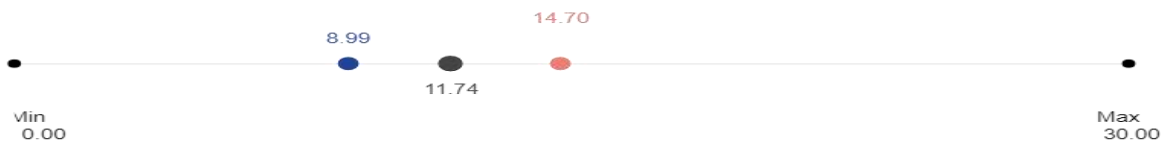
- Persentase masyarakat yang menggunakan produk tradisional



Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

Analisis IPK 2023 Provinsi Kepri per Indikator - Dimensi Ekpresi Budaya

- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir



Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi



Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

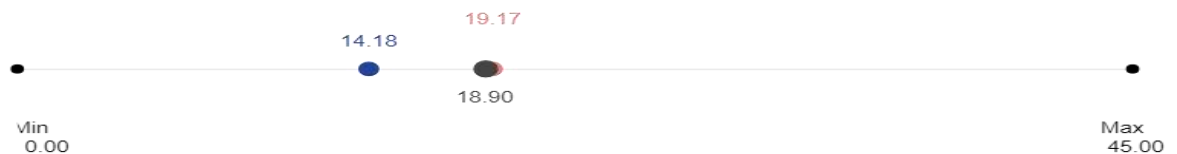


- Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni



Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

- Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat



Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

2 Analisis terhadap penyebab keberhasilan /kegagalan yang dapat dilihat dalam pencapaian Indeks pembangunan Kebudayaan sebagai berikut :

Dalam mencapai Indeks Pembangunan Kebudayaan terdapat beberapa penyebab keberhasilan dalam meningkatkan pembangunan kebudayaan, diantara lain sebagai berikut :

- a. Memperkuat pondasi budaya dalam rangka pembangunan nasional. Di sisi lain, pembangunan harus berdampak kepada karakter agar masyarakat memiliki sikap tangguh dan kreatif dalam menghadapi dinamika sosial.



- b. Teknologi dapat digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan dan melestarikan budaya lokal. Website, media sosial, aplikasi smartphone, dan platform digital lainnya dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat Indonesia maupun dunia untuk mengakses informasi dan pengalaman tentang budaya Indonesia. Melalui penggunaan teknologi digital, budaya lokal dapat dikenal secara lebih luas dan dapat terhubung dengan lebih banyak orang, sehingga dapat tetap hidup dan berkembang di tengah arus globalisasi.

Adapun terdapat juga kendala dalam meningkatkan Indeks pembangunan Kebudayaan yang menjadi tantangan untuk terus ditingkatkan ditahun yang akan datang, dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Beberapa wilayah baik di kabupaten/kota maupun provinsi belum menyusun peraturan daerah yang secara khusus mengatur Pemajuan Kebudayaan guna mengakomodasi karakteristik Kebudayaan dan kekhasan permasalahan di setiap daerah
- b. Inovasi layanan dukungan Pemerintah Daerah yang menunjang prakarsa pelaku budaya dalam Pemajuan Kebudayaan masih kurang, misalnya masih sedikit peran mempertemukan program pelaku budaya dengan sumber pendanaan swasta (*matchmaking*) yang dapat memperkuat berbagai program tersebut dan membuatnya lebih berkelanjutan.
- c. Koordinasi antar pemangku kepentingan Kebudayaan di daerah masih belum optimal. Belum terjalin sinergi antara Pemerintah Daerah, Lembaga Kebudayaan, dan masyarakat umum untuk menjalankan program Pemajuan Kebudayaan secara berkelanjutan.

Guna memperbaiki proses dan kualitas pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dirumuskan rencana tindak lanjut atau pun solusi sebagai berikut :

1. Penyuluhan dan Pendidikan Budaya

Satu cara untuk memberdayakan masyarakat adalah dengan menyediakan penyuluhan dan pendidikan budaya yang memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekayaan dan pentingnya budaya mereka.



Pendidikan budaya ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, pelatihan, atau melalui kegiatan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya.

2. Penciptaan Wadah Partisipasi Masyarakat

Penciptaan wadah partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengembangkan dan mempromosikan budaya mereka. Contohnya adalah dengan mendirikan kelompok seni atau komunitas budaya yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dalam kelompok ini, masyarakat dapat saling berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam pengembangan budaya mereka.

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya

Untuk mendorong masyarakat dalam mengembangkan budaya, penting untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana budaya ini dapat berupa tempat pertunjukan, gedung seni, museum, perpustakaan, studio seni, atau taman budaya. Melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses dan mengembangkan budaya mereka.

4. Pemberian Dukungan dan Pengakuan

Pemberian dukungan dan pengakuan kepada masyarakat merupakan langkah penting dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan budaya mereka. Dukungan ini dapat berupa bantuan dana, pelatihan, atau bantuan teknis dalam pengembangan budaya. Selain itu, pengakuan atas kontribusi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya mereka juga penting untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat.

2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Kebudayaan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 20.131.448.632 dengan rincian Belanja Langsung Rp . 8.613.823.589 dan Belanja tidak Langsung Rp 11.517.625.043. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi Rp 18.889.313.301 dengan



rincian Belanja Langsung Rp 7.748.548.953,00, dan Belanja Tidak Langsung Rp 11.140.764.348,00.

- **Target Belanja Dinas Kebudayaan**

Tabel 2.100
Target Belanja Dinas Kebudayaan APBD Perubahan Tahun 2023

Uraian	Target	Persentase
Belanja Langsung	Rp.7.748.548.953,00	41,02
Belanja Tidak Langsung	Rp 11.140.764.348,00	58,97
Total	Rp. 18.889.313.301	100

- **Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis**

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 Dinas Kebudayaan yang

No	Sasaran	Anggaran	Persentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Rp. 7.748.548.953	100	Semua belanja langsung dalam rangka mewujudkan satu sasaran

dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:



Tabel 2.101
Anggaran Belanja Langsung Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategi	Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	Efisiensi %
1	Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan kebudayaan	63,90	56,60	87,01	7.748.548.953	6.610.853.888	88,27

Pada tabel ini dapat dilihat bahwa indikator indeks Pembangunan kebudayaan yang telah ditetapkan target nya sebesar 63,90 hanya tercapai sebesar 56,60 % ini dapat dilihat dari dimensi ekonomi budaya yang masih cenderung rendah yang menandakan bahwa masih cukup rendahnya aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kebudayaan di provinsi kepulauan Riau dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya pada kehidupan sosial cukup baik. Namun kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan ekonomi masih perlu terus ditingkatkan. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ini terkait Penyerapan anggaran belanja langsung dalam pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 sebesar 88,27 % (Rp 7.489.512.150) dari total anggaran (Rp 6.610.853.888) terdapat 5 program 7 kegiatan 12 sub kegiatan yang mendukung indikator indeks pembangunan kebudayaan, pada Program Pengembangan Kesenian Tradisional yang merupakan program pendukung dimensi ekonomi budaya masih perlu di



tingkatkan karena untuk ekonomi budaya masih cenderung rendah capaian nya ini berpengaruh besar terhadap capaian indeks pembangunan kebudayaan, terkait dengan realisasi sebesar 88,27 % ini dikarenakan ada nya dana hibah yang tak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak lengkapnya data pendukung dari proposal yang diajukan oleh pihak lembaga sehingga berpengaruh terhadap realisasi yang akan dicapai.

Solusi untuk kedepan dalam peningkatan dimensi ekonomi budaya yaitu Dari segi ekonomi, industri kebudayaan menghasilkan barang dan jasa untuk pasar dan kepentingan publik, serta berdampak pada inovasi industri lain. Sementara dari segi budaya, industri kebudayaan berkontribusi dengan menunjukkan nilai dari barang dan jasa artistik, menaikkan nilai peran individu dalam kegiatan kreatif, mewujudkan nilai sosial dialog lintas budaya, serta mendukung peran seni dalam Pendidikan dan perlu nya komitmen dari kepala daerah untuk menyediakan Pendanaan melalui dana APBD untuk bidang kebudayaan yang lebih optimal dan Mengoptimalkan pemanfaatan sosial media, sebaga sarana promosi kegiatan event budaya dan juga sebagai media pertunjukan secara daring, dengan pengemasan yang lebih inovatif.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi.

2 REALISASI ANGGARAN

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu. maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran. maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.



Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2023 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa dari 12 sasaran mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Berikut Capaian kinerja dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang di alokasi untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau:



NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA				ANGGARAN			
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Efisiensi	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Percepatan Pemulihan dan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,9%-5,8 %	5,20 %	96 %	143.001.347.610	134.613.452.487	94,13%	Efisien
		Pendapatan Per Kapita	81,91 Juta Rupiah	92,93 Juta Rupiah	113 %				
		Indeks Gini	0,329 indeks	0,340 indeks	89 %				
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Pengangguran	9,50 %	6,80 %	128,42 %	4.467.054.446	4.349.811.653	97,37%	Efisien
		Angka Kemiskinan	5,74 %	5,69 %	100,87 %	119.970.665.843	113.973.514.417	95,00	Efisien
3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	69,95 indeks	74,26 indeks	106 %	793.183.305	743.969.049	93,80%	Efisien
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	70,37 indeks	73,56 %	104,53 %	233.479.590.640	225.497.139.204	96,58%	Efisien
5	Pembangunan Manusia yang Unggul dan	Indeks Pembangunan Manusia	77,14 indeks	79,08 indeks	102 %	403.205.240.923	390.314.299.340	96,80 %	Efisien



	Berkarakter								
6	Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100 %	84,97 %	84,97 %	352.071.093.414	334.345.582.529	94,97%	Efisien
7	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,30 indeks	93,50 indeks	100,21 %	2.866.514.202	2.818.269.315	98,32%	Efisien
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	15,30 %	15,40 %	99,3 %	5.776.345.839	5.487.817.739	95,0%	Efisien
9	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi	96 Rasio	97,99 Rasio	102 Rasio	7.424.998.178	6,560.354.584	88,35%	Efisien
		Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	123,73 Ha	135,07 Ha	51,77 %	8.158.839.985	8.058.738.161	98,77%	Efisien
10	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	Rasio Konektivitas	44,24 Rasio	48,63 Rasio	109 Rasio	83.447.260.359	78.278.152.069	93.81%	Efisien
11	Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Presentase Jalan Kondisi Baik	64,75 %	70,37 %	108,68 %	62.158.036.500	62.099.694.100	99,91%	Efisien
12	Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	63,9 Indeks	56,50 indeks	88,41 indeks	7.748.548.953	6.610.853.888	85,32%	Efisien



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi mengacu pada pemberian tugas atau kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tingkat provinsi untuk melaksanakan suatu program, kegiatan, atau tugas tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Hal ini dapat terjadi dalam konteks desentralisasi atau otonomi daerah, di mana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sebagian tugas atau program yang sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki dasar hukum yang melandasi dalam penyelenggaraan dan pelaporan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LKPI, AMJ dan ILPPD;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Petunjuk Teknis Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/Pmk.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3).

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau selain melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi juga melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu melalui tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat, dan tidak memberikan



tugas pembantuan kepada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Tiga urusan pemerintahan yang memperoleh Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat yaitu: (1) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (2) Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan; dan (3) Urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Adapun gambaran pelaksanaan program, kegiatan beserta anggaran tersaji dibawah ini.

3.1.1 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.1.1.1 Target Kinerja Tugas Pembantuan Urusan Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 17.324.357.000,00 dengan target kinerja 100%.

3.1.1.2. Realisasi Tugas Pembantuan Urusan Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang

Adapun realisasi dari Tugas Pembantuan Urusan Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang ini dari sisi keuangan sebesar Rp. 17.323.729.053,00 (99,99%) dan realisasi kinerja sebesar 100%. Tugas pembantuan ini dilaksanakan melalui beberapa program, yaitu:

1. Program Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan dengan kegiatan Dukungan Teknis; serta
2. Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga, dan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.

Pelaksanaan dari 2 program dan kegiatan diatas dapat mencapai target kinerja output. Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau tercantum pada tabel berikut.



Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tugas Pembantuan Urusan Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Kinerja Output			Anggaran		
					Target	Realisasi	Persentase Capaian kinerja	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dukungan Teknis	Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen	1	1	100	6.886.000,00	6.706.000,00	99,77
2	Program Infrastruktur Konektivitas	Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan/ laporan/dok	2	2	100	692.338.000,00	691.890.000,00	99,94
		Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	km	58,192	58,192	100	15.825.633.000,00	15.825.633.000,00	100,00
			OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	m	729,5	729,5	100	729.500.000,00	729.500.000,00	100,00
Jumlah/Rata-rata							100	17.324.357.000,00	17.323.729.000,00	99,99

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau



3.1.2 Urusan Pertanian

3.1.2.1 Target Kinerja Tugas Pembantuan Urusan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian. Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 5.490.638.000,00 dengan target kinerja 100%.

3.1.2.2 Realisasi Tugas Pembantuan Urusan Pertanian

Adapun realisasi dari Tugas Pembantuan Urusan Pertanian ini dari sisi keuangan sebesar Rp. 4.788.114.245,00 (87,17%) dan capaian realisasi kinerja sebesar 99,06%. Tugas pembantuan ini dilaksanakan melalui beberapa program, yaitu:

1. **Program Dukungan Manajemen** dengan kegiatan meliputi: Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan; Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian; Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Tanaman Pangan; dan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Holtikultura.
2. **Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas** dengan kegiatan meliputi: Fasilitasi Pembiayaan Pertanian; Fasilitasi Pupuk dan Pestisida; Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan; Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian; Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan; Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura; Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat; dan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak.
3. **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri** dengan kegiatan meliputi: Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan; Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan; Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak; Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura; dan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan.



Pelaksanaan dari sebanyak 20 kegiatan Tugas Pembantuan urusan Pertanian yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan provinsi Kepulauan Riau, sebanyak 19 kegiatan dapat mencapai target kinerja output, dan hanya 1 kegiatan yang belum mencapai target kinerja, yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. Selengkapnya Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Urusan Pertanian yang diterima oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau tercantum pada tabel berikut ini.



Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tugas Pembantuan Urusan Pertanian
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Kinerja Output			Anggaran		
					Target	Realisasi	Persentase Capaian kinerja	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	1	1	100	93.700.000	93.355.500	99,63
		Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Layanan BMN	Layanan	1	1	100	255.813.000	245.282.000	95,88
			Layanan Data Informasi	Layanan	1	1	100			
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	1	1	100			
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	1	1	100			
			Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	4	4	100			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Layanan Manajemen Keuangan	Kegiatan	1	1	100	218.830.000	209.721.100	95,84
		Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	3	3	100	623.665.000	574.552.700	92,13
		Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Layanan Perencanaan	Layanan	2	2	100	80.000.000	79.896.600	99,87
2	Program	Fasilitasi	Bimtek,	Kegiatan	1	1	100	50.000.000	45.634.000	91,27



	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pembiayaan Pertanian	Monitoring dan Evaluasi Lingkup Pembiayaan Pertanian							
--	---	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Pupuk dan Pestisida	Kegiatan	1	1	100	91.184.000	29.035.000	31,84
		Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal	Koordinasi, Bimtek, Monitoring dan Evaluasi	Kegiatan	1	1	100	259.789.000	246.530.757	94,90
		Tanaman Pangan	Kawasan Padi Kaya Gizi	Ha	94	94	100			
		Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat Mesin Pertanian	Kegiatan	1	1	100	90.000.000	70.510.400	78,34
		Pengelolaan Sistem	Koordinasi, Bimtek,	Kegiatan	1	1	100	119.525.000	110.340.888	92,32



		Perbenihan Tanaman Pangan	Monev dan Pelaporan							
			Area Penyaluran Benih Padi	Ha	66	66	100			
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Pelayanan Kesehatan Hewan	Layanan	11.710	8.280	70,71	697.250.000	516.712.950	74,11
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Sertifikasi Unit Usaha	Lembaga	5	5	100	304.000.000	187.893.800	61,81
			Keamanan dan Mutu Produk Hewan	Produk	25	25	100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Kawasan Durian	Ha	30	30	100	195.000.000	194.621.250	99,81
		Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Kawasan Aneka Cabai	Ha	40	40	100	480.000.000	479.855.900	99,97
		Penyediaan Benih dan	Ternak Yang Didata dan	Unit	4.500	4.500	100	1.003.904.000	859.238.900	85,59



		Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Ditandai Optimalisasi Produksi	Ekor	1.000	1.000	100			
3	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Kegiatan	1	1	100	100.800.000	99.513.000	98,72
			Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	1	1	100	340.000.000	303.082.600	89,14
			Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan	Layanan	2	2	100			



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Unit	1	1	100			
		Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	Lembaga yang Teredukasi Akses Pembiayaan, Investasi, Jaringan Pemasaran dan Ekspor	lembaga	1	1	100	45.000.000	44.824.000	99,61
		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Sarana Pemasaran Hortikultura	Unit	1	1	100	35.000.000	34.721.000	99,20
		Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Rekomendasi Benih Perkebunan	Rekomendasi	3	3	100	407.178.000	360.791.900	88,61
			Kebun Sumber Benih Tanaman Pangan	Ha	15	15	100			
Jumlah/Rata-rata							99,06	5.490.638.000	4.786.114.245	87,17

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau



3.1.3 Urusan Pariwisata

3.1.3.1 Target Kinerja Tugas Pembantuan Urusan Pariwisata

Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.085.000.000,00 dengan target kinerja 100%.

3.1.3.2 Realisasi Tugas Pembantuan Urusan Pariwisata

Adapun realisasi dari Tugas Pembantuan Urusan Pariwisata ini dari sisi keuangan sebesar Rp. 1.083.295.013,00 (99,84%) dan capaian realisasi kinerja sebesar 100%. Tugas pembantuan ini dilaksanakan melalui beberapa program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan; serta
2. Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (*Events*), Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, dan Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata.

Pelaksanaan dari sebanyak 5 kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata, semuanya sebanyak 5 kegiatan dapat mencapai target kinerja output. Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tercantum pada tabel berikut ini.



Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tugas Pembantuan Urusan Pariwisata
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Kinerja Output			Anggaran		
					Target	Realisasi	Persentase Capaian kinerja	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Dukungan Manajemen	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	Daerah	1	1	100	110.000.000	109.330.386	99,39
2	Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	Pendukung Event Daerah Lainnya	Kegiatan	1	1	100	500.000.000	498.999.156	99,80
		Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	42	42	100	87.500.000	87.498.846	100,00
		Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Orang	42	42	100	87.500.000	87.471.082	99,97
		Pengembangan Tata Kelola Destinasi	Pengembangan Sistem Informasi	Kegiatan	1	1	100	300.000.000	299.995.543	100,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023

		Pariwisata	Kepariwisataan Nasional							
Jumlah/Rata-rata							100	1.085.000.000	1.083.295.013	99,84

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau



3.1.4 Permasalahan dan Kendala

Secara umum pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan, serta Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik, tidak ada kendala dan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penyelenggaraan pelayanan dasar yang menyangkut publik sebagai penerima pelayanan tentunya tidak luput dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar pelayanan tersebut dijalankan secara akuntabel dan berkinerja tinggi. Namun begitu, pencapaian kinerja pelayanan bagi publik sering kali terkendala akibat adanya variasi dalam penyelenggaraan atau dalam proses pelayanannya. Untuk itu, diperlukanlah suatu upaya bagi mengurangi variasi dalam penyelenggaraan atau dalam proses pelayanan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan standarisasi, dan salah satu standar pelayanan yang telah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya melakukan percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dalam lingkungan masyarakat dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan yang salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM. Ada 6 (enam) urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, adapun penjelasan lebih detail di bawah akan disampaikan berdasarkan jenis pelayanan, target dan realisasi SPM, alokasi anggaran, dukungan personil, dan permasalahan serta solusi.

Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan SPM adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;



5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018, SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negarayang mencakup 6 bidang urusan. lingkup standar pelayanan dasar tersebut meliputi 6 urusan wajib, yakni: 1) pendidikan, 2) kesehatan, 3) pekerjaan umum dan penataan ruang, 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 5) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) sosial.

Ke enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan dengan berpedoman pada standar teknis yang telah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum, standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar



jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Untuk itu, dalam penerapannya, SPM harus menjamin tersedianya akses kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

PP Nomor 2 Tahun 2018 pada pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pendidikan bagi Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Pendidikan menengah; dan
2. Pendidikan khusus.

4.1.2 Target Pencapaian

Target capaian SPM Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 adalah sebesar 100%, terdiri dari 2 jenis pelayanan dasar yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Target Capaian SPM Bidang Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Capaian	Persentase
1	Pendidikan Menengah	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang mendapatkan layanan	85.759	100%
2	Pendidikan Khusus	Jumlah penduduk usia 4-18 tahun yang mendapatkan layanan SLB	1.592	100%

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

4.1.3 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk 2 jenis pelayanan dasarnya pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.2
Realisasi Capaian Target SPM Bidang Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pencapaian	Persentase
1	Pendidikan Menengah	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang mendapatkan layanan	85.759	79.145	92,29
2	Pendidikan Khusus	Jumlah penduduk usia 4-18 tahun yang mendapatkan layanan SLB	1.592	1.414	88,82

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

4.1.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Adapun anggaran yang dialokasikan pada untuk mencapai target SPM pada Bidang Pendidikan dengan kegiatan pendukung Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 343.629.540.681. Sedangkan realisasi anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp. 332.133.639.787. Sumber anggaran tersebut terdiri dari:

Tabel 4.3
Alokasi dan Realisasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1	APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) / DAK (Dana Alokasi Khusus) Provinsi Kepulauan Riau	330.185.097.651	318.886.421.594	96,57
2	BOS (Bantuan Operasional Sekolah)	13.444.443.030	13.247.218.193	98,53

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau



4.1.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM Bidang Pendidikan dan pemenuhan pelayanan dasarnya, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau melibatkan pegawai Dinas Pendidikan serta guru di masing-masing jenjang Pendidikan dengan jumlah 6.893 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4
Dukungan Personil dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	ASN Dinas Pendidikan	
	a. Pimpinan Tinggi Pratama	1
	b. Administrator	7
	c. Fungsional Ahli Madya	21
	d. Fungsional Ahli Muda	16
	e. Fungsional Ahli Pertama	2
	f. Fungsional Mahir	1
	g. Fungsional Terampil	2
	h. Klerek	49
	i. Operator	6
	j. Pengawas	16
Jumlah		121
2	Non ASN Dinas Pendidikan	
	a. PTT	120
	b. THL	134
Jumlah		254
3	Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)	
	a. PNS	1.280
	b. PPK	314
	c. Non ASN	2.025
Jumlah		3.619
4	Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	
	a. PNS	572
	b. PPPK	378
	c. Non ASN	1.702
Jumlah		2.652
5	Guru Pendidikan Khusus (PK)/SLB	
	a. PNS	45
	b. PPPK	2
	c. Non ASN	200
Jumlah		247

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam penerapan SPM Bidang Pendidikan dan pemenuhan pelayanan dasarnya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data;
2. Data yang diperlukan sebagian belum tersedia pada *platform* Rapor Pendidikan;
3. Sulitnya menentukan kriteria penerima serta belum terjalinnya koordinasi yang baik dengan pihak terkait dengan data yang dibutuhkan;
4. Keterbatasan anggaran serta masih adanya *refocusing* anggaran; dan
5. Sistem Perencanaan dan penganggaran kegiatan/program belum murni berbasis SPM.

4.2 Urusan Kesehatan

PP Nomor 2 Tahun 2018 pada pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Kesehatan bagi Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

4.2.1 Target pencapaian

Target capaian SPM Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 adalah sebesar 100%, terdiri dari 2 jenis pelayanan dasar yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Target Capaian SPM Bidang Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Persentase
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah sasaran warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau	8.349	100



	provinsi	berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan		
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah sasaran warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	12.895	100

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

4.2.2 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk 2 jenis pelayanan dasarnya pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Realisasi Capaian Target SPM Bidang Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pencapaian	Persentase
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah sasaran warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	8.349	8.349	100
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah sasaran warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	12.895	12.895	100

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau



4.2.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Adapun anggaran yang dialokasikan pada untuk mencapai target SPM pada Bidang Kesehatan dengan kegiatan pendukung Pelayanan dasar adalah Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 533.747.419. Sedangkan realisasi anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp. 333.984.337.209. Sumber anggaran berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.7
Alokasi dan Realisasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	128.629.000	123.249.194	95,82
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	405.118.419	388.913.682	95,99

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

4.2.4 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan dan pemenuhan pelayanan dasarnya, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau melibatkan seluruh pihak dengan jumlah 6.762 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.8
Dukungan Personil dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	Penanggulangan krisis kesehatan kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	
	a. Dokter	156
	b. Perawat	264
	c. Bidan	134



	d. Tenaga Kesmas	-
	e. Tenaga Keswan	27
	f. Tenaga Penyuluh	25
	Jumlah	606
2	Penanggulangan KLB	
A	Di luar fasilitas pelayanan kesehatan TGC Provinsi oleh TGC	156
	a.Tenaga Kesmas Epid	80
	b. Tenaga Kesmas Kesling	330
	c. Tenaga Kesmas Entomologi	17
	d. Tenaga Laboratorium	423
	e. Tenaga Penyuluh	168
	Jumlah	1.174
B	Di Fasilitas pelayanan kesehatan	
	a. Dokter	1.272
	b. Perawat	3.119
	c. Petugas Radiologi	168
	d. Petugas Laboratorium	423
	Jumlah	4.982

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

4.2.5 Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan dan pemenuhan pelayanan dasarnya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya masyarakat yang tertutup dan tidak melaporkan segera atas penyakit yang berpeluang menjadi KLB ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga penanganan terlambat dilakukan;
2. Anggaran yang tersedia untuk penanganan KLB lebih berfokus kepada penanganan COVID-19 padahal masih terdapat 24 jenis penyakit berpeluang KLB lainnya yang masuk dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) yang harus didukung anggaran penanggulangan;
3. Dengan adanya dampak pada kinerja daerah dan sumber anggaran penanganan KLB, menyebabkan Kepala Daerah cukup sulit untuk menetapkan suatu kasus penyakit tertentu naik menjadi status KLB; dan
4. Terlambatnya penerimaan data akibat keterlambatan pengiriman hasil sampel terduga KLB yang dikirim BKPK Kementerian Kesehatan RI.



4.3 Urusan Pekerjaan Umum

PP Nomor 2 Tahun 2018 pada pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum bagi Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

4.3.1 Target pencapaian

Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Tirta Kepri yang daerah pelayanannya mencakup Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang dan didukung dengan pembangunan infrastrukturnya oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Kepri.

Dalam hal Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang, sampai saat ini belum teridentifikasi kebutuhan terkait pengelolaan air limbah domestik secara regional. Pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang hingga saat ini dilakukan secara individu dan komunal setempat yang kemudian dikelola dan dilakukan pengawasannya oleh masing-masing Kabupaten/Kota. Sehingga belum teridentifikasi kebutuhan terhadap Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan pemenuhan 2 jenis pelayanan dasarnya, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam perihal penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan pemenuhan pelayanan dasarnya, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan target pencapaian tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Target Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target	Persentase
----	-----------------------	-------------------	--------	------------



			Pencapaian	
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kab/kota	1.413 jiwa	100
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah rumah yang dilayani oleh SPALD regional provinsi dalam satu kelurahan/ desa	0	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

4.3.2 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk 2 jenis pelayanan dasarnya pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Realisasi Capaian Target SPM Bidang Pekerjaan Umum
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pencapaian	Persentase
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kab/kota	1.413 jiwa	2.111 jiwa	149,41
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah rumah yang dilayani oleh SPALD regional provinsi dalam satu kelurahan/desa	0	0	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

4.3.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Adapun anggaran yang dialokasikan pada untuk mencapai target SPM pada Bidang Pekerjaan Umum dengan kegiatan pendukung Pelayanan Dasar yaitu pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepri sebesar Rp. 17.350.000.000. Sedangkan realisasi anggaran yang



digunakan adalah sebesar Rp. 14.863.492.890,02. Sumber anggaran berasal dari APBDP Tahun 2023 dan dana DAU (Dana Alokasi Umum) tahun 2023 melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

4.3.4 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan pemenuhan pelayanan dasarnya, Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau melibatkan seluruh pihak dengan jumlah 11 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.11
Dukungan Personil dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	ASN	7
2	Non ASN	4

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

4.3.5 Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dalam penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan pemenuhan pelayanan dasarnya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya pengumpulan data terkait penyediaan air minum dan sanitasi yang berupa data BNBA. Namun saat ini sedang berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau untuk menggunakan data DTKS sebagai data dasar;
2. Pengumpulan data yang belum tersedia mengakibatkan langkah-langkah penerapan selanjutnya terkendala seperti perhitungan kebutuhan, perencanaan dan penganggaran, dan pelaksanaan; dan
3. Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah regional lintas kabupaten/kota tidak bisa di terapkan di Provinsi Kepulauan Riau karena lokasi geografis



Provinsi Kepulauan Riau yang berupa kepulauan dan terdiri dari pulau-pulau kecil.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya menyediakan dokumen Rencana Induk Sistem Penyelenggaraan Air Minum (RISPAM Provinsi) sebagai bagian integrasi secara menyeluruh dalam pengelolaan dan penyediaan air minum;
2. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Balai Permukiman dan Prasarana Wilayah Kepri dan Balai Wilayah Sungai Sumatera IV (BWS) khususnya untuk Pembangunan SPAM Regional Pulau Bintan;
3. Intervensi terhadap perusahaan daerah Perumda Tirta Kepri baik dari sisi kebijakan anggaran maupun peningkatan mutu dan kualitas pelayanan; dan
4. Perlunya koordinasi stakeholder terkait terutama Biro Pemerintahan sebagai leader dalam penyelenggaraan SPM di Daerah, sehingga dalam menjalankan rencana aksi SPM lebih terarah dan efisien;
5. Perlu adanya usulan perubahan nomenklatur SPM pada sub urusan air limbah.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

PP Nomor 2 Tahun 2018 pada pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat bagi Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

4.4.1 Target pencapaian

Target capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 adalah sebesar 100%, terdiri dari 2 jenis pelayanan dasar yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12
Target Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Pencapaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

4.4.2 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat untuk 2 jenis pelayanan dasarnya pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Realisasi Capaian Target SPM Bidang Perumahan Rakyat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pencapaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

4.4.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Adapun anggaran yang dialokasikan pada untuk mencapai target SPM pada Bidang Perumahan Rakyat dengan kegiatan pendukung yang pelayanan dasarnya adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi yang



dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 23.164.433.574,18. Dimana anggaran ini bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 346.199.700 dan APBN sebesar 22.818.233.874,18. Sedangkan besaran anggaran untuk jenis pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14
Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	565.546.600
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	22.881.660.274,18

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

4.4.4 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan pemenuhan pelayanan dasarnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau melibatkan seluruh pihak yang dibagi kedalam sub kegiatan seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15
Dukungan Personil dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Dukungan Personil	
		ASN	Non ASN
1	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	10	8
2	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi	10	8
3	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	10	8
4	Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP	10	8

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau



4.4.5 Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dalam penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan pemenuhan pelayanan dasarnya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mahalnya penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan nilai bangunan per rumah sekitar Rp.228.182.338,74;
2. Tidak adanya program pemerintah yang mengharuskan dilakukannya Relokasi; dan
3. Tidak tersedianya data kawasan kumuh kewenangan Provinsi dengan status ilegal yang dapat dilakukan relokasi.

Solusi yang dilakukan terkait kendala dan permasalahan tersebut antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar menuntaskan kekurangan rumah khusus sebanyak 47 unit pada Tahun Anggaran 2024;
2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis yang terkait dengan program strategis daerah yang mengharuskan dilakukannya relokasi; dan
3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait relokasi kawasan kumuh kewenangan Provinsi dengan status kepemilikan ilegal.

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

PP Nomor 2 Tahun 2018 pada pasal 9 ayat (2) menjelaskan bahwa Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat bagi Daerah Provinsi yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.

4.5.1 Target pencapaian

Target pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau adalah 100% sebagaimana tabel dibawah ini.



Tabel 4.16
Target Capaian SPM Bidang Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi	100%	setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang

Sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

4.5.2 Realisasi

Hasil capaian Target SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat atau indeks pencapaian SPM (IP SPM) = (persentase pencapaian mutu layanan dasar x bobot mutu minimal layanan dasar sebesar 20) + (persentase pencapaian penerima layanan dasar x bobot penerima layanan dasar sebesar 80). Adapun Capaian Target SPM/Indeks Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2023 adalah 99,88 % dengan kategori tuntas utama. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.17
Realisasi Capaian Target SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Pencapaian (%)
1	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	80
2	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	19,88
Total Capaian		99,88

Sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

4.5.3 Alokasi Anggaran

Adapun anggaran yang dialokasikan pada untuk mencapai target SPM pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 ini adalah sebesar Rp. 4.086.043.114.

4.5.4 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat didukung oleh sejumlah personil. Adapun jumlah personil di lingkungan Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 yang mendukung pencapaian SPM sebanyak 161 orang, dengan rincian berikut ini.

Tabel 4.18
Dukungan Personil dalam Penerapan SPM Bidang Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

No	Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	ASN	50
2	PTT	75
3	THL	36

Sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

4.5.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi oleh Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah:

1. Standar sarana prasarana Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau belum terpenuhi dikarenakan minimnya anggaran;
2. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau belum terpenuhi karena minimnya anggota Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau yang telah mengikuti diklat PPNS hanya berjumlah 6 (enam) orang;
3. Belum adanya kebijakan daerah terkait standar teknis pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;



4. Pengumpulan data terkait jumlah dan identitas lengkap penerima layanan dasar masih terkendala;
5. Pengumpulan data terkait jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia masih terkendala; dan
6. Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar belum sepenuhnya dipahami.

Solusi yang dilakukan terkait kendala dan permasalahan tersebut antara lain:

1. Memenuhi sarana dan prasarana minimal Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau;
2. Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau;
3. Melakukan pengintegrasian penerapan SPM pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ke dalam dokumen perencanaan (Renstra dan Renja);
4. Menyusun Peraturan Gubernur terkait standar teknis pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
5. Perlu *guidance*/pelatihan per urusan pada setiap tahapan penerapan SPM.

4.6 Urusan Sosial

PP Nomor 2 Tahun 2018 pada pasal 10 ayat (2) menjelaskan bahwa Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial bagi Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.



4.6.1 Target pencapaian

Penerapan SPM Bidang Sosial dan pemenuhan pelayanan dasarnya, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Dalam perihal penerapan SPM Bidang Sosial dan pemenuhan pelayanan dasarnya, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan target pencapaian tahun 2023, yakni sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya, target pencapaian SPM Bidang Sosial Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.19
Target Capaian SPM Bidang Sosial
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Persentase
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	90	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	570	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	90	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	10	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	200	100

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau



4.6.2 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Bidang Sosial untuk 2 jenis pelayanan dasarnya pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.20
Realisasi Capaian Target SPM Bidang Sosial
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pencapaian	Persentase
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	90	90	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	570	570	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	90	90	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	10	10	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	200	200	100



Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

4.6.3 Alokasi Anggaran

Adapun anggaran yang dialokasikan pada untuk mencapai target SPM pada Bidang Sosial dengan 5 jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 3.225.720.347 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.21
Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	958.690.164
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	959.694.805
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	590.402.855
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	113.645.605
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	603.286.938
Total Anggaran		3.225.720.347

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

4.6.4 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM Bidang Sosial didukung oleh sejumlah personil. Adapun jumlah personil yang terlibat dalam penerapan SPM di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebanyak 20 orang dengan perincian:

Tabel 4.22
Dukungan Personil dalam Penerapan SPM Sosial
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	ASN	15
2	PTT	5

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau



4.6.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kepulauan Riau dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial adalah:

1. Belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat tertangani;
2. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PPKS di mana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal;
3. Tidak adanya Pantis Sosial yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau memberdayakan pantis milik masyarakat yang kemudian difasilitasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial bagi Daerah, terkait dengan kewenangan provinsi untuk pelayanan dasar PPKS di dalam Pantis, harus memiliki Pantis Sosial.

Solusi yang dilakukan terkait kendala dan permasalahan tersebut antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas sektor serta lintas daerah dengan masalah penanganan PPKS;
2. Meningkatkan kualitas hidup PPKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PPKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PPKS;
4. Pengusulan pembangunan Pantis Sosial milik pemerintah. Saat ini pengusulan tersebut masih dalam tahap proses.

4.7 Program dan Kegiatan

4.7.1 Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:



Tabel 4.23
Program dan Kegiatan dalam Pelaksanaan SPM Bidang
Pendidikan Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Program	Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu	Realisasi
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	196.766.454.784	188.817.370.948
	1 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	4.500.000.000	4.346.902.499
	2 Penambahan Ruang Kelas Baru	16.205.522.445	14.918.997.338
	3 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4.332.372.600	4.017.737.880
	4 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	2.329.998.600	2.117.673.543
	5 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	3.104.613.600	2.808.056.848
	6 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	1.434.603.600	1.281.690.047
	7 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	1.167.926.600	1.069.532.510
	8 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	4.499.875.600	4.186.433.437
	9 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.023.621.600	904.235.377
	10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10.009.832.449	9.469.014.627
	11 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	2.342.692.600	2.171.825.262
	12 Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	4.211.249.204	3.704.140.896
	13 Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	1.203.443.600	1.153.242.931
	14 Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Laboratorium Biologi	614.584.000	575.396.248
	15 Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Laboratorium Fisika	593.880.000	565.847.107
	16 Rehabilitasi Sedang/ Berat	326.417.600	320.352.780



		Ruang Laboratorium Kimia		
17		Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Laboratorium Komputer	401.972.600	391.833.174
18		Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Laboratorium Bahasa	183.819.000	183.482.341
19		Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	454.252.600	415.170.334
20		Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	728.169.000	644.253.007
21		Rehabilitasi rumah dinas Kepala Sekolah, guru, penjaga sekolah	787.839.600	746.396.537
22		Pengadaan mebel sekolah	6.415.004.396	6.412.345.000
23		Pengadaan perlengkapan sekolah	75.917.200	75.341.200
24		Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik	3.207.231.600	3.184.314.214
25		Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah atas	17.256.730.000	17.160.123.700
26		Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta Didik	150.000.000	137.598.562
27		Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	419.377.206	384.471.500
28		Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah atas	213.030.000	115.064.700
29		Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah menengah atas	912.000.000	912.000.000
30		Pengelolaan dana bos sekolah menengah atas	107.660.477.484	104.443.897.352
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	128.449.053.323	122.147.481.924
1		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	2.959.915.000	2.949.164.700
2		Penambahan ruang kelas	4.165.670.000	3.664.026.764



		sekolah		
	3	Pembangunan ruang praktik siswa	9.475.087.770	8.557.795.829
	4	Pembangunan ruang laboratorium	9.431.053.000	8.773.032.199
	5	Pembangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.137.370.000	1.126.449.082
	6	Pembangunan perpustakaan sekolah	527.262.000	428.621.470
	7	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	4.630.655.455	4.209.916.515
	8	Rehabilitasi ruang kelas sekolah	3.447.608.000	2.911.515.920
	9	Rehabilitasi ruang laboratorium	387.255.000	346.362.473
	10	Pengadaan mebel sekolah	2.540.000.000	2.518.182.200
	11	Pengadaan perlengkapan sekolah	167.694.916	53.104.460
	12	Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik	9.312.218.892	8.924.875.314
	13	Penyediaan biaya personil peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan	3.116.000.000	2.456.406.100
	14	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	150.000.000	123.333.050
	15	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	310.000.000	274.377.074
	16	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	349.999.834	299.250.650
	17	Pembinaan kelembagaan dan manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1.304.000.000	1.287.576.395
	18	Pengelolaan dana bos Sekolah Menengah Kejuruan	75.037.263.456	73.243.491.728
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas		200.000.000	162.981.766



Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi			
1	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus	200.000.000	162.981.766

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 4.23
Program dan Kegiatan dalam Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Program	Kegiatan		Pagu
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus		12.927.525.830
	1	Penambahan ruang kelas sekolah	1.174.441.200
	2	Pembangunan ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	370.621.400
	3	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	219.924.600
	4	Pembangunan perpustakaan sekolah	230.793.100
	5	Pembangunan sarana, Prasarana dan utilitas sekolah	1.454.642.000
	6	Pembangunan kantin sekolah	324.253.650
	7	Pengadaan mebel sekolah	309.796.200
	8	Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik	579.798.200
	9	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	128.497.800
	10	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah pendidikan khusus	356.493.680
	11	Pengelolaan dana BOS sekolah pendidikan khusus	7.778.264.000
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Provinsi		516.917.200
	1	Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus	516.917.200

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau



4.7.2 Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai SPM Bidang

Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.24
Program dan Kegiatan dalam Pelaksanaan
SPM Bidang Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN
1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah penduduk yang mmendapatkan layanan kesehatan yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi sesuai standar	Orang
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Keterangan:

Indikator dan Satuan telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.7.3 Program dan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai SPM Bidang

Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:



Tabel 4.25
Program dan Kegiatan dalam Pelaksanaan
SPM Bidang Pekerjaan Umum
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)
1	Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan	16.150.000.000,00	15.202.333.536,66	100
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional	Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat	1.014.677.460,00	813.152.170,73	100
			Pembinaan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik	185.322.540,00	77.353.093,00	100
Total Anggaran				17.350.000.000,00	16.092.838.800,39	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

4.7.4 Program dan Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:



Tabel 4.26
Program dan Kegiatan dalam Pelaksanaan
SPM Bidang Perumahan Rakyat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)
Pengembangan perumahan	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi	143.168.000	126.693.132	100
		2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	139.605.300	136.649.450	100
		3	Pendataan rumah sewa milik masyarakat	35.064.400	27.712.450	100
	Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	4	Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP	28.362.000	25.353.598	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

4.7.5 Program dan Kegiatan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.26
Program dan Kegiatan dalam Pelaksanaan SPM Bidang Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Program/Kegiatan/ Sub	Satuan	Anggaran	Realisasi	%
-----------------------	--------	----------	-----------	---



Kegiatan				
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		4.086.043.114	3.902.474.130	95.51
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		3.723.281.092	3.549.598.689	95.34
1. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	1.175.427.008	1.156.732.488	98.41
2. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	373.174.330	369.681.243	99.06
3. Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat provinsi	Dokumen	400.277.260	379.023.900	94.69
4. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	812.456.700	731.428.653	90.03
5. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	148.501.694	130.642.100	87.97
6. Kerja sama antar	Dokumen	21.320.000	16.897.975	79.26



lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan				
7. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Unit	733.157.720	711.277.430	97.02
8. Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Dokumen	53.966.380	53.914.900	99.90
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				
1. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	30.896.268	27.920.700	90.37
2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	266.185.381	261.284.525	98.16
3. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	20.243.435	19.796.713	97.79
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi				
1. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	45.436.938	43.873.503	96.56
2. Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS penegak Perda, dukungan pelaksanaan sidang ditempat, penguatan sekretariat bersama PPNS	Dokumen	-	-	-

Sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau



4.7.6 Program dan Kegiatan Bidang Sosial

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai SPM Bidang Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 4.27
Program dan Kegiatan dalam Pelaksanaan SPM Bidang Sosial
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)
1	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Penyediaan asrama yang mudah diakses	474.223.080	466.804.540	100
			Pemberian bimbingan fisik mental, spiriual, dan sosial	484.467.079	466.953.942	100
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Penyediaan asrama yang mudah diakses	393.050.800	387.772.894	100
			Pemberian bimbingan fisik, mental spritual dan sosial	566.644.000	558.951.731	100
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Penyediaan asrama yang mudah diakses	170.188.900	162.691.000	100
			Pemberian bimbingan fisik mental, spiriual, dan sosial	420.213.950	411.060.350	100
		Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti	Penyediaan asrama/ wisma yang mudah diakses	61.878.700	61.445.718	100
			Pemulangan ke daerah asal	51.766.900	50.883.734	100
2	Program Penanganan Bencana	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi	Penyediaan permakanan	219.364.676	216.971.200	100
			Penyediaan sandang	152.408.058	149.369.058	100



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

			Penanganan khusus bagi kelompok rentan	37.168.400	34.828.900	100
			Pelayanan dukungan psikososial	194.345.804	185.100.104	10
Jumlah Anggaran				3.225.720.347	152.833.1713	100

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau



BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan upaya mengoptimalkan pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian pembangunan guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, maka, dengan ini, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan LPPD Tahun 2023 sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sistematika penyusunan LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 telah berpedoman pada Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.2.7/8697/OTDA Tanggal 11 Desember Tahun 2023 Perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2023.

Secara umum, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 berlangsung dengan baik. Pada prinsipnya, program yang dicanangkan dalam perencanaan strategis untuk tahun 2023 ini, yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, serta termasuk di dalamnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Namun begitu, tentu dapat disadari bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 masih memiliki banyak kekurangan. Kedepannya, kekurangan-kekurangan tersebut akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan yang sekaligus akan menjadi prioritas utama yang harus diatasi di tahun yang akan datang demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Demikian laporan ini di sampaikan, dan semoga dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2023 ini dapat



memberikan informasi yang komprehensif terkait dengan capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan menjadi bahan evaluasi dalam menetapkan program dan kegiatan prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan umum, serta kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan dan mengemban tugas, serta amanah dalam pengabdian kepada masyarakat, guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

**PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

TAHUN 2023

LPPD